ISSN: 0853 - 6708

ANALISIS PENGARUH FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP EKSPOR DI PROVINSI GORONTALO Deviana Komenaung, Anderson Kumenaung, Audie Niode

ANALISIS TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DERAH DI KOTA MANADO PASCA OTONOMI DAERAH Ivan Rumetor, Tri Oldy Rotinsulu dan Mauna Maramis

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2002 - 2011 Claudia Lina Wenas, Anderson Kumenaung dan Wensy Rompas

PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MINAHASA Debora Christiani Wola, Debby Rotinsulu dan Antonius Luntunga

ANALISIS DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH DI KOTA MANADO Deasyrein Deborah Lantang, Amran Naukoko dan Richard Tumilaar

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI SULAWESI UTARA TAHUN 2010.1-2013.8 Elina Dyah Permata Manoppo, Tri Oldy Rotinsulu dan Albert Londa

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM DI SULAWESI UTARA PERIODE 2007.1-2013.2 Inggrid Zeteline Dumaili, Robby Kumaat, dan Jacline Sumual

PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA MANADO Kinly I. Turangan, Vekie A.Rumate dan Jacline I. Sumual

ANALISIS POTENSI PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO)
Marlon Brando Pandeirot, Vekie Rumate dan Richard Tumilaar

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Meilanie J. E. Makahanap, Amran Naukoko dan Patrick Wauran

PENGARUH BELANJA DAERAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO (TAHUN 2002-2012) Donny Fernando Laplan, Amran T Naukoko dan Richard Tumilaar

ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DI KOTA MANADO Gustin Silooy, Anderson Kumenaung dan Patrick Wauran

ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE VARIABLE COSTING PADA PERUSAHAAN ROTI LIDYA Chintya Ester Bokong, Sifrid S. Pangemanan dan Winston Pontoh

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO Flani Kawung, Herman Karamoy dan Winston Pontoh

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK CACAT PADA PT.SINAR PUREFOODS INTERNASIONAL BITUNG Maria Lidya Lalamentik, Jantje Tinangon dan Victorina Tirayoh

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK CACAT DAN PRODUK KADALUARSA PADA DOLPHIN DONUTS BAKERY MANADO Keisya Claudya Tampi, Sifrid S. Pangemanan dan Inggriani Elim

ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2001-2012 Hesty Rahayu, Rosalina A. M Koleangan dan George M. Kawung

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO Maya Rangkang, Rosalina A.M Koleangan dan Debby Ch. Rotinsulu

ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL PASCA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS KOTA MANADO 2008 - 2012) Steivi A.R. Lombogia, Anderson G. Kumenaung dan Krest D. Tolosang

ANALISIS PENDAPATAN PRODUSEN SALAK DI KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Fredrik Pelealu dan J. Tampenawas

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume XIV No. 01 Hal. 01 - 243 Peb 2014 ISSN: 0853 - 6708

SUSUNAN PENGELOLA JURNAL BERKALA ILMIAH *EFISIENSI*

Volume 14 No. 01 - Pebruari 2014

ISSN: 0853 - 6708

Pelindung Rektor Universitas Sam Ratulangi

Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT

Pemimpin Redaksi Drs. Sutomo Wim Palar, MS.

Wakil Pemimpin Redaksi DR. Daisy S.M. Engka, SE. MSi.

Redaksi Pelaksana Amran T. Naukoko, SE. MSi.

Mauna Maramis, SE. MSi. DR. George Kawung, SE. ME. Patrick C. Wauran, SE. ME. Krest D. Tolosang, SE. MSi.

Dewan Redaksi Prof. DR. Anderson G. Kumenaung, SE. MS.

DR. Debby Rotinsulu, SE. MSi. DR. Vekie A. Rumate, SE., MS.

DR. Vecky A. J. Masinambow, SE., MS.

DR. Tri O. Rotinsulu, SE. MSi. DR. Rosalina Koleangan, SE. MSi. Anton Luntungan, SE. MSi. Dennij Mandeij, SE. MSi.

Administrasi & Sirkulasi Steeva Tumangkeng, SE. MSi.

Wensy Rompas, SE. MSi. Avriano Tenda, SE. MM.

Henry Rais, SE.

Alamat Redaksi Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Jalan Kampus UNSRAT Bahu Manado 95115

Telp. (0431) 9139988 / 085256602416

Jumal Berkala Ilmiah Efisiensi diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, sebagai media informasi, penelitian dan karya ilmiah dalam bidang Ilmu Ekonomi, Ekonomi Perencanaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Moneter, Ekonomi Publik, Ekonomi Perusahaan dan Ekonomi Keuangan, yang berasal dari para pengajar, alumni, mahasiswa dan masyarakat umum. Jumal ini terbit minimal tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan Pebruari, Juni, Oktober.

Redaksi menerima tulisan ilmiah yang belum pemah diterbitkan oleh media dan tinjauan atas buku-buku ekonomi tebitan dalam dan luar negeri yang baru serta catatan/komentar atas artikel yang dimuat dalam jumal ini.

Surat menyurat mengenai naskah yang akan diterbikan, langganan, keagenan dan lainnya dapat dialamatkan langsung ke alamat redaksi atau melalui email: efisiensi_feunsrat@gmail.com

DAFTAR ISI

Volume 14 No. 01 - Pebruari 2014	33IN: U833 - 07U8
ANALISIS PENGARUH FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP EKSPOR DI PROVINSI GORONTALO Deviana Komenaung, Anderson Kumenaung, Audie Niode	1-10
ANALISIS TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DERAH DI KOTA MANADO PASCA OTONOMI DAERAH Ivan Rumetor, Tri Oldy Rotinsulu dan Mauna Maramis	11 - 24
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2002-2011 Claudia Lina Wenas, Anderson Kumenaung dan Wensy Rompas	1 25−36
PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MINAHASA Debora Christiani Wola, Debby Rotinsulu dan Antonius Luntungan	37 - 49
ANALISIS DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH DI KOTA MANADO Deasyrein Deborah Lantang, Amran Naukoko dan Richard Tumilaar	50-62
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI SULAWESI UTARA TAHUN 2010.1-2013.8 Elina Dyah Permata Manoppo, Tri Oldy Rotinsulu dan Albert Londa	63 - 74
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM DI SU	
UTARA PERIODE 2007.1-2013.2 Inggrid Zeteline Dumaili, Robby Kumaat, dan Jacline Sumual	75 - 86
PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA MANADO Kinly I. Turangan, Vekie A.Rumate dan Jacline I. Sumual	87-97
ANALISIS POTENSI PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) Marlon Brando Pandeirot, Vekie Rumate dan Richard Tumilaar	98-109
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKIN/ KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Meilanie J. E. Makahanap, Amran Naukoko dan Patrick Wauran	AN DI 110 - 121
PENGARUH BELANJA DAERAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANAD 2002-2012)	•
Donny Fernando Lapian, Amran T Naukoko dan Richard Tumilaar	122 - 134
ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DI KOTA MANADO Gustin Silooy, Anderson Kumenaung dan Patrick Wauran	135 - 147
ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN BIAYA VARIABLE COSTING PADA PERUSAHAAN ROTI LIDYA Chintya Ester Bokong, Sifrid S. Pangemanan dan Winston Pontoh	148 - 159
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SEBAGAI FAKTOR PE	NDUKUNG
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO Fiani Kawung, Herman Karamoy dan Winston Pontoh	160 – 172
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK CACAT PADA PT.SINAR PUREFOODS INTERNASIONAL I Maria Lidya Lalamentik, Jantje Tinangon dan Victorina Tirayoh	BITUNG 173-182
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK CACAT DAN PRODUK KADALUARSA PADA DOLPHIN DO BAKERY MANADO Keisya Claudya Tampi, Sifrid S. Pangemanan dan Inggriani Elim	ONUTS 183 - 193
ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2001-2012 Hesty Rahayu, Rosalina A. M Koleangan dan George M. Kawung	194 - 207
PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA I Maya Rangkang, Rosalina A.M Koleangan dan Debby Ch. Rotinsulu	MANADO 208-221
ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL PASCA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS KOTA MANADO 2008 – 2012) Steivi A.R. Lombogia, Anderson G. Kumenaung dan Krest D. Tolosang	222 - 234

ANALISIS PENDAPATAN PRODUSEN SALAK DI KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Fredrik Pelealu dan J. Tampenawas

235 - 243

ANALISIS PENGARUH FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP EKSPOR DI PROVINSI GORONTALO

Deviana Komenaung, Anderson Kumenaung, Audie Niode

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado Email : dekolicious@yahoo.com

ABSTRAK

Bisnis dunia usaha sekarang ini tidak dapat lagi diidentikkan sebagai kegiatan nasional semata, akan tetapi sudah bersifat trans nasional atau global, sehingga dengan semakin terbukanya perdagangan bebas di antara satu Negara dengan Negara lain juga akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi dan perdagangan dengan Negara lain.

Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap ekspor di Provinsi Gorontalo, yang merupakan Provinsi yang sedang berkembang, dalam hal ini memiliki kesempatan dalam perdagangan Internasional untuk mengembangkan perekonomiannya. Pada penelitian ini menggunakan Bank Umum secara keseluruhan sebagai satu unit obyek penelitian, dengan periode penelitian mulai dari Januari 2009–Desember 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana, sementara uji hipotesis menggunakan uji- t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial, Koefisien determinasi (R²) untuk menguji kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekspor.

Kata Kunci: Nilai Rupiah, Ekspor.

ABSTRACT

The business world these days can no longer be identified as a national activity, but has to be global, so that with the opening of free trade between one country to another, will provide an opportunity for the region to develop the economy and trade with other countries.

Therefore, conducted this research aims to determine how much influence the fluctuation of the exchange rate on exports in Gorontalo province, which is a new emerging provinces, in that it has a chance to develop its economy to international trade. In this study using Bank Indonesia as a whole as a unit object of study, the study period starting from January 2009 - December 2012. Analytical technique used is simple linear regression, while hypothesis testing using t-test to test the effect of partial variables. Coefficient of determination (R2) to test the ability of the regression models explaining variation in the dependent variable. Based on the results of the study, the result that the exchange rate and a significant positive effect on exports

Keywords: Exchange Rate, Exports.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan dunia yang terjadi, tidak terlepas dari perkembangan ekonomi, perdagangan dan moneter, dimana perkembangan ini telah menciptakan suatu pola hubungan finansial, perdagangan (ekspor – impor), produksi dan berbagai hubungan ekonomi, kegiatan ekonomi. Bisnis dunia usaha sekarang ini tidak dapat lagi diidentikkan sebagai kegiatan nasional semata, akan tetapi sudah bersifat trans nasional atau global, sehingga dengan semakin terbukanya perdagangan bebas di antara satu Negara dengan Negara lain juga akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi dan perdagangan dengan Negara lain. (Marengke, 2004).

Salah satu Provinsi di Indonesia yang juga turut berpartisipasi dalam perdagangan luar negeri yaitu Provinsi Gorontalo. Gorontalo adalah <u>provinsi</u> yang ke-32 di <u>Indonesia</u>. Sebelumnya Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di <u>Sulawesi Utara</u>. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan <u>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000</u>, tertanggal <u>22 Desember 2000</u>. Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 11.967,64 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.040.164 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km².

Kemandirian Provinsi Gorontalo salah satunya ditunjukkan lewat perdagangan Internasional yang dilaksanakannya selama ini. Produk – produk perdagangan secara langsung menaikkan pendapatan Provinsi Gorontalo. Setelah Gorontalo resmi pemekaran diri dengan Sulewasi Utara, perlahan-lahan perekonomian di tata dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan adanya kenaikan permintaan barang-barang yang akan di ekspor ke luar negeri, menyebabkan peningkatan barang – barang yang akan diproduksi, yang secara otomatis perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang lebih yang nantinya akan diambil dari masyarakat setempat yang tergolong pegangguran.

Berdasarkan angka – angka dalam tabel 1.1, terlihat bahwa nilai ekspor mengalami fluktuasi tiap bulannya. Sehingga dari perhitungan rata-rata nilai ekspor selama tahun 2009 adalah sebesar 257,41 US\$. Negara tujuan ekspor bulan Desember 2009 adalah Hongkong, Rep. Korea dan Taiwan dengan jenis komoditas ekspor adalah Bungkil Kopra, Kayu, barang dari kayu, Gula dan kembang gula. Nilai ekspor Gorontalo tahun 2010 banyak mengalami naik turun. Nilai ekspor tertinggi tercatat di bulan Oktober. Rata-rata nilai ekspor di tahun 2010 adalah sebesar 1215,33 US\$, hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai ekspor dari tahun sebelumnya yaitu hanya 257 US\$. Rata-rata nilai ekspor tahun 2011 adalah 207,6 US\$. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup drastis yaitu dari rata-rata nilai ekspor tahun sebelumnya yang mencapai angka 1215 US\$. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya kegiatan ekspor yang terjadi di tahun 2011. Bahkan dari tabel di atas tidak terlihat adanya kegiatan ekspor di bulan Mei, Juli, September dan Oktober. Inilah yang menyebabkan angka nilai rata-rata eskpor menurun secara drastis. Negara tujuan ekspor bulan Desember 2011 adalah Pilipina, dan Republik Korea dengan jenis komoditas ekspor adalah Jagung, kayu dan barang dari kayu.

Tahun 2012 nilai ekspor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, jika dihitung dalam rata-rata maka diperoleh nilai sebesar 1248,16 US\$. Hal ini disebabkan tingginya nilai ekspor setiap bulannya di tahun 2012. Bahkan mencapai hingga 2080 US\$ di bulan Agustus, angka tertinggi dalam periode ekspor tahun 2009 – 2012. Negara tujuan ekspor 2012 adalah Korea Selatan, jenis komoditas ekspor adalah Gula & Kembang Gula dan Kayu, Barang dari Kayu.

2009.12

9400

9670

2012.12

Bulan/	Nilai Tukar	Bulan/	Nilai Tukar	Bulan/	Nilai Tukar	Bulan/	Nilai Tukar
Tahun	(USD)	Tahun	(USD)	Tahun	(USD)	Tahun	(USD)
2009.1	11355	2010.1	9365	2011.1	9057	2012.1	9000
2009.2	11980	2010.2	9335	2011.2	8823	2012.2	9085
2009.3	11575	2010.3	9115	2011.3	8709	2012.3	9180
2009.4	10713	2010.4	9012	2011.4	8574	2012.4	9190
2009.5	10340	2010.5	9180	2011.5	8537	2012.5	9565
2009.6	10225	2010.6	9083	2011.6	8597	2012.6	9480
2009.7	9920	2010.7	8952	2011.7	8508	2012.7	9485
2009.8	10060	2010.8	9041	2011.8	8578	2012.8	9560
2009.9	9681	2010.9	8924	2011.9	8823	2012.9	9588
2009.10	9681	2010.10	8928	2011.1	8835	2012.1	9615
2009.11	9681	2010.11	9013	2011.11	9170	2012.11	9605

8991

2010.12

Tabel 1. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat (Kurs Tengah) Di Bank Indonesia Tahun 2009.1 - 2012.12

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa komoditi ekspor paling banyak adalah Jagung, Kayu, Gula dan Bungkil Kopra. Komoditi-komoditi tersebut dihasilkan dari pertanian. Sedangkan sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di Gorontalo yang sangat mempengaruhi PDRB. Semenjak provinsi ini berdiri, besaran PDRB Provinsi Gorontalo terus meningkat dan pada tahun 2001 PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai 1.896.306 (jutaan rupiah) atau meningkat 16,91 persen jika dibandingkan dengan tahun 2000 yang sebesar 1.622.000 (jutaan rupiah). Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dari angka PDRB di provinsi Gorontalo yaitu serbesar 33,71 persen dari total PDRB dari awal provinsi ini terbentuk. Struktur perekonomian Provinsi Gorontalo dapat ditunjukan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan kondisi Provinsi Gorontalo yang merupakan daerah agraris, maka pertumbuhan ekonominya sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian. Berdasarkan angka distribusi persentase PDRB berdasarkan lapangan usaha nampak bahwa sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 1.2.

2011.12

9068

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gorontalo 2004-2010 (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN	159.717	171.946	182.771	196.199	219.093	226.761	248.728
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	6.270	6.160	6.943	7.363	7.890	9.112	9.725
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	51.046	51.657	52.422	57.007	59.536	61.286	65.380
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	2.367	2.578	2.855	3.273	3.222	3.399	3.839
5. BANGUNAN	25.368	22.059	28.294	31.541	35.944	41.805	44.673
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	55.833	57.820	59.692	62.174	64.779	72.460	78.402
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	66.814	77.622	84.063	90.440	93.116	102.706	112.262
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	68.340	71.042	78.105	83.677	90.400	97.919	103.274
9. JASA-JASA	131.186	139.987	148.978	160.458	170.989	185.234	195.442
PDRB ADHK	566.942	600.872	644.123	692.134	744.969	800.681	861.725
http://gorontalokab.bps.go.id							

Dari tabel 1.2 jelas bahwa dari ke sembilan sektor di atas, sektor Pertanian lah yang paling banyak menyumbang dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Sama halnya

dengan ekspor yang bergantung pada sektor pertanian karena komoditi-komoditi yang diekspor kebanyakan dihaslkan dari pertanian, begitu pula dengan nilai tukar Ekspor juga sangat bergantung terhadap nilai tukar. Karena untung tidaknya eksportir ditentukan oleh naik atau turunnya kurs di pasar valas

Perbedaan nilai tukar mata uang suatu Negara (kurs) pada prinsipnya ditentukan oleh besrnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut (Levi, 1996 : 129). Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam perekonomian terbuka, karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, mengingat pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel — variabel makro ekonomi lainnya. Kurs dapat djadikan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu Negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa Negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik atau stabil (Salvator, 1997 : 10).

Ketidakstabilan nilai tukar ini mempengaruhi arus modal atau ivestasi dan perdagangan Internasional. Indonesia sebagai Negara yang banyak mengimpor bahan baku industri mengalami dampak dan ketidakstabilan kurs ini, yang dapat dilihat dari melonjaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga barang-barang milik Indonesia mengalami peningkatan. Dengan melemahnya rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan keperayaan terhadap mata uang dalam negeri. (Triyono, 2008).

Tabel 3 jelas menampilkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2009 – 2012. Pada akhir tahun 2009 nilai tukar rupiah sebesar Rp 9400/US\$. Selanjutnya pada akhir tahun 2010 nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi hingga mencapai Rp 8991/US\$. Namun seiring berjalannya waktu nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sehingga pada akhir tahun 2011 menjadi Rp 9068/US\$. Dan terakhir pada tahun 2012 nilai tukar kembali melemah, depresiasi kali ini mencapai angka Rp 9670/US\$.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat (Kurs Tengah) Di Bank Indonesia Tahun 2009.1 - 2012.12

Tahun Bulan	2009 (USD)	2010 (USD)	2011 (USD)	2012 (USD)
Januari	11355	9365	9057	9000
Februari	11980	9335	8823	9085
Maret	11575	9115	8709	9180
April	10713	9012	8574	9190
Mei	10340	9180	8537	9565
Juni	10225	9083	8597	9480
Juli	9920	8952	8508	9485
Agustus	10060	9041	8578	9560
September	9681	8924	8823	9588
Oktober	9545	8928	8835	9615
November	9480	9013	9170	9605
Desember	9400	8991	9068	9670

Sumber: Bank Indonesia Cabang Manado, 2013

Dampak lain dari fluktuasi nilai tukar (kurs) terhadap kinerja ekspor yaitu depresiasi rupiah, dimana ekspor non migas Indonesia masih didominasi oleh kondisi manufaktur yang memiliki kandungan bahan baku impor yang tinggi. Depresiasi nilai tukar yang berlebihan cenderung menimbulkan krisis kepercayaan terhadap perbankan nasional dan pemasok bahan baku dari luar negeri, selain depresiasi yang berlebihan juga menyebabkan banyak perusahaan eksportir yang memiliki kewajiban valas dalam jumlah besar atau mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat mejalankan proses produksinya secara normal (BI, 1993).

Menurut Salvatore (2008: 67) nilai tukar Rupiah atau disebut juga kurs Rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar negara di mana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut kurs valuta asing atau kurs. Nilai tukar terbagi atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal (nominal exchange rate) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai riil (real exchange rate) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain (Mankiw, 2000:115).

Menurut sumber investopedia yang ditulis oleh Jason Van Bergen terdapat 6 faktor yang mempengaruhi nilai tukar yaitu :

1. Perbedaan tingkat inflasi antara 2 negara

Suatu negara yang tingkat inflasinya konsisten rendah akan lebih kuat nilai tukar mata uangnya dibandingkan negara yang inflasinya lebih tinggi. Daya beli (purchasing power) mata uang tersebut relatif lebih besar dari negara lain. Pada akhir abad 20 lalu, negara-negara dengan tingkat inflasi rendah adalah Jepang, Jerman dan Swiss, sementara Amerika Serikat dan Canada menyusul kemudian. Nilai tukar mata uang negara-negara yang inflasinya lebih tinggi akan mengalami depresiasi dibandingkan negara partner dagangnya.

2. Perbedaan tingkat suku bunga antara 2 negara

Suku bunga, inflasi dan nilai tukar sangat berhubungan erat. Dengan merubah tingkat suku bunga, bank sentral suatu negara bisa mempengaruhi inflasi dan nilai tukar mata uang. Suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut meningkat. Investor domestik dan luar negeri akan tertarik dengan return yang lebih besar. Namun jika inflasi kembali tinggi, investor akan keluar hingga bank sentral menaikkan suku bunganya lagi. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga maka akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut.

3. Neraca perdagangan

Neraca perdagangan antara 2 negara berisi semua pembayaran dari hasil jual beli barang dan jasa. Neraca perdagangan suatu negara disebut defisit bila negara tersebut membayar lebih banyak ke negara partner dagangnya dibandingkan dengan pembayaran yang diperoleh dari negara partner dagang. Dalam hal ini negara tersebut membutuhkan lebih banyak mata uang negara partner dagang, yang menyebabkan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap negara partnernya melemah. Keadaan sebaliknya disebut surplus, dimana nilai tukar mata uang negara tersebut menguat terhadap negara partner dagang.

4. Hutang publik (*Public Debt*)

Neraca anggaran domestik suatu negara digunakan juga untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan publik dan pemerintahan. Jika anggaran defisit maka *public debt* membengkak. *Public debt* yang tinggi akan menyebabkan naiknya inflasi. Defisit anggaran bisa ditutup dengan menjual bond pemerintah atau mencetak uang. Keadaan bisa memburuk bila hutang yang besar menyebabkan negara tersebut *default* (gagal bayar) sehingga peringkat hutangnya turun. *Public debt* yang tinggi jelas akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut.

5. Ratio harga ekspor dan harga impor.

Jika harga ekspor meningkat lebih cepat dari harga impor maka nilai tukar mata uang negara tersebut cenderung menguat. Permintaan akan barang dan jasa dari negara tersebut naik yang berarti permintaan mata uangnya juga meningkat. Keadaan sebaliknya untuk harga impor yang naik lebih cepat dari harga ekspor.

6. Kestabilan politik dan ekonomi.

Para investor tentu akan mencari negara dengan kinerja ekonomi yang bagus dan kondisi politik yang stabil. Negara yang kondisi politiknya tidak stabil akan cenderung beresiko tinggi sebagai tempat berinvestasi. Keadaan politik akan berdampak pada kinerja ekonomi dan kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut.

Menurut Marengke (2004) sesungguhnya sangat banyak dampak atau pengaruh yang terjadi akibat kurs valuta asing yang berfluktuasi, khususnya yang berkecenderungan meningkat besar, sebagaimana yang lazim terjadi di Negara kita dewasa ini, antara lain yaitu:

1. Neraca Pembayaran

Dengan fluktuasi kurs valuta asing yang bertendensi mengikat sebetulnya aka nada dorongan untuk mengekspor sehingga nilai ekspor diharapkan akan naik. Tetapi karena ekspor itu lebih banyak ditentukan oleh faktor luar negeri, maka nilai ekspor seringkali tidak akan mengalami kenaikan yang berarti sebaliknya, karena sifat perekonomian terbuka dan banyak bergantung pada perdagangan luar negeri (impor), serta terdpatnya komponen impor akan mengalami kenaikan pula. Semuanya ini berakibat adanya tendensi yang besar ke arah terjadinya defiit neraca perdagangan (tidak termasuk migas), yang kemudian dapat turut menekan atau mempersulit posisi neraca pembayaran.

2. Situasi Moneter

Ketidakstabilan moneter dan kurs valuta asing yang cenderung meningkat itu akan dapat menimbulkan bahaya spekulasi dalam valuta asing yaitu membeli dan menyimpan valuta asing dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan kurs yang diharapkan di kemudian hari.

3. Proses Industrialisasi

Kurs valuta asing yang dibiarkan mengambang dengan kecenderunga meningkat itu setegahnya akan lebih baik bagi ekspor dibandingkan dengan kurs tetap stabil, karena hal itu akan memperkuat daya saing dan merangsang komoditi ekspor. Dengan demikian kurs macam itu akan dapat mendorong proses indsutrialisasi dalam menghasilkan barang ekspor yang tertuju pada pasar luar negeri.

Priadi dalam (Sundari Sri 2005 : 20) menyatakan bahwa kegiatan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang — barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentaun yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa lainnya dalam tahun tertentu. Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah Negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah *output* dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat *output* yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2003).

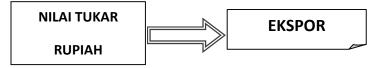
Menurut Ahmad Jamli dalam (Marengke 2004 : 20) mendefinisikan bahwa depresiasi merupakan perwujudan dari nilai uang yang tidak terjadi begitu saja akan tetapi ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang dimana permintaan dan penawaran uang sangat berpengaruh pada aktivitas arah produksi yang pada akhirnya memberikan dampak pada stabilnya ekonomi Negara tersebut.

Menurut teori Heckers-Ohlin atau H-O dalam (Angkow, 2013) menyatakan bahwa, perbedaan opportunity cost suatu produk antara satu Negara dengan Negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing Negara. Perbedaan opportunity cost tersebut dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relative banyak/murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebalikna, masing-masing Negara akan mengimpor barang tertentu jika Negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka/mahal dalam memproduksinya.

Intinya adalah fluktuasi nilai tukar berpengaruh terhadap nilai ekspor, sedangkan naik turunnya nilai ekspor berpengaruh secara langsug terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi nilai ekspor yang dihasilkan daerah tersebut maka pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan meningkat, sebaliknya semakin kecil nilai ekspor yang dihasilkan suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi otomatis menurun.

Masalahnya apabila nilai tukar Rupiah melemah maka nilai ekspor menurun dan ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi melemah. Oleh karena itu peningkatan ekspor perlu untuk terus dikembangkan lebih lanjut sehingga nilai devisa sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan. Namun dalam kegiatannya usaha ekspor mengalami berbagai masalah seperti belum dikembangkanya berbagai potensi daerah secara optimal, belum optimalnya produksi berbagai komoditas yang berkualitas ekspor serta masalah dalam fluktuasi nilai tukar. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap ekspor di Provinsi Gorontalo.

Untuk kerangka Pemkiran dalam tulisan ini adalah



Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut bahwa diduga fluktuasi Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif terhadap Ekspor di Provinsi Gorontalo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder nilai tukar dan ekspor di Provinsi Gorontalo pada periode Januari 2009 – Desember 2012 (bulanan) data time series. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Sumber data berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Bank Indonesia cabang Gorontalo, Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, dan jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Ekspor sedangkan Nilai Tukar Rupiah merupakan variabel independen. Metode pengumpulan data sehubungan dengan penelitian ini adalah datang langsung ke kantor atau instansi yang terkait, dengan mencatat data dan mengkopi data yang diperlukan dalam penelitian ini, juga mengadakan wawancara dengan pimpinan instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Nilai Tukar Rupiah atau disebut juga kurs adalah merupakan perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah terhadap mata uang negara lain, yang dalam penelitian ini, digunakan perbandingan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat (USD). Data Kurs yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kurs Tengah yang nilainya dinyatakan dalam ribuan rupiah (Rp).
- 2. Ekspor, adalah arus keluar sejumlah barang dan jasa dari suatu negara ke pasar internasional, ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain. Dan dalam penelitian ini Ekspor diukur dengan satuan volume (ton) yang juga dikonfrensikan ke dalam ribu USD.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap ekspor Gorontalo (Gujarati, 2006:107), dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$X = f (Kurs)....(Pers. 3.1)$$

Dimana

Kurs = Nilai Tukar Rupiah (ribuan)

X = Ekspor Non Migas (ribuan)

Persamaan 3.1 diatas disusun dalam bentuk persamaan matematika dalam bentuk persamaan khusus untuk menjelaskan hubungan antar variabel seperti terlihat pada persamaan 3.2 dibawah ini.

$$X = 0 + 1Kurs + \mu i....(Pers. 3.2)$$

Dimana:

X = Ekspor Non Migas (ribuan) Kurs = Nilai Tukar Rupiah (ribuan)

0 = Intercept

1 = Koefisien regresi

 $\mu = \text{Error term (kesalahan pengganggu)}$

Selanjutnya Persamaan 3.2 disusun ke dalam bentuk persaman ekonometrik, Ditransformasikan ke dalam bentuk Log natural (Ln). Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan besaran antar variabel independen dengan variabel dependen/ untuk menyetarakan nominalnya, dan juga sekaligus hasil output regresi menunjukkan, koefisien regresi merupakan tingkat perubahan variabel tidak bebas (dalam persen) bila terjadi perubahan variabel-variabel bebas (dalam persen) Nachrowi, (2006:109).

LnX=
$$0 + 1 lnKurs + \mu i....(Pers. 3.3)$$

Dimana:

LnX = Ekspor

lnKurs = Nilai Tukar Rupiah

0 = Intercept

1 = Koefisien regresi

μi = Error term (kesalahan pengganggu)

Dalam mengolah data, penulis menggunakan program eviews 7.0.dan Uji Kesesuaian (Test of Goodness of fit) di dalam tulisan ini adalah dengan **Uji t-parsial** (*partial test*) Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Dalam uji t digunakan hipotesis sebagai berikut :

H0: 1=0HA: 1 0

Dimana b1 adalah koefisien variabel independen ke-i adalah nilai parameter hipotesis biasanya nilai b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Bila nilai t-hitung > t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus:

t-hitung =
$$\frac{i}{Se(-i)}$$

t-tabel = n-k-1

Dimana:

1= koefisien regresi variabel independen ke-i

Se= standar eror dari vaiabel independen ke-i

n = jumlah data

k = jumlah variabel

Koefisien Determinasi (r2) digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi linier sederhana yaitu pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap ekspor di Gorontalo, dan mengkaji serempak digunakan koefisien determinasi (r2) sebagai berikut:

$$r^2 = 1 - \frac{x^2}{2Y^2}$$

 $0 r^2 1$ nilai koefisien determinan tidak pernah negatif.

Jika r^2 makin mendekati 1 maka tingkat ketepatan dari regresi linier sederhana yaitu persentase perubahan nilai tukar rupiah terhadap naik turunnya ekspor mendekati ketepatan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel bebas (Nilai Tukar), dan variabel terikat (Ekspor) maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia periode Januari 2009 sampai Desember 2012. Data sekunder tersebut diestimasikan dengan analisis regresi linier sederhana seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program Eviews 7 untuk uji t, uji R². Dari hasil regresi dapat dibentuk model estimasi sebagai berikut:

Ket: * Signifikan pada = 10 %

Berdasarkan hasil regresi di atas dapat dijelaskan pengaruh variabel independen yaitu Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor adalah:

Nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap Ekspor . Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi nilai tukar rupiah yaitu sebesar 7.276176. Artinya setiap kenaikan nilai tukar sebesar 1% maka ekspor akan naik sebesar 7.2761%, ceteris paribus. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno, (2002:69) bahwa dengan meningkatnya nilai tukar mengakibatkan meningkatnya ekspor.

Uji Kesesuaian (Test Goodness of fit) dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan Pengujian Uji t-statistik ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh nyata terhadap ekspor. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya t hitung atau dengan melihat tingkat probabilitasnya.

Hasil dari perhitungan Nilai Tukar adalah sebagai berikut :

```
\begin{array}{lll} \text{- Df} &= \text{n-k-1} \\ &= 48\text{-1-1} &= 46 &= 10 \ \% \\ \text{- T-tabel} &= 1.303 \\ \text{- T-hitung} &= 1.540327 \end{array}
```

Data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung>t-tabel (1.540>1.303). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya Ho, maka perubahan Nilai Tukar mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 90% (=10%) terhadap perubahan Ekspor.

Nilai R2 (koefisien determinasi) dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0-1. Nilai R2 makin mendekati 0 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin kecil dan sebaliknya nilai R2 makin mendekati 1 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin besar. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R2 adalah 0.053470, yang berarti variasi dari perubahan Nilai Tukar, mempengaruhi perubahan Ekspor sebesar 5.34 persen. Sedangkan sisanya (94.66 persen) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dibuktikan bahwa variabel nilai tukar rupiah memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap ekspor di Provinsi Gorontalo. Hal ini

terlihat dari nilai uji t (parsial) yang dihasilkan dari proses estimasi sama-sama menunjukkan angka yang cukup signifikan pada tingkat kepercayaan =10% serta koefisien determinasi R2 adalah 5.34 persen. Hal ini sesuai dengan kajian empiris dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angkow J (2013) mengenai analisis pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap ekspor minyak kelapa kasar (CCO) di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitiannya, Angkow berhasil membuktikan pengaruh yang cukup signifikan terjadi antara variabel kurs dan ekspor minyak kelapa kasar (CCO). Dalam kaitannya dengan teroi perdagangan internasional, secara langsung kita dapat melihat pengaruh yang cukup besar terjadi melalui aktivitas eskpor yang dilakukan, dan secara langsung kita dapat melihat dampak dari peningkatan ekspor lewat jumlah penerimaan devisa daerah pada setiap tahun.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulandalam tulisan ilmiah ini adalah

- 1) Nilai Tukar Rupiah (Kurs) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekspor.
- 2) Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R2 (koefisien determinasi) adalah 0.053470 yang berarti variasi dari perubahan Nilai Tukar Rupiah (KURS) mempengaruhi perubahan Eskpor Non Migas sebesar 5.34 persen. Sedangkan sisanya (94.99 persen) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
- 3) Nilai Tukar Rupiah yang terus berfluktuasi akan berdampak pada jumlah ekspor baik dari segi nilai maupun volume dari total ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

Angkow, J, 2013. Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor Minyak Kelapa Kasar (CCO) di Provinsi Sulawesi Utara (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT. Manado.

Gujarati, Damodar N. 2006. Dasar-dasar Ekonometrika. Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta.

Jhingan, M.L. 2003. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT. Raja Grafido Persada, Jakarta.

Levi, Maurice D. 1996. Keuangan Internasional. Yogyakarta: Andi Offset

Mankiw, N. Gregory. 2000. Teori Makroekonomi. Erlangga, Jakarta.

Marengke, Marnix, 2004. Analisi Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nilai Komoditas Eksport Unggulan Ikan Tuna di Propinsi Sulawesi Utara (Skripsi). Fakultas Ekonomi. Unversitas Sam Ratulangi, Manado.

Nachrowi, 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta.

Salvatore, Dominick. 1997. Ekonomi Internasional, Edisi Ketiga.

Penerbit Erlangga, Jakarta

Salvatore, Dominick. 2008. Ekonomi Internasional. Edisi Kelima.

Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sundari Sri K, 2005. Analisis Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar Amerika Serikat Dan Nilai Ekspor Terhadap Neraca Perdagangan Sumatera Utara (Skripsi). Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan

Triyono, 2008. Analisis Perubahan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika (Skripsi). Fakultas Ekonomi Unversitas Muhammadiyah, Surakarta.

www.investopedia.com: 6 Factors That Influence Exchange Rates, by Jason Van Bergen

ANALISIS TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DERAH DI KOTA MANADO PASCA OTONOMI DAERAH

Ivan Rumetor, Tri Oldy Rotinsulu dan Mauna Maramis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado Email: ivan.rumetor28@gmail.com

ABSTRAK

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang memperlihatkan kemempuan suatu daerah semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah kota manado pasca otonomi daerah dengan mengevaluasi kemampuan keuangan daerah di kota Manado pasca otonomi.

Ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa derajat desentralisasi fiskal di Kota Manado berada masih 12,1% atau Kurang menunjukan bahwa pemerintah Kota Manado harus memperhatikan dan menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pusat dengan melakukan strategi pembangunan terhadap potensi ekonomi daerah.

Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui perkembangan kemampuan keuangan pasca otonomi daerah Kota Manado dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2007 s/d 2012.

Kata Kunci: Total Penerimaan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Blanja Daerah

ABSTRACT

PAD as a reception area which shows an area greater kemempuan PAD indicates that the region is able to implement fiscal decentralization and reduced dependence on the central government. The objectives of this study were: to determine the level of fiscal capacity Manado city after regional autonomy by evaluating the ability of local financial autonomy in Manado post.

Of the results of the study indicated that the degree of fiscal decentralization in the city of Manado was still 12.1 % or less indicates that the government should pay attention to Manado City and explore sources - local revenue sources to encourage local economic growth and minimize the dependence on the center by making development strategy against potential local economy.

This research is expected to note the development of the financial capacity of local autonomy after the city of Manado from year to year, especially from 2007 - 2012.

Keywords: Total Revenue Regions (TPD), income (PAD), Fund Balance, Expenditure

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan pengelolahan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan Otonomi Daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan Good Governance, maka adalah tepat untuk memperhatikan masalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misisi Organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui suatu media pertanggungjawaban yang di laksanakan secara periodik.

Sumber Pendapatan asli Daerah merupakan sumber Keuangan Daerah yang di gali di dalam Daerah yang bersangkutan yang terdiri dari Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan sumber daya alam dan lain – lain adalah pendapatan yang sah. Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan , dan penerimaan sumber daya alam serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Kusus. Dengan di kelolahnya APBD oleh pemerintah daerah tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah atau Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Undang-undang 33 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1).

Otonomi atau *autonomie* berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang (Silalahi,1996, mengutip kamus Petit Larousse). Jadi Otonomi berarti mengatur dengan undang-undang sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi adalah "pemberian hak dan kekuasaan perundang-undangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan ataupun daerah". Pengertian Otonomi dalam lingkup suatu negara selalu dikaitkan dengan daerah atau pemerintah daerah (*local government*). Otonomi dalam pengertian ini, selain berarti mengalihkan kewenangan dari pusat (*central government*) ke daerah juga berarti menghargai atau mengefektifkan kewenangan asli yang sejak semula tumbuh dan hidup di daerah untuk melengkapi sistem prosedur pemerintahan negara di daerah (Sumitro,2000).

Pemberlakukan UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999; direvisi menjadi UU No.32/2004 dan UU No.33/2004. tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5. "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Konsekwensi dari pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, dan lembaga sosial masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Keasatuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam mengelola administrasi keuangan pendapatan dan belanja daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya melaksanakan beberapa fungsi, antara lain: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Mangkoesoebroto, 1992). Penerapan ketiga fungsi tersebut dapat memotivasi potensi ekonomi daerah, peningkatan taraf hidup maupun sektor-sektor kegiatan pembangunan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga merupakan rincian lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan pola dasar pembangunan daerah. Bila dikaitkan dengan peranan pemerintah

daerah, maka APBD harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik dilihat dari aspek kualitatif maupun aspek kuantitatif. Dan pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparat maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (*financial*), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.

Kebijakan pengelolaaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman Pada UU No 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) Disisi lain Keuangan daerah adalah sebagai alat Fiskal Pemerintah Daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber - sumber Ekonomi, memeratakan hasil Pembangunan dan menciptakan stabilitas Ekonomi selain stabilitas Sosial Politik. Peranan keuangan daerah semakin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa DAU dan DAK, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah.

Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berati subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerahnya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memilki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangannya sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Latar Belakang Paradigma Baru Perencanaan Keuangan Daerah dan APBD:

- 1. Pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif
- 2. Pemberlakukan UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999; direvisi menjadi UU No.32/2004 dan UU No.33/2004.
- 3. Sistem, prosedur, format, dan struktur APBD yang berlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan perubahan

Sumber-sumber pendapatan/ penerimaan daerah menurut UU nomor 32 Tahun 2004 :

- a) Pendapatan asli daerah
- b) Dana perimbangan.
- c) Pinjaman daerah.
- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Bird dan Vaillancourt, 2000).

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN). Hasil studi yang dilakukan Zhang dan Zou (1998), menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengimplikasikan bahwa desentralisasi fiskal gagal mendorong pertumbuhan

ekonomi di China. Hal ini merefleksikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan investasi di sektor infrastruktur. Sementara , studi yang dilakukan oleh Philips dan Woller (1997) juga menunjukkan efek negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju.

Variabel Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini dapat diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

Variabel Desentralisasi Penerimaan ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masingmasing kabupaten/kota (APBD), tidak termasuk subsidi terhadap total penerimaan pemerintah. Variabel ini mengekspresikan besaran relatif antara pendapatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Dillinger (dalam Sidik, 2001), pada dasarnya ada empat jenis desentralisasi, yaitu:

- Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
- Desentralisasi adminitratif, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu. Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga):
 - 1. Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintah pusat
 - 2. Pendelegasian (delegation or institutional pluralism) yaitu: pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign-authority).
 - 3. Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai distributed institutional monopoly of administrative decentralization.

Desentralisasi fiskal (*fiscal dezentralization*), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan , yang mencakup :

- 1. Self-financing atau cost recovery dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah
- 2. *Cofinancing atau coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.

3. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) ,Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat serta pinjaman daerah (sumber daya alam).

Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi ekonomi pasar.

Sumber Penerimaan Daerah Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut JB. Kristiadi (1985) adalah pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber -sumber PAD itu sendiri. Se dangkan menurut Alfian Lains (1985) PAD adalah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinasdinas dan lain-lain. Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan (Ladjin, 2008).

Menurut World Bank 1994 dalam Suhab 1997 kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah

- 1. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dala pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- 2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut diatas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembanguan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto, 1997). Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU nomor 34 tahun 2000).

Hasil Perusahan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayan Daerah yang di pisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah /swasta dan kelompok masyarakat. Jenis hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang di pisahkan terdiri dari :

- 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahan milik daerah /BUMD
- 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahan milik pemerintah /BUMN

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain PAD yang sah, adalah penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi/potongan ataupun bentuk lain dari pengadaan ataupun penjualan jasa oleh daerah (UU 32/2004, Penjelasan Pasal 157, Huruf a, Angka (4)).

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Kusus. Dana perimbangan selain dimaksutkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Ketiga komponen Dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan kesatuan yang utuh.

Dana Bagi Hasil digunakan Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada daerah dengan presentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001.

Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan saerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap (fiscal gap), dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (fiscal needs) dengan potensi daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada. Kemampuan/potensi fiskal/ekonomi daerah dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah. (Republik Indonesia, 2004b).

Dana Alokasi Khusus pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. (Republik Indonesia, 2004-b)

Perimbangan keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah ini merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai konsekensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dapat

ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dengan tujuan untuk melakukan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Di samping itu, desentralisasi fiskal dapat memberikan ruang bagi daerah untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi atas penyediaan pelayanan publik, menciptakan peluang investasi dan bisnis, dan secara selektif para investor dan pebisnis memilih selera yang paling mendekati preferensi masyarakat setempat.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
- 2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah
- 3. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
- 4. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- 1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
- 2. Pemerintah Daerah lain;
- 3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Seiring berjalannya waktu Kota Manado sudah banyak pembenahan dari pembangunan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, banyak pengusaha asing yang ingin berinvestasi di kota manado dan sudah ada yang melakukan invenstasi di kota manado ini, Serta banyaknya event-event Nasionan dan Internasional yang diselenggarakan di kota manado yang banyak mengundang turis-turis

asing untuk datang ke Kota Manado, juga banyak begitu banyak sumber daya yang dimiliki kota manado. Hal ini juga bisa meningkatkan PAD Kota Manado. Namun dapat diduga bahwa Kota Manado belum bisa mandiri. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan Daerah di Kota Manado pasca otonomi daerah.

Adapun kerangka pemikiran dalam tulisan ini tergambar sebagai berikut



B. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur dan dari hasil materi perkuliahan ataupun sumber - sumber lain yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Manado yaitu untuk tahun 2007-2012 serta data pendukung lainnya yang di butuhkan.

Adapun Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

- APBD adalah Perkiraan Penerimaan Daerah Kota Manado yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan, lain lain PAD yang sah, yang di ukur dalam satuan Rupiah.
- Belanja daerah adalah Pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado yang terdiri atas Belanja langsung dan tidak langsung yang di ukur dalam Satuan Rupiah/Tahun.
- DAU adalah Transfer Dana dari Pemerintah Pusat yang untuk Pemerintah kota Manado sesuai kebutuhan, yang terdiri dari DAU untuk Propinsi dan DAU untuk Kabupaten/Kota yang di ukur menggunakan satuan Rupiah.
- DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu sesuai prioritas nasional yang di ukur dengan satuan Rupiah .
- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah Kota Manado untuk mendanai kebutuhan daerah yang ukur dengan satuan Rupiah.

Untuk melengkapi data dan refrensi yang diperlukan dalam penyusunan jurnal ini, maka ditempuh cara sebagai berikut:

- 1. *Library research* (penelitian kepustakaan)
 Penelitian yang dilakukan diperpustakaan guna mendapatkan refrensi yang ada kaitannya dengan penulisan ini.
- 2. *Field reaserch* (penelitian lapangan)
 Penelitian yang dilakukan di tempat-tempat atau instansi terkait yang menyediakan data atau informasi yang berkaitan dalam penulisan ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung rasio. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yangdiperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak,Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001 : 262). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

Rasio Kemandirian =
$$\frac{Pendapatan Asli Daerah}{sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstren} x 100$$

Rasio Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Derajat Desentralisasi Fiskal = \frac{Pendapatan Asli daerah (PAD)}{Total Penerimaan Daerah} \times 100$$

Rasio Indeks Kemampuan Rutin dapat dilihat melalui proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. Indeks Kemampuan Rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Index Kemampuan Rutin = \frac{Pendapatan Asli Daerah}{Total Pengeluaran Rutin} x100$$

Rasio Pertumbuhan mempunyai rumusan sebagai berikut :

$$r = \frac{Pn - Po}{Po}$$

r = Pertumbuhan

Pn = data yang di hitung pada tahun ke –n (PAD tahun berjalan)

Po = Data yang di hitung pada tahun ke - n (PAD tahun Sebelumnya)

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan belanja pembangunan yang di ikuti oleh semakin rendahnya belanja rutin, maka pertumbuhanya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhanya dari periode yang satu ke periode berikutnya dan begitu pula sebaliknya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio keuangan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado ,sehingga dapat diketahui bagai mana kecenderungan yang terjadi. Adapun data yang digunakan adalah data yang berasal dari arsip dokumen pada bagian anggaran kantor Pemerintah Kota Manado yang berupa data APBD. Dari hasil APBD tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kemampuan keuangan APBD Kota Manado Adapun hasil dari Analisis Rasio APBD tersebut adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah : Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstren}} \times 100$

Tabel 2 Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Manado Tahun Anggaran 2007-2012 (Ribu Rupiah)

No	Sumber pendapatan dari pihak Ekstern	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bagi Hasil Pajak	24.281.790.908	41.175.000.000	30.028.348.209	46.102.853.655	55.041.281.055	45.903.054.718
2	DAU	201.530.000.00	374.754.000.000	430.073.269.000	420.752.563.000	420.481.311.000	482.454.130.000
3	DAK	DAK 8.260.000.000 35.379.000.00		42.741.000.000	55.683.000.000	28.014.400.000	42.958.800.000
4	Dana Perimbangan dari Propinsi	10.515.223.463	-	-	-	-	-
per	otal Sumber ndapatan dari ihak Ekstern	244.587.014.31 7	451.308.000.000	502.842.617.209	522.538.416.655	503.536.992.055	571.315.984.718
Per	erkembangan ndapatan Dari ihak Ekstern	-	84,51%	11,41%	3,91%	(3,63%)	13,46%
Pendapatan Asli Daerah		38.375.876.560	54.715.561.525	73.898.733.040	72.404.996.767	90.828.438.199	134.721.720.942
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah		-	42,57%	35.05%	(2,02%)	25,44%	48,32%
Rasi	o Kemandirian	15,6%	12,1 %	14,6 %	13,8 %	18,0 %	23,5 %
Po	la Hubungan	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif

Sumber: Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2007 - 2012 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa PAD dan sumber pendapatan dari pihak ekstern dalam hal ini pemerintah mengalami peningkatan hampir setiap tahun ketahun. Peningkatan dari PAD dikarenakan kenaikan penerimaan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan juga pendapatan pendukung PAD lainnya.

Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis pajak/retribusi yang ada didaerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensi ontuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, yang dalam pemungutan/pengenaannya berdasarkan UU/peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Darah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber bembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal : Derajat Desentralisasi Fiskal = $\frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100$

Pendapatan Asli **Total Penerimaan Drajat Desentralisasi** Kemampuan Tahun Daerah Daerah Fiskal keuangan 2007 38.375.876.560 304.806.158.897 12,9 % Kurang 561.268.191.480 9,74 % Sangat kurang 2008 54.715.561.525 2009 73.898.733.040 662.074.202.665 11,1 % Kurang 72.404.996.767 647.169.850.697 2010 11,1 % Kurang 90.828.438.199 672.960.863.401 13,4 % 2011 Kurang 134.721.720.942 899.152.955.866 2012 14,9 % Kurang Rata -Rata 12,1 % Sangat Kurang

Tabel 3 Perhitungan Rasio derajat Desentralisasi Fiskal Kota Manado 2006-2011 (Ribu Rupiah)

Sumber: Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2007 – 2012 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah Kota Manado masih kurang meskipun Pada tahun 2007 rasio derajat Desentralisasi fiskal 12,9 % dan pada tahun 2008 menurun menjadi 9,74 % yang masuk dalam Skala Interval 0,00% s/d 10% yaitu sangat kurang, Selanjutnya pada tahun 2009 naik menjadi 11,1 % dan pada tahun 2010 masih mengalami kesamaan yaitu 11,1 % Pada tahun 2011 rasio derajat desentralisasi fiskal kembali naik menjadi 13,4 % hingga pada tahun 2012 rasio derajat desentralisasi akhirnya mengalami kenaikan menjadi 14,9 %. selama enam tahun pada Pemerintahan Kota Manado masih dalam skala interval yang "kurang" ,karena masih berada dalam Skala interval antara 10,1% s/d 20% dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kota Manado mesih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Kota Manado dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari Pemerintahan Pusat/Pemerintah propinsi.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin : $\frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100$

Tabel 4 Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Manado 2007-2012 (Ribu Rupiah)

Tahun	PAD	Pengeluaran Rutin	IKR	Kemampuan Keuangan
2007	38.375.876.560	108.221.685.833	35,4 %	Kurang
2008	54.715.561.525	306.409.745.013	17,85 %	sangat kurang
2009	73.898.733.040	347.693.423.895	21,25 %	Kurang
2010	72.404.996.767	424.994.024.741	17,03 %	sangat kurang
2011	90.828.438.199 475.460.069.1		19,10 %	sangat kurang
2012	134.721.720.942	554.781.774.977	24,28 %	Kurang
	Rata-Rata	22,4 %	Kurang	

Sumber: Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2007 – 2012 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin daerah Kota Manado dari tahun ke tahun menunjukan keadaan yang tidak stabil dan selalu berubah-ubah pada tahun 2007 dan 2008, rasio indeks kemampuan rutin mencapai 35,4 % dan 17,85 %. Selanjutnya pada tahun 2009 dan 2010 naik menjadi 21,25 % dan 17,03 %, pada tahun 2011 kembali naik lagi menjadi 19,10 %. Pada tahun 2012 rasio indeks kemampuan rutin mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 24,28 %. Sehingga rata-rata Index Kemampuan Rutin adalah 22,4%

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 4.4. dapat disimpulkan bahwa rasio indeks kemampuan rutin Kota Manado Selama enam tahun Masih kurang dan masuk dalam Skala Interval 20,01% - 40,00%

Rasio Pertumbuhan : $\Gamma = \frac{Pn-Po}{Po}$

r = Pertumbuhan

Pn = data yang di hitung pada tahun ke –n (PAD tahun berjalan)

Po = Data yang di hitung pada tahun ke - n (PAD tahun Sebelumnya

Tabel 5 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Belanja Rutin dan Belanja Daerah Kota Manado 2007-2012 (Ribu Rupiah)

N o	Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	PAD	38.375.876.560	54.715.561.525	73.898.733.040	72.404.996.767	90.828.438.199	134.721.720.942
	Pertumbuhan PAD	-	42,57%	35.05% (2,02%)		25,44%	48,32%
2	Total Penerimaan	304.806.158.897	561.268.191.480	662.074.202.665	647.169.850.697	672.960.863.401	899.152.955.866
	Pertumbuhan penerimaan	-	84,13 %	17,96 %	(2,25 %)	3,98 %	33,61 %
3	Total Belanja Rutin	108.221.685.833	306.409.745.013	347.693.423.895 424.994.024.741		475.460.069.159	554.781.774.977
	Pertumbuhan Belanja rutin	-	35,31%	88,12%	81,81%	89,38%	85,70%
4	Total Belanja Pembangunan	191.773.488.114	214.023.584.015	269.113.780.051	268.748.281.243	203.028.007.034	321.844.725.98 9
	Pertumbuhan Belanja Pembangunan	-	11,60%	25,74%	(0,13%)	(24,45%)	58,52%

Sumber: Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2007 – 2012 (Data diolah)

Dari perhitungan tabel 5 diatas kondisi pertumbuhan APBD Kota Manado dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun anggaran 2007-2012 menunjukan pertumbuhan yang positif meskipun relatif sangat kecil . Total penerimaan diikuti kenaikan PAD mengalami peningkatan dan pengeluaran belanja pembangunan tapi diikiuti dengan pengeluaran belanja rutin yang masih sangat besar namun Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kota Manado mulai memberikan perhatiannya yang besar terhadap pembangunan daerahnya dan kesejahtraan masyarakat.

Tabel 6 Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi fiskal , Rasio Indeks kemampuan Rutin dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Kota Manado 2006-2011 (Ribu Rupiah)

N o	Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata- Rata	Kemampuan Keuangan
1	Rasio Kemandirian	15,6%	12,1 %	14,6 %	13,8 %	18,0 %	23,5 %	16,26%	Instruktif (Rendah Sekali)
2	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	12,9%	9,74%	11,1%	11,1%	13,4%	14,9%	12,1%	Kurang
3	Rasio Indeks kemampuan rutin	35,4%	17,85%	21,25%	17,03%	19,10%	24,28%	22,4 %	Kurang
4	Rasio Pertumbuhan								
	PAD	-	42,57%	35.05%	(2,02%	25,44%	48,32%	29,87%	
Te	otal Penerimaan	-	84,13 %	17,96 %	(2,25 %)	3,98 %	33,61 %	27,48%	
	Belanja Rutin	-	35,31 %	88,12 %	81,81 %	89,38%	85,70 %	76,06%	
Belanja Pembangunan		-	11,60%	25,74%	(0,13%	(24,45 %)	58,52%	14,25%	

Sumber: Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2007 – 2012 (Data diolah)

Hasil analisis menunjukan bahwa Rasio Desentralisasi fiskal merupakan salah satu rasio terpenting dalam penelitian ini, seperti yang diketahui bahwa Rasio Desentralisasi fiskal Kota Manado masih Kurang yaitu sebesar 12,1%, sehingga dapat hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah di lakukan oleh Widodo((2001) dalam penelitiannya tentang Analisis rasio keuangan APBD Kabupaten Boyolali yang masih belum mampu membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya sendiri, dan hasil ini sesuai dengan kriteria derajat desentralisasi yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) tentang kemampuan keuangan daerah. Dimana kemampuan keuangan daerah skala 10,1% s/d 20% itu dikatakan *kurang*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih juga sangat rendah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian David Effendi(2010) yaitu Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan OTDA di kabupaten nganjuk, yang menyatakan bahwa Rasio desentralisasi fiskal yang kurang mampu untuk meningkatkan PAD dalam pembangunan. Dari rasio pertumbuhan, dapat disimpulkan bahwa APBD Kota Manado tahun anggaran 2007-2012 menunjukan pertumbuhan yang positif meskipun relatif kecil. Seperti yang di kemukakan oleh hidayat(2000) tentang faktor yang mempengaruhi PAD salah satunya mungkin kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan yang dikemukakan oleh .

Dari keempat rasio diatas dapat disimpulakan bahwa Pemerintah Kota Manado pasca otonomi daerah belum mampu. karena kemampuan keuangan yang Instruktif, sangat kurang dan masih tergantung dengan penerimaan dari Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Yuliati(2004) tentang Analisis kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah di Kabupaten Malang yaitu pemerintah kota masih bergatung pada pemerintah pusat dan hal ini sejalan dengan hopotesis bahwa kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Manado Belum Mampu dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemerintah kota manado masih bergantung pada pemerintah pusat.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpualn sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Manado tahun anggaran 2007-2012 tergolong dalam skala interval 0% 25% yang mempunyai pola hubungan bahwa rasio tersebut instruktif, yang berarti kemampuan Pemerintah Kota Manado dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif **rendah** dan masih **belum mampu**. Tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah nasional cukup tinggi. Hal ini disebabkan masih besarnya proporsi sumber pendapatan Pemerintah Pusat, dari pada PAD nya.
- 2. Berdasarkan rasio derajat desenteralisasi fiskal, bahwa PAD Kota Manado masih relatif kecil jika digunakan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Rasio derajat desenteralisasi fiskal untuk tahun anggaran 2007-2012 Secara rata-rata Kota Manado masih dalam kategori **kurang**. Pemerintah Kota Manado masih sangat tergantung dengan sumber keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat masih berpengaru sangat besar terhadap penerimaan daerah meskipun terjadi peningkatan PAD dari tahun ke tahun.
- 3. Berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin Kota Manado tahun anggaran 2007 2012, Pemerintah Kota Manado selama kurun waktu 6 tahun menunjukkan skala yang kurang karena kemampuan PAD dalam memenuhi pengeluaran rutin masih rendah.
- 4. Berdasarkan rasio pertumbuhan Kota Manado, hampir secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan pertambahan pajak dan retribusi daerah meskipun begitu kemampuan Kota Manado masih harus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian Lains, 1985. "Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru", Penerbit PRISMA.

Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt,. Desentralisasi Fiskal di Negara-

Negara Berkembang: Tinjaun Umum, dalam Richard M.Bird dan FrancoisVaillancourt (Penyunting), Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang (Terjemahan), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991)

Depdagri dan Fispol UGM 1991 Dalam Anita Wulandari ", 2001.

Halim, Abdul,2002. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta.

Kristiadi, JB, 1985. Naskah Sekitar Peningkatan Pendapatn Daerah, Majalah Prisma, No.12 Tahun XIV. LPEM FEUI, 2000, Kajian Analisis Penerimaan Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal, Laporan Pendahuluan, Jakarta. (Tidak dipublikasikan).

Ladjin, Nurjanna. 2008. **Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Skripsi).** Universitas Diponerogo. Semarang.

Mardiasmo, 1999. **Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik**, PAU Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Radianto, 1997. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II suatu Studi di Maluku.

Sidik, 2001. Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Widodo, 2001. Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Boyolali.

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2002-2011

Claudia Lina Wenas, Anderson Kumenaung dan Wensy Rompas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado email : <u>claudiawenas18@yahoo.com</u>

ABSTRAK

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah.Adanya DAU dan PAD menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk sebaik mungkin dalam penggunaan kedua dana tersebut, dalam merealisasikannya lewat pembangunan yang bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi masyarakat di daerah sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah pemerintah Kota Manado Tahun 2002 – 2011.Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Ekonometrika dengan fungsi regresi linear berganda dengan Metode *Ordinary Least Square* (*OLS*).Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

Kata kunci: dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah

ABSTRACT

Special Allocation Fund an Revenue are sources of local revenue. The DAU and PAD causing the local government claimed to the best possible use of both these funds, in make it possible through a beneficial development and provide satisfaction for the people in the area. This study aimed to determine the effect of the DAU and PAD for shopping areathe government in Manado City in 2002-2011. The model of analysis used in the research is Econometrics Analysis with the function of multiple linear regression with Ordinary Least Square method (OLS). The result showed that the DAU and PAD is positive and significant effect to the shopping area in the government of the Manado City.

Keywords: special allocation fund, revenue, and shopping area

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

Menurut Kunarjo (1996:156), yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah meliputi berbagai sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal.Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Dengan diberlakunya kebijakan desentralisasi fiskal maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing.Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pada tahun 2004, dikeluarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No.22 Tahun 1999. Begitu pula UU No.25 Tahun 1999 digantikan oleh UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain (Maimunah, 2006).

Sejak pelaksanaan otonomi daerah peningkatan PAD selalu menjadi pembahasan penting termasuk strategi peningkatannya.Hal ini mengingat bahwa kemandirian daerah menjadi tuntutan utama sejak diberlakunya otonomi daerah.Optimalisasi potensi daerah digalakkan untuk meningkatkan PAD.Dalam era otonomi daerah PAD merupakan pencerminan dari local taxing power yang seharusnya memiliki peran yang cukup signifikan. Namun kenyataan peran PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota khususnya di kota Manado masih relatif kecil. Pada Tabel 1 dapat dilihat perkembangan PAD Kota Manado sebagai berikut:.

Tabel 1.PAD Kota Manado Tahun 2002-2011 (Miliyar Rupiah)

Tahun	Realisasi
2002	30.087.134.000
2003	30.392.108.218
2004	32.995.360.000
2005	38.375.877.000
2006	46.516.790.000
2007	54.715.562.000
2008	73.898.733.040
2009	72.404.997.767
2010	90.828.438.199
2011	134.721.721.000

Sumber : BPS Sulut (Manado dalam angka 2002-2011) dan www.depkeu.go.id

Tabel 1 dapat dilihat perkembangan PAD Kota Manado dari tahun 2002 sampai 2011 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp. 30.087.134.000 di tahun 2002 dan Rp. 134.721.721.000 di tahun 2011.Walaupun di tahun 2009 PAD Kota Manado mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2008 sebesar Rp. 73.898.733.040 sedangkan di tahun 2009 turun menjadi Rp. 72.404.996.767 namun di tahun 2010 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 90.828.438.199. Hal ini berarti, pemerintah Kota Manado mampu mengelola dan merealisasikan potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang nantinya membiayai pembangunan daerah.Dengan meningkatnya PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja daerah pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja.Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang undang No.33 Tahun 2004).Sumber sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Halim (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

(Todaro, 2006:19) Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun wakru yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI (gross national income) tahunan. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan dusuatu Negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNI, baik secara keseluruhan maupun perkapita, yang diyakini akan menetas dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain, yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil- hasil pertumbuhan ekonomi dan social secara merata.

(Arsyad, 1999:298) Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumbaerdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia,kelembagaan,dan sumberdaya fisik local (daerah).

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah proses. Proses itu mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembanguna industri-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.Dalam upayah mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama sam mengambil inisiatif pembangunan daerah.Oleh karena itu, pemerintah daerah besert partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pada umumnya, ahli-ahli ekonomi memberikan pengertian yang sama mengenai pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan terjadinya perbaikan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Tetapi ada pula ahli ekonomi pembangunan (*economic development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), menurut sadono sukirno (1978;14) pembangunan ekonomi diartikan sebagai berikut:

- Peningkatan dalam pendapatan perkapita masyarakat yaitu pertambahan produk domestic bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau produk domestik regional bruto (PDRB) untuk tingkat regional pada suatu tahun tertentu adalah melebihi dari tingkat pertambahan penduduk
- Perkembangan PDB atau PDRB yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh perombakan (pergeseran) dan modernisasi dalam struktur perekonomiannya yang bercorak tradisional.

J.A.C. Mackie (dalam Sicat, G.P dan Arnt, H.W, 1991;345) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi (economic growth) sebagai peningkatan kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kepastian ini bertumpu kepada kemajuan teknologi produksi.Secara konvensional, pertumbuhan diukur dengan kenaikan pendapatan nasional (PDB) per kapita.Pembangunan (development) adalah suatu konsep yang lebih luas. Konsep ini mencakup pula modernisasi lembaga, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bukan ekonomi, seperti pemerintah, kota, desa cara berpikir, tidak saja berkenaan dengan tujuan agar dapat memproduksi secara efisien, melainkan juga agar mengkonsumsi secara rasional dan hidup lebih baik. Kesemuanya itu membuka jalan bagi perubahan ekonomi dan mendahului atau berbarengan dengan perubahan sosial.

Meskipun pengertian mengenai pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh dua pilar diatas tidak persis sama, namun keduanya menyebutkan terjadinya kenaikan pendapatan nasional (PDB atau PDRB) perkapita, yang mencerminkan terjadinya perbaikan dalam tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan dukungan tersedianya sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, sumber teknologi, sumberdaya kelembagaan, dan sumberdaya pembangunan lainnya.Sumberdaya modal dimaksudkan adalah kemampuan keuangan daerah.Sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah harus ditingkatkan dan dikelola secara efektif dan efisien.Pajak dan Retribusi Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial, tetapi relatif kecil, sehingga ketergantungan keungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah sangat kuat.Ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat yang sangat kuat itu merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan, meliputi :

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi, Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak-pajak dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah. Besarnya PAD menunjukan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan mendukung pembangunan yang akan laksanakan pada masa yang akan datang serta memelihara pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah.Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinanya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997). Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaran pemerintahan (Arif, 2002). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Menurut Susanti (2008) dalam Nurul (2008) menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevalusi kinerja dan memotivasi bawahannya. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatakan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007).

Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu: (1) Belanja selain modal (Belanja administrasi umum; Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; Belanja transfer; Belanja tak terduga). (2) Belanja modal. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokan menjadi lima kelompok (Pambudi, 2007), yaitu:

- a. Belanja administrasi umum.
 - Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:
 - 1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
 - 2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 - 3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
 - 4. Belanja pemeliharaan merupukan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubugan secara langsung dengan pelayanan publik.
- b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:
 - 1. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/peronal yang berhubugan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
 - 2. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 - 3. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

- 4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupukan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubugan langsung dengan pelayanan publik.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:
 - 1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
 - 2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.
- d. Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:
 - a. Angsuran pinjaman.
 - b. Dana bantuan.
 - c. Dana cadangan.
- e. Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Menurut Nurlan (2008) menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009) menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial.Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Nur indah Rahmawati (2010) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Daerah, studi kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.Pemerintah Daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

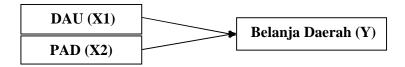
Selanjutnya, Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2003) tentang pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah, studi kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali, hasil penelitian menunjukan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik maupun tanpa lag. Ketika tidak digunakan tanpa lag, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD. Ketika kedua faktor (DAU dan PAD) diregres serentak dengan belanja daerah, pengaruh keduanya juga signifikan, baik dengan ataupun lag.Dalam model prediksi tanpa lag, daya prediksi DAU lebih rendah dari PAD, tetapi sebaliknya dalam prediksi dengan lag. Dengan demikian terjadi flypaper effect.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sudah seharusnya pemerintah daerah mengubah komposisi belanjanya. Fenomena yang terjadi selama ini, belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasi yang kurang relatif produktif. Pergeseran komposisi belanja merupakan usaha logis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan

tingkat kepercayaan publik.Semakin tinggi tingkat belanja pelayanaan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset yang tetap dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal/pembangunan merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Adapun Kerangka Pemikiran dalam tulisan ini adalah terjadi hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah



Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut bahwa Dana Alokasi Khusus (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga berpengaruh terhadap belanja daerah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder DAU, PAD dan Belanja Daerah tahun 2002-2011 (tahunan) data *time series*. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, media internet, jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika, yaitu model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana OLS (*Ordinary Least Square*). Penaksiran OLS merupakan penaksiran tak bias linear yang terbaik (best linear unbiased estimator/BLUE). Fungsi persamaan umum yang akan diestimasi dalam penelitian ini Suliyanto (2011:54) adalah :

$$BD = f(DAU, PAD)$$
(3.1)

Kemudian persamaan (3.1) dapat dituliskan kedalam model dasar regresi berganda :

$$BD = {}_{0+} {}_{1}DAU + {}_{2}PAD + \mu i$$
(3.2)

Dimana:

BD = Belanja Daerah (Rp. Milyar) DAU = Dana alokasi umum (Rp. Milyar) PAD = Pendapatan asli daerah (Rp. Milyar)

0 = Konstanta μi = Error Term

1, 2, = Parameter yang akan ditaksir memperoleh gambaran tentang besarnya pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Data belanja modal yang digunakan dalam

penelitian ini adalah nilai realisasi belanja modal Kota Manado yang nilainya dinyatakan dalam miliar Rupiah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data dana alokasi khusus yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai realisasi dana alokasi khusus Kota Manado yang nilainya dinyatakan dalam miliar Rupiah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data PAD yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah Kota Manado yang nilainya dinyatakan dalam miliar Rupiah.

Pengujian Statistik (*Goodnes Of Fit*) menggunakan Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t) dimana Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk menghitung nilai t hitung digunakan rumus Suliyanto (2011:62):

$$t_{\text{hitung}} = \frac{'i}{\text{Se}('i)}$$

$$t_{tabel} = , (n-k)$$

Dimana:

1 = koefisien regresi variabel independen ke-I N = jumlah data Se = standar eror dari vaiabel independen ke-I K = jumlah variabel

Hipotesis yang diuji pada uji statistik t adalah sebagai berikut :

H0: i = 0 Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H1: i 0 Ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

Sedangkan Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) menggunakan nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan derajat kebebasan: df: , (k-1), (n-k). Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus Suliyanto (2011:62):

$$F = \frac{R^2/k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

 $\begin{array}{ll} \mbox{Dimana}: & F = \mbox{Nilai } F \mbox{ hitung} & N = \mbox{Jumlah observasi} \\ \mbox{R}^2 = \mbox{Koefisien determinasi} & K = \mbox{Jumlah variabel} \\ \end{array}$

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dengan melihat ilai R^2 disebut juga koefisien determinasi.Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula Gujarati (2006:161) :

$$R^2 = 1 - \frac{e_i^2}{y_i^2}$$

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas.

Uji Asumsi Klasik yang digunakan adalah Uji Heterokedastisitas dimana asumsi pokok dalam model regresi linear klasik adalah bahwa varian setiap *disturbance term* yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan 2. Inilah yang disebut asumsi *heteroskedasticity* atau varian yang sama, dengan menggunakan *White Test* Suliyanto (2011:95). Kemudian Uji Asumsi Klasik selanjutnya Uji Autokorelasi, dimana Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau *time series* data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau *cross-sectional* data) Sumodiningrat (2007:231).Pada penelitian ini digunakan metode pengujian *Lagrange Multiplier* atau uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM-Test*.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi antar variabel bebas(DAU, PAD), dan variabel terikat (belanja Daerah) menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS, Sulut dari tahun 2002-2011. Data sekunder tersebut diestimasikan dengan analisis regresi berganda seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program Eviews 7.0 untuk uji t, uji F, uji R² sampai dengan uji asumsi klasik. Dari hasil regresi dapat dibentuk model estimasi sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Estimasi (OLS) Pengaruh DAU, PAD terhadap Belanja Daerah

BD	= -6	2696625+ 1,139753DAU	*** + 3,423093PAD***	
S	=	(0, 1146)	(0,4289)	
t-statistik	=	(5.391258)	(2.593352)	
$R^2 = 0.9944$	411		F-Statistik = $622,6927$	_

Sumber: Data diolah, 2013

Ket: *** Signifikan pada = 1%

Hasil regresi di atas dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas yaitu DAU, dan PAD terhadap belanja daerah sebagai berikut:

DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi DAU yaitu sebesar (1,139753). Artinya setiap kenaikan DAU sebesar 1 miliar maka belanja daerah akan naik sebesar 1.139.000.000 ceteris paribus.

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi PAD yaitu sebesar (3,423093). Artinya setiap kenaikan PAD sebesar 1 miliar maka belanja modal akan naik sebesar 3,423.000.000 ceteris paribus.

Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel pada derajat kebebasan (n-k-1) dan tingkat signifikansi () 1%, 5%, 10%.

Nilai F-tabel dengan derajat kebebasan (0,01) dan = 1% adalah 9.55. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 622,6927. Dengan demikian F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, artinya secara bersama-sama variabel DAU, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Uji secara individual (Uji t):

1. Uji t terhadap Koefisien dari DAU

- d) T-hitung = 9,945467
- e) Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (9,945467 > 2.988). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya Ho, maka perubahan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% (=1%) terhadap belanja daerah.
- 2. Uji t terhadap Koefisien dari PAD
 - a) Df = n-k= 10-3 = 7
 - b) = 5%
 - c) T-tabel = 1.895
 - d) T-hitung = 7.979439
 - e) Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (7.979439 > 1.895). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya Ho, maka perubahan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% (=5%) terhadap belanja daerah.

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan hasil regresi dengan melihat nilai R^2 adalah 0.994411 = 99,44% yang berarti bahwa kontribusi atau sumbangan dari variabel bebas DAK, PAD secara bersama-sama terhadap variasi naik turunnya variabel belanja modal adalah sebesar 99,44%, sisanya 0,66% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam model.

Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan di artikel ini adalah sebagai berikut :

A. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

$R^2 = 0.319692$	
Obs^*R -squared = 3.196	
Chi-squares (²) pada	1% = 15.0863

Sumber: Data diolah 2013

Tabel 3 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.319692. Nilai Chi-squares hitung sebesar 3.196918 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R^2) . Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares $(^2)$ pada = 1% dengan df sebesar 5 adalah 15.0863. Karena nilai Chi-squares hitung $(^2)$ lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares $(^2)$ maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

B. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

$R^2 = 0.295296$	
chi squares (2) = 2.9	
nilai kritis (²) pada	10% = 4.60517
	5% =5.99147
nilai kritis (²) pada	1% = 9.21034

Sumber: Data diolah 2013

Tabel 4 Hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.295296. Nilai chi squares hitung (2), sebesar 2.952958 sedangkan nilai kritis (2) pada = 10%, = 5%, = 1% dengan df sebesar 2. Karena nilai chi squares hitung (2) lebih kecil dari pada nilai kritis chi- squares (2), maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Berdasarkan pengujian secara individual dengan menggunakan uji t, variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, dengan demikian hipotesis terbukti.

Untuk DAU berpengaruh positif, hal tersebut bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara tansfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat akan menyebabkan penurunan pengeluaran daerah dan begitu juga sebaliknya peningkatan alokasi tranfer akan diikuti dengan pengeluaran yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa pemerintah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Untuk PAD berpengaruh positif, menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah dipemerintahan kota manado. Pemerintah daerah yang memiliki PAD dan DAU yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerah juga akan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya jika pendapatan daerah rendah atau menurun maka alokasi dana belanja daerah pada pemerintah juga akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Setiawan, 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah). Universitas Diponegoro Semarang.
- Badan Pusat Statistik. Manado dalam Angka. Sulawesi Utara
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum danPendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupatendan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- Moeleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi Sarjana (dipublikasikan).Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Rahmawati, Nur Indah, 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah : Studi Kasus Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MINAHASA

Debora Christiani Wola, Debby Rotinsulu dan Antonius Luntungan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado EmaiL; deborachristianiwola@ymail.com

ABSTRAK

Belanja daerah merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial. Penelitian ini bertujuan untuk seberapa besar pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Hasil uji t dan uji F yang telah dilakukan diketahui bahwa secara parsial belanja langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Minahasa dan belanja tidak langsung berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa. Kemudian secara simultan kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Minahasa.

Kata Kunci: Belanja Langsung, Belanja Tidak langsung, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

Shopping is a shopping area that benefits exceed one fiscal year and will add to the asset or assets will add to the shopping area as well as routine as maintenance costs. Capital expenditure allocation is based on local needs for facilities and infrastructure, both for the convenience of the government and for public facilities. Usually held every year acquisitions by local governments, in accordance with the budget priorities and public services that provide long-term financial impact. This study aims to how much influence the direct expenditures and indirect expenditures to economic growth Minahasa The results of the t test and F test that has been made known that the partial direct spending no significant effect on the economy of Minahasa District andindirect expenditures significantly affect economic growth Minahasa. Then simultaneously two variables jointly influence the economy Minahasa regency.

Keywords: Shopping Direct, Indirect Spending, Economic Growth

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba "lebih baik", secara material maupun spiritual. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan setinggitingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi,struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pemberian otonomi yang luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelavanan. pemberdayaan,dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah,dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 33 tahun 2004. Daerah diberikan hak mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya persediaan pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang di susun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar, penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja Alokasi belanja yang dasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan perasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Kabupaten Minahasa salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, terletak diujung utara Pulau Sulawesi. Ibukota Kabupaten Minahasa adalah Tondano. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan otonomi daerah yang lebih nyata, maka berbagai sumber/faktor dan sub sektor yang turut menunjang pendapatan daerah.. Kesiapan Kabupaten Minahasa sendiri dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan undang-Undang No 32 tahun 2004, identik dengan daerah kota lainnya dimana masih dipandang perlu mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerahnya.

Tabel. 1. Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Belanja Tidak Langsung Di Kabupaten Minahasa

Tahun	Total Belanja	B.Langsur	ng	B.Tidak lan	gsung
		Rp	%	Rp	%
2001	260,690,509,500	180,569,919,500	69,3	80,120,590,000	30,7
2002	297,760,274,100	185,750,155,700	62,3	112,010,118,430	37,6
2003	332,744,728,300	189,930,391,900	57,3	142,814,336,450	42,9
2004	366,729,182,500	193,110,628,100	52,6	173,618,554,460	47,3
2005	400,713,636,700	196,290,864,300	48,9	204,422,772,470	51,0
2006	434,698,096,700	199,471,100,500	45,8	235,226,990,200	54,2
2007	462,877,592,400	202,651,336,700	43,7	260,226,255,700	56,2
2008	496,060,087,100	205,831,572,900	41,4	290,228,514,200	58,5
2009	541,262,581,800	209,011,809,155	38,6	332,250,772,735	61,3
2010	610,844,914,800	213,266,277,546	34,9	397,578,637,383	65,1
2011	665,749,011,019	228,655,215,405	34,3	437,093,803,686	65,6
2012	720,653,123,200	244,044,153,300	33,8	476,608,969,900	66,2

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa proporsi Belanja langsung terhadap belanja total adalah sebesar 69,3% pada Tahun 2001 sedangkan pada tahun 2012 proporsinya sebesar 33,8% dengan demikian selama periode 2001-2012 proporsi Belanja langsung terhadap total Belanja daerah Kabupaten Minahasa adalah sebesar rata-rata adalah 37,3% pertahun. Sementara itu Belanja Tidak langsung terhadap belanja total adalah sebesar 30,7% pada Tahun 2001 sedangkan pada tahun 2012 proporsinya sebesar 66,2% Belanja Tidak langsung terhadap total Belanja daerah Kabupaten Minahasa adalah sebesar rata-rata adalah 62,7% pertahun. Berdasarkan permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa.

Sehubungan dengan ini maka tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa dan Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa. Tujuan utama daru usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya,harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2004).

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Jelasnya bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang *multidimensional*.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan kapabilitas dan efektivitas pemerintah sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja.mardiasmo(2002;11). Penentuan besarnya penerimaan / pendapatan dan pengeluaran / belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 3 bagian, yakni : Pendapatan Asl Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 (ayat 13) dan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut Halim (2002), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Bastian (2002) yang mengemukakan bahwa Belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah daerah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas, konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva/ ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi enitas ekonomi itu sendiri. Menurut Bastian (2002), Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang enitas yang berada di bank. Beban dapat berarti pengakuan biaya-biaya non-kas baik karena penyusutan, amoritas, penyisihan atau cadangan. Penyisihan per persediaan itu sendiri. Berdasarkan manfaatnya, biaya yang telah terjadi pada suatu periode dapat diklasifikasikan sebagai opersi dan non-operasi. Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan mengemukakan bahwa, Belanja atau biaya diklasifikasikan menurut penggunaan belanja/ biaya dirinci berdasarkan kelompok jenis belanja/ biaya, sedangkan pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah. (Bastian, 2002).

Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 terdiri atas: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu belanja atau pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos belanja untuk membiayai

pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang: berbagai macam subsidi, angsuran, dan lain-lain. Sedangkan belanja atau pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik.

Sistem penganggaran Kep-mendagri nomor 29 tahun 2002 pada pasal 6 mengklasifikasi belanja daerah dalam dua klasifikasi utama yaitu pertama, Belanja daerah yang terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik. Kedua, masing-masing belanja dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. Menurut Halim (2004), belanja daerah digolongkan menjadi 4, yakni: belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.Program dan kegiatan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam dua urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, social, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistic, arsip dan komunikasi dan informatika. Sedangkan urusan pilihan pemerintah mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai ,belanja barang dan jasa ,belanja modal. Sdangkan Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun asset.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basi, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bunga untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Naskah perjanjian hibah daerah.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas model atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, dan yang bisa menaikkan produktifitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru,inovasi dan kemajuan teknologi.

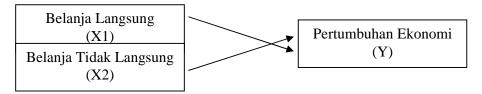
Model Pertumbuhan Ekon Menurut Lincolin Arsyad (2005:7) pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan PDB/ PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Model pertumbuhan ekonomi wilayah secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu peningkatan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang bersifat perubahan kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data pendapatan atau pendapatan perkapita (Nanga 2001:279).

Model pertumbuhan neoklasik solow merupakan penggabungan input modal (K),Tenaga Kerja (L) dan kemajuan teknologi/efisiensi tenaga kerja (A). Teknologi/efisiensi unit tenaga kerja (AL) merupakan variabel abstrak yang melekat pada variabel tenaga kerja. Variabel AL mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode produksi yang sejalan dengan peningkatan teknologi produksi (Herlambang 2002:83).

Model pertumbuhan solow menyatakan bahwa kelanjutan pertumbuhan output efektif harus berasal dari kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen,tetapi modelsolowtidakdapat menjelaskan secara spesifik dari mana kemajuan teknologi tersebut (Mankiw 2000:108). Untuk membantu menjelaskannya maka muncul teori pertumbuhan endogen(*endogenous growth theory*/new growth theory) atau model pertumbuhan AK tanpa diminishinr eturns (Budiono,2001).Skema Hubungan Antara Belnja langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa diduga belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan menggunakan data dalam bentuk angka, mengenai belanja langsung dan tidak langsung serta Produk Domestik Regional bruto Kabuapten Minahasa Untuk menganalisis data digunakan Penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2010:100) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Periode waktu penelitian dimulai dari September sampai dengan November 2013.

Penulis melakukan kajian awal dengan melakukan studi literatur baik studi kepustakaan maupun membaca melalui internet. Kemudian melakukan pengidentifikasian tentang masalah, merumuskannya, menetapkan tujuan/ manfaat penelitian, kemudian membatasi masalah ke lingkup yang disesuaikan dengan penelitian saat ini. Perancangan dan persiapan survai pada objek penelitian yang telah ditentukan, kemudian pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Melakukan pengolahan data, membahasnya kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran guna melengkapi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diproses dengan pengumpulan data yaitu mendatangi langsung ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Minahasa dan Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa untuk mengambil data sekunder. Selain itu digunakan juga metode studi kepustakaan dan pencarian data tambahan melalui internet.

Model analisis yang digunakan adalah Analisis regresi berganda dan Analisis regresi sederhana, dengan menggunakan program komputer SPSS versi 20.0. Adapun formula untuk metode Analisis Regresi Berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 X + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 2 + e$$

Dimana:

Y = PDRB

 X_1 = Belanja langsung X_2 = Belanja tidak langsung

 β_{0} = Konstanta

 β_{1-2} = Koefisien parsial untuk masing-masing variabel X_1, X_2

Pengujian Asumsi Klasik dalam penelitian ini diawali dengan Uji normalitas yang bertujuan untuk menguji, apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen,keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak,dengan melihat grafik normal P-P Of Regression Standard-ized residual menggambarkan penyebaran data disekitar garis diagonal yang penyebaranya mengikuti arah garis diagonal grafik. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari

residual pada model regresi. Multikolinearitas dapat dideteksi pada model regresi apbila variabel terdapat pasangan variabel bebas yang saling berkorelasi kuat satu sama lain. Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu, secara umum dengan menggunakan angka Durbin-Watson biasa diambil patokan:

Angka D-W di bawah - 2 berarti ada autokorelasi positif.

Angka D-W diantara - 2 sampai + 2 berarti tidak ada autokorelasi.

Angka D-W diantara + 2 ssampai + 2 berarti ada autokorelasi.

Selanjutnya Uji Asumsi Klasik menggunakan Uji T adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri dengan kriteria pengujian apabila signifikan < 0.05 maka $H_{\rm o}$ ditolak, $H_{\rm a}$ diterima atau apabila signifikan > 0.05 maka $H_{\rm o}$ diterima $H_{\rm a}$ ditolak. a.Merumuskan Hipotesis

- Ho: $_1 = 0$, Artinya variabel belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa
- Ha: 1 0, Artinya variabel belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa
- Ho : $_2 = 0$, Artinya variabel belanja tidak langsung tidak berpengaruh tehadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa.
- Ha: $_2$ 0, Artinya variabel belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa

Jika tingkat signifikansi/probabilitas $t_{hitung} \le 0.05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, dan jika signifikansi/probabilitas $t_{hitung} \ge 0.05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Kemudian dilanjutkan dengan Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkahnya adalah Merumuskan hipotesis

- Ho: 1, 2=0 Belanja langsung dan belanja tidak langsung secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa.
- Ha: 1, 2, 0 Belanja langsung dan belanja tidak langsung secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa
- Jika tingkat signifikansi/probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima dan jika tingkat signifikansi/probabilitas < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak.

Adapaun Definisi dan pengukuran Variabel dalam penelitian ini yaitu Belanja Langsung adalah (X_1) adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan., yang diukur dengan satuan rupiah (Rp) per tahun..Belanja Tidak Langsung (X_2) adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang diukur dengan dengan menggunakan satuan rupiah (Rp) per tahun.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa dengan kata lain pertumbuhan ekonomi menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya yang diukur dengan menggunakan santuan satuan rupiah (Rp) per tahun.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung Kabupaten Minahasa dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Minahasa 2001 – 2012

No	Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	%
1	2001	180,569,919,500,00	-
2	2002	185,750,155,700,00	2.87
3	2003	189,930,391,900,00	2.25
4	2004	193,110,628,100,00	1.67
5	2005	196,290,864,300,00	1.65
6	2006	199,471,100,500,00	1.62
7	2007	202,651,336,700,00	1.59
8	2008	205,831,572,900,00	1.57
9	2009	209,011,809,155,55	1.55
10	2010	213,266,277,546,93	2.04
11	2011	228,655,215,405,00	7.22
12	2012	244,044,153,300,00	6.73

Sumber: Kabupaten Minahasa, 2013

Tabel 4.2 menunjukan bahwa realisasi belanja langsung Kabupaten Minahasa Tahun 2001 sebesar Rp 180.569.919.500.00. Tahun 2002 sebesar 2.87% menjadi Rp 85.750.155.700. Tahun 2003 meningkat sebesar 2.25% menjadi Rp 189.930.391.900.000. 2004 meningkat sebesar 1.67% menjadi sebesar Rp 193.110.628.100.000. Tahun 2005 meningkat sebesar 1,65% menjadi menjadi Rp 196.290.864.300.000. Tahun 2006 meninkat sebesar 1.62% menjadi Rp 199.471.100.500. Tahun 2007 kembali naik 01.59% menjadi Rp 202.651.336.700.00. Tahun 2008 meningkat 1,57% menjadi Rp 205.831.572.900.00. Tahun 2009 meningkat 1.55% menjadi Rp 209.011.809.155.00. Tahun 2010 meningkat 2,04% menjadi Rp 213.266.277.546 dan tahun 2011 kembali meningkat 7.22% menjadi Rp 228.655.215.405 serta tahun 2012 meningkat 6.73% menjadi Rp 244.044.153.300.000.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung Kabupaten Minahasa dapat dilihat dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Minahasa 2001–2012

No	Tahun	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	%
1	2001	80,120,590,000,00	-
2	2002	112,010,118,430,00	27.11
3	2003	142,814,336,450,00	27.50
4	2004	173,618,554,460,00	21.57
5	2005	204,422,772,470,00	17.74
6	2006	235,226,990,200,00	15.07
7	2007	260,226,255,700,00	10.69
8	2008	290,228,514,200,00	39.94
9	2009	332,250,772,735,00	14.48
10	2010	397,578,637,383,00	19.66
11	2011	437,093,803,686,00	9.99
12	2012	476,608,969,900,00	8.04

Sumber: Kabupaten Minahasa, 2013

Tabel 4. menunjukan bahwa realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Minahasa Tahun 2001 sebesar Rp 88.120.590.000. Tahun 2002 meningkat sebesar 27.11% menjadi Rp 112.010.118.430. Tahun 2003 meningkat sebesar 27.50% menjadi Rp 142.814.336.450. Tahun 2004 meningkat sebesar 21.57% menjadi Rp 173.618.554.460. Tahun 2005 meningkat 17.74% menjadi Rp 204.422.772.470. Tahun 2006 meningkat 15.07% menjadi 235.226.990.200. Tahun 2007 meningkat sebesar 10.63% menjadi Rp 260.226.255.700. Tahun 2008 meningkat 11.53% menjadi Rp 290.228.514.200. Tahun

2009 meningkat 14.48% menjadi Rp 332.250.772.735. Tahun 2010 meningkat 19,66% menjadi Rp 397.578.637.383 dan tahun 2011 meningkat 9,94% menjadi Rp 437.093.803.686 serta tahun 2012 meningkat 9.04% menjadi Rp 476.608.969.900.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan didalam negara tersebut. Jadi ini dapat artikan bahwa PDRB adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan didalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tersebut Tabel 4.4. akan menjelaskan jumlah PDRB Kabupaten Minahasa Tahun 2001-2012

Tabel 5. PDRB Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun – 2012 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRE	3 (Juta Rp)
NO	Tanun	ADHB	ADHK
1	2001	1.652.225	1.008.175
2	2002	1.877.354	1.039.352
3	2003	2.031.550	1.094.054
4	2004	2.397.750	1.151.636
5	2005	2.441.598	1.175.182
6	2006	2.596.207	1.253.214
7	2007	2.732.959	1.443.972
8	2008	2.941.851	1.697.695
9	2009	3.764.328	1.764.328
10	2010	4.337.529	2.116.994
11	2011	4.882.871	2.531.555
12	2012	5.134.671	2.397.906

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa, 2013

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa, terus menurus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini terlihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 12 tahun terakhir atas dasar harga berlaku, dimana angka PDRB tahun 2001 sebesar Rp 1.652.225 juta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 5.134.671 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2001 sebesar Rp 1.008.175 juta, pada tahun 2011 naik menjadi Rp 2.531.555 juta serta tahun 2012 sebesar Rp 2.397.906 juta.

Adapun hasil dari Uji normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test .Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 6.Hasil Pengujian Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		b.langsung	b.t.langsung	PDRB
N		12	12	12
Normal Parameters(a,b)	Mean	26.8057	26.2462	28.0115
	Std. Deviation	1.81207	.58413	.31524
Most Extreme Differences	Absolute	.460	.135	.188
	Positive	.460	.135	.188
	Negative	312	124	129
Kolmogorov-Smirnov Z		1.593	.468	.652
Asymp. Sig. (2-tailed)		.012	.981	.789

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Berdasarkan tabel ini maka terlihat bahwa nilai uji Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa nilai uji masing-masing variabel adalah 0.12 belanja langsung, 0.981 belanja tidak langsung, dan 0,789 PDRB . Nilai Kolmogorov-Smirnov masing-masing varibale tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.

Hasil analisis regresi berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai Koefisien dan Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Т	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.044	2.819		6.046	.000
	b.langsung	.380	.037	.220	1.042	.324
	b.t.langsung	.379	.114	.702	3.327	.009

a Dependent Variable: PDRB

Persamaan regresi dari penelitian ini adalah Y=17,044+0,038X1+0,379~X2~X1 Nilai konstanta sebesar 17,044 mengandung arti bahwa jika nilai belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah sebesar 0, maka PDRB akan sebesar Rp.17.044 Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,038 mengandung arti bahwa jika belanja langsung bertambah sebesar Rp.1.000.000 maka PDRB akan bertambah sebesar Rp 380.000. Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,379, mengandung arti bahwa jika belanja tidak langsung bertambah Rp.1.000.000 maka PDRB juga akan bertambah sebesar Rp.379.000 ceteris paribus.

Nilai thitung belanja langsung adalah 1.042 nilai t hitung belanja tidak langsung adalah 3,327. Nilai t tabel adalah 1,833 yang diperoleh dengan Alpha 5% dan df sebesar yakni (12-2-1). Pada sisi yang lain nilai signifikansinya (Sig) belanja langsung 0,324 dan belanja tidak langsung 0,009.untuk koefisien belanja langsung nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel dan nilai sig lebih besar dari alpha berarti Ho diterima. Dan hal ini bahwa belanja langsung tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap PDRB. Untuk koefisien belanja tidak langsung nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dan nilai sig lebih kecil dari nilai alpha berarti Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa belanja tidak langsung memiliki pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri terhadap PDRB.

Tabel 8 Uji Korelasi, Kontribusi, dan Pengaruh Simultaan

Mod el	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F	Sig F Change
61	.802	.644	.564	.20804	8.129	0.010

a Predictors: (Constant), b.t.langsung, b.langsung

b Dependent Variable: PDRB

Nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0.802. Besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai variabel bebas dengan PDRB sebagai avariable terikat adalah sangat erat dan besifat positif. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,644 atau 60 persen. Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 60 persen mengandung arti bahwa kontribusi atau sumbangan variable belanja langsung dan belanja tidak langsung secara bersama-bersama terhadap PDRB adalah sebesar 60 persen sedangkan sisanya 40 persen disumbangkan oleh variabel lain. Nilai F hitung sebesar 121,184 degan signifikansi 0,010. Nilai Ftabel 5 %, dengan jumlah variabel bebas (v1) = 2 dan jumlah sampel 12, maka diperoleh nilai Ftabel 3,89. Nilai Fhitung (8.129) lebih besar dari nilai Ftabel (3,89).

Berdasarkan hasil uji F maka variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung secara bersamasama (simultan) memiliki pengaruh terhadap PDRB sebagai variabel terikat.

Untuk Uji Multikolinearitas adalah sebagai berikut

Tabel 8. Korelasi antara Variabel Bebas yang digunakan dalam Penelitian Coefficient Correlations(a)

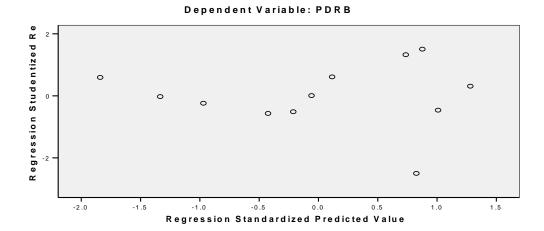
	Model	Belanja tidak langsung	Belanja langsung
Korelasi	Belanja tidak langsung	1.000	332
	Belanja langsung	332	1.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2013

Berdasarkan hasil perbaikan model penellitian sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.2.3 diatas maka variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi penelitian adalah variabel belanja tidak langsung dan variabel belanja langsung. Hal ini didasarkan pada hasil uji korelasi yang menunjukkan besarnya korelasi antara kedua variabel bebas tersebut adalah -0.332 atau lebih kecil dari 0,5. Aturan dalam program SPSS bahwa jika korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,5 maka kedua variabel tersebut tidak mengandung multikolinearitas (Ashari & Santoso, 2007 : 240).

Untuk Uji Heterokedastisitas adalah sebagai berikut Variabel bebas penelitian yang telah bersih dari gejala multikolinearitas (variabel modal kerja dan variabel pengalaman kerja) diuji kembali dengan pengujian heterokedastisitas. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Scatterplot



Gambar Kurva Uji Heterokedastisitas Hasil Model Penelitian

Berdasarkan gambar Kurva uji *heterokedastisitas* hasil perbaikan model maka terlihat penyebaran residu adalah tidak teratur dengan plot yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas dalam model penelitian, sehingga dengan demikian persamaan regresi yang akan digunakan telah memenuhi asumsi *heterokedastisitas* yakni varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki kesamaan atau tidak membentuk pola tertentu sebagaimana yang terlihat dalam *scatterplot* tersebut diatas.

Untuk Uji Autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Hasil Pengujian Autokorelasi

				Adjusted R	Std. Error of the	
	Model	R	R Square	Square	Estimate	Durbin-Watson
ĺ	1	.802	.644	.546	.20804	1.027

a Predictors: (Constant), b.t.langsung, b.langsung

b Dependent Variable: PDRB

Dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,027. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 12, serta k = 2 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 0,812 dan dU sebesar 1,579 (lihat lampiran). Karena nilai DW (1,027) berada pada daerah antara dL dan dU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (berada di daerah keragu-raguan).

D. KESIMPULAN

- 1. Hasil analisis menunjukan bahwa belanja langsung kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa .
- 2. Belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa.
- 3. Secara bersama-sama atau simultan belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa

DAFTAR PUSTAKA

Bastian Indra 2002, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga,

Budiono Arif, 2001. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia.

Herlambang, Mardiasmo dan Kirana Jaya. 2002. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*, Jurnal Akuntansi, Manajemen, da n Sistem Informasi STIE "YO", No. 21. Yogyakarta

Kainde, Christian 2013 Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Bitung. Jurnal Emba Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 393-400. ISSN 2303-1174 Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 Tentang Belanja Daerah

Mankiw, N. Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi. Ed. 4, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo 2002, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Kabupaten Minahasa. Jurnal Emba Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 171-180. ISSN 2303-1174

Todaro Michael. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan,

Todaro Michael dan Stephen C. Smith. 2004. *Economic Development seventh edition*, Longman Inc, England.

Vegirawati. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan). Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi. Volume 2 No 1. Januari 2011

ANALISIS DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH DI KOTA MANADO

Deasyrein Deborah Lantang, Amran Naukoko dan Richard Tumilaar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Samratulangi, Manado email: deasyrein lantang@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor dan Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil Penelitian melalui analisis deskriptif menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Manado, karena semakin besar DAU, maka belanja daerah diprediksiakan semakintinggi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Manado, karena PAD merupakan salah sumber pembelanjaan daerah.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the value of the growth of the general allocation fund, local revenue and it's impact on regional spending Manado. Data used in this study is secondary data obtained from the Office and the Office of Financial Management, Asset and Revenue regional Manado analytical method used is descriptive. Analysis results through descriptive analysis showed that the effect on the General Allocation Fund expenditure Manado, because the greater the DAU, the shopping area predicted more high local Revenue expenditure affect the Manado City, because PAD is one source of local spending.

Keyword: General Allocation Fund, Local Revenue, Expenditure

A. PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2005: 18). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Pembangunan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Selain itu, otonomi daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri. Pembangunan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Selain itu, otonomi daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri.

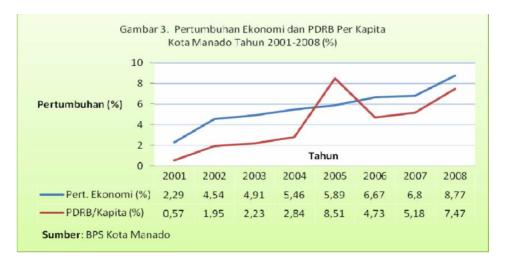
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber utama bagi pendapatan daerah dalam rangka keseimbangan secara vertikal dan horisontal. Dana Alokasi Umum berkontribusi rata-rata 80% bagi penerimaan daerah kabupaten/kota dan 30% bagi penerimaan propinsi setiap tahunnya. Porsi Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah akan secara bertahap akan berkurang seiring dengan tuntutan untuk semakin meningkatkan kemandirian daerah. Tentu hal ini bukan merupakan perkara yang mudah, tapi menjadi tantangan besar bagi daerah, sebab jangan sampai demi desentralisasi dan otonomi daerah justru akan menjadi beban baru bagi kaum miskin. Karena bisa dipastikan bahwa ketika pemerintah pusat mengurangi porsi bagi daerah, maka dengan sendirinya pemerintah daerah akan menyiapkan berbagai regulasi yang bisa meningkatkan pendapatan daerahnya termasuk dari pajak dan retribusi Waluyo, 2007.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan baik aspek mikro maupun makronya peran pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek regulasi/kebijakan pembangunan daerah, di dalam hal ini kemampuan mengelola anggaran daerah. Untuk itu dibutuhkan *good will* pemerintah daerah dalam menjalankan atau mengendalikan anggaran daerah secara efektif dan efisien. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya dan pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik.

Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2002). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya anggaran belanja modal merupakan

prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapuita Kota Manado Tahun 2001-2008

Kota Manado dalam rangka meningkatkan pertumbuhan otonomi daerah yang lebih nyata, maka berbagai sumber/faktor dan sub sektor yang turut menunjang pendapatan daerah. Ekonomi makro Kota Manado menunjukan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh dengan rata-rata di atas 5% selama lima tahun terakhir. Seiring dengan tingginya pertumbuhan perekonomian Manado, pendapatan masyarakat yang terlihat dari PDRB dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan hamper 4,84 % per tahun menurut harga konstan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1 Belanja Daerah Kota Manado 2008 - 2012

No	Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Persentase (%)
1	2005	55,351,111,000	-
2	2006	60,321,251,000	8.98
3	2007	65,321,250,000	8.29
4	2008	70,351,475,000	7.70
5	2009	75,050,325,000	6.68
6	2010	88,354,654,000	17.73
7	2011	110,354,989,000	24.90
8	2012	157,634,467,000	42.84

Sumber: Dispenda Kota Manado 2013

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2005 hingga 2012 terjadi peningkatan jumlah belanja daerah Kota Manado. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah Kota Manado memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Belanja daerah di masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat. Berikut akan disajikan mengenai PAD, Dana Alokasi Umum Kota Manado periode 2005 hingga 2012.

No Tahun PAD (Rp) DAU (Rp) 1 2005 58,347,351,100 357,555,687,000 2 2006 60,534,411,587 386,354,768,000 3 2007 64,715,561,525 408,354,000,000 4 2008 73,481,423,371 430,073,269,000 5 2009 78,205,183,422 450,759,580,000 2010 90,828,463,200 460,481,311,000 6 2011 134,721,720,942 480,454,130,000 7 2012 178,429,310,832 579,989,312,000

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kota Manado 2008 - 2012

Sumber: Dispenda Kota Manado 2013

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka Pemerintah memberikan Dana Perimbangan. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah.

Hasil riset yang dilakukan oleh Adi (2006) mengindikasikan bahwa proporsi Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya proporsi Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat. Fakta ini tidak mencerminkan timbulnya kemandirian sebagaimana tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil (Harianto dan Priyo, 2010).

Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya bahkan antara negara satu dengan Negara lain. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product (GNP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu Propinsi, Kabupaten atau Kota. Definisi pembangunan tradisional ini sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara menjadi negara industrialisasi. Kontribusi sektor pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Jelasnya bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang *multidimensional*.

Menurut Mamesah (2007:23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasi oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Halim (2002 : 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD (Saragih, 2003:12).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari penerimaan pajak, retribusi daerah, Laba usaha Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan. Penerimaan rutin daerah yang berasal dari pungutan (pajak, retribusi) dan hasil dari perusahaan daerah lainnya serta hasil usaha daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari penerimaan pajak, retribusi daerah, Laba usaha Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan. Penerimaan rutin daerah yang berasal dari pungutan (pajak, retribusi) dan hasil dari perusahaan daerah lainnya serta hasil usaha daerah yang sah.

Saragih (2003 : 15), peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya PEMDA lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi. Adapun rumus Pendapatan Asli Daerah menurut Mahmudi (2007 : 68) sebagai berikut :

PAD =

Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi daerah + Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber utama bagi pendapatan daerah dalam rangka keseimbangan secara vertikal dan horisontal. Dana Alokasi Umum berkontribusi rata-rata 80% bagi penerimaan daerah kabupaten/kota dan 30% bagi penerimaan propinsi setiap tahunnya. Porsi Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah akan secara bertahap akan berkurang seiring dengan tuntutan untuk semakin meningkatkan kemandirian daerah.

Tentu hal ini bukan merupakan perkara yang mudah, tapi menjadi tantangan besar bagi daerah, sebab jangan sampai demi desentralisasi dan otonomi daerah justru akan menjadi beban baru bagi kaum miskin. Karena bisa dipastikan bahwa ketika pemerintah pusat mengurangi porsi bagi daerah, maka dengan sendirinya pemerintah daerah akan menyiapkan berbagai regulasi yang bisa meningkatkan pendapatan daerahnya termasuk dari pajak dan retribusi Waluyo, 2007. Termasuk dari pajak dan retribusi Waluyo, 2007.

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat mengharapkan daerah dapat mengelolah sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengharapkan Dana Alokasi Umum. Di beberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (Sidik, 2002).

Salah satu fungsi DAU adalah untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah yang ada, sehingga distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar PEMDA di Indonesia

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa APBN Merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Undang-Undang dan didalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

Menurut Mamesah (2007; 19) APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan keuangan pengeluaran se-tinggi-tingginya guna membiayai kegiatan – kegiatan dan proyek- proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran tersebut.

Marthos (2007 : 2) menjelaskan bahwa penyusunan APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karena itu APBD sangat perlu untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan daerah sehingga pemerintah dapat menghimpun tabungan pemerintah yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan. Wong (2004 : 82) APBD adalah suatu rencana pekerjaan keuangan (Financial Work Plan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu dalam waktu di mana badan legislatif memberikan kredit kepada badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah t angga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Mokoginta (2005 : 22) Pada hakekatnya APBD merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu DPRD dan pemerintah harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensinya masingmasing. Dengan demikian hak—hak masyarakat sebagai konsekuensi kewajibannya membayar pajak, retribusi dan lain-lain yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik sesuai kebijakan ekonomi dan kebutuhan daerah yang peka terhadap aspirasi masyarakatnya.

Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 (ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pada pasal (huruf q) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan..

Bastian (2006) yang mengemukakan bahwa Belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri.

Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13/2006 terdiri atas: belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu belanja atau pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Belanja rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos belanja untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang: berbagai macam subsidi, angsuran, dan lain-lain. Sedangkan belanja atau pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik.

Belanja aparatur daerah adalah belanja yang berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/ pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) sedangkan belanja pelayanan publik adalah belanja yang berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/ pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap peneriman daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari Pemerintah Pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat *retribusi* lebih relevan dibanding pajak. Alsan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002). Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3 % merupakan retribusi (Lewis, 2003). Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Manado dan bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah Kota Manado?

Adapun yang menjadi tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui besarnya analisis pertumbuhan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli daerah dan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kota Manado melalui analisis deskriptif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Manado Periode waktu penelitian dimulai dari September sampai dengan November 2013. Penulis melakukan kajian awal dengan melakukan studi literatur baik studi kepustakaan maupun membaca melalui internet. Kemudian melakukan pengidentifikasian tentang masalah, merumuskannya, menetapkan tujuan/ manfaat penelitian, kemudian membatasi masalah ke lingkup yang disesuaikan dengan penelitian saat ini. Perancangan dan persiapan survai pada objek penelitian yang telah ditentukan, kemudian pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Melakukan pengolahan data, membahasnya kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran guna melengkapi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series) dari tahun 2001-2012 Data Sekunder adalah data yang di ambil dari instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado dan Dispenda Kota Manado Jenisjenis data sekunder antara lain: PAD Kota Manado dan APBD Kota Manado. Sehubungan dengan aktifitas usaha untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian, dengan cara pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan instansi terkait dengan penelitian ini mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Metode Penelitian Kepustakaan yaitu pengumpulan data dari beberapa literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi dan akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelititian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukisjan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga ditarik suatu kesimpulan.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan dinyatakan dalam satuan Rupiah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah Kota Manado dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah Kota Manado dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang diukur dalam satuan rupiah.

Belanja daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah daerah Kota Manado yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan didaerah tersebut, yang diukur dalam satuan rupiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Manado mulanya dikenal dengan nama Wenang yaitu nama sejenis pohon kayu yang banyak terdapat pada saat itu yang dalam bahasa ilmiah disebut *Mancarangan Hispida, sp.* Batang pohon tersebut sering digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan alat musik tradisional Minahasa yang disebut kolintang. Wilayah Kota Manado berdasarkan perkembangan wilayah sejak berdirinya, yaitu pada tanggal 14 Juli 1963 sampai saat ini telah mengalami dua fase perkembangan kota. Sebelum mengalami perkembangan wilayah yang berdasarkan pada PP No. 22 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Manado dan Kabupaten Minahasa yang dijabarkan melalui INMENDAGRI No. 189 Tahun 1989 Jo SK Gubernur Sulut No. 188 Tahun 1989 Luas Kota Manado 2.369 Ha menjadi 15.726 Ha. Wilayah administrasi kecamatan terdiri 5 (lima) kecamatan yaitu : Kecamatan Molas, Malalayang, Mapanget, Wenang dan Sario dengan 46 Kelurahan dan 22 Desa.

Pada tahun 2000 melalui Perda No. 04 tanggal 27 September 2000 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan di Kota Manado dan Perda No. 5 Tanggal 27 September 2000 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan, maka wilayah administrasi kecamatan menjadi 9 kecamatan dan 87 (delapan puluh tujuh) kelurahan. Luas wilayah kecamatan dan jumlah kelurahan di Kota Manado dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Manado

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kelurahan
1	Bunaken	5.212,50	8
2	Tuminting	700,17	10
3	Singkil	587,13	9
4	Wenang	279,50	12
5	Tikala	1.558,40	12
6	Sario	144,80	7
7	Wanea	659,95	9
8	Malalayang	1.640,00	9
9	Mapanget	4.913,55	11
	Jumlah	15.726,00	87

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kota Manado Tahun 2012

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber utama bagi pendapatan daerah dalam rangka keseimbangan secara vertikal dan horisontal. Menurut UU No 33 tahun 2004 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Adapun Dana Alokasi Umum Kota Manado Tahun 2001-2012 dapat diliohat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Manado 2001 – 2012

No	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp)	Persentase
			(%)
1	2001	225,602,900,000	-
2	2002	261,590,125,000	3.09
3	2003	293,579,313,000	12.23
4	2004	325,567,500,000	10.90
5	2005	357,555,687,000	9.83
6	2006	386,354,768,000	8.05
7	2007	408,354,000,000	5.69
8	2008	430,073,269,000	5.32
9	2009	450,759,580,000	4.81
10	2010	460,481,311,000	2.16
11	2011	480,454,130,000	4.34
12	2012	579,989,312,000	20.72

Sumber: Dispenda Kota Manado 2013

Tabel 4.2 menunjukan bahwa realisasi Dana Alokasi Umum Kota Manado Tahun 2001 sebesar Rp 225.602.900.000. Tahun 2002 meningkat 3.09% menjadi Rp 261.590.125.000. Tahun 2003 meningkat 12.26% menjadi Rp 293.579.313.000. Tahun 2004 meningkat 10.94% menjadi Rp 325.567.500.000. Tahun 2005 meningkat 9.83% menjadi Rp 357.555.687.000. Tahun 2006 meningkat 8.05% menjadi Rp 386.354.768.000. Tahun 2007 meningkat 5.69% menjadi Rp 408.354.000.000. Tahun 2008 meningkat 5.32% menjadi Rp 430.073.269.000. Tahun 2009 naik 4.81% menjadi Rp 450.759.580.000. Tahun 2010 meningkat 2.16%. menjadi Rp 460.481.311.000, tahun 2011 naik 4.34% menjadi Rp 480.454.130.000 dan tahun 2012 meningkat 20.72% menjadi Rp 579.989.312.000.

Realisasi DAU Kota Manado cenderung naik setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi karena Pemerintah Pusat memberikan dana yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah selanjutnya yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Tujuannya memeberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi PAD Kota Manado terdiri dari sumber-sumber penerimaan sebagai berikut Pajak, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari keempat sumber penerimaan tersebut maka terbentuknya PAD Kota Manado sebagai berikut :

Tahun PAD (Rp) No Persentase (%) 1 2001 47,621,187,130 2 2002 50,626,896,170 3.09 3 2003 51,632,605,210 1.99 4 2004 52,638,314,250 1.95 5 2005 58,347,351,100 10.85 2006 60,534,411,587 3.75 6 7 2007 64,715,561,525 6.91 8 73,481,423,371 13.56 2008 9 2009 78,205,183,422 6.43 10 2010 90,828,463,200 16.14 11 2011 134,721,720,942 48.33 12 2012 178,429,310,832 32.44

Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Manado 2001 – 2012

Sumber : Dispenda Kota Manado 2013

Tabel 4.3 menunjukan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2001 sebesar Rp 47.621.187.130. Tahun 2002 meningkat 3.09% menjadi Rp 50.626.896.170. Tahun 2003 meningkat 1.99% menjadi Rp 51.632.605.210. Tahun 2004 meningkat 1.95% menjadi Rp 52.638.314.250. Tahun 2005 meningkat 10.85% menjadi Rp 58.347.351.100. Tahun 2006 meningkat 3.75% menjadi Rp 60.534.411.587. Tahun 2007 meningkat 6.97% menjadi Rp 64.715.561.525. Tahun 2008 meningkat 13.55% menjadi Rp 73.481.423.371. Tahun 2009 meningkat 6.43% menjadi Rp 78.205.183.422. Tahun 2010 nmeningkat 16.14%. menjadi Rp 90.828.463.200, tahun 2011 meningkat 48.33% menjadi Rp 134.721.720.942 dan tahun 2012 meningkat yaitu 32.55% menjadi Rp 178.429.310.832.

Pada Tahun Anggaran 2004, PAD hanya meningkat 1,95% karena masih banyaknya potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal, badan usaha milik daerah belum memberikan bagian laba kepada pemerintah daerah dan masih kurangnya kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, masih terdapat kebocoran-kebocoran yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman atas penatausahaan penerimaan daerah oleh aparat pemungut karena belum memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Pada Tahun Anggaran 2013, realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar 48,33% dikarenakan adanya sarana mobilitas (kendaraan dinas) bagi petugas guna meningkatkan pembinaan kepada para wajib pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga akan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Realisasi belanja daerah Kota Manado dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Daerah Kota Manado 2001 – 2012

No	Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Persentase (%)
1	2001	27,232,095,000	-
2	2002	34,261,849,000	3.09
3	2003	41,291,603,000	20.52
4	2004	48,321,357,000	17.02
5	2005	55,351,111,000	14.55
6	2006	60,321,251,000	8.98
7	2007	65,321,250,000	8.29
8	2008	70,351,475,000	7.70
9	2009	75,050,325,000	6.68
10	2010	88,354,654,000	17.73
11	2011	110,354,989,000	24.90
12	2012	157,634,467,000	42.84

Sumber: Dispenda Kota Manado 2013

Tabel 4.4 menunjukan bahwa realisasi Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2001 sebesar Rp 27.232.095.000. Tahun 2002 meningkat 3.09% menjadi Rp 34.261.849.000. Tahun 2003 meningkat 20.52% menjadi Rp 41.291.603.000. Tahun 2004 meningkat 17.02% menjadi Rp 48.321.357.000. Tahun 2005 meningkat 14.55% menjadi Rp 55.351.111.000. Tahun 2006 meningkat 8.98% menjadi Rp 60.321.251.000. Tahun 2007 meningkat 9.29% menjadi Rp 65.321.250.000. Tahun 2008 meningkat 7.70% menjadi Rp 70.351.475.000. Tahun 2009 meningkat 6.68% menjadi Rp 75.050.325.000. Tahun 2010 meningkat 17.73%. menjadi Rp 88.354.654.000, tahun 2011 meningkat 24.90% menjadi Rp 110.354.989.000 dan tahun 2012 naik yaitu 42.84% menjadi Rp 157.634.467.000.

Belanja daerah Kota Manado mengalami kenaikan dalam periode tahun 2010-2013 karenas dana yang ada digunakan untuk belanja operasi diantaranya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga. Namun pada tahun anggaran serta dana yang tersedia pada APBD tahun berjalan diprioritaskan untuk pengadaan aset tetap.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelen ggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.

Realisasi DAU, PAD dan belanja daerah Kota Manado dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tahun DAU (Rp) Belanja Daerah (Rp) No PAD (Rp) 225,602,900,000 47,621,187,130 27,232,095,000 1 2001 2 2002 261,590,125,000 50,626,896,170 34,261,849,000 3 2003 293,579,313,000 51,632,605,210 41,291,603,000 4 2004 325,567,500,000 52,638,314,250 48,321,357,000 5 2005 357,555,687,000 58,347,351,100 55,351,111,000 6 2006 386,354,768,000 60,534,411,587 60,321,251,000 7 2007 408,354,000,000 64,715,561,525 65,321,250,000 2008 430,073,269,000 73,481,423,371 8 70,351,475,000 450,759,580,000 75,050,325,000 9 2009 78,205,183,422 10 2010 460,481,311,000 90,828,463,200 88,354,654,000 2011 480,454,130,000 134,721,720,942 110,354,989,000 11 12 2012 579,989,312,000 178,429,310,832 157,634,467,000

Tabel 4.5 DAU, PAD dan Belanja Daerah Kota Manado 2001 – 2012

Sumber: Dispenda Kota Manado 2013

Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa tingginya proporsi Dana Alokasi UMUM dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah, karena semakin besar DAU, maka belanja daerah diprediksi akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan pem penelitianoleh Prakosa (2004), Abdullah dan Susilo dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Kebijakan pengalokasian anggaran belanja daerah terkait dengan sumber pendapatan atau pendanaan yang tersedia. Besaran belanja daerah berasosiasi dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, tapi tidak dengan pendapatan sendiri (PAD).

Pendapatan Asli Daerah PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Kebijakan alokasi wajib (*earmarking*) yang termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat 'memaksa' daerah dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang tertentu.

Akan tetapi, Kota Manado belum menerapkan aturan tersebut pada tahun anggaran 2011. Misalnya, belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan seharusnya dibiayai oleh 10% dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai komponen dari PAD. Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber -sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002). PAD merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi - potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006).

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Manado, karena semakin besar DAU, maka belanja daerah diprediksi akan semakin tinggi
- 2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Manado, karena PAD merupakan salah sumber pembelanjaan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. (2010). *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Jurnal yang disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Lewis Wajong . (2003). Administrasi Keuangan Daerah, Penerbit Ictiar, Jakarta.
- Mamesah. (2007), *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Garamedia Pustaka Utama Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Mokoginta. (2005) .Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fisikal (Antara Teori Dan Aplikasinya di Indonesia), Jogyakarta.
- Prakoso, Kesit Bambang. (2004), Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI Vol.8 No.2, 101-118.
- Saragih, Juli Panglima. (2003), Desentralisasi Fisikal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia
- Suparmoko, M. (2002). Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Andi, Yogyakarta
- Sidik, Machfud. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fisikal(Antara Teori Dan Aplikasinya di Indonesia), Jogyakarta.
- Todaro. M.P & Smith S.C. (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Delapan. Erlangga. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. (2006). *Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah* . www.kardin-indonesia.or.id.
- Wong, John D. (2004. The Fiscal Impact Of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Fall, 16.3. 799-816.
- Waluyo, Joko. (2007). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia. Kampus UI Depok.
- Yani, Ahmad. (2002), *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Rajagrafindo, Jakarta
- Yusuf, Haryono. (2001). Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi Ke-5. Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YPKN
- www/http/ jurnal belanja daerah, ac. id

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI SULAWESI UTARA TAHUN 2010.1-2013.8

Elina Dyah Permata Manoppo, Tri Oldy Rotinsulu dan Albert Londa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado E-mail: manoppoelina@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Kehadiran bank syariah dengan filosofih bebas bunga memiliki signifikasi tersendiri bagi upaya pembangunan ekonomi nasional. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. prinsip-prinsip pembiayaan antara lain adalah bagi hasil (mudharabah,musyarakah,almuzarah),jual beli(bai'al-murabahah, al-bai' naqan, al-bai' muajjal, al-bai' salam,bai' al-istishna) serta sewa menyewa (Ijarah dan IMBT). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis yang digunakan adalah *error correction model* (ECM) yang diolah dengan menggunakan program Eviews 5.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan *Non Performing Loan* dan Inflasi tidak terhadap pembiayaan. Bagi Otoritas Jasa Keuangan agar dapat mengawasi persaingan perbankan.

Kata Kunci : Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Inflasi, ECM

ABSTRACT

Economic development in a country heavily depend on the development of dynamic and real contribution of banking sector. The presence of Islamic banks with philosophy of free from interest rate has own significance national economic development efforts. Financing as a financial institution efforts in the real sector has received high attention from Islamic banking. The principles of financing are profit sharing(mudharabah,musyarakah,al-muzarah),selling(bai'al-murabahah,al-bai' naqan,al-bai'muajjal, al-bai' salam,bai' al-istishna) and renting(ijarah dan IMBT). The data used was a secondary data from Bank Indonesia and Badan Pusat Statistik. The method used was error correction model (ECM) that processed using Eviews 5.1 program. The result showed that third party finds has a significant influence on the financing, at the same time Non Performing Loan and Inflation have not a significant influence on the financing. To Otoritas Jasa Keuangan in order to control banking competation.

Keywords: Financing, Third Party Funds, Non Performing Loan, Inflation, ECM

A. PENDAHULUAN

Bank syariah tumbuh dan berkembang sebagai bagian integral dari sistem keuangan yang diambil dari saripati aturan-aturan syariah (*Islamic jurisprudence*). Kehadiran bank syariah dengan filosofih bebas bunga memiliki signifikasi tersendiri bagi upaya pembangunan ekonomi nasional. Sistem perbankan nasional didominasi sistem bunga yang bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah kebawah merupakan permasalahan yang krusial, karena dibebani oleh pikiran bukan saja pada pengembalian modal pinjaman pokok, tetapi juga pada pengembalian bunga (Antonio,M.1998). Perkembangann perbankan syariah di Indonesia terbilang cukup pesat dengan dibukanya kantor bank syariah yang menjamur disuluruh Indonesia. Pada tahun 2012 perbankan syariah cukup menggembirakan dimana perbankan syariah mampu tumbuh ± 37% sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%, yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan Industri dalam bentuk *iB campaign* baik untuk *funding* maupun *financing* telah mampu memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi ± 4,3% (Islamic Banking Outlook – Bank Indonesia).

Kehadiran bank syariah di Sulawesi Utara dan perkembangannya yang cukup pesat dimana masyarakat yang didominasi oleh non-muslim cukup membuktikan bahwa kinerja dari perbankan syariah telah dipercaya dan saat ini pengguna dari jasa bank syariah tidak hanya sebatas bagi masyarakat Islam saja tetapi bisa dinikmati semua kalangan tanpa ada batasan agama. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 telah beroperasi 3 bank syariah di Sulawesi utara antara lain Bank Mualamat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega syariah. Di tahun 2013 bulan Mei telah dibuka kembali bank yang berbasis syariah yaitu Bank BRI syariah dengan demikian terdapat 4 bank yang syariah yang ada di Sulawesi Utara. Peran perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi tidak lepas dari adanya hambatan yang terjadi dari sisi internal faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan antara lain adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL). Perkembangan bank syariah di Sulawesi Utara selama kurun waktu 4 tahun mengalami perkembangan yang berfluktuasi dilihat dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan rasio pembiayaan yang kurang lancar/macet dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1 Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Sulawesi Utara

Tahun	DPK (RP miliar)	NPL (%)	Pembiayaan (RP miliar)
2010 – 1	83,599	2.06	141,369
2010 –12	125,457	15.39	240,063
2011 – 1	125,819	13.44	237,034
2011 – 12	188,576	1.68	355,479
2012 – 1	185,593	1.94	352,817
2012 – 12	266,311	4.18	472,465
2013 – 1	247,277	4.87	466,348
2013 – 8	188,705	5.74	498,926

Sumber: Bank Indonesia, 2013

Pada tabel diatas jelas terlihat bahwa dana pihak ketiga perkembanngannya cukup baik walaupun pada akhir 2011 dan awal 2012 sempat mengalami penurunan sebesar 2,983 miliar dan pada tahun 2013 Dana Pihak Ketiga turun pada bulan agustus menjadi 188,705 miliar. Pada sisi pembiayaan telihat perkembangan yang lebih baik dimana pembiayaan terus meningkan selama 2010 sampai 2012 dan pada 2013 awal sempat turun namun kembali meningkat pada agustus 2013. Di sisi *Non Performing Loan* terlihat jelas perkembangan yang sangat berfluktuatif dimana seharusmya pihak bank mampu mengcover kredit macet namun terlihat pada 2010 akhir dan 2011 awal presentase *Non Performing Loan* mengalami kenaikan yang sangat tinggi namun pada periode selanjutnya kembali turun dan pada tahun 2012 *Non Performing Loan* bank syariah mulai naik kembali sehingga pada

agustus 2013 presentase *Non Performing Loan* berada pada 5,76% dimana telah berada diatas batas yang telah ditentukan oleh bank Indonesia yaitu 5%.

Selain terdapatnya masalah internal yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan terdapat pula masalah eksternal yang salah satunya dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaam pada bank syariah. Inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi, meskipun dalam sistem perbankan syariah tidak menggunakan sistem suku bunga kredit dimana inflasi sangat menentukan pergerakan suku bunga kredit namun bukan berarti perbankan syariah kebal dengan kenaikan inflasi. Ketika tingkat suku bunga kredit bank konvensional naik otomatis bank kovensional juga menaikkan suku bunga tabungan untuk menjaga kestabilan, hal ini bisa berdampak pada bank syariah dikarenakan masyarakat akan cenderung menabung di bank konvensional. Dengan demikian Dana Pihak Ketiga yang seharusnya bisa diserap oleh bank syariah yang nantinya disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan akan berkurang.

Pembahasan ini akan menguji pengaruh dan hubungan variable-variabel bebas meliputi Dana Pihak ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL) dan Tingkat Inflasi terhadap variable terikat yaitu Pembiayaan pada bank syariah di Sulawesi Utara pada tahun 2010.1-2013.8. Penelitian ini dilandasi berdasarkan teori teori sebagai berikut:

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiataan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. (Kasmir,2012).

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Veitzhal Rivai,2008).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu,dengan imbalan atau bagi hasil. (Veitzhal Rivai,2008).

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendawijaya, 2005).

Non Performing Loan merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2004).Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NPL dirumuskan sebagai berikut :

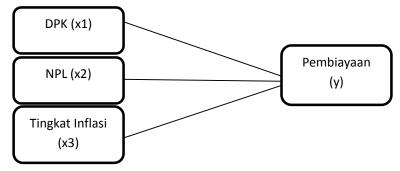


Kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja, menurut definisi ini, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Menurut definisi ini kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi. Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikkan harga-harga umum barang secara terusmenerus (Nopirin, 2009).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan keputusan penyaluran pembiayaan oleh bank yang telah dilakukan. Penelitian tersebut antara lain: Billy Arma Pratama 2009, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan (studi pada bank umum di Indonesia periode tahun 2005-2009). Greydi NormalaSari, 2013 Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum di

Indonesia. Iman Mukhlis, 2011 Penyaluran Kredit Ditinjau Dari jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat *Non Performing Loan*. Mohammad.Hasanudin, 2010 analisis DPK, suku bunga, NPL dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit di BPR di Jawa Tengah. Wuri.Arianti,Analisis 2011. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) Dan *Return on Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011).

Berdasarkan pendahuluan diatas maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), Tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank syariah di Sulawesi Utara dan bagaimana hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), Tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank syariah di Sulawesi Utara.

Adapun hipotesis dari penilitian ini adalah

Ho1 : Di Duga DPK tidak berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan pada Bank Syariah
 Ha1 : Di Duga DPK berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan pada Bank Syariah
 Ho2 : Di Duga NPL tidak bepengaruh secara negatif terhadap pembiayaan pada Bank Syariah

Ha2 : Di Duga NPL bepengaruh secara negatif terhadap pembiayaan pada Bank Syariah

Ho3 : Di Duga Inflasi tidak berpengaruh secara negatif terhadap pembiayaan pada Bank Syariah

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan data bulanan pada rentang waktu Januari 2010 – Agustus 2013. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder *time series*. Sumber data berasal dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan jurnal-jurnal ilmiah serta litelatur-litelatur lain yang berkaitan dengan topic penelitian ini.

Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan model dinamis, yaitu dengan menggunakan model korekasi kesalahan (Error Correction Model/ ECM). Dalam konteks ekonomi, spesifikasi model dinamis penting artinya karena berkaitan dengan pembentukan model dari suatu sistem ekonomi yang berhubungan dengan perubahan waktu (Insukindro, 1991). Model dinamis yang relatif baik untuk digunakan adalah model koreksi kesalahan (ECM), di mana faktor gangguan yang merupakan "equilibrium error" diparameterisasi. Kesalahan ekuilibrium ini dapat digunakan untuk mengkaitkan perilaku jangka pendek terhadap nilai jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi. Bila dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode maka model koreksi kesalahan akan mengoreksi pada periode berikutnya, sehingga mekanisme model koreksi kesalahan dapat diartikan sebagai penyelaras perilaku jangka pendek dan jangka panjang (Insukindro, 1991).

Berkaitan dengan model ECM, berikut ini akan diturunkan rumus umum model ECM. Anggaplah bahwa pembiayaan yang diinginkan dipengaruhi oleh DPK, NPL, Inflasi dan dinyatakan dalam hubungan jangka panjang atau keseimbangan (*long equilibrium relationship*) sebagai berikut:

PPembiayaan_t^{*} =
$$_{0}$$
 + $_{1}$ DPK_t + $_{2}$ NPL_t + $_{3}$ Inflasi_t + € $_{1}$ 0, $_{2}$ > 0, $_{3}$ < 0

Selanjutnya dengan mengikuti pendekatan yang dikembangkan oleh Domowitz dan Elbadawi (1978) dapat dirumuskan fungsi biaya kuadrat periode tunggal (*single quadratic cost function*) sebagai berikut:

Adapun definisi operasinonal untuk variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut :

1. Pembiayaan

Prinsip pembiayaan antara lain Bagi Hasil (Mudharah,Musyarakah,Al-Muzarah), Jual Beli (Bai'Al-Murabahah,Al-Bai'Naqan,Al-Bai'Muajjal,Bai'Al-Istishna), sewa menyewa (Ijarah dan IMBT) (Veitzhal Rivai,2008). Pembiayaan pada akhir bulan dinyatakan dalam Miliar Rupiah Data yang digunakan diperoleh dari Bank Indonesia pada periode 2010.1-2013.8

- 2. Dana Pihak Ketiga (DPK)
 - Menurut SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka (deposito) . sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank syariah pada akhir periode bulan yang dinyatakan dalam Miliar Rupiah. Data yang digunakan diperoleh dari Bank Indonesia pada periode tahun 2010.1-2013.8
- 3. Non Performing Loan (NPL)

Menurut SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Perbandingan antara kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total kredit. Pada akhir periode bulanan yang dinyatakan dalam persentase. Data yang digunakan diperoleh dari kejian ekonomi regional, Bank Indonesia pada periode 2010.1-2013.8

4. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa-jasa secara umum dalam suatu periode biasanya (bukan satu macam barang dan sesaat). Perhitungan laju inflasi disini menggunakan konsep inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) yang dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Data yang digunakan adalah data bulanan dalam persen selama periode penelitian yaitu tahun 2010-.1 - 2013.8. Inflasi yang digunakan adalah inflasi bulanan yang diihitung berdasarkan IHK 2007=100 (dilakukan penyesuaian tahun dasar) (BPS, 2013)

Untuk menguji perilaku data pada penelitian dapat memakai uji Dickey-Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF).

a. Rumus Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

DF tanpa trend dan intercept $Yt = \delta Yt - 1 + ut$ DF dengan intercept $Yt = \beta 1 + \delta Yt - 1 + ut$ DF dengan trend dan intercept $Yt = \beta 1 + \beta 2t + \delta Yt - 1 + ut$ di mana.

di mana:

 $\Delta Yt = Yt - Yt - 1$

Yt = variabel yang diamati pada periode t

ut = unsur pengganggu.

b. Rumus Augmented Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$Yt = \beta 1 + \beta 2T + \delta Yt - 1 + \alpha i$$
 $\lim_{i=1}^{m} Yt - i + ut$ di mana:

Yt = Yt - Yt - 1

M = panjangnya lag yang digunakan

Yt = variabel yang diamati pada periode t

T = trend waktu

ut = unsur pengganggu

Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak adalah dengn membandingkan nilai ADF dengan nilai kritis distribusi MacKinnon. Pengambilan keputusannya adalah apabila ADF hitung dari suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut stasioner, begitu pula sebaliknya.

Cara pengujiannya adalah dengan menguji residualnya berintegrasi atau tidak. Apabila residualnya berintegrasi, berarti data tersebut sudah memenuhi prasyarat dalam pembentukan dan estimasi model dinamis. Untuk melakukan uji kointegrasi dilakukan dengan beberapa macam uji, yaitu: Engle-Granger test (EG), Augmented Engle-Granger (AEG) test, dan Cointegrating Regression Durbin Watson (CRDW). Namun, pada penelitian ini akan menggunakan Engle-Granger test (EG).

Menggunakan uji asumsi klasik antara lain uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan kaidah "auxiliary regression". Penggunaan kaidah ini dilakukan dengan cara meregres masing-masing variabel independen dengan variabel independen yang lain. Apabila hasil dari proses meregres masing-masing variabel independen dengan variabel independen yang lain tersebut menunjukkan adanya nilai R² yang lebih rendah dari R² model utama, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas antar variabel independen. Uji heterokedastisitas salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan menggunakan White Test. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat probabilitas Obs*R-squared. Apabila nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari taraf nyata tertentu maka persamaan tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya. Dan Uji Autokorelasi Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Godfrey, sehingga dikenal juga dengan sebutan The Breusch-Godfrey (BG) Test. Selanjutnya dilakukan Uji Statistik antara lain Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), Nilai Koefisien Determinasi (R²).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Akar Unit (Unit Root Test)

Tabel 2: Uji Akar unit (*Unit Root Test*)

Variabel	Level		First Difference			
	Intercept	Trend and Intercept	None	Intercept	Trend and Intercept	None
LNPembiayaan	-3.863263**	-0.430675	7.402481	4.235037**	6.222028**	-2.413279**
LNDPK	-1.575677	-1.438326	1.431155	- 7.936980** *	- 8.284295** *	-7.429886***
NPL	-2.943122**	-2.912879	-1.290081	- 6.221355** *	- 6.141264** *	-6.293904***
LNInf	0.919889	-1.081060	2.940491	5.954198** *	6.126921** *	-5.060734***

Ket: *** Signifikan pada tingkat signifikansi 1%
Signifikan pada tingkat signifikansi 5%

Berdasarkan tabel pengujian akar-akar unit dapat simpulkan bahwa semua data sudah stasioner pada derajat integrasi satu (first difference) baik pada persamaan dalam bentuk none, intercept maupun

trend dan *intercept* pada tingkat signifikansi 1% dan 5%. Hal ini dibuktikan dengan hasil ADF hitung yang melebihi ADF kritis pada tingkat signifikansi 1% dan 5%.

Uji Kointegrasi

Pengujian ini menggunakan metode *Engle-Granger* sedangkan persamaan jangka panjangnya akan diturunkan dari persamaan ECM (*Error correction Model*).

$$\Delta e_t = 0.003395 - 0.341174 e_{t-1}$$

$$ADF_{statistic} > ADF_{tabel} = -2.954095 > -2.931404$$

$$\alpha = 5\%$$

Sumber: Data diolah, 2013

kointegrasi lebih besar (signifikan) dari nilai kritis ADF tabel (ADF hitung > ADF tabel) pada signifikansi 5%. Kondisi tersebut menyimpulkan bahwa variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini berkointegrasi pada derajat yang sama.

Hasil Estimasi Error Correction Model (ECM)

$$dln Pembiayaan = 0.028356 + 0.12328 dln DPK - 0.001014 dln NPL - 0.33434 dln Inflasi + 0.127632 ECT$$
 t-statistik = 2.602192*** -0.611452 -0.972258 2.593506***
$$R^2 = 0.266607 \qquad F-statistik = 3.453483$$

Hasil Estimasi OLS jangka panjang

Sumber : Data diolah (2013) Ket : *** signifikan pada 1% ** signifikan pada 5%

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas Jangka Pendek

Tabel 3: Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	2 Hitung R	R
DlnDPK	0.169780	0.266607
NPL	0.142142	0.266607
dlnInflasi	0.050006	0.266607

Sumber: Data Diolah, 2013

Dari tabel hasil analisis uji multikolinieritas di atas terlihat bahwa $\overset{2}{R}$ lebih kecil dari $\overset{2}{R}$. Hal ini menunjukkan bahwa H₀ diterima. Dengan diterimanya H₀ berarti tidak terdapat Multikolinearitas.

Jangka Panjang

Tabel 4: Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	2 Hitung R	R^{2}		
lnDPK	0.773513	0.964382		
NPL	0.127970	0.964382		
lnInflasi	0.786761	0.964382		

Sumber: Data Diolah, 2013

Dari tabel hasil analisis uji multikolinieritas di atas terlihat bahwa R lebih kecil dari R. Hal ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak. Dengan ditolaknya H₀ berarti tidak terdapat Multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas Jangka Pendek

Tabal 5. Hacil Hii Hatarackadacticitae

Tabel 3. Hash Of Heteroskedastisitas		
$R^2 = 0.188477$		
Obs*R-squared = 8.104501		
Chi-squares (2) pada $1\% = 20.0902$		

Sumber: Data diolah

Dari tabel 5 diketahui bahwa koefisien determinasi (R²) sebesar 0.188477. Nilai Chi-squares hitung sebesar 8.104501 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R²). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares (²) pada = 1% dengan df sebesar 8 adalah 20.0902. Karena nilai Chi-squares hitung (2) lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares (2) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas

Jangka Panjang

Tabel 6: Hasil Uii Heteroskedastisitas

Tuber of Trustre egrater oblications
$R^2 = 0.200844$
Obs^*R -squared = 8.837149
Chi-squares (2) pada $1\% = 16.8119$

Sumber: Data diolah, 2013

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa koefisien determinasi (R²) sebesar 0.200844 Nilai Chi-squares hitung sebesar 8.837149 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R²). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares (²) pada = 1% dengan df sebesar 6 adalah 16.8119. Karena nilai Chi-squares hitung (²) lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares (²) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi Jangka Pendek

Tabel 7: Hasil Uji Autokorelasi

$R^{2} = 0.193267$	
chi squares $\binom{2}{2} = 8.3$	10483
nilai kritis (²) pada	10% = 4.60517
nilai kritis (²) pada	5% = 5.99147
nilai kritis (²) pada	1% = 9.21034

Sumber: Data diolah, 2013

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.193267. Nilai chi squares hitung (2) sebesar 8.310483, sedangkan nilai kritis (2) pada = 10%, = 5%, = 1% dengan df sebesar 2 karena nilai chi squares hitung (2) lebih kecil dari pada nilai kritis chi squares (2), maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Jangka Panjang

Tabel 8: Hasil Uji Autokorelasi

· ·	
$R^{2} = 0.420708$	
chi squares (2) = 1.851117	
nilai kritis (2) pada $10\% = 4.60517$	
nilai kritis (2) pada $5\% = 5.99147$	
nilai kritis (2) pada $1\% = 9.21034$	

Sumber: Data Diolah

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.420708. Nilai chi squares hitung (2) sebesar 1.851117, sedangkan nilai kritis (2) pada = 10%, = 5%, = 1% dengan df sebesar 2 karena nilai chi squares hitung (2) lebih kecil dari pada nilai kritis chi squares (2), maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Statistik : Uji Secara Individual (Uji T)

Jangka Pendek

1. $\widetilde{\text{U}}$ ji t terhadap Koefisien dari dlnDPK

Dari hasil estimasi untuk nilai perubahan persentase DPK (dlnDPK) di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar 2.602192 dengan df sebesar 39 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.457, 5% = 1.697dan 10% = 1.310. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dengan diolaknya H_0 berarti perubahan persentase DPK (dlnDPK) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%,5%, dan 10% terhadap perubahan persentase Pembiayaan pada bank syariah (dlnPembiayaan).

2. Uji t terhadap Parameter dari NPL

Dari hasil estimasi untuk nilai perubahan NPL (dlnNPL) di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar -0.611452 dengan df sebesar 39 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.457, 5% = 1.697dan 10% = 1.310. Karena nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima. Dengan diterimanya H_0 berarti perubahan NPL (dlnNPL) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% terhadap perubahan persentase Pembiayaan pada bank syariah (dlnPembiayaan).

3. Uji t terhadap Parameter dari dInflasi

Dari hasil estimasi untuk nilai perubahan Inflasi (dlnInflasi) di dapatkan bahwa nilai tstatistik sebesar -0972258 dengan df sebesar df sebesar 39 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.457, 5% = 1.697dan 10% = 1.310. Karena nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima. Dengan diterimanya H_0 berarti perubahan Inflasi (dInflasi) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%,5%10% terhadap perubahan persentase Pembiyaan pada bank syariah (dlnPembiayaan).

4. Uji t terhadap Error Correction Term (ECT)

Dari hasil estimasi untuk nilai Error Correction Term (ECT) di dapatkan bahwa nilai tstatistik sebesar 2.593506 dengan df sebesar 39 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.457, 5% = 1.697 dan 10% = 1.310. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dengan ditolaknya H_0 berarti Error Correction Term (ECT) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% terhadap perubahan persentase Pembiyaan pada bank syariah (dlnPembiayaan). Nilai koefisien ECT 0.127632 mempunyai makna bahwa perbedaan antara nilai aktual Pembiayaan pada Bank Syariah di Sulawesi Utara dengan nilai keseimbangannya sebesar 0.127632 akan disesuaikan pada periode berikutnya.

Jangka Panjang

1. Uji t terhadap Koefisien dari lnDPK

Dari hasil estimasi untuk nilai DPK di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar 11.38668 dengan df sebesar 40 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.423, 5% = 1.684 dan 10% = 1.303. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dengan ditolaknya H_0 berarti DPK (lnDPK) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% terhadap Pembiayaan pada bank syariah.

2. Uji t terhadap Parameter dari NPL

Dari hasil estimasi untuk nilai SBK di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar 4.702139 dengan df sebesar 40 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.423, 5% = 1.684 dan 10% = 1.303. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dengan ditolaknya H_0 berarti *Non Performing Loan* (NPL) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% terhadap Pembiayaan pada bank syariah.

3. Uji t terhadap Parameter dari Inflasi

Dari hasil estimasi untuk nilai Inflasi di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar -1.836034 dengan df sebesar df sebesar 40 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.423, 5% = 1.684 dan 10% = 1.303. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dengan ditolaknya H_0 berarti Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 5%, dan 10% terhadap Pembiayaan pada bank syariah.

Pengujian Secara Serempak (Uji F)

Jangka Pendek

Nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan (3,39) dan = 5% adalah 2.92. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 3.453483. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} , artinya secara bersama-sama variabel perubahan persentase DPK, perubahan NPL, dan perubahan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan Pembiayaan pada bank syariah.

Jangka Panjang

Nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan (3,40) dan = 5% adalah 2.92. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 3.610112. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} , artinya secara bersama-sama variabel DPK, NPL, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah

Nilai Koefisien Determinasi (R²) Jangka Pendek

Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R adalah 0.266607, yang berarti variasi dari perubahan DPK, perubahan persentase NPL, perubahan Inflasi mempengaruhi perubahan persentase Pembiayaan pada Bank Syariah di Sulawesi utara sebesar 26.6607%, sedangkan sisanya (77.3393%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Jangka Panjang

Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R adalah 0.964382, yang berarti variasi dari DPK, NPL, Inflasi mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah sebesar 96.4382%, sedangkan sisanya (3.6518%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pembahasan

Tanda positif pada koefisien ECT memberikan penjelasan bahwa pembiayaan pada bank syariah berada dibawah nilai keseimbangan, maka pembiayaan pada bank syariah akan meningkat pada periode berikutnya untuk mengoreksi kesalahan keseimbangan. Dari hasil uji yang dilakukan terhadap regresi ECT didapatkan bahwa koefisien regresi tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri apada tingkat keyakinan 1%, 5%, dan 10%. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara nilai aktual pembiayaan pada bank syariah dengan nilai

keseimbangannya dalam jangka panjang akan disesuaikan selama waktu satu bulan. Dengan demikian, spesifikasi model ECM yang dipakai dalam penelitian ini adalah tepat dan mampu menjelaskan hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan tersebut sudah sahih dan tidak dapat ditolak.

Variabel dana pihak ketiga merupakan salah satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu pembiayaan pada bank syariah. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam jangka pendek Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah. Dalam jangka panjang dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah. Hasil ini sejalan dasar teoretik dan hipotesis bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga, maka semakin tinggi pula pembiayaan pada bank syariah. Dengan kata lain tinggi rendahnya pembiayaan pada bank syariah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dana pihak ketiga yang dicapai oleh bank syariah disulawesi utara. Hal ini akan mampu untuk memperbaiki perekonomian dimana dana yang diserap oleh masyarakat melalui pembiayaan bisa digunakan untuk investasi yang dimana nantinya hasil dari investasi tersebut dapat menaikkan pendapatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ikut meningkat. Di Sulawesi Utara sendiri mengalami perkembangan ekonomi yang sangat baik terlihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi dan segala infratruktur yang kian hari kian berkembang pesat. Hal ini tidak lepas dari peran bank syariah yang berhasil menyalurkan pembiayaan. Hasil temuan ini diperkuat oleh fakta dan data bahwa Dana Pihak Ketiga dari bulanan 1 tahun 2010 sampai bulanan 8 tahun 2013 terus meningkat sehingga pembiayaan pada bank syariah juga ikut meningkat.

Variabel Non Performing Loan merupakan salah satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu pembiayaan pada bank syariah. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam jangka pendek Non Performing Loan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. sesuai dengan teori dimana apabila Non Performing Loan meningkat makan pembiayaan akan menurun. Pada jangka panjang hasil temuan menunjukkan Non Performing Loan berpengaruh positif dan signifikan . Hasil ini tidak sejalan dengan dasar teoretik dan hipotesis bahwa semakin tinggi Non Performing Loan, maka pembiayaan pada bank syariah yang dilakukan akan turun. Hal ini dikarenakan walaupun tingkat presentase NPL meningkat namun pihak bank masih mampu mengendalikannya sehingga dalam proses dalam penyaluran pembiayaan tidak akan terganggu dan tidak akan mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Dengan kata lain tinggi rendahnya pembiayaan pada bank syariah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat Non Performing Loan oleh suatu bank. . Hasil temuan ini dipekuat fakta dan data bulanan 1 tahun 2010 sampai bulanan 8 2013.

Variabel tingkat inflasi merupakan salah satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu pembiayaan pada bank syariah. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam jangka pendek tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah. Dalam jangka panjang tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah. Hasil ini sejalan dengan dasar teoretik dan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka pembiayaan akan turun. Dengan kata lain tinggi rendahnya pembiayaan pada bank syariah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat inflasi yang ditargetkan oleh suatu negara. Hasil temuan ini dipekuat fakta dan data bulanan 1 tahun 2010 sampai bulanan 8 2013.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan* dan Inflasi terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Sulawesi Utara pada kurun waktu Januari 2010 sampai Agustus 2013 dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*). Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan pada bank syariah di Sulawesi utara. *Non Performing Loan* berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pembiayaan pada bank syariah di Sulawesi Utara. Tingkat Inflasi berpengaruh tidak signifikan dan negative terhadap pembiayaan pada bank syariah di Sulawesi Utara. Secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Perfoming Loan (NPL)* dan Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank syariah di Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad syafi'i.(eds).1998. Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam Nasional dan Global. Islam. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Billy Arma Pratama. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan (studi pada bank umum di Indonesia periode tahun 2005-2009)
- Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP . Jakarta
- Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Greydi Normala Sari. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia
- Gujarati, Damodar, 2003. Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, International Editions, New York
- Imam Mukhlis. 2011. Penyaluran Kredit Ditinjau Dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Non Performing Loan
- Insukindro.1991. Regresi Linier Lancung dalam Analisa Ekonomi: Studi kasus permintaan deposito dalam valuta asing di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.1.No.1
- Kasmir. 2012 Manajemen Perbankan . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Hasanudin. 2010. Analisis DPK, Suku Bunga, NPL dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit di BPR di Jawa Tengah.
- Nopirin, 2009. Ekonomi Moneter Buku II. BPFE. Yogyakarta
- Rivai Veithzal.2008. Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktik Untuk Lembaga Keuangan ,Nasabah ,Praktisi ,Dan Mahasiswa. PT Raja Grafindo PERSADA. Jakarta
- Wuri Arianti. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011)

www.BI.go.id.com

www.BPS.go.id.com

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM DI SULAWESI UTARA PERIODE 2007.1-2013.2

Inggrid Zeteline Dumaili, Robby Kumaat, dan Jacline Sumual

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado email: <u>dumailiinggrid@yahoo.co.id</u>

ABSTRAK

Kredit merupakan mesin pencetak keuntungan bagi bank. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan kredit, terdapat salah satu jenis kredit yang di salurkan oleh bank yang mempunyai signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, yaitu kredit investasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh hubungan jangka pendek dan jangka panjang dari suku bunga kredit investasi, Dana Pihak Ketiga, dan inflasi terhadap penyaluran kredit investasi. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu error correction model (ECM). Dari hasil penelitian diketahui R² sebesar 0.329522 berarti naik turunnya penyaluran kredit investasi dipengaruhi oleh suku bunga kredit investasi, Dana Pihak Ketiga, dan inflasi sebesar 32,95% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dalam jangka pendek hanya inflasi yang berpengaruh signifikan terhadap kredit investasi, namun dalam jangka panjang hanya suku bunga kredit investasi dan DPK yang berpengaruh signifikan terhadap kredit investasi.

Kata kunci : Suku bunga kredit investasi (Ii), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, Kredit Investasi (Krinv).

ABSTRACT

Credit is a profit making machine for the banks. In relation to credit growth, there is one type of credit channeled by banks that have a significant impact on economic growth in Indonesia, particularly in North Sulawesi, namely investment loans. The purpose of this study was to analyze the effect of short-term relationships and long-term investment loan interest rates, third party funds, lending and inflation on investment. Based on the purpose of this study, the method of analysis used in this study is an error correction model (ECM). The results showed R^2 of 0.329522 mean rise and fall of the investment is affected by the lending interest rate investment loans, Third Party Funds, and inflation of 32.95% while the rest is influenced by other factors not addressed in this study. In the short term inflation is only significant effect on the investment loan, but in the long term only investment loan interest rates and third party funds which have a significant effect on the investment loan.

Keyword : Interest rate investments (ii), Third Party Funds (TPF), Inflation, Investment Credit (Krinv).

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Bank di satu daerah akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Apabila keberadaan bank secara merata ada di setiap daerah dan terintegrasi dengan baik, maka akan mempunyai pengaruh pada perkembangan positif ekonomi suatu negara (Supriyono, 2011).

Kegiatan utama bank itu sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan sumber dana terbesar bagi bank untuk membiayai aktivitas atau kegiatan bank sehari-hari serta usaha bank untuk melakukan aktivitas penyaluran kredit.

Kredit merupakan alokasi dana terbesar bagi bank yang bisa memberikan peluang keuntungan terbesar pula bagi bank. Namun demikian risiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana tersebut juga besar. Oleh karena itu bank harus berhati-hati dalam penempatan dana tersebut dalam bentuk kredit.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan kredit, terdapat salah satu jenis kredit yang disalurkan oleh bank yang mempunyai signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Sulawesi utara, yaitu kredit investasi. Namun beberapa tahun terakhir dominasi kredit konsumsi justru lebih tinggi dibandingkan dengan kredit investasi. Hal ini mengakibatkan kegiatan perokonomian tidak sehat karena pergerakan perekonomian pada sektor riil menjadi terhambat. Akibatnya ekonomi tidak didukung oleh investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan produksi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi, disebabkan oleh perilaku bank yang cenderung menyukai pemberian kredit konsumsi karena mengingat jangka waktu pengembeliannya relatif lebih singkat dibandingkan dengan kredit investasi, sehingga pihak bank pun bersedia untuk ekspansi dalam dua jenis kredit tersebut. Jika dilihat dari sisi permintaan, rendahnya permintaan terhadap kredit investasi bisa disebabkan oleh kurangnya minat para investor untuk berinvestasi di Sulawesi utara yang disebabkan oleh iklim investasi yang masih terkendala oleh resikoresiko struktural seperti ekonomi biaya tinggi, minimnya infrastruktur, lambannya birokrasi, dan lemahnya kepastian hukum. Peran bank umum dalam menyalurkan kredit investasi juga tidak terlepas dari adanya hambatan yang terjadi baik itu dari sisi internal yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan Non Performing Loan (NPL), maupun dari sisi ekternal yaitu inflasi.

Perubahan suku bunga mempengaruhi besaran jumlah dana yang disalurkan, makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi semakin kecil. Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil (Nopirin, 1992:70-71).

Pada tahun 2008 triwulan III suku bunga kredit investasi naik sebesar 0,81%, namun penyaluran kredit investasipun ikut naik sebesar 60 miliar dan pada tahun 2012 triwulan II, suku bunga kredit investasi turun sebesar 0,16%, namun penyaluran kredit investasipun ikut turun sebesar 165 miliar, begitupun pada tahun 2012 triwulan III suku bunga kredit investasi turun sebesar 0.1%, namun penyaluran kredit investasipun ikut turun sebesar 2 miliar, begitu juga yang terjadi pada tahun 2012 triwulan IV suku bunga kredit investasi turun sebesar 0.09%, namun penyaluran kredit investasipun ikut turun sebesar 1 miliar. Pada tahun 2013 triwulan I juga demikian terjadi penurunan suku bunga kredit investasi sebesar 0.03 % namun kredit investasipun ikut turun sebesar 39 miliar, hal ini tidak sejalan dengan teori, dimana ketika suku bunga kredit investasi naik maka penyaluran kredit investasi akan menurun dan sebaliknya.

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Dengan demikian apabila dana pihak ketiga meningkat akan meningkat pula penyaluran kredit investasi yang akan disalurkan oleh bank.

Berdasarkan data DPK yang diambil dari bank Indonesia, pada tahun 2008 triwulan IV DPK pada bank umum sulut naik sebesar 931 miliar rupiah namun kredit investasi turun sebesar 24 miliar rupiah, pada tahun 2012 triwulan II juga demikian DPK naik sebesar 788 miliar rupiah namun kredit investasi turun sebesar 165 miliar rupiah, pada tahun 2012 triwulan III DPK naik sebesar 185 miliar rupiah namun kredit investasi turun sebesar 2 miliar rupiah, pada tahun 2012 triwulan IV juga demikian DPK naik sebesar 538 miliar rupiah namun kredit investasi turun sebesar 1 miliar rupiah, pada tahun 2013 triwulan pertama DPK naik sebesar 18 miliar rupiah namun kredit investasi turun sebesar 39 miliar rupiah.

Selain itu, penyaluran kredit investasi juga di pengaruhi oleh fluktuasi inflasi yang terjadi di Sulawesi utara yang juga mempengaruhi penyaluran kredit investasi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM menyebabkan inflasi yang melambung tinggi sehingga dengan adanya kenaikan harga hal ini menurunkan daya beli masyarakat. Melihat daya beli masyarakat menurun, maka rumah tangga produksi menurunkan kapasitas produksinya karena penurunan daya beli, masyarakat akan menurunkan permintaan produk yang dihasilkan sehingga kalau kapasitas produksi ditambah tentu akan merugikan. Penurunan kapasitas produksi dapat mengakibatkan penurunan permintaan kredit investasi oleh rumah tangga produksi.

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman bank dapat dibedakan menjadi (kasmir 2007 : 38) :

- 1. Bank konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.
- 2. Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al Ouran dan hadits.

Fungsi bank pada umumnya menurut (Rindjin, 2001) adalah:

- menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat,
- memberikan kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuanya mencipakan tenaga beli baru,
- memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank umum dalam perekonomian modern memiliki fungsi adalah sebagai berikut (Manurung, Rahardja, 2004) :

- Penciptaan uang
- Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran
- Penghimpunan dana simpanan masyarakat dan penyaluran kredit
- Mendukung kelancaran transaksi internasional
- Penyimpanan barang-barang berharga
- Pemberian jasa-jasa lainnya

Menurut Hasibuan, (1996), kredit adalah semua jenis pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar kembali bunganya oleh peminjam. Dalam hal ini, pihak bank memberi tarif bunga atau yang disebut bunga kredit dalam setiap permohonan kredit kepada pihak peminjam.

1. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang untuk membiayai capital goods, seperti pendirian pabrik, perluasan, perbaikan perusahaan, perbaikan mesin (Simorangkir, 2004). Adapun tujuan dari kredit investasi antara lain:

- Memberikan kelonggaran *cash flow* pada nasabah sehingga dapat lebih leluasa dalam mengelola usahanya atau mengembangkan tingkat penjualan.
- Memberikan jangka waktu kredit yang cukup panjang.
- Memberikan kemungkinan diterapkan suatu grace period dan pencicilannya.

Dana untuk penyaluran kredit investasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain (Simorangkir, 2004):

- Dana anggaran pemerintah yang disalurkan melalui perbankan.
- Dana bank sentral.
- Dana dari bank-bank pemerintah.
- Dana dari pengusaha.
- Dana-dana dari luar negeri, baik yang berupa kredit luar negeri maupun berupa modal asing.

2. Suku bunga

Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang yang dinyatakan dalam persen per satuan waktu (per bulan atau per tahun).

3. Dana Pihak Ketiga

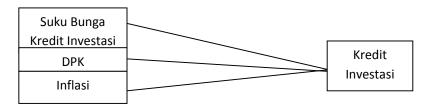
Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendawijaya, 2005).

Pengertian inflasi adalah kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja, menurut definisi ini, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Menurut definisi ini kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi. Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikkan harga-harga umum barang secara terus-menerus (Nopirin, 2009).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penyaluran kredit investasi, yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Daryati Ningsih, dan Idah Zuhroh (2010), Hedwigis esti R¹, & Sari Wulandari R² (2009), Rosyeti, dan Rita Yani Iyan (2010) yang menyatakan bahwa suku bunga kredit investasi berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap penyaluran kredit investasi, menurut Maiva Linda (2007) menyatakan bahwa dalam jangka pendek suku bunga kredit investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit investasi, sedangkan dalam jangka panjang suku bunga kredit investasi berpengaruh secara signifikan terhadap kredit investasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Daryanti Ningsi dan Idah Zuhroh (2010), di dapatkan hasil bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kredit investasi. Menurut Menurut Rosyeti, dan Rita Yani Iyan (2010) DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit investasi. Begitu juga dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Hedwigis esti R¹,& Sari wulandari R² (2009) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit investasi, menurut Meiva Linda (2007) menyatakan bahwa dalam jangka pendek DPK berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit investasi, sedangkan dalam jangka panjang DPK berpengaruh secara signifikan terhadap kredit investasi.

Berdasarkan pendahuluan di atas maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar I: Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari variabel independen yaitu suku bunga kredit investasi, dana pihak ketiga, dan inflasi terhadap variabel dependen yaitu kredit investasi.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah

- H1: Diduga bahwa suku bunga kredit investasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kredit investasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
- H2: Diduga bahwa DPK berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kredit investasi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
- H3: Diduga bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kredit investasi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan data triwulan pada rentang waktu 2007 triwulan pertama sampai 2013 triwulan kedua. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder *time series*. Sumber data berasal dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan jurnal-jurnal ilmiah serta litelatur-litelatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan model dinamis, yaitu dengan menggunakan model korekasi kesalahan (*Error Correction Model/ ECM*). Dalam konteks ekonomi, spesifikasi model dinamis penting artinya karena berkaitan dengan pembentukan model dari suatu sistem ekonomi yang berhubungan dengan perubahan waktu (Insukindro, 1991).

Model dinamis yang relatif baik untuk digunakan adalah model koreksi kesalahan (ECM), di mana faktor gangguan yang merupakan "equilibrium error" diparameterisasi. Kesalahan ekuilibrium ini dapat digunakan untuk mengkaitkan perilaku jangka pendek terhadap nilai jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi. Bila dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode maka model koreksi kesalahan akan mengoreksi pada periode berikutnya, sehingga mekanisme model koreksi kesalahan dapat diartikan sebagai penyelaras perilaku jangka pendek dan jangka panjang (Insukindro, 1991).

Berkaitan dengan model ECM, berikut ini akan diturunkan rumus umum model ECM. Anggaplah bahwa kredit investasi yang diinginkan dipengaruhi oleh suku bunga kredit investasi (Ii), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi dan dinyatakan dalam hubungan jangka panjang atau keseimbangan (long equilibrium relationship) sebagai berikut:

Pkrinv_t^{*} =
$$_{0}$$
 + $_{1}$ Ii_t + $_{2}$ DPK_t + $_{3}$ Inflasi_t + €_t

Selanjutnya dengan mengikuti pendekatan yang dikembangkan oleh Domowitz dan Elbadawi (1978) dapat dirumuskan fungsi biaya kuadrat periode tunggal (*single quadratic cost function*) sebagai berikut:

```
\begin{aligned} & krinv_t = \ _1 \quad Ii_t + \ _2 \quad DPK_t + \ _3 \quad Inflasi_t + \ _6(I- \ 0- \ 1Ii- \ _2DPK- \ _3Inflasi)_{t-1} + ect_t \\ & \quad _{Dimana} ect_{t \ adalah} : \\ & ect_t = \ _0 + \ _1 \ Ii_t + \ _2 \ DPK_t + \ _3 \ Inflasi_t + \ _4 \ Ii_{t-1} + \ _5 \ DPK_{t-1} + \ _6 \ Inflasi_{t-1} + \ _7 \ Pkrinv_{t-1} \end{aligned}
```

Adapun definisi operasinonal untuk variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut :

- 1. Kredit investasi
 - Kredit investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi kredit investasi pada bank umum yang ada di Sulawesi Utara yang nilainya dinyatakan dalam miliar rupiah.
- 2. Suku bunga kredit investasi

Suku bunga kredit investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga kredit investasi pada Bank Umum yang dinyatakan dalam satuan persen.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank umum yang dinyatakan dalam miliar rupiah.

4. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi dalam penelitian ini menggunakan konsep inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen).

Untuk menguji perilaku data pada penelitian dapat memakai uji Dickey-Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF).

a. Rumus Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

DF tanpa trend dan intercept $Yt = \delta Yt - 1 + ut$ DF dengan intercept $Yt = \beta 1 + \delta Yt - 1 + ut$ DF dengan trend dan intercept $Yt = \beta 1 + \beta 2t + \delta Yt - 1 + ut$

di mana:

 $\Delta Yt = Yt - Yt - 1$

Yt = variabel yang diamati pada periode t

ut = unsur pengganggu.

b. Rumus Augmented Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

 $Yt = \beta 1 + \beta 2T + \delta Yt - 1 + \alpha i \quad \underset{i=1}{m} Yt - i + ut$

di mana:

Yt = Yt - Yt - 1

 $M \quad = panjangnya \; lag \; yang \; digunakan$

Yt = variabel yang diamati pada periode t

T = trend waktu

ut = unsur pengganggu

Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak adalah dengn membandingkan nilai ADF dengan nilai kritis distribusi MacKinnon. Pengambilan keputusannya adalah apabila ADF hitung dari suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut stasioner, begitu pula sebaliknya.

Cara pengujiannya adalah dengan menguji residualnya berintegrasi atau tidak. Apabila residualnya berintegrasi, berarti data tersebut sudah memenuhi prasyarat dalam pembentukan dan estimasi model dinamis. Untuk melakukan uji kointegrasi dilakukan dengan beberapa macam uji, yaitu: Engle-Granger test (EG), Augmented Engle-Granger (AEG) test, dan Cointegrating Regression Durbin Watson (CRDW). Namun, pada penelitian ini akan menggunakan Engle-Granger test (EG).

Setelah itu digunakanlah uji asumsi klasik antara lain uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan kaidah "*auxiliary regression*". Penggunaan kaidah ini dilakukan dengan cara meregres masing-masing variabel independen dengan variabel independen yang lain. Apabila hasil dari proses meregres masing-masing variabel independen dengan variabel independen yang lain tersebut menunjukkan adanya nilai R² yang lebih rendah dari R² model utama, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas antar variabel independen.

Uji heterokedastisitas salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan menggunakan *White Test*. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat probabilitas *Obs*R-squared*. Apabila nilai probabilitas *Obs*R-squared* lebih besar dari taraf nyata tertentu maka persamaan tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya. Dan Uji Autokorelasi Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Godfrey, sehingga dikenal juga dengan sebutan *The Breusch-Godfrey (BG) Test* Selanjutnya dilakukan Uji Statistik antara lain Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), Nilai Koefisien Determinasi (R²).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Akar Unit (Unit Root Test)

Tabel 2: Uji Akar unit (*Unit Root Test*)

Variabel	Level		First Difference			
	Intercept	Trend and Intercept	None	Intercept	Trend and Intercept	None
LNkredit investasi	-1.061809	-0.859099	4.451624	3.813094**	-3.796465**	-2.478456**
Suku Bunga (Ii)	-1.367954	-2.078874	- 1.932908*	-3.072194**	-2.981765	-2.995808***
LNDPK	-1.461682	-2.469510	7.430268	- 8.462474** *	9.145232**	-2.816486***
LNinf	-2.089651	-1.884890	-0.237761	- 5.116669** *	- 5.253552** *	-5.223116***

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel pengujian akar-akar unit dapat simpulkan bahwa semua data sudah stasioner pada derajat integrasi satu (*first difference*) baik pada persamaan dalam bentuk *none*, *intercept* maupun *trend* dan *intercept* pada tingkat signifikansi 1% dan 5%. Hal ini dibuktikan dengan hasil ADF hitung yang melebihi ADF kritis pada tingkat signifikansi 1% dan 5%.

Uji Kointegrasi

Pengujian ini menggunakan metode *Engle-Granger* sedangkan persamaan jangka panjangnya akan diturunkan dari persamaan ECM (*Error correction Model*).

$$\Delta e_t$$
 = -0.006345 - 0.959861 e_{t-1} (4.522)

 $ADF_{statistic} > ADF_{tabel} = -4.520305 > -3.737853$

Sumber: Data diolah, 2013.

kointegrasi lebih besar (signifikan) dari nilai kritis ADF tabel (ADF hitung > ADF tabel) pada signifikansi 5%. Kondisi tersebut menyimpulkan bahwa variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini berkointegrasi pada derajat yang sama.

Hasil Estimasi Error Correction Model (ECM)

DLNKriny = 0.078268 - 0.023837 DLNIi - 0.443447 DLNDPK - 0.437427 DLNInf + 0.246059 ECT

Hasil Estimasi OLS jangka panjang

LNkrinv = -5.132282 - 0.082343Ii + 1.494628 LNdpk + -0.096507 LNinflasi + ε_t

^{***} Signifikan pada tingkat signifikansi 1%

^{**} Signifikan pada tingkat signifikansi 5%

^{*} Signifikan pada tingkat signifikansi 10%

Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas Jangka Pendek

Tabel 3: Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	2 Hitung R	${f R}^2$
DlnIi	0.104492	0.329522
DlnDPK	0.206325	0.329522
DlnInf	0.120014	0.329522

Sumber: Data Diolah, 2013.

Dari tabel hasil analisis uji multikolinieritas di atas terlihat bahwa $R^{2 \text{ Hitung}}$ lebih kecil dari R^{2} . Hal ini menunjukkan bahwa H₀ diterima. Dengan diterimanya H₀ berarti tidak terdapat Multikolinearitas.

Jangka Panjang

Tabel 4: Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	2 Hitung R	$\mathbf{R}^{^{2}}$
Ii	0.806050	0.954108
LNDPK	0.813447	0.954108
lnInflasi	0.317174	0.954108

Sumber: Data Diolah, 2013.

Dari tabel hasil analisis uji multikolinieritas di atas terlihat bahwa R lebih kecil dari R. Hal ini menunjukkan bahwa H₀ ditolak. Dengan ditolaknya H₀ berarti tidak terdapat Multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Jangka Pendek

Tabel 5: Hasil Uji Heteroskedastisitas

$R^2 = 0.197613$	
Obs^*R -squared = 4.940	332
Chi-squares (²) pada	

Sumber: Data diolah, 2013

Dari tabel 5 diketahui bahwa koefisien determinasi (R²) sebesar 0.197613. Nilai Chi-squares hitung sebesar 4.940332 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R²). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares (²) pada = 1% dengan df sebesar 8 adalah 20.090. Karena nilai Chi-squares hitung (²) lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares (²) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Jangka Panjang

Tabel 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas

$R^2 = 0.168031$		
Obs*R-squared = 4.368814		
Chi-squares (²) pada		

Sumber: Data diolah, 2013.

Dari tabel 6 diketahui bahwa koefisien determinasi (R²) sebesar 0.168031 Nilai Chi-squares hitung sebesar 4.368814 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R²). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares (²) pada = 1% dengan df sebesar 6 adalah

16.812. Karena nilai Chi-squares hitung (²) lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares (²) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi Jangka Pendek

Tabel 7: Hasil Uji Autokorelasi

$R^2 = 0.073605$	
chi squares (2) = 1.8	40114
nilai kritis (²) pada	10% = 4.60517
nilai kritis (²) pada	5% = 5.99147
nilai kritis (²) pada	1% = 9.21034

Sumber: Data Diolah, 2013.

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.073605. Nilai chi squares hitung $(^2)$ sebesar , 1.840114 sedangkan nilai kritis $(^2)$ pada =10%, =5%, =1% dengan df sebesar 2 karena nilai chi squares hitung $(^2)$ lebih kecil dari pada nilai kritis chi squares $(^2)$, maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Jangka Panjang

Tabel 8 : Hasil Uji Autokorelasi

$R^{2} = 0.063184$	
chi squares (2) = 1.6	42791
nilai kritis (²) pada	10% = 4.60517
nilai kritis (²) pada	5% = 5.99147
nilai kritis (²) pada	1% = 9.21034

Sumber: Data Diolah, 2013.

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.063184. Nilai chi squares hitung $(^2)$ sebesar 1.642791, sedangkan nilai kritis $(^2)$ pada =10%, =5%, =1% dengan df sebesar 2 karena nilai chi squares hitung $(^2)$ lebih kecil dari pada nilai kritis chi squares $(^2)$, maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uii Statistik

Uji Secara Individual (Uji T)

Jangka Pendek

$1. \quad \textbf{Uji t terhadap Koefisien} \quad _{_{1}} \textbf{dari suku bunga kredit investasi (dlnIi)}$

Dari hasil estimasi untuk nilai perubahan persentase suku bunga kredit investasi (dlnIi) di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar -0.668923 dengan df sebesar 21 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.518 , 5% = 1.721 dan 10% = 1.323. Karena nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima. Dengan diterimanya H_0 berarti perubahan persentase Suku bunga kredit investasi (dlnIi) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%,5%, dan 10% terhadap perubahan persentase kredit investasi pada bank umum (dlnkrinv).

2. Uji t terhadap parameter $_2$ dari DPK (dlnDPK)

Dari hasil estimasi untuk nilai perubahan DPK (dInDPK) di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar -0.845667 dengan df sebesar 21 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.518 , 5% = 1.721 dan 10% = 1.323. Karena nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Dengan diterimanya H0 berarti perubahan DPK (dInDPK) tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%, 5% dan 10% terhadap perubahan persentase kredit investasi pada bank umum (dlnkrinv).

3. Uji t terhadap parameter dari inflasi (dlninf)

Dari hasil estimasi untuk nilai perubahan inflasi (dIninf) di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar -2.341040 dengan df sebesar 21 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.518, 5% = 1.721 dan 10% = 1.323. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya H0 berarti perubahan inflasi (dIninf) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 5% dan 10% terhadap perubahan persentase kredit investasi pada bank umum (dlnkrinv).

4. Uji t terhadap Error Correction Term (ECT)

Dari hasil estimasi untuk nilai Error Correction Term (ECT) di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar 2.309647 dengan df sebesar 21 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.518, 5% = 1.721 dan 10% = 1.323. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dengan diterimanya H_0 berarti Error Correction Term (ECT) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 5%, dan 10% terhadap perubahan persentase kredit investasi pada bank umum (dlnkrinv). Nilai koefisien ECT 0.246059 mempunyai makna bahwa perbedaan antara nilai actual kredit investasi dengan nilai keseimbangannya sebesar 0.246059 akan disesuaikan pada periode berikutnya.

Jangka Panjang

1. Uji t terhadap Koefisien dari suku bunga kredit investasi (Ii)

Dari hasil estimasi untuk nilai suku bunga kredit investasi di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar -1.414437 dengan df sebesar 22 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.508, 5% =1.717 dan 10% = 1.321. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya H0 berarti suku bunga kredit investasi (Ii) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaa 10% terhadap penyaluran kredit investasi pada bank umum di Sulawesi Utara.

2. Uji t terhadap Parameter , dari DPK (LNDPK)

Dari hasil estimasi untuk nilai SBK di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar 7.995065 dengan df sebesar 22 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.508 , 5% = 1.717 dan 10% = 1.321. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya H0 berarti DPK (LNDPK) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% terhadap penyaluran kredit investasi pada bank umum di Sulawesi Utara.

3. Uji t terhadap Parameter dari Inflasi

Dari hasil estimasi untuk nilai Inflasi di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar -0.311066 dengan df sebesar 22 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.508, 5% = 1.717 dan 10% = 1.321. Karena nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Dengan diterimanya H0 berarti Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 5%, dan 10% terhadap penyaluran kredit investasi pada bank umum.

Pengujian Secara Serempak (Uji F)

Jangka Pendek

Nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan (3,21) dan = 10% adalah 2.36. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 2.457370. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} , artinya secara bersama-sama variabel perubahan persentase suku bunga kredit investasi (Ii), perubahan DPK, perubahan inflasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan kredit investasi pada bank umum.

Jangka Panjang

Nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan (3,22) dan = 1% adalah 4.817. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 152.4608. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} , artinya secara bersama-sama variabel suku bunga kredit investasi, DPK, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit investasi pada bank umum di Sulawesi Utara.

Nilai Koefisien Determinasi (R²)

Jangka Pendek

Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R adalah 0.329522, yang berarti variasi dari persentasi suku bunga kredit investasi , perubahan DPK, perubahan inflasi mempengaruhi perubahan persentase kredit investasi pada Bank Umum di Sulawesi utara sebesar 32.9522%, sedangkan sisanya (67.0478%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Jangka Panjang

Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R² adalah 0.954108, yang berarti variasi dari suku bunga kredit investasi (Ii), DPK, Inflasi mempengaruhi penyaluran kredit investasi pada bank umum sebesar 95.4108%, sedangkan sisanya (4.5892%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang dari variabel suku bunga kredit investasi (Ii), DPK dan Inflasi terhadap penyaluran kredit investasi pada Bank umum di Sulawesi Utara dari tahun 2007 triwulan pertama sampai 2013 triwulan kedua dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*). Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan Pada jangka pendek hanya ada satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kredit investasi yaitu variabel inflasi. Hal ini terjadi karena suatu variabel bereaksi terhadap variabel lainnya membutuhkan waktu (lag) dan pada umumnya reaksi suatu variabel terhadap variabel lainnya terjadi dalam jangka panjang yang ditunjukkan dengan koefisien pada ECT yang signifikan dan bernilai positif. Koefisien pada ECT tersebut berarti bahwa setiap bulan kesalahan dikoreksi untuk menuju ke keseimbangan jangka panjang.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang suku bunga berpengaruh signifikan terhadap kredit investasi dan temuan ini sesuai dengan teori, jika tingkat suku bunga kredit investasi meningkat maka permintaan kredit investasi pelaku usaha akan menurun.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit investasi pada bank umum dan temuan ini tidak sesuai dengan teori dimana apabila presentase dana pihak ketiga meningkat maka penyaluran kredit investasi yang disalurkan akan meningkat pula. Kondisi ini terjadi dikarenakan oleh fakta yang ada dengan gaya hidup masyarakat sulawesi utara, yang cenderung memiliki tingkat pola konsumsi yang tinggi, sehingga permintaan akan kredit konsumsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan kredit investasi sehingga DPK lebih banyak tersalurkan pada kredit konsumsi dari pada kredit investasi. Namun dalam jangka panjang DPK berpengaruh signifikan terhadap kredit investasi, dan temuan ini sesuai dengan teori.

Hasil pengujian dalam jangka panjang menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran kredit investasi pada bank umum dan temuan ini sesuai dengan teori yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang semakin tinggi, maka penyaluran kredit investasi akan semakin menurun. Ini dikarenakan oleh kenaikkan tingkat inflasi di kota manado

yang bersifat sementara sehingga dalam jangka panjang inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kredit investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia

Daryanti Ningsih, dan Idah Zuhroh, 2010. *Analisis permintaan kredit investasi pada bank swasta nasional di Jawa Timur*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Gujarati, Damodar, 2003. Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, International Editions, New York

Hasibuan, Malayu, 2006, Dasar-dasar perbankan, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Hedwigis esti ,& Sari wulandari, 2009. *Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kredit investasi di bank persero*. Institut Perbanas.

Insukindro.1991. Regresi Linier Lancung dalam Analisa Ekonomi: Studi kasus permintaan deposito dalam valuta asing di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.1.No.1

Kasmir, 2007. Pemasaran Bank. Edisi Revisi. Jakarta Prenada Media Group.

Maiva Linda, 2007. Responsifitas Kredit Investasi Terhadap Variabel Makroekonomi Dan Perbankan Pada Bank Persero Dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Dan Non Devisa

Nopirin, 1992. Ekonomi Moneter. Buku I. Yogyakarta; BPFE Yogyakarta.

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Konstekstual Indonesia). Jakarta ; Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rosyeti, dan Rita Yani Iyan, 2010. Peran dana pihak ketiga & tingkat suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit investasi bank umum di provinsi Riau. Universitas Riau Kampus Bina Widjaya.Riau.

Ridjin. 2001. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Kedua Jakarta ; Salemba Empat.

Supriyono, 2011. Buku Pintar Perbankan, Edisi Dua. Andi. Yogyakarta.

Simorangkir, 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Ghalia Indonesia: Bogor.

www.BI.go.id.com

www.BPS.go.id.com

PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA MANADO

Kinly I. Turangan, Vekie A.Rumate dan Jacline I. Sumual

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado email: qntur 91@yahoo.com

ABSTRAK

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sektor dengan pertumbuhan cepat ini telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi global. Tujuan Penelitian untuk menganalisis apakah jumlah wisatawan dan jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dari Tahun 2007-2011. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Metode yang di gunakan metode ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana Ordinary Least Square. Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel dan variabel dependent Penerimaan Pajak Daerah maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah tahun 2007 sampai 2011 dalam quartalan.bahwa jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Penerimaan Pajak Daerah.

ABSTRACT

The tourism sector is one of the strategic sectors in the development of the Indonesian economy. This rapidly growing sector has become part of the global economy. The purpose of research is to analyze whether the number of tourists and the number of hotels affect the local tax revenue of Year 2007-2011. Local revenue is revenue derived from the tax sector, retribution results of company-owned areas, the results are separated wealth management area, and other legitimate source revenues. The method used econometric methods to be used in this study is a multiple regression model with a simple least squares method (Ordinary Least Square). To obtain the results of the regression between the independent variables Total number of tourists and hotel and Local Tax Receipts dependent variable then used secondary data sourced from the Regional Revenue Office 2007 to 2011 in the quarterly, that the number of tourists affected significantly to the local tax revenue while the number of hotel no significant effect on local tax revenue.

Keywords: Number of Tourists, Number of Hotels, Local Tax Revenue.

A. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sektor dengan pertumbuhan cepat ini telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi global. Tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran merupakan dua permasalahan besar di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena adanya permintaan dari para wisatawan yang datang. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha hotel, restoran, jasa penunjang angkutan dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata sehingga peluangtersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja sehingga masyarakat akan memperoleh pendapatan dari pekerjaan tersebut.

Secara konseptul ekowisata sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Dari segi pengelolaanya, ekowisata sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatnkan kesejahtraan masyarakat setempat. Sementara itu dari segi perjalanannya yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahtraan penduduk setempat"

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa ekowisata adalah ecological tourism, yaitu suatu model pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola secara kaidah alam untuk menikmati dan menghargai alam (dan segala bentuk budaya yang menyertainya) yang mendukung konservasi, melibatkan unsur pendidikan dan pemahaman, memiliki dampak yang rendah dan keterlibatan aktif sosio ekonomi masyarakat setempat. Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan pontensi sumbersumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan,sumber-sumber pendapatan melalui ekowisata ini diupayakan dalam rangka pengembangan suatu daerah.

Pengembangan suatu pemerintah daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing,Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah.Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.Karena satu hal yang tidak bisa dipungkiri bagaimanapun konsep otonomi daerah adalah tetap selalu berada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan-urusan dari daerah itu sendiri.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu lewat mencari sumber-sumber pendapatan yang baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumberdaya yang ada.Semakin tinggi PAD berarti daerah tersebut bisa dikatakan berhasil dalam penyelenggaraan dan

pembangunan.Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian dari Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dimana hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh),

Adapun pengertian Pajak Hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif tertinggi Pajak Hotel sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah sebesar 10 %, Adapun pengertian Pajak Restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah, yaitu pajak atas peleyanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencangkup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif tertinggi Pajak Restoran sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah sebesar 10%, Adapun Pajak Hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran dengan tarif pajak hiburan sebesar 5%-40%.

Tabel 1. Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Manado

Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah Hotel	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)
2007	349.728	64	16.258.025.507
2008	441.825	94	20.824,636.859
2009	487.463	94	24.076.633.708
2010	550.915	96	31.931.005.518
2011	552.397	109	40.529.909.657

(Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, Dispenda Kota Manado tahun 2013)

Data diatas dapat dilihat Jumlah wisatawan dari tahun 2007-2011 mengalami kenaikan sedangkan jumlah hotel mengalami kenaikan dan juga ada yang tetap seperti pada tahun 2008-2009 dan seterusnya mengalami kenaikan begitupun Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2007-2011 mengalami kenaikan.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengertian pajak Djajadiningrat dalam Resmi, 2009:1 Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum" (Supramono & Damayanti, 2009:2). Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:

- 1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
- 2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
- 3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- 4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Fungsi pajak (Resmi, 2011:3) dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan: Teori dan Kasus" yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
 - Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
- b. Fungsi Regularend (Pengatur)
 - Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberpa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
 - 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap baran-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka terif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlombalomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
 - 2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yag memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - 3. Tarif pajak ekspor dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
 - 4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat menggangu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
 - 5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
 - 6. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asingagar menanamkan modalnya di Indonesia.

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Mardiasmo, 2011:7)):

1. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- 2. Wajib Pajak bersifat Pasif
- 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.

- 2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pengelompokan pajak (Menurut Supramono & Damayanti, 2011:5), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

b. Pajak Tak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalahpajak subyektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Obyektif

Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain: yaitu Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Selain pengelompokkan tersebut, pajak juga dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :

1. Pajak Final

Pajak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh.

2. Pajak Tidak Final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada

total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan. Misalnya, Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 24, serta PPN.

Jumlah wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Menurut organisasi wisata dunia (WTO) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Lewat industri ini, banyak negara diselamatkan dari serangkaian krisis-krisis ekonomi yang terjadi.

Jumlah hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

"Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penelitian Terdahlu (Kajian Empiris) Aldo adam (2013) dengan judul hubungan jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di kota manado bertujuan untuk menganalisis apakah jumlah wisatawan dan jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, perbedaan dari penelitian ini menggunkan analisis korelasi berganda. Nasrul Qadarroch (2010) dengan judul analisis penerimaan daerah dari sektor pariwisata di kota semarang dan faktor-faktor yang mempengarui.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, apakah jumlah wisatawan dan jumlah hotel berpengaruh terhadapa penerimaan pajak daerah di kota manado pada tahun 2007-2011

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif kwartalan pada rentang waktu antara tahun 2007 – 2011 dengan pertimbangan ketersediaan data. Data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder *time series*. Berhubung karena data jumlah wisatawan, jumlah hotel dan pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak hiburan) hanya tersedia dalam bentuk tahunan maka data tersebut diubah dalam bentuk kwartalan untuk periode 2007 – 2011 Perubahan menjadi data kwartallan dilakukan dengan menggunakan *metode interpolasi linear*

Tempat penelitian yang dilakukan, dilaksanakan penelitian di Kantor Dinas Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat jalan 17 Agustus dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dengan alamat jalan 17 Agustus. Waktu pelaksanaan penelitian pada tanggal 27 November 2013 dan Tanggal 11 Desember 2013

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi Data realisasi anggaran pendapatan Pajak Hotel,Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Manado selama tahun 2007-2011 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Data jumlah wisatawan Kota Manado selama tahun 2007-2011 yang dinyatakan dalam jumlah Jiwa, bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Data jumlah hotel di Kota

Manado selama tahun 2007-2011 yang dinyatakan dalam jumlah unit, bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Metode ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square*). Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen (Gujarati, 1999). Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *Eviews 5.0* dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya.

Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Uji F-statistik ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama/serentak terhadap variabel dependen. Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel X1, dan X2 terhadap variasi (naik turunnya) Y digunakan koefisien determinasi. Nilai R^2 digunakan antara 0 sampai 1 (0 < R^2 < 1) semakin mendekati 1 berarti semakin tepat garis regresi untuk meramalkan nilai variabel terkait Y.

Uji Heteroskedastisitas menunjukkan disturbance yang dapat ditunjukkan dengan adanya conditional variance Yi bertambah pada waktu X bertambah. Dapat dikatakan bahwa heteroskedastisitas menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil taksiran dapat menjadi kurang dari semestinya, melebihi dari semestinya dan menyesatkan.

Uji Autokorelasi merupakan pelonggaran asumsi klasik yang menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat kolerasi antar error term. Autokolerasi sering disebut dengan kolerasi serial (serial correlation) terjadi kebanyakan pada serangkaian data runtut waktu (time series).

Uji Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen di antara satu dengan lainnya. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regrasi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, memiliki yaitu jenis pajak daerah yang berhubungan dengan sektor pariwisata sehingga definisi oprasional yakni pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: keseluruhan jumlah dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Berdasarkan Realisasi dalam jumlah milyar rupiah bersumber dari dinas pendapatan daerah kota manado.

Variabel Independen dalam penelitian ini meliputi:

- 1. Jumlah wisatawan adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kota Manado. Dinyatakan dalam jumlah jiwa bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
- 2. Jumlah hotel adalah banyaknya penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Dinyatakan dalam jumlah unit bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel (Jlh Wstn, Jlh Htl) dan variabel dependent Penerimaan Pajak Daerah (Pjk Drh) maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah tahun 2007 sampai 2011 dalam kwartalan. Data sekunder tersebut diestimasikan dengan analisis regresi berganda seperti yang sudah

dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program Eviews 5.0 untuk uji t, uji F, uji R2 sampai dengan uji asumsi klasik. Dari hasil regresi dapat dibentuk model estimasi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Persamaan Jangka Panjang (OLS)

Variabel	Coefficient	t-statistik	Probabilitas		
Jlh Wstn	8.90E-05	2.336024	0.0320		
Jlh Htl	0.027063	0.140003	0.8903		
С	-4.421078	-2.148901	0.0463		
$R^2 = 0.646825$					
F-statistic = 15.56742					

Sumber: Data Diolah

Hasil estimasi persamaan OLS untuk periode 2007.1 - 2011.4 adalah sebagai berikut: $Pjk\ Drh = -4.421078 + 8.90E-05 Jlh\ Wstn + 0.027063 Jlh\ Htle_t$

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi dapat dipercaya maka dilakukan pengujian lebih lanjut yaitu berupa uji statistik.Uji tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah penafsiran-penafsiran terhadap parameter sudah bermakna secara teoritis dan nyata secara statistik.

Uji t-statistik dilakukan untuk menguji apakah Jumlah wisatawan secara parsial berpengaruh nyata terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung >t-tabel (2.336024< 2.120).Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan diterimanya H0, maka perubahan persentase Jumlah wisatawan mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% (=5%) terhadap perubahan penerimaan pajak daerah.

Uji t-statistik dilakukan untuk menguji apakah Jumlah hotel secara parsial berpengaruh nyata terhadap Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (0.0140003> 2.120).Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Dengan diterimanya H0, maka perubahan Jumlah Hotel mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% (=5%) terhadap persentase penerimaan pajak daerah

Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel pada derajat kebebasan (k-1, n-k-1) dan tingkat signifikansi () 5%.Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas dan jika F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas.

Nilai F-tabel dengan derajat kebebasan (20) dan =5% adalah 3.34928. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F-hitung adalah15.56742. Dengan demikian F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, artinya secara bersama-sama variabel Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Nilai R2 (koefisien determinasi) dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.Nilai R2 berkisar antara 0-1. Nilai R2 makin mendekati 0 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin kecil dan sebaliknya nilai R2 makin mendekati 1 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin besar. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R2 adalah 0.646825, yang berarti variasi dari perubahan persentase Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel mempengaruhi persentase penerimaan pajak daerah sebesar 64.682%.Sedangkan sisanya (35.318%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pengujian asumsi klasik Agar hasil empirik diatas dapat diterima secara ekonometrik, maka diperlukan syarat BLUE (Best, Linear, Unbias, Estimator) dari metode kuadrat terkecil (OLS). Pengujian yang dilakukan dalam model antara lain: Uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi dalam model yang estimasi, karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut. Uji t dan uji F yang dilakukan menjadi tidak falid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.dari buku ekonometrika.

Dengan kata lain, apakah hasil-hasil regresi telah memenuhi kaidah Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) sehingga tidak ada gangguan serius terhadap asumsi klasik dalam metode kuadrat terkecil tunggal (OLS) yaitu masalah Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokesdasitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah pengujian White. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan bantuan program komputer eviews dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

R ² =0.237492	
Obs*Rsquared=4.749849	
Chi-squares (²) pada 0.059	% =9.488

Sumber: data diolah

Dari table di atas diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0.237492.Nilai Chi-squares hitung sebesar 4.749849 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan R2). Di lain pihak, nilai kritis nilai Chi-square (2) pada = 5% dengan df sebesar 2 adalah 9.488. Karena nilai Chi-squares hitung (2) lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares (2) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi Untuk mendeteksi masalah autokolerasi digunakan Uji Lagrange Multiplier. Jika nilai Chi-squared hitung 2 < dari nilai kritis Chi-squared 2, maka model estimasi tidak terdapat autokolerasi. begitu pula sebaliknya jika nilai Chi-squared hitung 2 > dari nilai kritis Chi-squared 2, maka model estimasi tidak terdapat autokolerasi.

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

$R^2 = 0.423309$	
chi squares $\binom{2}{2} = 8.46$	5618
nilai kritis (²) pada	10% =4.605
nilai kritis (²) pada	5% =5.991
nilai kritis (²) pada	1% =9.210

Sumber: data diolah

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R2) sebesar 0.423309. Nilai chi squares hitung (x2), sebesar 8.46618 sedangkan nilai kritis (x2) pada = 1% dengan df sebesar 2 karena nilai chi squares hitung (x2) < dari pada nilai kritis chi squares (x2), maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan diantara variabel bebas. Deteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan melakukan regresi suatu variabel independen terhadap variabel-variabel independen yang lain dalam model. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas maka dibangun hipotesis sebagai berikut:

 $H_0: _1 = _2 = _3 = 0$ $H_a: _1 = _2 = _3 = 0$

 H_0 diterima jika F_{statik} lebih kecil $F_{\text{tabel.}}$ Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah Multikolinearitas.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	F statistic	F table
JlhWstn	74.42523	19.00
JlhHtl	74.42523	19.00

Sumber: Data Diolah

Dari tabel hasil analisis uji multikolinieritas di atas terlihat bahwa F-statistik lebih kecil dari F-tabel.Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima.Dengan diterimanya H_0 berarti tidak terdapat Multikolinearitas.

Dalam kaitan adanya kolinear yang tinggi sehingga menimbulkan tidak terpenuhi asumsi terbebas dari masalah multikolinearitas, dengan mempertimbangkan sifat data dari *time series*, maka bila tujuan hanya sekedar untuk keperluan prediksi, hasil regresi dapat di tolerir, sepanjang nilai t signifikan. (Gujarati, 1995)

Berdasarkan Hasil penelitian terhadap jumlah wisatawan yang signifikan, hal tersebut ditunjukkan dari turun naiknya wisatawan di Kota Manado, Ini mendukung adanya peningkatan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran,dan Pajak Hiburan. Jadi semakin meningkatnya jumlah wisatawan tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran,dan Pajak Hiburan. dengan alasan karena dalam proses pemungutan pajak hotel, pajak restoran sebesar 10% sedangkan pajak hiburan tarif pajaknya dari 5% bisa mencapai 40%.

Pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil pengujian jumlah hotel dari tahun ke tahun walaupun ada yang tetap atau bahkan bertambah di Kota manado berpengaruh secara positif namun tidak signifikan yang mendukung penerimaan pajak daerah di Kota Manado. Melihat dari keseluruhan penelitan, hubungan antara jumlah wisatawan dan jumlah hotel adalah kuat terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Manado. Dan yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah adalah jumlah wisatawan. Sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Pada kenyataannya wisatawan yang datang berkunjung di Manado, ada yang menginap dan tidak menginap di hotel karena mereka memiliki saudara atau kerabat yang ada di Manado

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data yang sudah diolah, menjawab dari tujuan penelitian pada bab Sebelumnya.

1. Bahwa jumlah wisatawan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado. Walaupun turun naiknya jumlah wisatawan yang datang di Kota Manado.

2. Bahwa jumlah hotel tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Walaupun perkembangan Pajak Daerah dari tahun 2007-2011 ada yang tetap bahkan ada yang bertambah.

Dan adanya pengaruh yang kuat antara jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Aldo Adam, 2013, **Hubungan Jumlah Wisatawan,Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Manado.**

Azinar Muqaddas R., A. Karim Saleh dan Madris, 2011, Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Parepare.

Felita. 2006. **Analisa Pengaruh Faktor Jumlah Wisatawan dan Tingkat Okupansi Kamar Hotel Berbintang Terhadap Realisasi Pajak Hotel di Kota Surabaya**, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Gujarati, Damodar, 2003. Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, International Editions, New York.

http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/uji-multikolinearitas.html

http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/uji-hteroskedastisitas.html

http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/uji-autokorelasi.html

http://dayintapinasthika.wordpress.com/2011/04/06/pembangunan-ekonomi-daerah/

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak

Kuncoro, Mudrajad, 2009, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, edisi revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nasrul Qadarrochman, 2010, **Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya**

Nugraha, Satria, 2012, **Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel**, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Resmi, Siti, 2009, Perpajakan: Teori dan Kasus, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Suparmono - Damayanti, 2009, **Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan,** Penerbit Andi, Yogyakarta.

Siahaan, Marihot, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Rajagrafindo Persada

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pengertian Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia Edisi 10, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

ANALISIS POTENSI PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO)

Marlon Brando Pandeirot, Vekie Rumate dan Richard Tumilaar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulang,i Manado e-mail: marlon pandeirot@yahoo.co.id

ABSTRAK

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan. Tujuan penelitian ini untuk menentukan potensi perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro SITARO sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (time series) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Provinsi Sulawesi Utara2008-2012. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis Klassen Tipology, analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share. Hasil analisis yang menunjukan potensi perekonomian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berdasarkan ketiga analisis sektor yang dikategorikann sektor yang sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu sektor listrik dan air bersih dan sektor jasa-jasa. Sektor yang merupakan sektor basis, yaitu sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik dan air bersih, dan sektor jasa-jasa. Sektor yang merupakan sektor kompetitif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor pengangkutan dan konstruksi, sektor Bank dan lembaga keuangan lainnya, dan jasa-jasa.

Kata Kunci: Potensi, Klassen Typology, Location Quotient dan Shift Share.

ABSTRACT

To achieve the goal of regional economic development, the main policy that needs to be done is to try as much as possible in order of priority according to the regional development potential of the area. It is associated with the potential development of every region vary widely, each region must determine the dominant economic sector. The purpose of this study was to determine the economic potential of the district Siau Islands Tagulandang Biaro Sitaro as a material consideration in the planning of information and economic development. This study uses secondary data in the form of time series (time series) of the Gross Domestic Product (GDP) Siau Islands District Tagulandang Biaro and Sulawesi Utara2008-2012. The analytical tool used in this study, which analyzes Tipology Klassen, Location Quotient (LQ) and the shift share analysis.

The results of the analysis indicate potential economic Biaro Tagulandang Siau Islands District, based on the analysis of third sector dikategorikann advanced sectors and sectors that are growing rapidly, ie electricity and water sector and the services sector. Sector which is the basis of the sector, namely agriculture, transport and communication, electricity and water sector, and services sector. Sector that is competitive sectors, namely mining and quarrying, electricity and clean water, building and construction sector, the transport sector and the construction sector, the Bank and other financial institutions, and services.

Keywords: Potential, Klassen Typology, Location Quotient and Shift Share

A. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama. Karena proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya. Indonesia dituntut untuk melakukan pembangunan di segala bidang dan di berbagai tempat. Salah satunya dilakukan di daerah, karena pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang membangun seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan pembangunan di daerah dilakukan dalam rangka meniadakan ketimpangan dan menyamakan serta memadukan seluruh kegiatan. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pembangunan yang menyeluruh pada tiap sektor. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia pada dasarnya terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian;(3) industri pengolahan; (4) listrik dan air bersih; (5) bangunan dan konsturksi; 6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

Khususnya Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini secara administratif terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota. Komoditi unggulan pada Provinsi Sulawesi Utara terdapat di sektor pertanian, perkebunan dan jasa. Untuk sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan yaitu kelapa, kopi dan kakao. Untuk sektor jasa, bidang pariwisata menjadi komoditi yang sangat diandalkan, dengan obyek wisata bahari yang sangat terkenal hingga ke mancanegara yaitu Pulau Bunaken. Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007 menjadi salah satu kabupaten dari 11 kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sitaro .

Kabupaten Kepulauan Sitaro memiliki Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha dan Harga Konstan Tahun 2000 secara rata-rata dari Tahun 2008-2012 dengan minyak dan gas sebesar 313.275,86 juta, begitu pula dengan Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha dan Harga Konstan Tahun 2000 secara rata-rata Tahun 2008-2012 tanpa minyak dan gas tidak mengalami perubahan sebesar Rp. 313.275,856 juta. Subsektor minyak dan gas tidak sama sekali memberikan konstribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sitaro .

Sektor yang memberikan kontribusi paling besar adalah sektor pertanian sebesar Rp. 101.796,45 juta pada Tahun 2012 atau dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 30.99 %. Sedangkan di peringkat kedua disusul oleh sektor jasa-jasa mencapai Rp. 71.139,10 juta pada Tahun 2012 atau dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 19,12 %. Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar Rp. 3.335,52 juta pada Tahun 2012 atau dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 0,83 %. Sedangkan dari pertumbuhan ekonominya, Kabupaten Kepulauan Sitaro mempunyai laju pertumbuhan rata-rata tahun 2008-2012 sebesar 7,72 %.

Kontribusi sektor serta laju pertumbuhan yang relatif meningkat, bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah melakukan kebijakan efektif. Pemerintah Kabupaten Kepulaun Sitaro tetap di tuntut untuk menggali dan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang dimiliki sehingga memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara

keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang tercipta di suatu wilayah.

Sedangkan menurut Todaro (1994:142) pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur, sikap dan faktor kelembagaan, juga percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan absolut.

Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Untuk dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi salah satu alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah melalui penyajian angka-angka pendapatan regional.

Menurut Arsyad (1999:163) sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dariseluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut teori Basis Ekspor (*Export Base Theory*), pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya ditentukan oleh besarnya Keuntungan Kompetitif (*Competitive Advantage*) yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. Bila suatu wilayah tertentu dapat mendorong pertumbuhan sektorsektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan akan meningkat cepat. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan ekspor tersebut akan memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) yang cukup besar bagi perekonomian daerah bersangkutan (Sjafrizal 2012:90).

Teori pola pembangunan Chenery memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai roda penggerak ekonomi. Penelitian yang dilakukan Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri.

Perubahan struktur ekonomi atau disebut juga transformasi struktural, didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam komposisi dari permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti penggunaan tenaga kerja dan modal) yang disebabkan adanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro, 2000).

Menurut Arsyad (1999:108) permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi.

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah klasifikasi dan potensi perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro?
- 2. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro ?

3. Bagaimanakah perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

- 1. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
- 2. Untuk mengetahui sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
- 3. Untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk:

- 1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sitaro.
- 2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang terkait dengan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro) yang merupakan salah satu Kabupaten Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Utara. Pertimbangan penelitian dilakukan di Sitaro. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data, yaitu data kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, PDRB Kabupaten Sitaro dan Provinsi Sulawesi Utara periode 2008-2012. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sitaro dan Provinsi Sulawesi Utara. Serta Data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini.

Data sekunder peneliti peroleh dengan cara mengambil data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda dan sebagainya kesumbernya dan penelitian-penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan kebutuhan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data, yaitu:

- 1. Analisis *Tipologi Klassen* digunakan untuk memperoleh klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Sitaro.
- 2. Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Sitaro.
- 3. Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kabupaten Sitaro.

Analisis *Tipologi Klassen* menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:180):

Tabel 1. Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen

Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector) s _i > s dan sk _i > sk	$\begin{tabular}{ll} \textbf{Kuadran II} \\ \textbf{Sektor maju tapi tertekan } (\textit{stagnant} \\ \textit{sector}) \\ \textbf{s}_i < \textbf{s} \ \textit{dan } \textbf{sk}_i > \textbf{sk} \\ \end{tabular}$
Kuadran III Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector) si > s dan ski < sk	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sector) si < s dan ski < sk

(Sjafrizal, 2008:180)

Keterangan:

si = Rata-rata laju pertumbuhan di Kabupaten Kepulauan Sitaro s = Rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Utara ski = Rata-rata kontribusi di Kabupaten Kepulauan Sitaro sk = Rata-rata kontribusi di Provinsi Sulawesi Utara

Mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val *dalam* Kuncoro (2004:183) sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{PDRB_{ST,i}}{PDRB_{ST}}}{\frac{PDRB_{SU,i}}{PDRB_{SU,i}}}$$

Dimana:

 $PDRB_{ST,i}$ = PDRB sektor i di Kabupaten Sitaro pada tahun tertentu. $PDRB_{ST}$ = Total PDRB di Kabupaten Sitaro pada tahun tertentu.

PDRB_{SU,i} = PDRB sektor i di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun tertentu. PDRB_{SU} = Total PDRB di Provinsi Sulawesi Utara pada tahuntertentu.

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada tiga kemungkingan nilai LQ yang dapat diperoleh (Bendavid-Val *dalam* Kuncoro, 2004:183), yaitu:

LQ> 1 = Sektor merupakan sektor basis dan sektor potensial

LQ< 1 = Sektor merupakn sektor non basis dan tidak pontesial

1. Analisis Shift Share (Shift Share Analysis)

Provincial Share (PS), *Proportional Shift* (P), dan *Differential Shift* (D) dapat diformulasikan sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:91):

1.Provincial Share (PS)

$$P_{iST}^{t} = Y_{iST}^{t-1} \times (\frac{Y_{iSU}^{t}}{Y_{iSU}^{t-1}} - \frac{Y_{SU}^{t}}{Y_{SU}^{t-1}})$$

2.Proportional Shift (P)

$$PS_{iST}^{t} = Y_{iST}^{t-1} \times (\frac{Y_{SU}^{t}}{Y_{SU}^{t-1}} - 1)$$

3. Differential Shift (D)

$$D_{iST}^{t} = Y_{iST}^{t-1} \times (\frac{Y_{iST}^{t}}{Y_{iST}^{t-1}} - \frac{Y_{iSU}^{t}}{Y_{iSU}^{t-1}})$$

Di mana:

SU = Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah referensi yang lebih tinggi jenjangnya.

ST = Kabupaten Sitaro sebagai wilayah analisis.

Y = Nilai tambah bruto i = Sektor dalam PDRB

t = tahun 2012

t-1 = tahun awal (tahun 2008)

Perubahan (pertumbuhan) nilai tambah bruto sektor tertentu (i) dalam PDRB Kabupaten Sitaro merupakan penjumlahan *Provincial Share* (PS), *Proportional Shift* (P), dan *Differential Shift* (D) sebagai berikut:

$$\Delta Y_{iST}^t = PS_{iST}^t + P_{iST}^t + D_{iST}^t$$

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberi batasan definisi operasional sebagai berikut:

- a. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dalam satuan jutaan rupiah .
- b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diukur dalam satuan jutaan rupiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Utara yang terletak antara 125° 9'28" – 125° 24'25" BT dan 02° 4'13" – 02° 52'47" LU. Batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Tatoareng Kab. Kepl. Sangihe, sebelah timur dengan Laut Maluku, sebelah selatan dengan Kabupaten Minahasa Utara, dan sebelah barat berabatasan dengan Laut Sulawesi. Secara administrasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terbagi atas 10 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 80 Desa. Kecamatan tersebut adalah: Siau Timur, Siau Timur Selatan, Siau Tengah, Siau Barat, Siau Barat Utara, Siau Barat Selatan, Biaro, Tagulandang, Tagulandang Utara, Tagulandang Selatan. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Perekonomian Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Metode *Klassen Tipology* digunakan untuk mengetahui pengelompokkan sektor ekonomi dalam Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menurut struktur pertumbuhannya, *Matrix Klassen* dapat dilakukan empat pengelompokkan sektor dengan memanfaatkan laju pertumbuhan dan nilai kontribusi.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Sitaro Tahun 2008-2012 dengan Migas (%)

NO.	SEKTOR	Sulawesi Utara		Kab.Kep SITARO	
		Rata-Rata	Rata-Rata	Rata-Rata	Rata-Rata
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
		(S)	(Sk)	(Si)	(Ski)
1.	Pertanian	4,33	19,00	3,74	30,99
2	Pertambangan dan	6,90	5,12	2,82	9,08
	Penggalian				
3.	Industri Pengolahan	7,49	7,80	5,68	0,97
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	9,09	0,78	11,95	0,82
5.	Konstruksi	8,75	15,99	12,30	10,92
	Perdagangan, Hotel &				
6.	Restoran	11,79	16,60	9,04	15,19
	Pengangkutan &				
7.	Komunikasi	10,64	12,84	10,18	15,18
8.	KEU. Real Estat, & Jasa				
	Perusahaan	9,09	6,69	9,91	3,99
9.	Jasa-Jasa	7,70	15,18	8,64	19,12

Diolah dari Data Penelitian, 2013

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) tanpa migas diikuti oleh sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) tanpa migas yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah pertumbuhan rata-rata, paling besar ditunjukkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi kemudian diikuti sektor bangunan dan konstruksi, sektor listrik dan air bersih.

Tabel 3.Klasifikasi Sektor dan Subsektor PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Tahun 2008-2012 dengan Migas berdasarkan *Tipologi Klass*en

Kuadran I Sektor dan Subsektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector) s _i > s dan sk _i > sk • Listrik gas dan air bersih • Jasa-Jasa	Kuadran II Sektor dan Subsektor maju tapi tertekan (stagnant sector) s _i < s dan sk _i > sk • Pertanian • Pengangkutan dan Komunikasi
Kuadran III Sektor dan Subsektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector) si > s dan ski < sk • Pertambangan & Penggalian • Bangunan dan kontruksi • Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	Kuadran IV Sektor dan Subsektor relatif tertinggal (underdeveloped sector) si < s dan ski < sk • Perdagangan Hotel dan Restoran • Indutri Pengolahan

Data diolah dari Tabel 2.

Hasil analisis pada Tabel 3. terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan migas, sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh pesat adalah sektor jasa-jasa dan sektor listrik, gas & air bersih. Sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan, walaupun sektor pertanian memiliki kontribusi yang paling besar tetapi pertumbuhan rata-rata terus menurun. Sektor-sektor yang tergolong ke dalam sektor potensial untuk berkembang adalah sektor pertambangan & penggalian, sektor bangunan dan konstruksi, sektor industri pengolahan, dan sektor bank dan lembaga keuangan yang lainnya. Ternyata hasil analisis menunjukkan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai dua sektor yang maju dengan pesat dan dua sektor yang maju walaupun tertekan. Tabel 4. menyajikan hasil pengolahan data, yaitu berupa rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Sitaro Tahun 2008-2012 tanpa migas.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Sitaro Tahun 2008-2012 Tanpa Migas (%)

NO.	SEKTOR	Sulawesi Utara		Kab.Kep SITARO	
		Rata-Rata	Rata-Rata	Rata-Rata	Rata-Rata
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
		(S)	(Sk)	(Si)	(Ski)
1.	Petanian	4,33	19,00	3,49	30,99
2	Pertambangan dan				
	Penggalian	6,90	5,13	9,08	2,82
3.	Industri Pengolahan	7,49	7,80	5,68	0,97
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	9,47	0,79	11,95	0,82
5.	Konstruksi	8,75	16,02	12,30	10,92
	Perdagangan, Hotel &				
6.	Restoran	11,79	16,60	9,04	15,19
	Pengangkutan &				
7.	Komunikasi	10,64	12,89	10,18	15,18
8.	KEU. Real Estat, & Jasa				
	Perusahaan	9,09	6,70	9,91	3,99
9.	Jasa-Jasa	7,70	15,20	8,64	19,12

Diolah dari Data Penelitian, 2013

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) tanpa migas diikuti oleh sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) tanpa migas yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah pertumbuhan rata-rata, paling besar ditunjukkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi kemudian diikuti sektor bangunan dan konstruksi, sektor listrik dan air bersih.

Tabel 6. Klasifikasi Sektor dan Subsektor PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Tahun 2008-2012 tanpa Migas berdasarkan *Tipologi Klass*en

Kuadran I	Kuadran II		
Sektor dan Subsektor yang maju dan tumbuh	Sektor dan Subsektor maju tapi tertekan		
dengan	(stagnant		
pesat (developed sector)	sector)		
$s_i > s dan sk_i > sk$	$s_i < s dan sk_i > sk$		
 Listrik gas dan air bersih 	 Pertanian 		
• Jasa-Jasa	 Pengangkutan dan Komunikasi 		
Kuadran III	Kuadran IV		
Sektor dan Subsektor potensial atau masih	Sektor dan Subsektor relatif tertinggal		
dapat	(underdeveloped sector)		
berkembang (developing sector)	si < s dan ski < sk		
si > s dan ski < sk	 Perdagangan Hotel dan Restoran 		
 Pertambangan & Penggalian 	 Indutri Pengolahan 		
Bangunan dan kontruksi			
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya			

Sumber: Data diolah dari Tabel 6.

Tabel 6. menunjukkan bahwa, klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanpa migas 2008-2012 berdasarkan *Tipologi Klassen*, hanya terdapat dua sektor maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu sektor listrik dan air bersih dan sektor jasa-jasa. Sedangkan kategori maju tapi tertekan terdapat dua sektor yaitu sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Tiga sektor kategori potensial dan masih dapat berkembang yaitu sektor pertambangan & penggalian, sektor bangunan dan kontruksi, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Kategori relatif tertinggal terdapat dua sektor. Sektor hotel dan restoran,dan sektor industri pengolahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontrubusi rata-rata paling besar namun belum dikembangkan dan maju secara maksimal apabila menganalisa PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanpa migas. Sementara itu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro masih memiliki tiga relatif yang potensial atau masih dapat berkembang, yang 105ela menjadi pendorong lebih untuk pembangunan perekonomian. Kabupaten Kepulauan Siau juga mempunyai dua relatif yang relative tertinggal dan harus lebih di perhatikan.

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sektor basis dan non basis. LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat Provinsi Sulawesi utara. Nilai LQ > 1 berarti bahwa peranan suatu sektor di Kabupaten lebih dominan dibandingkan sektor di tingkat Provinsi dan sebagai petunjuk bahwa Kabupaten surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya bila nilai LQ < 1 berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di Kabupaten dibandingkan peranannya di tingkat Provinsi.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) dengan Migas Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008-2012

NO.	SEKTOR		TAHUN				LQ	Basis/non
	•	2008	2009	2010	2011	2012	Rata- Rata	basis
1.	Pertanian	1,640919785	1,680879597	1,612059739	1,628200127	1,583529164	1,62	В
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,508582057	0,530227141	0,569889658	0,580881121	0,567370468	0,55	N
3.	Industri Pengolahan	0,131220832	0,125874448	0,115918834	0,118259698	0,127910576	0,12	N
4.	Listrik dan Air Bersih	1,030263902	0,987577404	0,980723717	1,134404221	1,180562608	1,07	В
5.	Bangunan dan Konstruksi	0,613603597	0,658788944	0,714899809	0,698444816	0,73300963	0,69	N
6.	Perdagangan,Hotel dan Restoran	0,959026289	0,944052414	0,928717423	0,887182493	0,866161407	0,91	N
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,216065919	1,135660648	1,135018422	1,174849674	1,246393822	1,19	В
8.	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	0,591649398	0,590537454	0,580018276	0,604088219	0,619313822	0,59	N
9.	Jasa-Jasa	1,221867822	1,226817007	1,251140371	1,312004245	1,290494699	1,27	В

Diolah dari data penelitian, 2013

Berdasarkan Tabel 7. dari hasil perhitungan indeks *Location Quotient* PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan migas selama periode pengamatan tahun 2008-2012, maka dapat teridentifikasikan sektor-sektor basis dan non basis. Kontribusi sub sektor minyak dan gas sangat besar terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. sehingga hanya terdapat empat sektor basis, yaitu pertanian dengan LQ rata-rata sebesar 1,63, Lisrik dan Air bersih dengan LQ rata-rata sebesar 1,06, Pengangkutan dan Komunikasi dengan LQ rata-rata sebesar 1,18, serta sektor jasa-jasa 1,26. Hal ini menunjukkan ketiga sektor tersebit merupakan sektor basis yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) tanpa Migas Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008-2012

NO.	SEKTOR	TAHUN					LQ	Basis/Non
		2008	2009	2010	2011	2012	Rata- Rata	Basis
1.	Pertanian	1,6380429	1,677657844	1,609116628	1,625192792	1,580283951	1,62	В
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,507690403	0,529210851	0,568849219	0,579808216	0,566207725	0,55	N
3.	Industri Pengolahan	0,130990774	0,125633183	0,115707203	0,118041269	0,127648442	0,12	N
4.	Listrik dan Air Bersih	1,028457628	0,985684508	0,978933225	1,132308942	1,178143216	1,07	В
5.	Bangunan dan Konstruksi	0,612527818	0,657526238	0,713594628	0,697154767	0,731507433	0,69	N
6.	Perdagangan,Hotel dan Restoran	0,95734491	0,942242943	0,927021879	0,88554384	0,864386335	0,91	N
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,213933894	1,133483919	1,132946237	1,172679691	1,243839518	1,18	В
8.	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	0,59061211	0,589405567	0,578959346	0,60297245	0,618044628	0,59	N
9.	Jasa-Jasa	1,219725625	1,224465558	1,248856185	1,309580933	1,287850017	1,25	В

Diolah dari Data Penelitian, 2013

LQ sektor pertanian menunjukkan trend yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Sub sektor dari sektor pertanian memiliki nilai LQ > 1 yaitu sub sektor perikanan dan sub sektor pertanian. Sub sektor dengan nilai LQ terbesar dari sektor pertanian didominasi oleh perikanan laut dengan nilai 3,07 yang di dukung dengan keadaan geografis Kabupaten SITARO yang merupakan Kabupaten Kepulauan. Kemudian Sub sektor tanaman perkebunan dengan nilai LQ sebesar 1,99 merupakan kontribusi dari beberapa komoditi perkebunan dominan secara berturut-turut pala, kelapa, dan cengkeh.

LQ sektor listik dan air bersih didukung dengan sub sektor dengan LQ>1 yaitu sub sektor listik dengan nilai LQ 1,06. LQ pengakutan dan komunikasi didukung sub sektor pengakutan laut sebesar 1,18 serta sub sektor nilai LQ terbesar sub sektor pengangkutan sungai, danau , dan penyebrangan dengan nilai LQ 4,7. Sektor jasa dengan LQ senilai 1,15 didukung dengan sub sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan serta sub sektor jasa sosisal kemasyarakatan.

Meskipun sektor basis merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, akan tetapi peran sektor non basis tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena dengan adanya sektor basis akan dapat membantu pengembangan sektor non basis menjadi sektor basis baru.

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dikaitkan dengan perekonomian daerah yang menjadi referensi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara . Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dikaitkan dengan perekonomian daerah yang menjadi referensi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Analisis *Shift Share* dalam penelitian ini menggunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Analisis penentuan sektor ekonomi strategis dan memiliki keunggulan untuk dikembangkan dengan tujuan untuk memacu laju pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Untuk mengetahui sektor spesialisasi daerah serta pertumbuhannya digunakan komponen *Provincial Shre* (PS), *Proportional Shift* (P), dan *Differential Shift* (D). Hasil perhitungan analisis *shift share* PDRB Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan migas tahun 2008-2012 pada Lampiran 7 dicantumkan pada Table 9...

Tabel 9. Hasil Perhitungan Nilai *Shift Share* Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008-2012 dengan Migas

No	Sektor	Provincial	Proportional	Differential	Total (Y)
		Share (PS)	Shift (P)	Shift (D)	
1.	Pertanian	30602,08	-15641,03037	-3541,8	11419,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	2492,206	-756,4959646	1065,638	2801,348
3.	Industri Pengolahan	936,935	-80,52619579	-86,4608	769,948
4.	Listrik dan Air Bersih	708,22	106,9953204	428,7202	1243,936
5.	Bangunan dan Konstruksi	9198,267	-299,894169	7078,25	15976,62
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13520,65	7470,548468	-5822,14	15169,06
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	13334,59	4135,574531	1499,442	18969,61
8.	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	3567,482	608,5938022	709,4706	4885,546
9.	Jasa-Jasa	17076,28	-245,9068976	3877,291	20707,66
	Jumlah	91436,71	-4702,14	5208,411	91942,98

Diolah dari Data Penelitian, 2013

Sektor-sektor yang memiliki nilai komponen pertumbuhan proporsional positif, yaitu sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor ban dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan sektor-sektor yang mempunyai nilai komponen pertumbuhan proporsional negative, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor indutri pengolahan, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan, dan sektor jasa-jasa.

Nilai *Differential Shift* (D) sektor perekonomian Kabupaten Kepulauan Siaui Tagulandang Biaro selama periode tahun 2008-2012 yang mempunyai nilai positif yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, dam sektor jasa-jasa.

Nilai D positif, berarti bahwa terdapat sektor ekonomi Kabupaten Kepulauan Siaui Tagulandang Biaro tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan nilai D negatif, berarti sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Nilai *Shift Share* Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008-2012 Tanpa Migas

No	Sektor	Provincial Share (PS)	Proportional Shift (P)	Differential Shift (D)	Total (Y)
1.	Pertanian	30566,18977	-15605,14062	-3541,799055	11419,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	2489,283215	-2489,283215	2427,681421	2427,681
3.	Industri Pengolahan	935,8361326	-79,42736993	-86,46081784	769,9479
4.	Listrik dan Air Minum	707,3893882	107,8259122	428,7202179	1243,936
5.	Bangunan dan Konstruksi	9187,479063	-289,1065543	7078,249506	15976,62
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13504,79544	7486,405324	-5822,144598	15169,06
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	13318,95193	4151,213175	1499,442024	18969,61
8.	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	3563,297962	612,7777013	709,4705524	4885,546
9.	Jasa-Jasa	17056,25634	-225,8800415	3877,29052	70861,65
	Jumlah	91329,48	-6330,62	6570,45	141723,3

Diolah dari Data Penelitian, 2013

Nilai *Differential Shift* perekonomian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanpa migas dari tahun 2008-2012 menunjukkan terdapat sektor-sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor-sektor ekonomi yang sama di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian dngan nilai D sebesar 2427,681421, Sektor listrik dan air bersih dengan nilai D sebesar 428,7202179, sektor bangunan dan konstruksi dengan nilai D sebesar 7078,249506, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai D sebesar 1499,442024, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya dengan nilai D sebesar 709,4705524, Dan sektor jasa-jasa dengan nilai D sebesar 3877,29052.

Sedangkan sektor-sektor ekonomi dengan nilai D negatif, berarti sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi. Sektor sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan Restoran.

D. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan tentang analisis potensi perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan pendekatan sektor pembentuk PDRB dapat ditentukan beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1. Hasil analisis menurut *Klassen Typology* menunjukkan bahwa sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu sektor listrik dan air bersih dan sektor jasa-jasa.
- 2. Hasil perhitungan indeks *Location Quotient* sektor yang merupakan sektor basis (LQ>1), yaitu sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik dan air bersih, dan sektor jasa-jasa.
- 3. Hasil analisis *shift share* menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor pengangkutan dan konstruksi, sektor Bank dan lembaga keuangan lainnya, dan jasa-jasa

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, 2012. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara 2000-2012.

Badan Pusat Statistik, 2012. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten SITARO 2000-2012.

Badan Pusat Statistik, 2012. SITARO dalam Angka 2012.

Badan Pusat Statistik, 2012. Provinsi Sulawesi Utara 2012.

Kuncoro, M, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang. Erlangga,

Jakarta.

Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.

Sjafrizal, 2012. Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan, Baduose Media, Rajawali Pers, Jakarta.

Todaro, Michael P,1994. Ekonomi Untuk Negara Berkembang, Bumi Aksara, Edisi Ketiga, Jakarta.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2000. Pembangunan Ekonomi Jilid 1. PT.Erlangga.

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Meilanie J. E. Makahanap, Amran Naukoko dan Patrick Wauran

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: meilaniem@ymail.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu solusi untuk pengentasan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat diukur berdasarkan pengalokasian dana pengeluaran pemerintah pada kedua bidang tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga memiliki peranan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka akan semakin berkurang jumlah penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan dan bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan Program SPSSV.20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan adalah sebesar 86,1%, dan Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan adalah sebesar 80,2%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel independen signifikan pada = 5% terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Produk Domestik Regional Bruto

ABSTRACT

Poverty is one indicator of the level of social welfare. Development in areas such as social and health education to be one solution to poverty alleviation. The success of development in education and health, can be measured based on the allocation of funds in government spending in these areas. Gross Domestic Product also has a role in reducing the number of poor people. The higher the GDP of a region then it will decrease the number of poor people. This study aims to determine the effect of government spending on education and health to poverty and how the influence of GDP on poverty. The data used are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Sangihe Regency Revenue Service Finance and Asset Management District Sangihe Islands. The analysis model used is multiple linear regression with SPSSV.20 Program. The results showed that the effect of government spending on education and health on poverty is at 86.1 %, and the Effect of GDP against poverty is at 80.2 %. The results also show that not all independent variables significant at = 5 % of the dependent variable is poverty

Keywords: Poverty, Government Spending and Health Education, Gross Regional Domestic Product

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih merupakan masalah sosial yang terjadi di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Negara yang sudah puluhan tahun merdeka masih belum bisa keluar dari fenomena yang mengglobal ini. Pengangguran, keterbelakangan, ketidakmerataan pendapatan menjadi faktor pendukung bertambahnya penduduk miskin sehingga negara kitapun masih belum bisa maksimal bersaing dengan negara-negara yang sudah maju. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi yaitu 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Memasuki krisis ekonomi Pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 49,5 juta jiwa atau sebesar 24,23%. Perhatian pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan lebih ditingkatkan lagi dengan berbagai program-program pemerintah dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tahun 2004 jumlah kemiskinan 16,66 persen turun menjadi 11,37 persen pada Maret 2013, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 sampai 6 persen.

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah pemerintah lakukan, seperti penyaluran beras untuk masyarakat miskin, Program Keluarga Harapan yang memberikan dana bantuan sebesar Rp. 150.000,00 per bulan dan program bedah rumah. Akan tetapi program-program yang berfokus pada penyaluran bantuan sosial ini bukan menjadi solusi terbaik bagi pengentasan kemiskinan karena dengan menyalurkan bantuan-bantuan dana tersebut akan menimbulkan ketergantungan pada masyarakat miskin. Masyarakat akan menjadi malas dan tidak mau berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja.

Program-program bantuan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah perbaikan kualitas pendidikan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan yang lebih layak, perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, lebih memperhatikan kesehatan dan gizi masyarakat. Program inilah yang lebih bermanfaat dan akan menjadi modal manusia, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berusaha dan bekerja untuk menghasilkan pendapatan.

Produk Domestik Regional Bruto juga adalah salah satu variabel yang dapat mengurangi jumlah orang miskin. Dimana PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Jika di suatu daerah dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan banyak diminati konsumen itu berarti pendapatan perkapita akan meningkat dan jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu kepulauan yang ada di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Mengingat Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di Perbatasan Nusa Utara yang notabene penduduknya masih sedikit tertinggal dibandingkan penduduk-penduduk di daerah lain yang sudah maju maka sektor pendidikan dan kesehatan sangatlah penting bagi penduduk Sangihe untuk memajukan kualitas hidup yang lebih baik. Pendidikan dan kesehatan menjadi faktor kesejahteraan masyarakat, indikator yang dapat mengukur keberhasilan bidang pendidikan dan kesehatan adalah kemampuan membaca atau menulis atau disebut juga angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan lainnya

Tabel 1. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Sangihe (%) Tahun 2008-2011

Uraian	2008	2009	2010	2011
Angka Melek Huruf	98,50	98,54	98,70	98,70
Rata-rata Lama Sekolah	7,70	7,71	7,71	7,72

Sumber: BPS Kab.Kepl.Sangihe

Makin tinggi persentase angka melek huruf menunjukan keberhasilan program pendidikan. Sebaliknya makin rendah persentase angka melek huruf mengindikasikan kurang berhasilnya program pendidikan.

Tabel 2. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kepulauan Sangihe (%) Tahun 2008-2011

Uraian	2008	2009	2010	2011
Angka Harapan Hidup	72,50	72,75	73,01	73,19

Sumber: BPS Kab.Kepl.Sangihe

Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator untuk menilai taraf kesehatan masyarakat Hubungan antara pembangunan sosial ekonomi dengan AHH berkaitan erat dan positif. Bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik, maka AHH juga semakin tinggi, atau sebaliknya bila AHH lebih tinggi, maka mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah semakin maju.

Pada tahun 2008 dan 2009 angka harapan hidup 72,50 persen dan 72,75 persen. Di tahun 2010 dan 2011 AHH meningkat menjadi 73,01 dan 73,19 persen. Meningkatnya AHH Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan keberhasilan dalam bidang kesehatan. Tinggi rendahnya AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan perumahan yang sehat serta pola konsumsi makanan yang berimbang.

Tabel 3. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2009-2012

Tahun	Garis Kemiskinan	Pendu	nduduk Miskin		
Tahun	(Rp/Kap/Bln)	Jumlah Total	Persentase		
2009	168.309	18.400	14,01		
2010	190.539	16.600	13,20		
2011	197.236	14.930	11,71		
2012	204.168	13.600	10,55		

Sumber: BPS Kab. Kepl. Sangihe

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum <u>pendapatan</u> yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh <u>standar hidup</u> yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan lebih tinggi di <u>negara maju</u> daripada di <u>negara berkembang</u>. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe garis kemiskinan pada tahun 2009 sebesar Rp.168.309 dengan jumlah penduduk miskin 18.400 jiwa atau sebesar 14.01 persen. Di tahun 2010 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 16.600 jiwa atau 13.20 persen dengan garis kemiskinan Rp. 190.539. pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 14.930 jiwa atau 11.71 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 197.236. dan ditahun 2012 garis kemiskinan lebih meningkat menjadi Rp. 204.168 dengan jumlah penduduk miskin yang semakin berkurang menjadi 13,600 jiwa atau sebesar 10.55 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah otonomi diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain daerah diberikan kebebasan mengelola sendiri daerahnya berdasarkan potensi yang ada dalam daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Pengeluaran Pemerintah yang dialokasikan pada bidang pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat. Meningkatnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan maka akan meningkat pula produktivitas penduduk dan indeks pembangunan manusia sehingga masyarakat memiliki modal untuk selanjutnya dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Sebaliknya jika pemerintah tidak memperhatikan pengalokasian dana untuk bidang pendidikan dan kesehatan maka secara otomatis masyarakat tidak akan dapat mengecap pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik sehingga akan banyak jumlah penduduk yang melek huruf dan kekurangan gizi.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Sangihe juga memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data selama 10 tahun terakhir, PDRB Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengalami peningkatan. Apabila PDRB semakin meningkat maka pendapatan perkapita penduduk Sangihe juga meningkat, sehingga penduduk yang ada akan semakin sejahtera dan jumlah orang miskin dapat berkurang.

Penelitian ini dilandasi teori-teori sebagai berikut. Definisi menurut BAPPENAS kemiskinan adalah tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Emil Salim dalam Zakaria (2008:94), kemiskinan adalah suatu keadaan dimana manusia atau penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Dan mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Kebutuhan yang paling pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain.

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. *Kemiskinan absolut*: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. *Kemiskinan relatif* : kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. *Kemiskinan kultural*: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. *Kemiskinan struktural*: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. (Dalimunthe, dikutip dalam Suryawati:2005)

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia.

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. (Sharp et.al dikutip dalam Kuncoro: 2010)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. (Zakaria 2008:104).

Schumpter dalam bukunya *The Theori Of Economic Development* yang diterbitkan pada tahun 1908, (Sadono,hal.449) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya inovasi atau perubahan –perubahan pada teknologi, yaitu menggunakan metode baru dalam produksi dan menemukan barang-barang baru. Schumpter sangat yakin bahwa dalam jangka panjang tingkat hidup masyarakat dapat ditingkatkan karena adanya kemajuan teknologi. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya dapat dipacu dengan adanya inovasi melalui tekhnik-tekhnik baru dalam proses pertumbuhan ekonomi. Teori Neoklasik yang dikembangkan oleh Robert Solow Swan mengemukakan pendapat bawha faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi.

Kedua pakar ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi akan rendah. Model teori ini didasarkan pada asumsi bahwa proses pembangunan pada dasarnya masalah penambahan investasi modal. Karena masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Jika modal tersedia dan modal itu diinvestasikan maka akan terjadi pertumbuhan.

Teori Harrod maupun Domar dalam model pertumbuhannya adalah investasi selalu mempunyai efek ganda, disatu sisi sebagai peminta output yang berupa barang modal sedang disisi lain sebagai penyedia tambahan barang modal yang pasti akan meningkatkan kapasitas produksi total suatu ekonomi. Jadi investasi mempunyai efek permintaan (efek pada AD) sekaligus efek kapasitas produksi (efek pada AS).

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (*Human Development*)", sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang

dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka tersebut

Menurut Deliarnov (1995;42), PDRB merupakan jumlah PDB yang ada didalam suatu daerah ataupun wilayah, untuk itu kita bisa mengatakan bahwa teori tentang PDRB adalah sama dengan teori PDB. PDB adalah seluruh produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di suatu wilayah mencakup nilai faktor-faktor produksi yang dimanfaatkan dalam negara tersebut tidak peduli apakah pemiliknya warga negara sendiri atau warga negara asing.

Menurut Badan Pusat Statistik (2006:1), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah nilai produksi (output) di kurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upahd dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat dari dua segi yaitu :

- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 Perhitungan atas dasar harga berlaku memperlihatkan besaran yang disebabkan karena adanya perubahan volume (kuantitas) produksi barang dan jasa serta perubahan pada tahun yang berjalan.
- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
 Perhitungan atas dasar harga konstan, memperlihatkan besarnya volume (kuantitas) produksi atau perkembangan produktivitas secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Perhitungan atas dasar harga konstan berguna untuk mendapat gambaran mengenai struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut Masniari Dalimunthe (2008), judul penelitian Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Metode penelitian dengan menggunakan metode ekonometrika. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin dengan koefesien sebesar -0,141607, Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan trhadap penduduk miskin, Metode analisis penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis regresi berganda dengan eviews, sedangkan peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda dan regresi linear sederhana dengan SPSS versi 20.

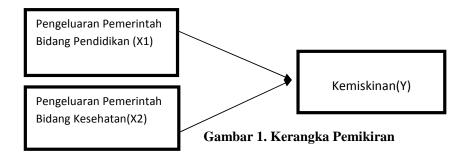
Hubungan Antar Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan adalah sebagai berikut :

Pendidikan dan Kesehatan merupakan komponen yang paling utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2006) Kesehatan dan pendidikan berkaitan sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Di satu sisi, modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian investasi yang dicurahkan untuk pendidikan, karena kesehatan merupakan faktor penting agar seseorang bisa hadir di sekolah dan dalam proses pembelajaran formal seorang anak. Harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan, sementara kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresisasi modal pendidikan. Di sisi lain, modal pendidikan yang lebih baik meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan, karena banyak program kesehatan bergantung pada ketrampilan dasar yang dipelajari di sekolah termasuk kesehatan pribadi dan sanitasi, di samping

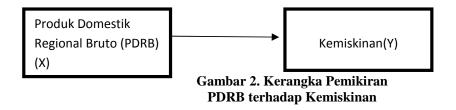
melek huruf dan angka, juga dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih tugas pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu dibutuhkan peranan pemerintah melalui pengalokasian dana untuk bidang pendidikan dan kesehatan agar pelayanan pada bidang-bidang tersebut dapat berjalan dengan baik, berkualitas dan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menghidupi kehidupan sendiri dan tidak terus terjebak dalam dunia kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan tingkat pendapatan nasional per kapita dari aspek ekonominya. Dalam suatu wilayah regional atau daerah, maka kesejahteraan masyarakat diukur melalui Produk Domestik Regional bruto (PDRB) per kapita.

Dalam pertumbuhan ekonomi regional, unsur regional atau wilayah dapat berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Target pertumbuhan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda satu sama lain, hal ini dikarenakan potensi ekonomi yang ada di setiap wilayah juga berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah atau daerah. Dikarenakan Indonesia telah masuk dalam era otonomi daerah, maka setiap daerah harus membuat dan menerapkan kebijakan yang dapat memaksimalkan potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya sehingga jika PDRB suatu wilayah meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarkat wilayah tersebut dan penduduk miskin akan semakin berkurang. (Wiguna, 2006)



Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan



berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten kepulauan sangihe dan bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di kabupaten kepulauan sangihe. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten kepulauan sangihe dan untuk mengetahui pengaruh pdrb terhadap kemiskinan di kabupaten kepulauan sangihe

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksplanasi untuk menjelaskan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan dan membandingkannya dengan pengaruh PDRB terhadap kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pertimbangan bahwa masih banyak penduduk di daerah tersebut yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak, sehingga mengakibatkan cenderungnya bertambah jumlah pendidik miskin. Waktu penelitian dimulai dari September sampai dengan Oktober 2013.

Model analisis yang digunakan adalah Analisis regresi berganda dan Analisis regresi sederhana, dengan menggunakan program komputer SPSS versi 20.0. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

```
Y = f(X1,X2,)....(1)

Y = f(X).....
```

Dengan spesifikasi model sebagai berikut:

```
LogY = -\beta 1 LogX1 - B2 LogX2 + \mu \dots (2)
LogY = -\beta LogX + \mu
```

Dimana:

Y = Kemiskinan = Intercep

 $\beta 1, \beta 2,$ = Koefisien Regresi

X1 = Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan X2 = Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan

X = Produk Domestik Regional Bruto

 μ = term of error

Penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Dasar dengan menggunakan metode uji normalitas kolmogorov smirnov. Uji kolmogorov smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan.

Penelitian ini juga menggunakan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Multikolinearitas dengan metode melihat nilai *variance inflation factor (VIF)* pada tabel regresi. Uji Heterokedastisitas memakai metode uji Gleisjer dan Uji Autokorelasi dengan memakai metode uji run. Uji Goodness of Fit yang terdiri Koefisien Determinasi Yang Disesuaikan (*Adj R*²), Uji F dan Uji T.

Dalam penelitian ini definisi operasional dan pengukuran variabelnya adalah sebagai berikut Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah penduduk yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. (dinyatakan dalam jumlah jiwa pertahun), Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan adalah alokasi dana pemerintah untuk menunjang bidang pendidikan. (dinyatakan dalam ribuan rupiah), Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan adalah alokasi dana pemerintah untuk menunjang bidang kesehatan (dinyatakan dalam ribuan rupiah), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah akhir yang diproduksi pada berbagai sektor di Kabupaten Sangihe dalam jangka waktu satu tahun yang diukur dengan satuan rupiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan

Tabel 4 Hasil estimasi Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan(X1) dan Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Kesehatan (X2) Terhadap Kemiskinan (Y)

Coefficients^a

Mo	odel	Unstand Coeffi		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Sta	tistics
		В	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	9,756	1,506		6,477	,000		
1	Pengeluaran Pemerintah BIdang Pendidikan	-,206	,254	-,276	-,810	,445	,172	5,820
	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	-,301	,153	-,669	-1,964	,090	,172	5,820

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil analisis dari Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan memiliki tanda negatif terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar -0,206. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan 1% maka akan mengakibatkan kemiskinan menurun sebesar 2,06%. Akan tetapi hasil penelitian pada bidang pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dilihat pada tabel 4, angka sig adalah 0,445. Bidang kesehatan memiliki pengaruh signifikan pada tingkat =10%.

Uji Asumsi Dasar

Tabel 5 Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		10
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	,04901739
Most Extreme	Absolute	,139
Differences	Positive	,139
Differences	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		,440
Asymp. Sig. (2-tailed)		,990

a. Test distribution is Normal.

Hasil Uji Normalitas tampak bahwa dengan 10 data maka nilai signifikansi adalah sebesar 0,990 > 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai residual telah terdistribusi secara normal

Hasil nilai t hitung untuk variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan adalah sebesar -0,810. Nilai tersebut di bawah nilai t-tabel yaitu 2,364 atau t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-0,810 < 2,364). Dengan demikian Ha diterima.

Hasil Nilai F hitung adalah sebesar 21,556 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi adalah di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada signifikansi 5%.

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS v. 20.0 diperoleh koefisien determinasi, yaitu : $(0.928)^2 = 0.861 = 86.1$ %. Dengan demikian pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sangihe adalah sebesar 86.1 %. Yang artinya pengaruhnya cukup besar. Hal ini disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mengurangi kemiskinan di kabupaten sangihe. Dan sisanya adalah 13.9% ditentukan oleh variabel-variabel lain.

Hasil uji multikolinearitas memberikan semua nilai VIF di bawah 10. Berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model dalam penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana tidak ada nilai t-hitung yang signifikan atau nilai signifikan (sig) lebih dari 0,05. Hasil uji autokorelasi tampak bahwa signifikansi adalah sebesar 0,737 > 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi gangguan autokorelasi pada model penelitian.

Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan

Tabel 6 Hasil Estimasi Produk Domestik Regional Bruto (X) Terhadap Kemiskinan (Y) Coefficients^a

Mod	Model Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence	e Interval for B	
		В	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Cons tant)	14,423	1,766		8,169	,000	10,352	18,495
	PDRB	-1,738	,304	-,896	-5,723	,000	-2,438	-1,037

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil analisis dari Produk Domestik Regional Bruto memiliki tanda negatif terhadap kemiskinan sebesar -1,738. Artinya apabila PDRB mengalami peningkatan 1% maka mengakibatkan kemiskinan menurun sebesar 1,74% dan signifikan pada tingkat = 5% Hal ini sesuai dengan hipotesa yang menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan PDRB maka jumlah penduduk miskin akan menurun, *cateris paribus*

Uji Asumsi Dasar

Tabel 7 Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
Normal Parameters	Std. Deviation	,05810641
	Absolute	,211
Most Extreme Differences	Positive	,211
	Negative	-,106
Kolmogorov-Smirnov Z		,669
Asymp. Sig. (2-tailed)		,763

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Tampak bahwa dengan 10 data maka nilai signifikansi adalah sebesar 0,763 > 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai residual telah terdistribusi secara normal.

Nilai t hitung untuk variabel PDRB = -5,723. Nilai tersebut jatuh di daerah Penolakan Ho (Sisi kiri kurva normal) sebab batas daerah penerimaan Ho pada = 0,025 dengan N=10 adalah 2,228 dan -2,228, sehingga dengan demikian Ha diterima atau Ho ditolak yang berarti bahwa PDRB memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hasil nilai F hitung pada model penelitian adalah sebesar 32,755 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi adalah di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada signifikansi 5%. Dengan demikian Ha diterima. Artinya secara bersama-sama variabel PDRB berpengaruh nyata terhadap kemiskinan.

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS v. 20.0 diperoleh koefisien determinasi, yaitu : $(0.896)^2 = 0.802 = 80.2$ %. Dengan demikian pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Sangihe adalah sebesar 80,2 %. Dan sisanya adalah 19,8% ditentukan oleh variabel-variabel lain.

Hasil uji multikolinearitas memberikan semua nilai VIF di bawah 10. Berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model dalam penelitian ini.

Hasil uji heterokesdasitas menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana tidak ada nilai thitung yang signifikan atau nilai signifikan (sig) lebih dari 0,05.

Hasil uji autokorelasi adalah sebesar 1,000 > 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi gangguan autokorelasi pada model penelitian.

Berdasarkan hasil analisis regresi persamaan yang dilakukan, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Isu-isu yang menyebabkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah adanya ketimpangan dalam pelayanan pendidikan. Masih minimnya bantuan dana untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu karena itu banyak masyarakat yang belum dapat menikmati jenjang pendidikan karena keterbatasan ekonomi , bantuan beasiswa kurang mampu yang tidak tepat sasaran, dan justru dinikmati oleh siswa-siswa yang mampu. Kemudian masih kurangnya tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas sehingga membuat pelayanan untuk pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan saja tetapi dari berbagai kebijakan yang lain dan bantuan-bantuan lainnya untuk masyrakat yang kurang mampu.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ternyata berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti kualitas pelayanan kesehatan berjalan baik dengan didukung oleh alokasi dana pemerintah. Saat pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk bidang kesehatan maka kualitas pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik dan bantuan-bantuan kesehatan untuk masyarakat dapat disalurkan dengan baik. Menurut Todaro (2006), kesehatan dan pendidikan merupakan inti dari kesejahteraan. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia. Dengan masyarakat yang berpendidikan dan sehat maka dapat mengurangi angka kemiskinan.

Tabel. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 – 2012

Uraian	2010	2011	2012
IPM	75,58	76,07	76,42

Sumber: BPS Sangihe

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sangihe mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Berkurangnya angka buta huruf dan bertambahnya jumlah anak yang bisa sekolah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Semakin baik kualitas pendidikan ditunjang dengan realisasi pengeluaran pemerintah yang meningkat maka indeks pembangunan manusia juga akan semakin meningkat.

Jika indeks pembangunan manusia meningkat maka jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang. Produk Domestik Regional Bruto juga berpengaruh negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dimana ketika jumlah PDRB meningkat maka kemiskinan akan berkurang. Ini sesuai dengan hasil peneliti terdahulu (Hassan,2007) yang mengatakan bahwa setiap penurunan 1 Milyar PDB Indonesia maka akan menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 3129,713 jiwa.

D. KESIMPULAN

- 1. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki tanda negatif terhadap kemiskinan tapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki tanda negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh secara signifikan.
- 2. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sangihe. Artinya Jika jumlah PDRB meningkat maka kemiskinan akan berkurang, begitu sebaliknya jika PDRB menurun kemiskinan akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Lia (2007), Ekonomi Pembangunan, Graha Ilmu

Anonim 2012, Sangihe Dalam Angka

Anonim (2009), Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dalimunthe Masniari (2008), Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Darise Nurlan (2009), *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri*, Edisi ke – 2, PT Indeks Jakarta

Deliarnov (1995), Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta, Universitas Indonesia

Hudaya Dadan (2009), http://www.scribd.com/doc/48241004/6/Faktor-Penyebab-Kemiskinan

Kumalasari Merna (2011), Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata Rata lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Todaro Michael P dan Smith Stephen C (2006), *Pembangunan Ekonomi* Edisi ke – 9, Penerbit Erlangga

Widodo A. Dkk, (2011), Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Zakaria Juanidin (2008), Pengantar Teori Ekonomi Makro, Gaung Persada

PENGARUH BELANJA DAERAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO (TAHUN 2002-2012)

Donny Fernando Lapian, Amran Naukoko dan Richard Tumilaar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado email: donnyfernandolapian@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan bahwa suatu daerah memiliki kesejahteraan masyarakat yang baik. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Dimana Tingkat PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan Ekonomi suatu wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda dengan Metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat hasil, Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado, PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado sedangkan PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Investasi Swasta, dan Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

The high economic growth indicates that an area has good public prosperity. GDP is defined as the total value-added generated by unit of the work in a region. Floor where can GDP growth reflects a region economically. The purpose of this study was to determine the effect of government expenditure and private investment on economic growth in the city of Manado. The analysis technique used is multiple linear regression analysis model with Ordinary Least Square method (OLS). Based on the research results to the results, Government Expenditure positive and significant impact on economic growth in the city of Manado, domestic investment and no significant positive effect on economic growth in the city of Manado, while Foreign investment significant and negative effect on economic growth in the city of Manado.

Keywords: Government Expenditure, Private Investment and Economic Growth

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta agar dapat menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital atau modal maupun sumber daya berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Todaro, 2000:144). Tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2004: 298).

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, menandakan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2004: 9). Secara teoritis, masalah kemiskinan, pengangguran atau kesempatan kerja akan dapat di atasi dengan adanya

campur tangan pemerintah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah serta memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi. Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak terlepas dari meningkatnya pengeluaran pemerintah dan juga dari meningkatnya investasi sektor swasta.

Untuk terciptanya ekonomi yang berkembang di suatu daerah maka pembangunan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan seluruh dana yang ada untuk pembangunan ekonomi. Dalam hal untuk menggerakkan dan memajukan pemasukan daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk memakai dana sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan semaksimal dan seefisien mungkin. Pembangunan daerah diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah ini untuk menyerap tenaga kerja lokal, untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian).

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Dengan adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran maka akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut, sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik.

Sukirno (2000 : 144) menyatakan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sukirno 1994:105). PDRB adalah salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya juga digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah:

- 1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- 2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- 3. Kemajuan teknologi (Todaro, 2003: 92).

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan - peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2004: 137).

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikan standar hidup masyarkatnya (Mankiw, 2003: 62).

Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang menyatakan dengan "Modal Dalam Negeri" adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara, swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disishkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha, sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang ini dengan "modal dalam negeri" adalah : bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
- b. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan Undang-Undang ini.

Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain:

- Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.

c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitrah Afrizal (2013) yaitu tentang "Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan". Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai R2 = 0,978019. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi benar-benar dijelaskan oleh PMDN, PMA, Belanja daerah, dan jumlah tenaga kerja sebesar 97,80%. Selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (66,74086 > 4,346831). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen PMDN, PMA, belanja pemerintah, dan jumlah tenaga kerja (X) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen PDRB di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya penelitian terdulu yang dilakukan oleh Eddy Wibowo Candra (2012) tentang "Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2001-2010". Variabel independen yang digunakan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan variabel dependenya adalah Pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji R2 dengan nilai 0.993504 berarti variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 99,35%, berdasarkan uji F dengan nilai probabilitas sebesar 0.000001 berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependent secara signifikan. Berdasarkan uji t semua variabel bernilai positif dan signifikan kecuali variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Investasi adalah salah satu penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Makmun dan Yasin (2003 : 63). Peningkatan kapasitas produksi yang menyebabkan kenaikan output dapat diperoleh melalui investasi swasta (*Private Investment*) yang bisa disebut dengn penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

Tabel 1. Realisasi PDRB, Belanja Daerah, Investasi PMDN dan PMA di Kota Manado

Tahun	PDRB	Belanja Daerah	PMDN	PMA
	(Jutaan Rupiah)	(Jutaan Rupiah)	(Rp)	(US\$)
2006	4.116.009,36	455.452.840	50.000.000.000	35.364.767
2007	4.410.977,81	520.433.329	30.000.000.000	14.300.000
2008	4.893.355,49	616.807.203	22.000.000.000	12.500.000
2009	5.371.420,93	693.742.305	990.165.045	700.000
2010	5.763.351,02	678.488.076	990.000.000	1.252.700
2011	6.247.147,75	876.626.500	14.050.000.000	26.709.000
2012	6.791.480,93	929.713.979	110.096.353.000	17.272.950

Sumber: BKPM Sulawesi Utara dan BPS Sulawesi Utara, 2013.

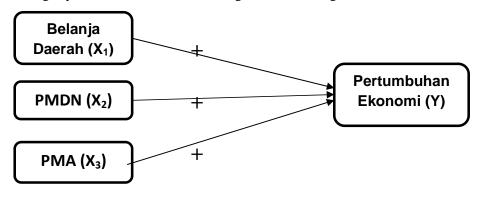
Tabel 1 menunjukan bahwa perkembangan PDRB kota Manado dari tahun 2006 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012, akan tetapi perkembangan belanja daerah kota Manado selama tahun 2006 sampai 2012 hanya mengalami penurunan di tahun 2010. Sementara itu perkembangan investasi PMDN dan PMA di kota Manado selama tahun 2006 sampai 2012 banyak mengalami fluktuasi. Berdasarkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel tersebut maka ada kemungkinan variabel-variabel tersebut saling berpengaruh. Namun demikian bagaimana sifat dan besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung maupun pengaruh total antar

variabel dependen dan variabel independen belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan yaitu:

- 1. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Manado?
- 2. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Manado ?
- 3. Apakah Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Manado ?

Adapun kerangka pemikiran dalam tulisan ini tergambar dalam bagan berikut ini :



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Diduga Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado.
- H2: Diduga Investasi Swasta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado.
- H3: Diduga Investasi Swasta Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado.

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

- 1. Untuk menganalisis apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.
- 2. Untuk menganalisis apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Manado.
- 3. Untuk menganalisis apakah Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Manado.

B. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik dan BKPM Provinsi Sulawesi Utara, yang berupa belanja daerah, investasi swasta PMDN dan PMA di kota Manado tahun 2002-2012.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Moleong, 2000: 236). Metode dokumentasi akan digunakan untuk mencari data kuantitatif yang berupa Belanja Daerah, Investasi swasta (PMDN dan PMA), dan Pertumbuhan ekonomi.

Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja daerah, adalah jumlah realisasi belanja daerah yang diukur dalam Rupiah (Rp).
- 2. Investasi PMDN, adalah jumlah realisasi investasi PMDN yang diukur dalam Rupiah (Rp).
- 3. Investasi PMA, adalah jumlah realisasi investasi PMA yang diukur dalam Rupiah (Rp).
- 4. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan jumlah PDRB yang diukur dalam Rupiah (Rp).

Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika, yaitu model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana OLS (*Ordinary Least Square*). Penaksiran OLS merupakan penaksiran tak bias linear yang terbaik (best linear unbiased estimator/BLUE). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut.

PDRB = + 1.BD + 2.PMDN + 3.PMA + e

dimana:

 Y_1 = Pertumbuhan ekonomi (PDRB)

 $X_1 = Belanja Daerah (BD)$

 $X_2 = PMDN$

 $X_3 = PMA$

a = Kostanta

_{1 2 3} = koefisien regresi

e = standart eror

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk menghitung nilai t hitung digunakan rumus: (Suliyanto.2011:62)

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_i}{\text{Se}(\beta_i)}$$

Dimana:

i = koefisien regresi variabel independen ke-i

Se = standar eror dari vaiabel independen ke-i

N = jumlah data

K = jumlah variabel

Hipotesis yang diuji pada uji statistik t adalah sebagai berikut :

H0: i = 0 Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap yariabel terikat.

H1: i 0 Ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan derajat kebebasan: df: , (k-1), (n-k). Nilai Fhitung dapat diperoleh dengan rumus: (Suliyanto.2011:62)

$$F = \frac{R^2/k - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Dimana:

F = Nilai F hitung

 R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah variabel

Hipotesis yang digunakan adalah:

Ho: i = 0 Semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel bebas secara bersama-sama

 $H1: i \quad 0$ Semua variabel atau minimal salah satu variabel berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

Nilai R2 disebut juga koefisien determinasi. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula: (Gujarati. 2006:161)

$$R^2 = 1 - \frac{e_i^2}{y_i^2}$$

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas.

Asumsi pokok dalam model regresi linear klasik adalah bahwa varian setiap *disturbance term* yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan 2. Inilah yang disebut asumsi *heteroskedasticity* atau varian yang sama, dengan menggunakan *White Test*. (Suliyanto.2011:95)

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau *time series* data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau *cross-sectional* data). (Sumodiningrat.2007:231) Pada penelitian ini digunakan metode pengujian *Lagrange Multiplier* atau uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM-Test*.

Multikolineritas berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar dua variabel bebas. Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. (Suliyanto.2011:85)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi antar variabel bebas (Belanja daerah, PMDN, PMA), dan variabel terikat (PDRB) menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan BKPM Provinsi Sulawesi Utara periode 2002 sampai 2012. Data sekunder tersebut diestimasikan dengan analisis regresi berganda seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program Eviews 7.0 untuk uji t, uji F, uji R2 sampai dengan uji asumsi klasik. Dari hasil regresi dapat dibentuk model estimasi sebagai berikut:

K	= 0.982218	+ 4.908828 BD + 0).530493 PMDN -	- 1.068521 PMA
t-statistik	=	(18.72682)***	(1.091857)	(-1.917331)*
$R^2 = 0.982218$ F-statistik = 128.8889				

Sumber: Data diolah (2013)

Keterangan:

*** Signifikan pada =1%

* Signifikan pada =10%

Berdasarkan hasil regeresi di atas dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas yaitu Belanja Daerah, PMDN dan PMA terhadap PDRB sebagai berikut:

- 1. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi Belanja Daerah yaitu sebesar (4.908828). Artinya setiap kenaikan Belanja Daerah sebesar 1% maka PDRB akan naik sebesar 4,908%, ceteris paribus.
- 2. PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi PMDN yaitu sebesar (0.530493). Artinya setiap kenaikan PMDN sebesar 1% maka PDRB akan naik sebesar 0,530%, ceteris paribus.
- 3. PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi PMA yaitu sebesar (-1.068521). Artinya setiap kenaikan PMA sebesar 1% maka PDRB akan turun sebesar 1,068%, ceteris paribus.

Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (18.72682 > 2.997). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya Ho, maka perubahan Belanja Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% (=1%) terhadap PDRB

Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel (1.091857 < 1.895). Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Dengan diterimanya Ho, maka perubahan PMDN tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% (=5%) terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel (-1.917331 < 1.414). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya Ho, maka perubahan PMA mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 90% (=10%) terhadap PDRB.

Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel pada derajat kebebasan (k-1, n-k-1) dan tingkat signifikansi () 1%, 5%, 10%. Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan jika F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Nilai F-tabel dengan derajat kebebasan (3,6) dan = 1% adalah 9.78. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 128.8889. Dengan demikian F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, artinya secara bersama-sama variabel Belanja Daerah, PMDN dan PMA berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Nilai R^2 (koefisien determinasi) dilakukan untuk mengukur tingkat ketepatan/ kecocokan, yang merupakan persentase sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi (naik turunnya) variabel terikat secara bersama-sama. Jika nilai $R^2=1$, berarti besarnya persentase sumbangan Belanja Daerah, PMDN dan PMA terhadap variasi (naik turunnya) PDRB secara bersama-sama adalah 100%. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R^2 adalah 0.982218 = 98,22% yang berarti bahwa kontribusi atau sumbangan dari variabel bebas Belanja Daerah, PMDN dan PMA secara bersama-sama terhadap variasi naik turunnya variabel PDRB adalah sebesar 98,22% , sisanya 1,78% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam model.

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

$R^2 = 0.991469$			
Obs*R-squared = 10.90616			
Chi-squares (²) pada 1% = 21.666			

Sumber: Data diolah (2013)

Dari tabel 2 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.991469. Nilai Chi-squares hitung sebesar 10.90616yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R^2) . Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares $(^2)$ pada = 1% dengan df sebesar 5 adalah 21.666. Karena nilai Chi-squares hitung $(^2)$ lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares $(^2)$ maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

$R^{2} = 0.046705$			
chi squares (2) = 0.513754			
nilai kritis (²) pada	10% = 4.60517		
nilai kritis (²) pada	5% =5.99147		
nilai kritis (²) pada	1% = 9.21034		

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R²) sebesar 0.046705. Nilai chi squares hitung (²) sebesar 0.513754 sedangkan nilai kritis (²) pada = 10%, = 5%, = 1% dengan df sebesar 2. Karena nilai chi squares hitung (²) lebih kecil dari pada nilai kritis chi-squares (²), maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	R ² _{statistik}	R ² _{model awal}
bebas		
BD	0.175435	0.982218
PMDN	0.108148	0.982218
PMA	0.163722	0.982218

Dari tabel hasil analisis uji multikolinieritas di atas terlihat bahwa R $^2_{statistik}$ lebih kecil dari R $^2_{model\ awal}$. Hal ini menunjukkan bahwa H $_0$ diterima. Dengan diterimanya H $_0$ berarti tidak terdapat Multikolinearitas.

Berdasarkan hasil regresi, variabel Belanja Daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanaja Daerah menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 4.908828. Hal ini berarti bahwa jika Belanja Daerah naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi di Kota Manado meningkat sebesar 4,908%. Variabel Belanaja Daerah sudah sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Pengaruh Belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado selama periode pengamatan adalah positif dan signifikan. Dalam konsep ekonomi makro pengeluaran pemerintah akan meningkatkan perekonomian nasional atau daerah. Pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian ini tentunya dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah digunakan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi atau yang memberikan dorongan bagi perkembangan kegiatan ekonomi. Jadi apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Deddy Rustiono (2008) dalam tesisnya dengan judul Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil regresi, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Nilai koefisien regresi untuk variabel PMDN menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 0.530493. Hal ini berarti bahwa jika PMDN naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi di Kota Manado meningkat sebesar 0,530%. Variabel PMDN sudah sesuai dengan teori akan tetapi belum signifikan secara statistik.

Penanaman modal dalam negeri merupakan suatu hal yang penting bagi suatu daerah khususnya dalam melakukan pembangunan ekonominya guna mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk-produk asing yang dapat mengurangi tingkat tabungan yang tercipta pada masa yang akan datang. Karena investasi atau pembentukan modal ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menggerakkan perkonomian suatu daerah, dimana dengan adanya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Manado maka akan mengatasi kekurangan modal yang terjadi di Kota Manado dan dengan semakin tingginya nilai investasi PMDN di Kota Manado akan mendorong serta memperlancar proses pertumbuhan ekonomi Kota Manado.

Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eddy Wibowo Candra (2012) dalam jurnalnya dengan judul Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2001-2010, yang menyatakan bahwa variabel PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien variabel Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sebesar sebesar -1.068521 dan secara statistik signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Berdasarkan hasil regresi menunjukan bahwa nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Manado berpengaruh negatif dan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado. Hal tersebut disebabkan karena pengembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Manado masih terhambat oleh rumitnya pengurusan perijinan akibat birokrasi yang berbelit-belit serta kurangnya keterpaduan koordinasi antar departemen yang terkait, kurang tersedianya fasilitas pendukung seperti transportasi, tenaga kerja terampil, dan teknologi. Sehingga investor asing kurang berminat untuk menanamkan modalnya di Kota Manado.

Dengan berbagai keuntungan yang dapat diberikan oleh penanaman modal asing tidaklah berarti bahwa kehadiran modal asing akan sepenuhnya menjamin kesuksesan pembangunan ekonomi. Penanaman modal asing dapat juga menimbulkan beberapa hal yang tidak menguntungkan pembangunan ekonomi. Jika dalam jangka pendek modal asing melakukan penanaman modalnya tidak di sektor produktif melainkan di sektor moneter yang bersifat spekulatif kemudian modal dan hasilnya di bawah ke luar negeri maka akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga, dalam jangka panjang modal asing dapat memperburuk masalah kekurangan mata uang asing, yaitu apabila hasil-hasil mereka tidak diekspor atau tidak menggantikan barang-barang impor dan mereka mengimpor bahan mentah dari luar negeri dan mengirimkan keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan induk di luar negeri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Belanaja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Hal ini berarti semakin tinggi Belanja Daerah maka semakin tinggi pula Pertumbuhan ekonomi.
- 2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Hal ini berarti semakin tinggi PMDN maka semakin

- tinggi pula Pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal dalam negeri merupakan suatu hal yang penting bagi suatu daerah khususnya dalam melakukan pembangunan ekonominya guna mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk-produk asing yang dapat mengurangi tingkat tabungan yang tercipta pada masa yang akan datang.
- 3. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Hal ini berarti jika PMA naik maka Pertumbuhan ekonomi akan turun. Hal ini disebabkan oleh Jika dalam jangka pendek modal asing melakukan penanaman modalnya tidak di sektor produktif melainkan di sektor moneter yang bersifat spekulatif kemudian modal dan hasilnya di bawah ke luar negeri maka akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga, dalam jangka panjang modal asing dapat memperburuk masalah kekurangan mata uang asing, yaitu apabila hasil-hasil mereka tidak diekspor atau tidak menggantikan barang-barang impor dan mereka mengimpor bahan mentah dari luar negeri dan mengirimkan keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan induk di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan Edisi ke Empat*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Deddy, Rustiono. 2008. Analisis pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. UNDIP. Semarang.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1968. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1969. Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Jakarta.
- Eddy Wibowo Candra. 2012. Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2001-2010. Universitas Brawijaya. Malang.
- Fitrah Afrizal. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Gujarati, Damodar N. 2006. Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1 dan 2. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Makmun dan Akhmad Yasin. 2003. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 3 September.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi Edisi ke Lima. Jakarta: Erlangga.
- Moeleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Mentri Dalam Negri No. 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus William D. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi (Edisi Terjemahan) Edisi Tujuh Belas*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Sukirno, Sadono. 1994. Pengantar Makroekonomi. Edisi Kedua. PT Grafindo. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. Makro Ekonomi Modern. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sumodiningrat. 2007. Ekonometrika Pengantar. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.

- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Kelima, Edisi ketujuh, Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2003 . *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, *edisi kedelapan*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DI KOTA MANADO

Gustin Silooy, Anderson Kumenaung dan Patrick Wauran

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado email: gustin.silooy@yahoo.com

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No 22 tahun 1999. Praktek desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 januari 2001 berdasarkan UU No 25 tahun 1999 yang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dengan adanya desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam pengelolaan dana secara mandiri menjadi tuntutan yang nyata sehingga seluruh potensi dapat dioptimalkan melalui mekanisme perencanaan secara tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap penerimaan daerah dan untuk mengetahui kemampuan keuangan kota Manado setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Setelah Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kota Manado, Penerimaan Daerah Kota Manado meningkat, sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi dan Kemampuan Keuangan di Kota Manado setelah pelaksanaan Desentralisasi Fiskal berfluktuatif, tetapi secara umum meningkat sehingga tingkat kemandirian Kota Manado mulai relatif tinggi.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan, Kemampuan Keuangan

ABSTRACK

Fiscal decentralization is one of the authority vested in local government since the enactment of Act No. 22 of 1999. Practice new fiscal decentralization in Indonesia run on 1 January 2001 by Act No. 25 of 1999 concerning the financial balance between central and local governments, the fiscal decentralization, regional ability to independently fund management into real demand so that the full potential can be optimized through appropriate planning mechanism. The purpose of this study was to determine how the implementation of fiscal decentralization to the reception area and to determine the financial ability of the city of Manado after the implementation of fiscal decentralization. The analytical method used in this research is descriptive quantitative analys is method. The analys is showed that after the Implementation of Fiscal Decentralization in Manado, Manado City Regional Revenues increased, so as to support economic development and financial capabilities in Manado City Fiscal Decentralization after pelaksanasan fluctuate, so that the level of independence of Manado started relatively high.

Keywords: Fiscal Decentralization, Fund Balance, Financial Capability

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah bukanlah konsep baru di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah.

Pengelolaan atau pelaksanaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No 22 tahun 1999. Praktek desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 januari 2001 berdasarkan UU No 25 tahun 1999 yang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 yaitu dsentralisasi fiskal, maka diharapkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat memberikan manfaat yag optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom, sehingga harus ada sumber penerimaan dana yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU No 33 tahun 2004 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat cenderung makin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin tingginya nilai transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam pengelolaan dana secara mandiri menjadi tuntutan yang nyata sehingga seluruh potensi dapat dioptimalkan melalui mekanisme perencanaan secara tepat. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom di Indonesia, termasuk kota Manado di propinsi Sulawesi Utara. Setiap upaya pengembangan daerah kota Manado di propinsi Sulawesi Utara, dimana pemerintah daerah kota Manado dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal di kota Manado propinsi Sulawesi Utara, hasilnya belum cukup memuaskan dimana masih banyak pula permasalahan yang perlu segera dituntaskan antara lain dalam bidang pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah, pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Bambang PS Brodjonegoro dan Teguh Dartanto (2003), dengan judul Dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah. Metode penelitian yang digunakan Model makro ekonometrika simultan, hasil penelitiannya Setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal kesenjangan antar wilayah semakin besar antar darah di Indonesia. Peneliti sebelumnya menguraikan tentang desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan perbedaan dari peneliti yaitu Metode analisis yang digunakan peneliti sebelumnya metode makro ekonometrika simultan, sedangkan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian terdahulu yang berkaitan juga, Raksaka Mahi (2001) dengan judul *Fiscal decentralization : it's impact on cities Growth*, menggunakan metode Model ekonometrika simultan *two stage least squares model*. Hasil penelitian dari Raksaka Dana alokasi umum lebih

menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan yang lainnya walaupun kebijakan dana alokasi umum tidak mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. Persamaan penelitian trdahulu dengan peneliti yaitu Dana Alokasi Umum lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan perbedaan nya Peneliti sebelumnya menggunakan model ekonomtrika simultan.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap Penerimaan daerah di kota Manado propinsi Sulawesi Utara dan untuk mengetahui kemampuan keuangan di kota Manado propinsi Sulawesi Utara setelah pelaksanakan desentralisasi fiskal.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam membantu pemikiran bagi pemerintah daerah Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dalam penentuan perencanaan dan kebijakan pembangunan sehingga pembangunan dalam era desentralisasi fiskal dapat mencapai hasil yang optimal dan mewujudkan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk melihat Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap Kemampuan Keuangan Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara serta dapat di jadikan bahan penelitian selanjutnya bagi peneliti yang akan meniliti tentang pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap Kemampuan Keuangan sebagai bahan perbandingan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika tertentu dan bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskripstif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi ataupun mencari implikasi.

- 1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah (KPRD) Kontribusi pajak dan retribusi daerah adalah besarnya kontribusi penerimaan pajak dan retribusi terhadap penerimaan PAD, yang diukur dalam satuan rupiah.
- 2. Rasio Pendapatan Asli Daerah (RPAD)
 Rasio PAD adalah perbandingan antara penerimaan PAD dengan PDRB dikalikan 100%, dimana rasio tersebut salah satu indikator dari ada atau tidaknya sistem peencanaan penerimaan PAD.
- 3. Rasio Pajak (RPJK)
 Rasio Pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDRB dikalikan 100%, dimana rasio tersebut adalah salah satu indikator dari ada atau tidaknya sistem perencanaan penerimaan PAD.
- 4. Rasio Retribusi (RRET)
 Rasio Retribusi adalah perbandingan antara penerimaan retribusi dengan PDRB dikalikan 100%, dimana rasio tersebut salah satu indikator dari ada atau tidaknya sistem perencanaan penerimaan PAD.
- 5. Elastisitas Pajak dan Retribusi (EPR)
 Elastisitas Pajak dan Retribusi adalah tingkat responsif pajak dan retribusi terhadap PDRB, yang diukur dalam satuan persentase.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah seberapa jauh daerah dapat menggali sumbersumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan Keuangan Daerah ditampilkan dengan menggunakan peta kemampuan daerah. Masing-masing kuadran di tentukan oleh besarnya nilai growth dan share. Dengan nilai nilai tersebut maka masing-masing Kabupaten atau Kota Manado di Propinsi Sulawesi Utara dapat diketahui posisinya (Yanuar 2010:83).

Kemampuan Keuangan Daerah tediri dari indikator :

1. Indeks Pertumbuhan

Indeks Pertumbuhan adalah perbandingan PAD antara tahun I dengan PAD tahun i-1.

- 2. Indeks Elastisistas
 - Indeks Elastisitas adalah proporsi dari belanja modal terhadap PAD.
- 3. Indeks Share
 - Indeks Share adalah proporsi dari PAD terhadap APBD.

Rumus dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah

Rumus Kontribusi Pajak dan Retribusi (Halim, 2004: 163):

$$P n = \frac{QX_n}{QY_n} \quad x \quad 100\%$$

2. Rasio PAD (RPAD)

Rumus Rasio PAD (Halim, 2004:337):

Rasio PAD =
$$\frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

3. Rasio Pajak (RPJK)

Rumus Rasio Pajak (Halim, 2004: 337)

4. Rasio Retribusi (RRET)

Rumus Rasio Retribusi (Halim, 2004: 337):

Rasio Retribusi =
$$\frac{\text{Penerimaan Retribusi}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

5. Elastisitas Pajak dan Retribusi (EPR)

Rumus elastisitas pajak dan retribusi (Elfida, 2005):

$$e = \frac{TR}{\frac{\cdot}{Y}} \frac{Y}{TR}$$

- ❖ Derajat Desentralisasi Fiskal antara pemerintah pusat dan daerah
 - 1. Rumus derajat desentralisasi fiskal (Halim,2004:24):

Proporsi PAD (PROPAD) =
$$\frac{PAD}{TPD}$$

Proporsi Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (PROBHPBP) =
$$\frac{BHPBP}{TPD}$$

$$DAK + DAU$$

Proporsi Sumbangan Daerah (PROSD) =
$$\frac{DAK + DAU}{TPD}$$

2. Indeks Kemampuan Keungan (IKK) Rumus IKK (Halim, 2004 : 24) :

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{X_G + X_E + X_S}$$

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini diperoleh dari laporan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara dari perpustakaan Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. 17 Agustus Manado 95119 dan mengakses situs badan pusat statistik yaitu www.bps.go.id dan Kajian Ekonomi Regional Sulawesi Utara (periode 2000-2011). Penelitian dilkukan secara bertahap dari bulan Agustus sampai November 2013.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumentasi dengan pengumpulan bahan-bahan dan data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang peneliti kutip dari buku, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data documenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan) yang berasal dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto.

Analisis yang digunakan dalam pnelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok dalam situasi tertentu, berpikir sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu, memberikan ide untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk mengambil keputusan sederhana, dengan kata lain, penelitian deskriptif menekankan pada pengajian data secara sistematis dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran dengan jelas.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Manado terletak diujung pulau Sulawesi dan merupakan kota terbesar dibelahan Sulawesi Utara sekaligus sebagai Ibu kota propinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Kota Manado terletak di antara 1°25′88"-1°39′50" LU dan 124°47′00"-124°56"00" Bujur Timur. Sebelah Utara dengan : Kec. Wori (Kab. Minahasa) dan Teluk Manado Sebelah Timur dengan : Kec. Dimembe Sebelah Selatan dengan : Kec. Pineleng Sebelah Barat dengan : Teluk Manado/ Laut Sulawesi.

Jumlah penduduk Kota Manado saat ini sebanyak 451.172 jiwa: Laporan Pemerintah Kota Manado (PDAM) 2003). Sebagian besar penduduk Kota Manado bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), guru atau pegawai swasta (41,44%), sebagai wiraswasta (20,57%), pedagang (12,85%), petani / peternak / nelayan (9,17%), buruh (8,96%). Sisanya bergerak di sektor jasa dan lain-lain (7%).

Perekonomian Kota Manado khususnya terdiri dari sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta setor jasa. Pada tahun 1996 peran ketiga sektor utama ini dalam pembentukkan PDRB, adalah sejumlah 68,74%. Dalam kurun waktu 5 tahun, peran ketiga sektor ini cenderung semakin dominan yang dilihat dari kontribusinya pada tahun 2000 yang meningkat menjadi 74,68%, laju inflasi Kota Manado selama kurun waktu dua tahun terakhir (2000-2001) sangat berfluktuatif. Pada tahun 2000 sempat mengalami deflasi sebanyak lima kali yaitu masing-masing pada bulan januari sebesar -0,25%, april -0,08%, mei -0,13%, agustus -0,85% dan desember -0,16%. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan oktober yaitu sebesar 4,05%. Sehingga secara kumulatif inflasi yang terjadi di Manado sebesar 11,41%. Pada tahun 2001 terjadi deflasi sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan februaru sebesar -0,56%, agustus -0,23%, dan desember sebesar -0,25%. Sedangkan inflasi tertinggi pada tahun 2001 terjadi pada bulan juli yaitu sebesar 2,83% dimana secara kumulatif inflasi pada tahun 2001 mencapai 13,30%.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado pada tahun 2000 adalah Rp. 3,06 trilyun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan angka tahun 1994 yang berjumlah Rp. 703,87 milyar. Tingkat pertumbuhan yang dicapai dalam kurun waktu tersebut

rata-rata 6,11%, per tahun. Pada tahun 1994 sampai 1996 angka pertumbuhan berada diatas 10% kemudian melambat menjadi 2,92% pada tahun 1999, pertumbuhan meningkat lagi menjadi 1,62%.

Sejak munculnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997, perekonomian Kota Manado sangat terpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka pengangguran yang diperkirakan pada tahun 2000 masih sebesar 20.465 orang atau 13,67% dan meningkatnya jumlah keluarga miskin sebanyak 19.754 kepala keluarga (KK) atau 24,60%. Pada tahun 1999, terdapat indikasi adanya pemulihan perekonomian kota yang signifikan. Pendapatan perkapita Kota Manado naik dari 1.753.482 pada tahun 1994 menjadi 4.452.672 pada tahun 2000.

Perekonomian Kota Manado khususnya terdiri dari sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta setor jasa. Pada tahun 1996 peran ketiga sektor utama ini dalam pembentukkan PDRB, adalah sejumlah 68,74%. Dalam kurun waktu 5 tahun, peran ketiga sektor ini cenderung semakin dominan yang dilihat dari kontribusinya pada tahun 2000 yang meningkat menjadi 74,68%, laju inflasi Kota Manado selama kurun waktu dua tahun terakhir (2000-2001) sangat berfluktuatif. Pada tahun 2000 sempat mengalami deflasi sebanyak lima kali yaitu masing-masing pada bulan januari sebesar -0,25%, april -0,08%, mei -0,13%, agustus -0,85% dan desember -0,16%. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan oktober yaitu sebesar 4,05%. Sehingga secara kumulatif inflasi yang terjadi di Manado sebesar 11,41%. Pada tahun 2001 terjadi deflasi sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan februaru sebesar -0,56%, agustus -0,23%, dan desember sebesar -0,25%. Sedangkan inflasi tertinggi pada tahun 2001 terjadi pada bulan juli yaitu sebesar 2,83% dimana secara kumulatif inflasi pada tahun 2001 mencapai 13,30%.

Berdasarkan kaidah alam secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara itu dari segi perjalanannya dapat didefiniskan sebagai "perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa ekowisata adalah *ecological tourism*, yaitu suatu model pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab di daerah yang masi alami atau daerah yang dikelola secara kaidah alam untuk menikmati dan menghargai alam (dan segala bentuk budaya yang menyertainya) yang mendukung konservasi, melibatkan unsur pendidikan dan pemahaman, memiliki dampak yang rendah dan keterlibatan aktif sosio ekonomi masyarakat setempat. Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan. Dengan kata lain ekowisata adalah kegiatan wisata alam plus plus.

Adanya unsur plus plus di atas yaitu kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat ditimbulkan oleh : kekuatiran akan makin rusaknya lingkungan oleh pembangunan yang bersifat eksploatatif terhadap sumber daya alam, asumsi bahwa pariwisata membutuhkan lingkungan yang baik dan sehat, kelestarian lingkungan tidak mungkin dijaga tanpa partisipasi aktif masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat lokal akan timbul jika mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi ('economical benefit') dari lingkungan yang lestari, kehadiran wisatawan ke tempat yang masih alami, itu memberikan peluang bagi penduduk setempat untuk mendapatkan penghasilan alternatif dengan menjadi pemandu, pondok ekowisata (ecolodge), warung dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan ekowisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka atau meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal, baik secara materil, spiritual, kulturil maupun intelektual.

Tabel 1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2002

PENERIMAAN	jumlah (Rp)
1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	0
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	30.138.130.000
3. Bagian Dana Perimbangan	164.792790.000
4. Bagian Pinjaman daerah	0
5. Bagian Lain – lain Penerimaan yang Sah	0
TOTAL	194.930.920.000
PENGELUARAN	
1. Belanja rutin	163.400.920.000
2. Belanja Pembangunan	31.530.000.000
TOTAL	194.930.920.000

Sumber: www.manadokota.go.id,2013

Dari data tersebut di atas ini bisa dilihat bahwa pendapatan dan pengeluaran APBD Kota Manado tahun 2002 adalah sama. Dari data penerimaan, bisa dilihat bahwa pendapatan yang didapatkan berasal dari 2 pokok bagian saja, yaitu bagian pendapatan alsi daerah, dan bagian dana perimbangan.

Tabel 2. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Manado 2000-2011

Tahun	PJK	RET	KPRD
2000	9,147,032	5,224,851	87,372
2001	11,795,000	10,590,994	89,850
2002	15,435,000	12,116,624	101,111
2003	19,566,090	9,561,370	95,838
2004	20,898,025	10,607,099	95,483
2005	25,121,530	13,728,375	91,926
2006	31,978,550	11,675,740	93,846
2007	32,501,510	15,712,220	92,275
2008	39,281,365	19,441,434	79,915
2009	40,979,250	18,845,290	79,921
2010	57,250,780	23,797,105	89,231
2011	121,993,320	27,061,067	91,101

Sumber: data sekunder yang diolah,2013

Dari tabel di atas menunjukkan, kontribusi pajak dan retribusi di daerah Kota Manado dari tahun 2000-2011 mengalami fluktuatif. Setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2000-2002 terus meningkat, Itu berarti pemerintah daerah semakin berhasil menggali potensi daerah, tetapi pada tahun 2003 kontribusi pajak dan retribusi daerah Kota Manado terus turun sampai pada tahun 2005, namun pada tahun 2006 kembali naik dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2007, terus mengalami penurunan sampai yang terendah di tahun 2008 dan pada tahun 2009 mulai naik kembali dan terus naik hingga tahun 2011.

Data Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, berarti pada tahun-tahun tertentu pemerintah Kota Manado belum optimal serta tidak konsisten dalam menggali potensi daerah sehingga kontribusi yang didapatkan mengalami perubahan naik dan turun atau berfluktuatif. Hal ini terjadi karena diduga pada masa-masa tersebut banyak kebijakan-kebijakan yang tidak dirasakan manfaatnya bagi pelaku dunia usaha dan masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga mereka tidak punya kesadaran dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi.

Sektor Pajak dan Retribusi yang kurang baik, bisa diduga karena masalah motivasi dan insentif pemerintah Kota Manado yang kurang terhadap pegawai yang bertugas memungut pajak. Kontribusi Pajak dan Retribusi pada tahun 2010 dan 2011 meningkat dapat diduga karena kebijakan insentif untuk pegawai dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi dan pemberian TKD.

Tabel 3. Rasio PAD di Kota Manado 2000-2011

Tahun	PPAD	PDRB	RPAD
2000	16,448,992	3,061,000,610	0.537
2001	24,914,701	3,212,540,140	0.775
2002	27,248,840	3,358,550,050	0.811
2003	30,392,110	3,523,622,760	0.862
2004	32,995,360	3,716,188,700	0.887
2005	42,261,822	3,935,254,310	1.073
2006	46,516,790	4,212,250,540	1.104
2007	52,250,010	4,498,771,860	1.161
2008	73,481,423	4,893,355,490	1.501
2009	74,854,540	5,371,420,930	1.393
2010	90,828,484	5,763,351,020	1.575
2011	163,614,428	6,247,147,750	2.619

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013

Tabel di atas menunjukkan Rasio PAD setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal dari tahun 2000-2011 secara umum terus mengalami peningkatan, Tetapi pada tahun 2008-2010 sedikit mengalami kenaikan dan penurunan, dan sampai pada tahun 2011 Rasio PAD terus mengalami kenaikan. Meningkatnya Rasio PAD di Kota Manado, berarti pemerintah Kota Manado sudah bisa mengembangkan penerimaan PAD terhadap PDRB. Pemerintah Kota Manado merencanakan PAD dalam APBD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Manado Rasio PAD semakin meningkat, dan itu berarti pemerintah daerah sangat mengandalkan penerimaan PAD sebagai salah satu pembiayaan pembangunan Kota Manado.

Tabel 4. Rasio Pajak di Kota Manado 2000-2011

Tahun	PPJK	PDRB	RPJK
2000	9,147,032	3,061,000,610	0.298
2001	11,795,000	3,212,540,140	0.367
2002	15,435,000	3,258,550,050	0.459
2003	19,566,090	3,523,622,760	0.555
2004	20,898,025	3,716,188,700	0.562
2005	25,121,530	3,935,254,310	0.638
2006	31,978,550	4,212,250,540	0.759
2007	32,501,510	4,498,771,860	0.722
2008	39,281,365	4,893,355,490	0.802
2009	40,979,250	5,371,420,930	0.762
2010	57,250,780	5,763,351,020	0.993
2011	121,993,320	6,247,147,750	1.952

Sumber: data sekunder yang diolah,2013

Pemerintah Kota Manado mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan PAD, dan penerimaan PAD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, berarti pemerintah Kota Manado kurang yakin dapat menggali potensi daerah dengan maksimal sehingga pendapatan pemerintah daerah yang berupa pajak akan meningkat. Secara keseluruhan Rasio Pajak masih rendah, tapi trend menunjukkan semakin meningkat Rasio Pajak dari tahun 2000-2011, hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Manado berusaha maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meningkatnya Rasio Pajak di kota Manado, pemerintah Kota

Manado menunjukkan usaha kinerja dalam menggali potensi penerimaan pajak Kota Manado untuk pelaksanaan pembangunan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan itu berarti pemerintah Kota Manado harus lebih berusaha memikirkan bagaimana menunjang usaha yang dilakukan masyarakat Kota Manado agar masyarakat sebagai wajib pajak juga bisa membantu kebijakan pemerintah Kota Manado dalam menggunakan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan PAD untuk pembagunan daerah Kota Manado.

Tabel 5. Rasio Retribusi di Kota Mando 2000-2011

Tahun	PRET	PDRB	RRET
2000	5,224,851	3,061,000,610	0.17
2001	10,590,994	3,212,540,140	0.329
2002	12.116.624	3,258,550,050	0.36
2003	9.561.370	3,523,622,760	0.271
2004	10.607.099	3,716,188,700	0.285
2005	13.728.375	3,935,254,310	0.348
2006	11.675.740	4,212,250,540	0.277
2007	15.712.220	4,498,771,860	0.349
2008	19.441.434	4,893,355,490	0.397
2009	18.845.290	5,371,420,930	0.35
2010	23.797.105	5,763,351,020	0.412
2011	27.061.067	6,247,147,750	0.433

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013

Tabel 5. Diatas menunjukkan Rasio Retribusi dari tahun 2000-2011 di Kota Manado berfluktuatif, dari tahun ke-tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Naik turunnya Rasio Retribusi di Kota Manado, berarti pemerintah Kota Manado kurang konsisten dan masih kurang usaha dalam mengandalkan penerimaan Retribusi untuk pembiayaan pembangunan Kota Manado. Hasil Rasio Retribusi yang berfluktuatif dari tahun ke-tahun, dapat dikatakan bahwa lahan milik pemerintah yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi oleh masyarakat masih belum maksimal.

Tabel 6. Elastisitas Pajak dan Retribusi

Tahun	TR	TR	PDRB	EPR
2000	87,372	14,371,883	3,061,000,610	8.306
2001	89,850	22,914,701	3,212,540,140	8.271
2002	101,111	27,551,624	3,258,550,050	8.411
2003	95,838	29,127,460	3,523,622,760	7.016
2004	95,483	31,505,124	3,716,188,700	5.779
2005	91,926	38,849,905	3,935,254,310	4.153
2006	93,846	43,654,290	4,212,250,540	3.184
2007	92,275	48,213,730	4,498,771,860	2.985
2008	79,915	58,722,799	4,893,355,490	1.666
2009	79,921	59,824,540	5,371,420,930	1.436
2010	89,231	81,047,885	5,763,351,020	1.564
2011	91,101	149,054,387	6,247,147,750	0.754

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013

Elastisitas Pajak dan Retribusi Kota Manado dari tahun 2000-2010 memiliki nilai elastisitas >1 sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2000-2010 adalah pajak dan retribusi yang elastis, itu berarti ada perubahan dalam PDRB sebesar 1% dan mengakibatkan perubahan dalam pajak dan retribusi lebih besar dari 1%. Sedangkan pada tahun 2011 memiliki nilai elastisitas <1 itu berarti pada tahun 2011 adalah pajak dan retribusi inelastis, berarti ada perubahan dalam PDRB sebesar 1% dan mengakibatkan perubahan dalam pajak dan retribusi lebih kecil dari 1%. Dari hasil elastisitas pajak dan retribusi diatas menunjukkan bahwa pada

tahun 2000-2010 pajak dan retribusi bertumbuh lebih baik atau lebih besar dari PDRB, namun pada tahun 2011 pajak dan retribusi lebih kecil daripada PDRB. Ini berarti Elastisitas Pajak dan Retribusi negatif atau tidak signifikan karena seharusnya jika PDRB naik, maka pajak dan retribusi juga meningkat.

Tabel 7. Proporsi PAD di Kota Manado 2000-2011

Tahun	PAD	TPD	PROPAD
2000	16.448.992	70.021.457	0,234
2001	24.914.701	167.139.024	0,149
2002	27.248.840	231.204.740	0,117
2003	30.392.110	264.387.410	0,114
2004	32.995.360	276.347.276	0,119
2005	42.261.822	301.366.266	0,140
2006	46.516.790	454.031.170	0,102
2007	52.250.010	549.089.470	0,095
2008	73.481.423	662.074.202	0,110
2009	74.854.540	641.481.790	0,116
2010	90.828.484	672.960.866	0,134
2011	163.614.428	939.055.655	0,174

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013

Proporsi PAD di Kota Manado dari tahun 2000-2011 sangat berfluktuatif, Proporsi PAD Kota Manado tersebut, berarti pemerintah kota Manado memiliki kemandirian keuangan yang semakin rendah. Itu berarti PAD memberikan kontribusi yang kecil dalm total penerimaan daerah. Penurunan Proporsi PAD sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa terjadi penurunan kontribusi PAD dalam total penerimaan daerah, sehingga kecenderungan daerah untuk mandri secara keuangan semakin kecil. Hasil ini berarti pemerintah Kota Manado mengandalkan dana dari pusat untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel 8. Proporsi BHPBP di Kota Manado 2000-2011

Tahun	ВНРВР	TPD	PROBHPBP
2000	9,147,032	70.021.457	0.075
2001	11,795,000	167.139.024	0.106
2002	15,435,000	231.204.740	0.124
2003	19,566,090	264.387.410	0.121
2004	37,851,916	276.347.276	0.136
2005	24,281,790	301.366.266	0.08
2006	22,286,210	454.031.170	0.049
2007	25,625,000	549.089.470	0.046
2008	41,966,816	662.074.202	0.063
2009	39,684,660	641.481.790	0.061
2010	60,747,413	672.960.866	0.09
2011	45,902,055	939.055.655	0.048

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Proporsi BHPBP di Kota Manado setelah desentralisasi fiskal mengalami fluktuatif. Dengan hasil data diatas berarti Dana Bagi Hasil yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah Kota Manado mengalami penurunan. Dari hasil Proporsi BHPBP sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah perlu mencari upaya-upaya untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak supaya dapat membiayai pembangunannya secara mandiri. Ini berarti Kota Manado dalam DBH pajak dan Bukan Pajak belum sepenuhnya mandiri.

Tabel 9. Proporsi Sumbangan Daerah di Kota Manado 2000-2011

Tahun	DAU	DAK	TPD	PROSD
2000	48.199.097	0	70.021.457	0,688
2001	124.676.292	0	167.139.024	0,759
2002	142.153.440	4.070.350	231.204.740	0,632
2003	194.620.420	6.510.320	264.387.410	0,760
2004	183.900.000	9.480.000	276.347.276	0,699
2005	201.530.000	8.260.000	301.366.266	0,696
2006	330.290.000	31.800.000	454.031.170	0,797
2007	374.754.000	35.379.000	549.089.470	0,746
2008	430.073.269	42.741.000	662.074.202	0,714
2009	420.759.590	55.683.000	641.481.790	0,742
2010	420.481.311	28.014.400	672.960.866	0,666
2011	482.454.130	42.958.800	939.055.655	0,559

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013

Dari tabel diatas menunjukkan Proporsi Sumbangan Daerah di Kota Manado setelah desentralisasi fiskal berfluktuatif dari tahun 2000-2011, berarti setelah desentralisasi fiskal pada tahun 2001 Proporsi Sumbangan Daerah Kota Manado semakin meningkat itu menunjukkan Kontribusi DAU dan DAK semakin meningkat dalam Total Pendapatan Daerah, sehingga kota Manado belum bisa mandiri dalam keuangan daerah. Tetapi pada tahun 2002 sedikit menurun, berarti pada tahun ini Kontribusi DAU dan DAK lebih kecil daripada tahun sebelumnya, tetapi Kota Manado belum bisa dikatakan mandiri secara keuangan karena pada tahun 2003 Proporsi Sumbangan Daerah kembali meningkat itu berarti Kontribusi DAU dan DAK tinggi. Pada tahun 2004-2010 terus mengalami fluktuatif. Sedangkan Pada tahun 2011 sedikit mengalami penurunan, itu berarti pada tahun 2011 Kota Manado dapat dikatakan sedikit mandiri dalam keuangan daerah.

Dari data Proporsi sumbangan daerah Kota Manado diatas menunjukkan kota Manado masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, namun dari tahun ke-tahun proporsi sumbangan daerah semakin menurun, artinya tingkat ketergantungan pemerintah pusat sudah semakin berkurang walaupun masih diatas 50%. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah supaya nantinya dapat mandiri secara keuangan. Pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan potensi lokal untuk mendorong peningkatan PAD yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan di kota Manado.

Tabel 11. Indeks Kemampuan Keuangan di Kota Manado 2000-2011

Tahun	XG	XE	XS	IKK
2000	0.462	0.913	0.17	0.515
2001	0.753	0.259	0.625	0.545
2002	0.152	0.128	0.272	0.184
2003	0.199	0.432	0.238	0.289
2004	0.14	0	0.284	0.141
2005	0.471	0.085	0.534	0.363
2006	0.171	0.624	0.079	0.291
2007	0.213	0.966	0	0.393
2008	0.633	0.907	0.193	0.577
2009	0	1	0.159	0.386
2010	0.368	0.493	0.443	0.434
2011	1	0.43	1	0.81

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Indeks Kemampuan Keuangan di Kota Manado setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2000-2011 berfluktuatif dan sangat tidak konisten. Secara umum Kota Manado masih sedikit mengandalkan keuangan pemerintah pusat dan dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya daerah dalam rangka mendorong peningkatan PAD masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah di Kota Manado masih belum mandiri atau tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan masih cukup besar, tetapi dengan meningkatnya IKK pada tahun 2011 berarti pemerintah kota Manado sudah berusaha optimal untuk meningkatkan penerimaan PAD, agar pemerintah daerah kota Manado bisa mandiri secara keuangan.

Meningkatnya IKK di Kota Manado pada tahun 2011, dapat diduga karena pelaksanaan internasional di Kota Manado pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun tersebut banyak wisatawan maupun masyarakat lokal yang datang dan menggunakan produk-produk Kota Manado, dan itu sangat menguntungkan bagi para wirausaha yang memproduksi kebutuhan para wisatawan, berarti dengan meningkatnya pendapatan wirausaha akan meningkatkan penerimaan Pajak dan bahkan penerimaan Retribusi Kota Manado.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah atau pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000-2011, memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk meningkatkan Penerimaan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Daerah dianggap lebih sensitif terhadap kebutuhan dan potensi lokalnya yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1. Setelah Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kota Manado, Penerimaan Daerah Kota Manado meningkat, sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi di Kota Manado dan dengan Menggali potensi lokal Kota Manado sangat menunjang Penerimaan di Daerah Kota Manado.
- 2. Kemampuan Keuangan di Kota Manado setelah pelaksanasan Desentralisasi Fiskal berfluktuatif, ada masa di tahun-tahun tertentu, pemerintah Kota Manado bisa mandiri secara keuangan, tetapi ada masa tahun tertentu pemerintah Kota Manado tidak bisa mandiri secara keuangan, tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Manado masih sedikit bergantung pada pemerintah pusat, namun pemerintah daerah Kota Manado tetap berusaha untuk optimal dalam menggali potensi keuangan daerah kota Manado dan mengoptimalkan penerimaan PAD di Kota Manado, sehingga tingkat kemandirian Kota Manado mulai relatif tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2013. Propinsi Sulawesi Utara

Bahl, Roy W, 2000. China: Evaluating the impact of intergovernmental

fiscal reform.

Bohte, John dan Kenneth J Meier, 2000. The Marble Cake: Introducing Federalism to The Government Equation. Publius. Summer. Hal: 35-99

Devas, N. 1995. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press

Hadi Hasana, 2006. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah) jurnal Vol 3 no 2.

- Halim, A. 2004. Bunga rampai Manajemen keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Hamid, E 2006. Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi. Penerbit UII, Yogyakarta
- Kaloh, J, 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Oates, W, 1993, Fiscal Decentralization and Economic Development, National Tax Journal, XLVI 237-243
- Priyo Hari Adi, 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap pertumbuhan Ekonomi (studi kasus kabupaten dan kota se Jawa-Bali). Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Raksaka, Mahi. 2001. Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari segi pemerataan antar daerah dan peningkatan efisiensi. Analisa CSIS XXIX, hal 54-66, Jakarta: Indonesia Project, Jakarta
- Yanuar 2010. Analisis Kemampuan keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah kebijakan Otonomi Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN BIAYA *VARIABLE COSTING* PADA PERUSAHAAN ROTI LIDYA

Chintya Ester Bokong, Sifrid S. Pangemanan dan Winston Pontoh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado E-mail: chinzzer@hotmail.com

ABSTRAK

Dalam bidang usaha produksi roti, biaya dapat berpengaruh dalam mendukung kemajuan suatu perusahaan dalam melaksanakan aktifitas atau kegiatan operasi. Pada biaya produksi, perusahaan memperhitungkan cakupan biaya yang mempengaruhi proses produksi secara keseluruhan. Biaya produksi dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung dan *overhead* pabrik. *Variable costing* merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik variabel. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Roti Lidya yang beralamat di Jl. Tanjung Batu Manado. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis perhitungan biaya produksi menggunakan pendekatan *variable costing*. Hasil dari dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam menggunakan perhitungan dengan pendekatan *variable costing* diperoleh total biaya produksi yang lebih rendah yaitu sebesar Rp. 72.720.000 dibandingkan dengan menggunakan perhitungan riil yang dibuat oleh perusahaan yaitu Rp. 82.000.553. Adanya selisih Rp. 9.280.553 dari perhitungan tersebut merupakan selisih antara marjin kontribusi dengan biaya tetap yang merupakan laba yang di peroleh oleh perusahaan.

Kata Kunci: Biaya Produksi, Variable Costing.

ABSTRACT

In the business of production bread, cost can be influential in supporting the company's progress in carrying out an activity or operation. In production cost, company takes into account the cost of coverage that affects the overall production process. Production cost incurred to meet the needs of production such as raw materials, direct labor and factory overhead. Variable costing is a method of determening which only takes into account of production cost into variable cost production, which consists of raw materials, direct labor costs and factory overhead costs variable. This study aims at revealing the result analysis of the calculation of cost production at Lidya Bakery on Jl. Tanjung Batu Manado. It has been identified that cost has the important role to support the operational activity of a company, since the cost production expectation such as, raw material, direct labor costs and overload factory. To determine the production of Lidya Bakery, variable costing method is used. The calculation focusing on the cost production using variable cost is Rp.72.720.000 lower than the real calculation Rp. 82.000.553 calculated by the company. The difference in cost is Rp. 9.280.553 shows that the difference between the marginal contribution is the profit gained by the company.

Keywords: Cost Production, Variable Costing

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu perusahaan, biaya merupakan salah satu komponen yang sangat penting, oleh karena itu biaya harus mendapat perhatian yang lebih khusus. Biaya merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan. Biaya produksi merupakan biayabiaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung harga produk jadi dan harga produk yang pada akhir periode akutansi masih dalam proses. Biaya produksi ini biasanya terdiri dari tiga unsur yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung dan *overhead* pabrik.

Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik variabel.

Perusahaan ini merupakan suatu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi roti. Dengan dipisahkan informasi biaya menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, metode *variable costing* mampu menghasilkan informasi-informasi yang diperlukan perusahaan Roti Lidya yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan baik dalam perencanaan laba jangka pendek, pengendalian biaya tetap yang lebih baik, dan pengambilan keputusan jangka pendek. Pada perusahaan Roti Lidya biaya produksinya dihitung secara terperinci. Penulis dalam hal ini ingin menganalisis biaya produksi perusahaan dengan pendekatan *variable costing*, karena dilihat dari cara perhitungannya *variable costing* lebih praktis serta metode ini dapat menyajikan dampak keputusan terhadap biaya dan laba.

Tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu menurut Mulyadi (2012 : 7), akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya.

Menurut Firdaus dan Wasilah (2012 : 22) menyatakan bahwa biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi.

Bastian dan Nurlela (2006 : 4), biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2012 : 13), biaya dapat digolongkan menurut:

- 1. Objek pengeluaran.
- 2. Fungsi pokok dalam perusahaan.
- 3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.
- 4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan.
- 5. Jangka waktu manfaatnya.

Menurut Mulyadi (2012 : 16), dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya: biaya produksi dan biaya nonproduksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya nonproduksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan nonproduksi, seperti biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum.

Full Costing atau sering pula disebut absorption atau conventional costing adalah metode penentuan harga pokok produksi, yang mebebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari: Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variable.

Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Harga produk yang dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel) ditambah dengan biaya nonproduksi variabel (biaya pemasaran variabel dan biaya administrasi dan umum variabel) dan biaya tetap (biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap).

Variable costing ini dikenal dengan nama direct costing. Istilah direct costing sebenarnya sama sekali tidak berhubungan dengan istilah direct cost (biaya langsung). Pengertian langsung dan tidak langsungnya suatu biaya tergantung erat tidaknya hubungan biaya dengan objek penentuan biaya, misalnya: produk, proses, departemen, dan pusat biaya yang lain. Dalam hubungannya dengan produk, biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang mudah diidentifikasi (atau diperhitungkan) secara langsung kepada produk. Apabila pabrik hanya memproduksi satu jenis produk, maka semua biaya produksi adalah merupakan biaya langsung dalam hubungannya dengan produk. Oleh karena itu tidak selalu biaya langsung dalam hubungannya dengan produk merupakan biaya variabel. Istilah direct costing adalah tidak tepat, karena metode ini berhubungan dengan penentuan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel, dan bukan biaya langsung (direct cost). Istilah yang tepat untuk metode direct costing adalah variable costing.

Dalam metode *variable costing*, biaya *overhead* pabrik tetap diperlakukan sebagai *period* costs dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya *overhead* pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dengan demikian biaya *overhead* pabrik tetap di dalam metode *variable costing* tidak melekat pada persediaan produk yang belum laku dijual, juga langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya.

Menurut metode *variable costing*, *period cost* adalah biaya untuk mempertahankan tingkat kapasitas tertentu guna memproduksi dan menjual produk. Dalam metode *variable costing*, *period costs* meliputi seluruh biaya tetap atau seluruh biaya kapasitas (*capacity costs*). Dengan demikian *period cost* menurut pengertian *variable costing* adalah biaya yang dalam jangka pendek tidak berubah dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yang meliputi: biaya *overhead* pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap.

Metode *variable costing* banyak diterapkan bagi keperluan pelaporan internal, karena metode ini dianggap konsisten dengan asumsi perilaku biaya yang kerap digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen (Witjaksono 2006 : 102).

Variable costing memiliki beberapa keuntungan dan kekurangan diantaranya (Lepadatu 2010 : 49). Keuntungannya antara lain: mudah dalam perhitungan biaya produksi unit; memungkinkan perhitungan indikator spesifik yang membantu analisis hubungan cost-volume-profit atau price-cost-volume menjadi efisiensi dalam membuat keputusan dalam periode produksi yang singkat; memungkinkan realisasi efisiensi kontrol pada setiap level perusahaan dan tanggungjawab oleh manajer; menunjukan produk dengan variabel harga yang tidak sesuai pada produk yang berbeda. Kekurangannya antara lain: variable cost hanya memungkinkan untuk perhitungan dalam periode produksi singkat; tidak dapat meramalkan produk yang profitable untuk periode produksi berikutnya disebabkan perubahan harga.

Ditinjau dari penyajian laporan laba rugi, perbedaan pokok antara metode *variable costing* dengan *full costing* adalah terletak pada klasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut. Laporan laba rugi yang disusun dengan metode *full costing* menitikberatkan pada penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi-fungsi pokok yang ada dalam perusahaan *(functional-cost classification)*.

Di lain pihak laporan laba rugi metode *variable costing* lebih menitikberatkan pada penyajian biaya sesuai dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan *(classification by cost behavior)*.

Berikut ini merupakan manfaat-manfaat dari variable costing:

- 1. *Variable Costing* sebagai Alat Perencanaan Laba Perencanaan Laba atau perencanaan operasi adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan yang dibagi dalam dua jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan jangka panjang.
 - yang dibagi dalam dua jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan jangka panjang. Variable costing bermanfaat dalam pembuatan rencana jangka pendek dengan memisahkan biaya variabel dan tetap dalam laporan rugi laba, sehingga akan diketahui contribution margin.
- 2. Variable Costing sebagai Petunjuk Penentuan Harga Jual Informasi contribution margin dari variable costing sangat membantu dalam menentukan harga jual yang kompetitif, karena contribution margin menunjukkan berapa kelebihan hasil penjualan dari biaya variabel, bisa diperhitungkan dengan mengalihkan contribution margin/unit dengan jumlah penjualan, sedangkan biaya tetap akan tetap jumlahnya. Oleh karena itu tertutup atau tidaknya tergantung jumlah contribution margin yang didapat. Selisih antara contribution margin dengan biaya tetap merupakan laba.
- 3. Variable Costing untuk Pengambilan Keputusan Manajemen Manajemen sering dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif dimana alternatif-alternatif tersebut mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya laba perusahaan, seperti masalah memasuki pasar-pasar baru, perluasan usaha, memenuhi atau tidak pesanan khusus, membuat sendiri atau memesan bahan pembantu atau suku cadang tertentu. Masalah ini dapat dipecahkan dengan pertolongan analisis contribution margin.

Menurut Simamora (2013:136) Perilaku biaya (cost behavior) berarti bagaimana suatu biaya akan bereaksi atau memberikan respons terhadap perubahan-perubahan tingkat aktivitas usaha. Aktivitas (activity) adalah istilah umum yang menunjuk kepada segala sesuatu yang dilakukan perusahaan. Contoh-contoh aktivitas meliputi unit produk yang diproduksi atau dijual, jam mesin, faktur yang dibuat, dan persediaan yang diinspeksi.

Pada umumnya dikenal 2 perilaku biaya, yakni biaya variabel dan biaya tetap. Sungguhpun begitu, terdapat pula pola perilaku biaya lainnya, yakni biaya campuran atau biaya semivariabel. Proporsi relatif dari setiap jenis biaya diatas dalam perusahaan disebut struktur biaya (*cost structure*). Struktur biaya perusahaan sangatlah signifikan dalam hal bahwa proses pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh jumlah relatif biaya tetap atau variabel yang ada dalam perusahaan.

Sifat kegiatan bisnis organisasi mempengaruhi secara signifikan struktur biayanya. Perusahaan-perusahaan listrik dan air minum cenderung memiliki biaya tetap yang tinggi karena mereka membenamkan investasi modal yang besar. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan pabrikasi mempunyai biaya-biaya variabel yang tinggi karena proses produksi membutuhkan banyak bahan baku dan tenaga kerja yang ekstensif. Tetapi manakala kian banyak perusahaan yang mengotomsi fasilitas-fasilitas produksi mereka, biaya-biaya tetap akan menggeser biaya-biaya variabelnya.

Proses normal klasifikasi biaya ke dalam komponen-komponen variabel dan tetap hanya sahih dalam asumsi-asumsi spesifik berikut:

- 1. Pada saat periode waktu yang dipertimbangkan relatif singkat, biasanya 1 tahun. Dalam jangka waktu yang lebih lama, metode teknologi, dan faktor-faktor lainnya akan berganti sehingga menimbulkan perubahan klasifikasi biaya-biaya dan perilakunya.
- 2. Pada waktu variasi aktivitas yang tengah dipertimbangkan relatif kecil, sebagai misal, kapasitas normal bertambah / berkurang sebesar 10%. Diluar kisaran aktivitas terbatas, biaya-biaya kemungkinannya kecil berperilaku sesuai dengan klasifikasinya semula. Selama periode waktu yang tengah dipertimbangkan, bentuk teknologi, kebijakan-kebijakan manajemen, dan metode-metode yang dipakai dianggap tidak berubah.

Menurut Ahmad (2013 : 87), biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya yang berhubungan dengan kapasitas atau volume, karena pemisahan biaya dan karakteristiknya diperlukan dalam membuat perencanaan, pengendalian biaya dan pembuatan/pengambilan keputusan. Biaya tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1. Biaya total yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode yang ditentukan atau kegiatan tertentu.
- 2. Biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume, pada volume rendah *fixed cost* unitnya tinggi, sebaliknya pada volume yang tinggi *fixed cost* per unitnya rendah.

Menurut Mulyadi (2012 : 468), biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan (tetap) dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi.

Menurut Simamora (2013 : 142), biaya variabel adalah biaya yang jumlah keseluruhannya berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis. Dengan demikian, apabila tingkat aktivitas meningkat 10%, maka jumlah biaya variabel juga ikut akan meningkat sebesar 10%. Sekalipun demikian, biaya variabel per unit jumlahnya tetap pada saat terjadi perubahan tingkat aktivitas. Aktivitas dapat dinyatakan dalam beberapa cara, seperti unit yang dihasilkan, unit yang dijual, jam mesin yang dioperasikan, dan seterusnya. Contoh-contoh biaya variabel adalah komisi penjualan, dan biaya pokok barang dagangan yang dijual dalam perusahaan dagang. Dalam perusahaan pabrikasi, contoh-contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung.

Menurut Ahmad (2013 : 100), biaya semivariabel atau biaya campuran adalah biaya yang mengandung elemen biaya tetap dan elemen biaya variabel. Biaya campuran ini sering pula disebut biaya semivariabel. Sifat biaya campuran yaitu:

- 1. Totalnya berubah mengikuti perubahan volume, tetapi perubahannya tidak proporsional.
- 2. Per unitnya juga berubah, tetapi terbalik dengan perubahan volume, dan tidak sebanding. Contoh: biaya telepon, pemeliharaan mesin, biaya listrik dan lainnya.

Pemisahan biaya campuran ini diperlukan dalam rangka penggunaannya sebagai perencanaan, pengendalian dan sebagai informasi pengambilan keputusan. Dalam mengadakan pemisahan biaya campuran ini, dipergunakan 2 metode yaitu:

- 1. Analytical approach (pendekatan analisis), dan
- 2. Historical approach (pendekatan historis).

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu yaitu Welthi Sugiarti (2011) dengan judul: Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Guna Menetapkan Harga Jual Dengan Menggunakan Metode *Full Costing* pada Perusahaan *Furniture* Santoso", yang bertujuan untuk mengetahui analisa perhitungan harga pokok produksi guna menetapkan harga jual dengan menggunakan metode *full costing*. Metode dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa analisa perhitungan HPP menggunakan metode *full costing* guna menetapkan harga jual menghasilkan selisih Sehingga perhitungan harga jual perusahaan Santoso lebih rendah dari perhitungan metode *cost-plus pricing* melalui pendekatan *full costing*. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu menganalisis perhitungan harga pokok produksi. Ada juga perbedaannya yaitu metode penentuan biaya produksi yang digunakan yaitu *full costing* dan *variable costing*.

Ada juga penelitian selanjutnya yaitu Sari Dyah S. Ayu (2013) dengan judul: Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Mustika Blora Berdasarkan Sistem Activity Based Costing (Studi Kasus pada Usaha Batik Mustika Blora) yang bertujuan untuk menentukan harga pokok produksi kain batik tulis dan batik cap dengan menggunakan pendekatan *sistem activity based costing*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan hasil penelitian yaitu HPP dengan sistem *ABC* pada kain batik sebesar Rp 102.785,42. Sedangkan jika menggunakan sistem tradisional harga pokok

produksi kain batik sebesar Rp101.045,1 lebih murah Rp. 1.740,28 per unitnya daripada sistem *ABC*. Letak kesamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melakukan perhitungan harga pokok produksi dan menggunakan metode penelitian yang sama. Ada juga perbedaannya yaitu penulis menggunakan pendekatan *variable costing* dalam perhitungan HPP sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan *ABC*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis perhitungan biaya produksi dengan menggunakan pendekatan *variable costing* pada Perusahaan Roti Lidya?

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis perhitungan biaya produksi menggunakan pendekatan *variable costing* pada perusahaan Roti Lidya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif untuk pengukuran skala numerik dalam jumlah bahan baku produksi dan data kualitatif berupa gambaran umum perusahaan.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dalam bentuk data primer. Data ini diperoleh langsung dari perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan melakukan wawancara langsung kepada pimpinan perusahaan.

Perhitungan *variable costing* dilakukan setelah semua data terkumpul, dihitung secara akuntabel, kemudian hasil perhitungannya dianalisis. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif, dimana metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan ciri dari jenis penelitian ini yang bermaksud membuat gambaran tentang situasi atau kejadian. Data analisis ini berdasarkan sistem pengendalian manajemen yang digunakan oleh objek penelitian. Setelah hasil analisis terdeskripsikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dengan membandingkan rumusan permasalahan dan hasil analisis yang ada. Data dalam penelitian ini berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi, data kepustakaan, data biaya-biaya produksi perusahaan dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

Tempat yang menjadi penelitian dari penulis adalah Perusahaan Roti Lidya yang bertempat di Tanjung Batu Lingkungan II Manado. Waktu penelitian yang dilakukan adalah dalam waktu dua bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan November 2013.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bulan Februari tahun 1998, diawali dengan ibadah maka Perusahaan Roti Lidya mulai resmi beroperasi. Perusahaan Roti Lidya ini timbul dari imajinasi, inspirasi, dan akhirnya menjadi sebuah ide yang direalisasikan oleh Ibu Lidya Maramis selaku pemilik sekaligus *owner* perusahaan. Perusahaan Roti Lidya beralamat di Tanjung Batu Link II, Manado, Sulawesi Utara. Awal berdirinya pabrik Roti Lidya ini, hanya memproduksi kolombeng coe saja. Setahun kemudian perusahaan mencoba memproduksi roti. Seiring berkembangnya waktu dan dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap cita rasa yang baru, perusahaan mulai menambah produk yang baru yaitu cake brudel. Tak mau kalah dengan persaingan pasar yang semakin pesat, perusahaan pun menyediakan cita rasa yang beraneka ragam, antara lain: coklat, keju, coklat keju, kacang serta mocca.

Walaupun termasuk perusahaan keluarga/kecil, Perusahaan Roti Lidya mempunyai visi dan misi, yaitu sebagai berikut:

Visi: Menjadi perusahaan yang selalu dapat memberikan kenyamanan/kemudahan bagi pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya akan roti, kue, dan jajanan tradisional Indonesia yang dapat dikonsumsi sehari-hari (daily used) dan dengan harga yang terjangkau.

Misi:

- 1. Memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.
- 2. Secara terus-menerus menambah berbagai varian produk roti, kue, dan jajanan tradisional.
- 3. Secara terus-menerus memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan ujung tombak dalam memberikan kenyamanan/kemudahan bagi pelanggan.

Berikut ini adalah proses pembuatan roti:

1. Pilih Bahan

Siapkan bahan-bahan yang berkualitas baik, bersetifikat halal dan pastikan kondisinya masih baru pula.

2. Penimbangan Bahan

Pada saat penimbangan harus teliti dan tepat, hindari tercecernya bahan. Untuk penimbangan air, pastikan tidak berlebihan sehingga adonan menjadi lembek.

3. Pengadukan

Biasakan semua bahan kering diaduk terlebih dahulu sebelum air dan mentega dimasukkan. Lakukan pencampuran semua bahan secara merata untuk hidrasi yang sempurna dari pati dan protein sehingga membentuk gluten (protein dalam tepung).

Lama pengadukan harus disesuaikan dengan kemampuan gluten dari tepungnya, karena semakin tinggi proteinnya semakin lama pengadukannya, demikian pula sebaliknya.

4. Fermentasi Awal

Proses pemecahan gula oleh ragi menjadi : Gas CO2 : Adonan menjadi mengembang Alkohol : Memberi aroma pada roti

Asam : member rasa dan memperlunak gluten Panas : Suhu meningkat selama fermentasi

Lamanya fermentasi awal ini tergantung dari jumlah adonan dan jumlah tenaga kerja yang mengerjakan, biasanya 30 menit.

Selama pengistirahatan berlangsung diharuskan ditutup dengan plastik/box agar adonan tidak kering.

5. Penimbangan Adonan

Membagi adonan sesuai dengan berat yang diinginkan serta menggunakan timbangan yang benar dan lakukan dengan cepat.

6. Pembulatan Adonan

Membentuk lapisan keras dipermukaan adonan, sehingga dapat menahan gas yang dihasilkan. Menghaluskan tekstur roti dan mempermudah pekerjaan selanjutnya.

7. Fermentasi Kedua

Selain fungsinya untuk melunakkan gluten pada adonan juga untuk mempercepat fermentasi berikutnya. Lakukanlah sekitar 10 menit. Selama proses ini, harus ditutup dengan plastik agar tidak kering.

8. Mengempiskan Adonan

Fungsinya untuk mengeluarkan gas yang ada dalam adonan dengan cara menekan adonan atau menggunakan roll. Proses ini juga berfungsi untuk dapat menghaluskan tekstur. Usahakan semua gas keluar agar serat roti menjadi halus.

9. Pembentukan Adonan

Bentuklah adonan roti sesuai keinginan. Untuk roti manis dapat diisi dengan berbagai isian, tetapi jangan terlalu banyak mengandung air dan minyak agar menghindari roti bocor.

Untuk roti tawar usahakan pembentukan dan penggulungan dalam keadaan rapat dan padat, dan sambungannya berada dibawah adonan.

10. Fermentasi Akhir

Dilakukan pengembangan adonan agar mencapai bentuk dan kualitas yang maksimal. Tempat untuk fermentasi akhir ini harus memiliki panas (35-40 derajat Celcius) dan kelembaban ruang (80-85%) yang stabil.

Dapat dilakukan dengan membuat uap air dan pastikan proses ini dilakukan dengan benar, karena akan menentukan hasil akhir dari roti. Gunakan alat ukur *hygrometer* dan *thermometer* ruang.

11. Pembakaran Adonan

Temperatur oven sangat menentukan kualitas akhir dari roti yang dibuat. Lamanya pembakaran ditentukan oleh jenis oven, jenis loyang yang digunakan, jenis roti yang dibuat dan jumlah pemakaian gula dalam adonan.

Roti tawar 220 derajat Celcius, dengan loyang tertutup 30–35 menit. Roti manis 170 derajat Celcius, maksimum 15 menit, lebih dari itu berarti oven kurang panas, bisa membuat roti kering, karena kelamaan oven, solusinya naikkan suhunya.

12. Keluarkan Roti dari Loyang

Keluarkan roti yang sudah matang dari loyang sesegera mungkin. Untuk roti manis, keluarkan dari loyang dengan sangat hati-hati karena roti yang baru keluar dari oven sangat lembut dan sensitif.

13. Pendinginan

Setelah dikeluarkan dari loyang, dinginkan roti pada suhu ruang selama 1 jam (tergantung volume roti, makin besar makin lama).

14. Pembungkusan

Untuk memperlama pengerasan kulit roti akibat menguapnya kandungan air dalam roti. Hindari pembungkusan roti yang masih hangat agar tidak mudah jamuran.

Hasil dari penelitian ini yaitu perhitungan harga pokok produksi bahan baku, tenaga kerja langsung dan *overhead* pabrik. Dibawah ini adalah data-data produksi yang diperoleh oleh penulis dari pihak Perusahaan Roti Lidya.

Berikut akan dijelaskan perincian biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi roti untuk persediaan selama 1 bulan yang datanya diambil pada bulan Oktober 2013.

Nama Bahan Harga Satuan Banyaknya Jumlah Biaya Rp. 8000/kg 1440 kg Rp. 11.520.000 **Tepung** Amanda Rp. 12.000/kg 180 kg Rp. 2.160.000 Bos Rp. 22.500/kg 180 kg Rp. 4.050.000 Meises Rp. 26.000/kg 270 kg Rp. 7.020.000 Van Houten Rp. 20.000/kg 81 kg Rp. 1.620.000 Srikaya Rp. 15.000/gr Rp. 1.350.000 90 gr Rp. 27.000/bungkus Ragi 90 bungkus Rp. 2.430.000 Gula Rp. 13.000/kg 450 kg Rp. 5.850.000 Telur Rp. 14.000/lusin 675 lusin Rp. 9.450.000 Total Biaya Bahan Baku Rp. 45.450.000

Tabel 1. Biaya Bahan Baku Roti

Sumber: Perusahaan Roti Lidya, Oktober 2013

Biaya tenaga kerja langsung menurut Perusahaan Roti Lidya, upah langsung adalah jumlah keseluruhan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang bekerja dibagian produksi mulai dari pengolahan bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Besarnya tarif upah ditentukan menurut kebijakan perusahaan.

Perusahaan Roti Lidya memiliki sembilan orang pekerja dibagian produksinya yang bekerja berdasarkan tugas masing-masing dan setiap bulannya mendapat gaji sebesar :

- Baker : Rp. 3.000.000 x 8 = Rp. 24.000.000 - Pembantu : Rp. 1.300.000 x 1 = Rp. 1.300.000 Total BTK Langsung perbulan = Rp. 25.300.000

Adapun biaya overhead pabrik yaitu:

a) Biaya Overhead Pabrik Tetap

Biaya karyawan tetap

Berikut adalah total gaji karyawan yang dibayarkan perbulan:

- Manager : Rp. 3.500.000 x 1 = Rp. 3.500.000 - Kasir : Rp. 1.500.000 x 1 = Rp. 1.500.000 - Pelayan : Rp. 1.500.000 x 2 = Rp. 3.000.000 Rp. 8.000.000

Berdasarkan perhitungan diatas maka total biaya karyawan tetap setiap bulannya yaitu sejumlah Rp.8.000.000

Biaya penyusutan perlengkapan pabrik setiap bulan menggunakan metode rata-rata:

- Penyusutan bangunan = $2.333.333 \div 12$ bulan = 194.444/bulan
- Penyusutan mixer besar = $7.333.333 \div 12$ bulan = 611.111/bulan
- Penyusutan mixer kecil = 2.900.000 ÷ 12 bulan = 241.666/bulan
 Penyusutan oven listrik = 2.300.000 ÷ 12 bulan = 191.666/bulan
 Penyusutan oven biasa = 500.000 ÷ 12 bulan = 41.666/bulan

Total biaya penyusutan perlengkapan pabrik yaitu sebesar Rp. 1.280.553

- b) Biaya Overhead Pabrik Variabel
 - Biaya bahan bakar minyak yang digunakan selama satu bulan sebesar Rp. 600.000
 - Biaya listrik yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000
 - Biaya air setiap bulannya sebesar Rp. 370.000/bulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui total jumlah biaya *overhead* pabrik yang dikeluarkan oleh pihak-pihak perusahaan untuk proses produksi per bulannya adalah :

Biaya bahan bakar minyak
Biaya listrik
Biaya air
Biaya penyusutan perlengkapan pabrik
Biaya karyawan tetap
Total biaya overhead pabrik
Rp. 600.000
Rp. 1.000.000
Rp. 1.280.553
Rp. 8.000.000
Rp. 11.250.553

Dari hasil perhitungan diatas, biaya *overhead* pabrik dalam satu bulan produksi adalah Rp. 11.250.553

Adapun perhitungan biaya produksi oleh Perusahaaan Roti Lidya. Perusahaan ini menggunakan perhitungan biaya produksi yang terperinci. Dalam hal ini perusahaan membebankan semua unsur biaya produksi dengan berdasarkan biaya yang terjadi sesungguhnya. Berikut ini adalah penentuan harga pokok produksi berdasarkan perhitungan riil (menggunakan metode *full* costing) perusahaan Roti Lidya.

Tabel 3. Harga Pokok Produksi berdasarkan Perhitungan Riil (Menggunakan Metode *Full* Costing)
Oktober 2013

. Biaya Bahan Baku		
- Tepung	Rp. 11.520.000	
- Amanda	Rp. 2.160.000	
- Bos	Rp. 4.050.000	
- Meises	Rp. 7.020.000	
- Van Houten	Rp. 1.620.000	
- Srikaya	Rp. 1.350.000	
- Ragi	Rp. 2.430.000	
- Gula	Rp. 5.850.000	
- Telur	Rp. 9.450.000	
Total Bahan Baku:		Rp. 45.450.000
2. Biaya Tenaga Kerja Langs	sung	
- Baker	Rp. 24.000.000	
- Pembantu	Rp. 1.300.000	
Total BTK Langsung:		Rp. 25.300.000
3. Biaya <i>Overhead</i> Pabrik Va	riabel	
- Biaya bahan bakar minyak	Rp. 600.000	
- Biaya listrik	Rp. 1.000.000	
- Biaya air	Rp. 370.000	
Total BOP Variabel		Rp. 1.970.000
4. Biaya Overhead Pabrik Te	tap	_
- Biaya peny.perlengkapan pa	brik Rp. 1.280.553	
 Biaya karyawan tetap 	Rp. 8.000.000	
Total BOP Tetap		Rp. 9.280.553
Total Biaya Produksi		Rp. 82.000.553

Sumber: hasil olah data 2013

Jadi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diatas, untuk memproduksi roti selama satu bulan perusahaan perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 82.000.553.

Perhitungan biaya produksi dengan menggunakan metode *variable* costing, dalam menentukan biaya produksi yang ada dalam perusahaan Roti Lidya hanya membebankan unsur-unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Adapun unsur-unsur biaya variabel itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik variabel. Pembebanan biaya produksi tersebut dilakukan berdasarkan biaya historis atau biaya yang sesungguhnya terjadi.

Berdasarkan teori yang ada, biaya variabel pabrik sebaiknya dibebankan berdasarkan tarif biaya *overhead* yang telah ada, karena tidak mungkin mengukur biaya *overhead* variabel dengan tepat yang harus dibebankan terhadap suatu produk. Selain itu, dengan menggunakan tarif biaya *overhead* yang telah ada, maka dapat disusun standar dan anggaran biaya untuk keperluan pengawasan dan efisiensi kerja. Pengalokasian biaya *overhead* menurut teori yang ada. Dari hasil analisa yang telah dilakukan, maka berikut ini penulis akan menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan *variable costing*.

Tabel 4. Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Variable Costing Oktober 2013

1. Biaya Bahan Baku		
- Tepung	Rp. 11.520.000	
- Amanda	Rp. 2.160.000	
- Bos	Rp. 4.050.000	
- Meises	Rp. 7.020.000	
- Van Houten	Rp. 1.620.000	
- Srikaya	Rp. 1.350.000	
- Ragi	Rp. 2.430.000	
- Gula	Rp. 5.850.000	
- Telur	Rp. 9.450.000	
Total Bahan Baku:	-	Rp. 45.450.000
2. Biaya Tenaga Kerja Langsun	g	
- Baker	Rp. 24.000.000	
- Pembantu	Rp. 1.300.000	
Total BTK Langsung:		Rp. 25.300.000
3. Biaya Overhead Pabrik Varia	bel	
- Biaya bahan bakar minyak	Rp. 600.000	
- Biaya listrik	Rp. 1.000.000	
- Biaya air	Rp. 370.000	
Total BOP Variabel		Rp. 1.970.000
Total Biaya Produksi V	γ ariabel	Rp. 72.720.000

Sumber: hasil olah data 2013

Jadi, perbedaan perhitungan antara perhitungan riil perusahaan (menggunakan metode *full costing*) dengan metode *variable costing* dapat terlihat jelas pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbedaan Metode Full Costing dengan Variable Costing

Keterangan	Riil Perusahaan (Menggunakan Full Costing	Variable Costing
Bahan Baku	45.450.000	45.450.000
Tenaga Kerja Langsung	25.300.000	25.300.000
Overhead Pabrik Variabel	1.970.000	1.970.000
Overhead Pabrik Tetap	9.280.553	-
Total	82.000.553	72.720.000

Sumber: Hasil Olah Data 2013

Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan hasil perbandingan yang berbeda antara perhitungan berdasarkan perhitungan perusahaan dengan *variable costing*. Perhitungan riil perusahaan didapatkan hasil per bulannya sebesar Rp. 82.000.553 sedangkan menggunakan perhitungan *variable costing* di dapatkan hasil per bulannya Rp.72.720.000. Adanya selisih Rp. 9.280.553 dari perhitungan diatas merupakan selisih antara marjin kontribusi dengan biaya tetap yang merupakan laba yang di peroleh oleh perusahaan.

Perbedaan utama antara metode perhitungan riil perusahaan dengan metode *variable costing* terletak pada perlakuan biaya *overhead* pabrik. Dimana dalam perhitungan riil perusahaan menggunakan biaya *overhead* tetap dan biaya variabel, sedangkan pada metode *variable costing* hanya menggunakan biaya *overhead* variabel saja.

Dengan menggunakan *variable costing*, akan membantu perusahaan saat ingin melakukan perhitungan perhari atau perminggu karena dalam *variable costing* tidak dihitung biaya *overhead* pabrik tetap.

D. KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan metode *variable costing* yang telah dibuat oleh penulis, didapatkan hasil yang berbeda dengan perhitungan yang dibuat oleh perusahaan. Menggunakan perhitungan dengan pendekatan *variable costing* diperoleh total biaya produksi yang lebih rendah yaitu sebesar Rp. 72.720.000 dibandingkan dengan menggunakan perhitungan riil yang dibuat oleh perusahaan yaitu Rp. 82.000.553. Adanya selisih Rp. 9.280.553 dari perhitungan diatas merupakan selisih antara marjin kontribusi dengan biaya tetap yang merupakan laba yang di peroleh oleh perusahaan. Terdapat perbedaan utama antara perhitungan riil perusahaan dengan perhitungan *variable costing* yaitu terletak pada perlakuan biaya *overhead* pabrik. Perhitungan riil perusahaan menggunakan perhitungan biaya *overhead* pabrik tetap dan variabel sedangkan metode *variable costing* hanya menghitung biaya *overhead* variabel saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruddin, 2013. Akuntansi Manajemen, Dasar dasar Konsep Biaya & Pengambilan Keputusan. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ayu, Sari, 2013. Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Mustika Blora Berdasarkan Sistem Activity Based Costing (Studi Kasus pada Usaha Batik Mustika Blora). Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Bustami, Bastian & Nurlela, 2006. *Akuntansi Biaya*, *Melalui Pendekatan Manajerial*. Mitra Wancana. Yogyakarta.
- Firdaus, Wasilah, 2012. Akuntansi Biaya. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Hongren., Datar., Foster, 2008. Akuntansi Biaya Jilid 1. Edisi Sebelas. Indeks. Jakarta.
- Lepadatu Ghorghe V, 2010. Variable Cost Method, Application Variants Adapted to Romanian Accounting Plan. Theoretical and Applied Economics. EBSCO Publishing.
- Mulyadi, 2012. *Akuntansi Biaya*. Edisi Kelima. Cetakan Sebelas. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mursyidi, 2010. Akuntansi Biaya. Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung.
- Simamora H, 2013. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. StarGatePublisher. Jakarta.
- Supriyono R. A, 2011. Akuntansi Biaya. BPFE. Yogyakarta.
- Welthi Sugiarti, 2011. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Guna Menetapkan Harga Jual Dengan Menggunakan Metode Full Costing pada Perusahaan Furniture Santoso. Universitas Gunadarma.
- Witjaksono, Armanto, 2006. Akuntansi Biaya. Graha Ilmu. Yogyakarta.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

Fiani Kawung, Herman Karamoy dan Winston Pontoh

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado Email: kawungfiani@yahoo.co.id

ABSTRAK

Ketentuan perpajakan memberikan petunjuk mengenai kriteria orang pribadi dan badan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepemilikan NPWP merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya program ekstensifikasi pajak memiliki peranan penting dalam sistem administrasi perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan kepemilikan nomor pokok wajib pajak sebagai faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak di kantor pelayanan pajak pratama manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif,peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu dari hubungan antara NPWP dengan ekstensifikasi pajak memiliki peranan penting dalam peningkatan NPWP karena wajib pajak diarahkan untuk memiliki NPWP dengan cara menginventarisasi wilayah sentra ekonomi,himbauan serta penyuluhan. Hubungan ekstensifikasi pajak dengan penerimaan pajak yaitu diharapkan agar wajib pajak membayar pajak sesuai dengan penghasilan. Jadi hubungan NPWP dengan program ekstensifikasi pajak dengan penerimaan pajak intinya adalah meningkatkan calon wajib pajak untuk memiliki NPWP agar wajib pajak dapat membayar pajak dan kemungkinan besar membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kata Kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak, Program Ekstensifikasi Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Tax regulations provide guidance regarding the criteria for individuals and entities to register as a taxpayer, TIN ownership is one of the factors supporting the efforts of the tax extension programs have an important role in the system of tax administration. The purpose of this study was to determine how the effectiveness of the application of the ownership tax number as a contributing factor in extending the tax program at the tax office pratama Manado. The method used in this research is descriptive qualitative, researchers conducted interviews with the data collection. The results of this study are of the relationship between TIN with extending the tax has an important role in improving a TIN because the taxpayer is directed in a way to have an inventory TIN economic center are, call and extension. Relationship with the tax extension tax revenue is expected that the taxpayer pays tax according to income. So TIN relationship with the tax extension program to increase tax revenue is essentially prospective taxpayer to have a TIN so that the taxpayer can pay the tax and most likely pay taxes according to the tax laws.

Keywords: Taxpayer Identification Number, Tax extensification program, Tax Filing

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan, penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan yang strategis karena dilihat dari sisi ekonomi penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandiran dalam pembangunan suatu daerah dan tentunya berbagai kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara harus terus ditingkatkan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak, yakni melalui program ekstensifikasi pajak yang diupayakan seoptimal mungkin dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan penegakkan hukum.

Ketentuan perpajakan memberikan petunjuk mengenai kriteria orang pribadi dan badan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, langkah program ekstensifikasi pajak ini di arahkan pada upaya-upaya pemerintah yaitu untuk menjangkau potensi yang belum terjangkau, upaya dari program ekstensifikasi pajak diarahkan tepat pada tujuan, yaitu masyarakat yang telah ditentukan oleh ketentuan perpajakan tetapi belum atau tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kepemilikan NPWP merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya program ekstensifikasi pajak memiliki peranan penting dalam sistem administrasi perpajakan.

Pengertian pajak, Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak memiliki ciri-ciri yaitu:

- 1. Iuran dari rakyat kepada negara
 - Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, baik pemeritah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2. Berdasarkan undang-undang
 - Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta peraturan perpajakan.
- 3. Sifatnya dapat dipaksakan.
 - Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat timbulnya sanksi perpajakan.
- 4. Tanpa kontraprestasi langsung dari negara
 - Dalam hal ini wajib pajak tidak akan bisa mendapat balas jasa atau kontraprestasi secara langsung dari pajak yang telah mereka bayarkan ke Negara.
- 5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak dipandang sebagai bagian yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. fungsi pajak menurut Siti resmi (2011), yaitu:

- 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
 - Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
- 2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Pengatur)
 - Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- b. Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, hal ini dilakukan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

Jenis pajak menurut Mardiasmo (2009:5) dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya:

a. Menurut Sifatnya

- 1. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Menurut Golongan

- 1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1. Pajak Pusat (negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, PPn dan PPnBM, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
- 2. Pajak Daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan dan Pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten atau Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Menurut Mardiasmo (2009:1) unsur-unsur pajak yaitu:

1. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, kemudian wajib pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal. Wajib pajak harus melaporkan kekayaan dan jumlah pajak yang menjadi tanggungannya kepada kantor pelayanan pajak setempat setiap tahun.

2. Objek Pajak

Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan, kekayaan, mobil.

3 .Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan.Berikut ini beberapa bentuk tarif pajak:

- 1) Tarif Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak.
- 2) Tarif Pajak Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak.
- 3) Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap, berapa pun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
- 4) Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan besar yang sama untuk semua jumlah. Dengan demikian, besarnya pajak yang terutang tidak tergantung pada jumlah yang dikenakan pajak.

Tata cara pemungutan pajak terbagi atas 3, yaitu :

- 1. Stelsel Nyata/Riil: Pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan: pajak dikenakan lebih realistis, Kelemahan: pajak baru dikenakan pada akhir periode.
- 2. Stelsel Anggapan: Pengenalan pajak didasarkan pada suatau anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan: pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahan: pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.
- 3. Stelsel Anggapan: Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

Asas-asas pemungutan pajak yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- 1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).
- 2. Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
- 3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang biasa kita kenal ada 3 (tiga), Menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan tersebut adalah

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparatur perpajakan (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif karena bukan dirinya sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dipakai dalam menentukan PPh terutang Wajib Pajak. *Self Assessment System* ini muncul untuk memberi kepercayaan masyarakat agar mereka mau membayar pajak yang mereka hitung sendiri. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi saja.

3. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo, (2009:23) Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu:Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2008:22), Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak antara lain:

- a) Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- b) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- c) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- d) Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya membuat paspor, kredit bank dan lelang.
- e) Restitusi Pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:26), format Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit yaitu 9 merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak.

Contoh: 01.011.009.1-257.009

Menurut Mardiasmo (2009:25) menjelaskan tentang sanksi bagi yang tidak memiliki NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Ekstensifikasi adalah upaya menambah jumlah wajib pajak, ekstensifikasi pajak dilakukan untuk membidik wajib pajak baru karena potensi calon wajib sebenarnya sangat besar. Menurut surat edaran Ditjen pajak No.SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6 agustus 2004 yang dimaksud dengan ekstensifikasi

pajak adalah ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dengan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak.

Tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domosili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*. Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah untuk kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang telah memiliki NPWP maupun belum memiliki NPWP. Bagi wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dipersiapkan dan direncanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
- 2. Membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan data yang dimiliki;
- 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan;
- 4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- Membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif.

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifiasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ditujukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Atas pemberitahuan yang dikirim kepada wajib pajak terdapat beberapa kemungkinan:

- 1. Wajib pajak menanggapai dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran. Terhadap wajib pajak tersebut dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2. Wajib pajak tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemeberitahuan telah diterima. Terhadap Wajib Pajak tersebut akan dilakukan tindak lanjut oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi, yakni data wajib pajak tersebut diteruskan ke seksi pelayanan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan;
- 3. Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP. Terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan;
- 4. Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP. Terhadap wajib pajak tersebut, dilakukan pencocokan dengan data Master File Lokal;
- 5. Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lain. Terhadap wajib pajak tersebut, dilakukan pencocokan dengan data Master File Lokal;
- 6. Wajib pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Kantor Pos. Terhadap wajib pajak tersebut, akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Semakin beratnya beban pemerintah dalam pembiayaan negara, mengharuskan pemerintah untuk terus-menerus meningkatkan penerimaan. Penerimaan yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembiayaan negara yaitu penerimaan negara di sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan memegang peranan yang besar dalam pembiayaan negara. Penerimaan dalam negari digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dalam pengeluaran rutin pemerintah.

Dalam hal ini terpuruknya perekonomian indonesia mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang merupakan sumber penerimaan pajak juga terpuruk. Akibatnya penerimaan negara dari perusahaan-perusahaan tidak dapat diandalkan lagi. Salah satu upaya yang pemerintah tempuh dalam peningkatan penerimaan negara di sektor pajak adalah melaksanakan ekstensifikasi untuk menggali sumber-sumber penerimaan negara dari wajib pajak baru dengan sasarannya yaitu:

- 1. Usaha untuk menambah wajib pajak baru, usaha ini juga sangat bergantung pada usaha dari Direktorat Jendral Pajak untuk memburu para calon wajib pajak yang belum terdaftar. berlawanan memang dengan apa yang ada dalam undang-undang perpajakan, diatur bahwa wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib pajak diharapkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak itu sendiri.
- 2. Usaha untuk menambah objek pajak baru. Dalam hal ini usaha untuk menambah objek pajak baru kegiatan yang dilakukan adalah dengan lebih memperhatikan pajak penghasilan atas barang mewah dan lain sebagainya.

Dalam mendefinisikan suatu efektivitas pasti akan mengarah pada tujuan dan sasaran dari suatu organisasi. Menurut Mahmudi mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan" (Mahmudi, 2005:92).

Pengukuran efektivitas menurut Steers (dalam Tangkilisan 2007:140) 5 kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:

- 1. Produktivitas
- 2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
- 3. Kepuasan kerja
- 4. Kemampuan berlaba
- 5. Pencarian sumber daya.

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu yaitu Maulida Oktaviani (2010) dengan judul Analisis Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar efektivitas kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak sebagi factor pendukung dalam proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan *Importance* and *performance analisys*, dan hasil dari penelitian menunjukan melalui koesioner menunjukan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan dengan kepentingan sebesar 93,71% terhadap program ekstensifikasi pajak.

Hal tersebut dapat di ketahui bahwa penerapan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai faktor pendukung dalam proses ekstensifikasi pajak telah efektif karena sesuai dengan harapan Kantor Pelayanan Pajak. Penerapan Kewajiban kepemilikan NPWP telah berjalan dengan baik yaitu sebesar 77,28 %telah menyatakan efektif. Program ekstensifikasi wajib pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Telah mampu meningkatkan wajib pajak terdaftar sebesar 74,33%, dimana pada tahun 2008 hanya berjumlah 52.417 wajib pajak dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 91.380 wajib pajak.peningkatan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2008 pada KPP jakarta kebayoran lamaberjumlah sebesar Rp. 1.135.556.000.000 dan pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 1.200.071.850.630, artinya telah mengalami peningkatan sebesar 5,68%.

Persamaan dengan penelitian sekarang untuk mengetahui efektivitas penerapan kepemilikan nomor pokok wajib pajak sebagai faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak dan perbedaannya yaitu pada objek penelitian dilakukan di KPP Pratama Manado, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif sedangkan penelitian sebelum dilakukan di KPP Jakarta Kebayoran Lama menggunakan analisis data statistik deskriptif.

Selanjutnya, Oktaviatus Didit Sulistiyono dengan judul penelitian Upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak Terdaftar (NPWP) Melalui Kebijakan Meningkatkan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Probolinggo dan untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi dari upaya ekstensifikasi wajib pajak tersebut, metode penelitian yaitu menggunakan teknik pengumpulan data adalah dengan dokumen dan interview, metode analisa yang digunakan adalah dengan mengolah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo berupa jumlah wajib pajak orang pribadi ditahun 2007 dan 2008.

Hasil dari penelitian yaitu upaya ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo yaitu melalui pendataan atau penyisiran, soaialisasi dan penyuluhan, kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait (Mou). Dari ketiga upaya ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo dapat meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2007 dan 2008.Dampak dari upaya ekstensifikasi pajak tentu memberikan partisipasi terhadap jumlah pendapatan pada KPP Pratama Probolinggo khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu menguraikan dampak dari upaya ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak dan perbedaannya pada objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo dan penelitian sekarang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Rumusan masalah adalah bagaimana efektivitas penerapan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan program ekstensifikasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado?

Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan program ekstensifikasi pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti menguraikan data berdasarkan informasi berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.

Tempat penelitian berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang beralamat di Jl. Klabat Manado dan waktu penelitian berlangsung pada tanggal 20 Oktober s/d November 2013.

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang diangkat
- 2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado untuk mengetahui berupa jumlah wajib pajak terdaftar dan realisasi penerimaan pajak tahun 2008-2012.
- 3. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data
- 4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Jenis data yaitu data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau data yang berbentuk uraian yaitu hubungan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan program ekstensifikasi pajak dan hubungan ekstensifikasi pajak dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Data kuantitatif data yang disajikan atau dipaparkan dalam bentuk angka-angka, data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data numerik jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2008-2012 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Sumber data yaitu data primer (*primary data*) merupakan data yang langsung dapat dan disajikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek atau perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang langsung dengan penelitian yang dilakukan.

Data primer yang merupakan hasil dari wawancara mengenai hubungan NPWP dengan ekstensifikasi pajak dan hubungan ekstensifikasi Pajak dengan penerimaan Pajak, permasalahan yang timbul mengenai hubungan-hubungan tersebut. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang dikategorikan sebagai data sekunder misalkan melalui catatan atau arsip perusahaan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari objek penelitian yaitu Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh Informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini. Informasi yang diperoleh yaitu hubungan antara NPWP dengan ekstensifikasi pajak dan hubungan antara ekstensifikasi pajak dengan penerimaan pajak, serta data jumlah wajib pajak terdaftar dan realisasi penerimaan pajak untuk periode tahun 2008-2012 di kantor Pelayanan pajak Pratama Manado dan penelitian kepustakaan (*library research*), teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari semua masalah dari buku-buku, literatur, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

Metode analisis data yang di gunakan adalah dengan metode analisis deskriptif. Dalam metode analisis deskriptif ini, analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan yaitu teknis analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua atau tiga periode tertentu. Dalam penelitian ini membandingkan jumlah wajib pajak terdaftar dan realisasi penerimaan pajak periode tahun 2008 sampai tahun 2012. Selanjutnya analisis dengan mengumpulkan informasi dengan cara melakukan wawancara, yaitu hubungan NPWP dengan Program Ekstensifikasi pajak dan hubungan ekstensifikasi pajak dengan penerimaan pajak, kemudian mengklasifikasi informasi, sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan mendapatkan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksnaakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sector Perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak berdiri pada tahun 1959, yang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar, dimana pada waktu itu menggunakan istilah Kantor Inspeksi Keuangan.Untuk daerah Sulawesi Utara meliputi Sulut dan Sulteng yang dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Dengan demikian berkembangnya potensi perekonomian Sulawesi pada umumnya, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pada khususnya, pada tahun 1979 Kantor Inspeksi Pajak Manado oleh Kantor Pusat dibagi menjadi dua yaitu kantor Inspeksi Pajak Manado dan kantor Inspeksi Pajak Palu. Pada tahun 1989 pemerintahan menetapkan penggantian nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan demikian berubah pula nama Kantor Inspeksi Pajak Manado menjadi Kantor Pelayanan Pajak Manado.

Kemudian dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang potensial di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah maka pada tahun 1989 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Manado, Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Palu dan Kantor Pelayanan Pajak Luwuk. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2008 pada saat pemberlakuan modernisasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Manado diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang merupakan gabungan dari 3 kantor pajak yakni Kantor Pelayanan Pajak Manado, kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Manado.

Cakupan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado untuk Kota Manado sendiri terdiri dari 9 Kecamatan yaitu:

- 1. Kecamatan Malalayang
- 2. Kecamatan Sario
- 3. Kecamatan Wenang
- 4. Kecamatan Mapanget
- 5. Kecamatan Singkil
- 6. Kecamatan Wanea
- 7. Kecamatan Tikala
- 8. Kecamatan Tuminting
- 9. Kecamatan Bunaken

Untuk Kota Tomohon terdiri dari 5 Kecamatan yaitu:

- 1. Kecamatan Tomohon Utara
- 2. Kecamatan Tomohon Tengah
- 3. Kecamatan Tomohon Selatan
- 4. Kecamatan Tomohon Timur
- 5. Kecamatan Tomohon Barat

Kegiatan Ekstensifikasi Pajak yang dilakukan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yaitu terutama menambah wajib pajak baru atau objek pajak baru yang dilakukan oleh petugas Pajak di KPP pratama Manado yaitu :

- 1. Dengan melakukan inventarisasi atau edukasi di wilayah sentra ekonomi
- 2. Menghimbau para calon wajib pajak agar memiliki NPWP baik secara lisan maupun tertulis (mengirim surat pemberitahuan kepada calon wajib pajak yang belum memiliki NPWP)
- 3. Penyisiran
 - Penyisiran adalah kegiatan dari program ekstensifikasi dengan menambah wajib pajak baru kemudian menelusuri wilayah kerja, atau daerah yang memiliki potensi, serta melihat data yang ada apakah para calon wajib pajak sudah mempunyai NPWP.
- 4. Sosialisasi Wajib Pajak
 - Kegiatan sosialisasi wajib pajak ini dilakukan kepada calon wajib pajak dalam hal ini di tujukan kepada mahasiswa atau perguruan tinggi dengan harapan agar supaya pada saat telah menyelesaikan pendidikan, jika sudah masuk didunia kerja sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan juga supaya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- 5. Sensus Pajak
 - Kegiatan sensus pajak ini dilakukan untuk menambah wajib pajak dengan cara petugas pajak melakukan kegiatan dengan cara dari pintu ke pintu yang dilakukan disentra ekonomi didaerah bisnis dan perumahan.

Kendala Dalam Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak, dalam pelaksanaan program kegiataan perpajakan tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam program penambahan wajib pajak baru yang dilakukan oleh Petugas pajak di KPP Manado, masalah atau kendala yang di temui yaitu himbauan petugas pajak dengan surat pemberitahuan sering tidak sampai ke tangan calon wajib pajak baru.

Pelaksanaan Penerapan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Sebagai faktor Pendukung Dalam Program Ekstensifikasi Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado setiap tahun meningkat dengan kenaikan jumlah wajib pajak pertahun, serta pada realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat dalam kurun waktu selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat lihat pada tabel 4.1 berikut:

Tahun Anggaran	Total Jumlah Wajib Pajak	Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Per Tahun	Persentase (%)
s/d 2007	27.483		
2008	41.281	13.798	50,21%
2009	73.751	32.470	78,66%
2010	91.329	17.578	23,84%
2011	105.078	13.749	15,06%
2012	116.501	11.423	10.87%

Sumber: Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Data Olahan, 2013

Keterangan:

Tahun Anggaran =
$$\frac{\text{kenaikan jumlah WP per tahun}}{\text{Total Wajib Pajak}} \times 100 \% = \text{persentase}\%$$

Tahun 2008 =
$$\frac{13.798}{27.483}$$
 X 100% = 50,21%

Jadi, tingkat kenaikan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Manado pada tahun 2008 sebesar 50,21%.

Tahun 2009 =
$$\frac{32.470}{41.281}$$
 X 100% = 78,66%

Jadi, tingkat kenaikan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Manado pada tahun 2009 sebesar 78,66%.

Tahun 2010 =
$$\frac{17.578}{73.751}$$
 X 100% = 23,84%

Jadi, tingkat kenaikan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Manado pada tahun 2010 sebesar 23,84%.

Tahun 2011 =
$$\frac{13.749}{91.329}$$
 X 100% = 15,06%

Jadi, tingkat kenaikan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Manado pada tahun 2011 sebesar 15,06%.

Tahun 2012 =
$$\frac{11.423}{105.078}$$
 X 100% = 10,87%

Jadi, tingkat kenaikan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 sebesar 10,87%.

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Periode Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Jumlah Wajib Pajak Realisasi Penerimaan Pajal	
	Terdaftar	(Rp)
2008	41.281	781.807.118.230
2009	73.751	802.598.862.803
2010	91.329	862.028.900.279
2011	105.078	1.013.602.025.276
2012	116.501	1.224.790.124.171

Sumber: Data Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado,2013

Hubungan Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Program Ekstensifikasi Pajak

Nomor Pokok Wajib pajak adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta menghitung besarnya angsuran pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dalam penyetoran pajak dalam suatu masa pajak.

Tujuan ekstensifikasi pajak adalah memperluas basis pajak dengan menambah Wajib pajak. Hubungan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan ekstensifikasi pajak yaitu dengan adanya program ekstensifikasi pajak calon wajib pajak dapat diarahkan untuk memiliki NPWP. Dari tabel 4.1 menunjukkan jumlah wajib pajak dari tahun 2008 kenaikan sebesar 50,21 %, tahun 2009 persentase kenaikan jumlah wajib pajak sebesar 78,66%, tahun 2010 persentase kenaikan jumlah wajib pajak sebesar 23,84%, tahun 2011 persentase kenaikan jumlah wajib pajak sebesar 15,06%, dan di tahun 2012 persentase kenaikan jumlah wajib pajak sebesar 10,87%. Jadi dengan kegiatan program ekstensifikasi pajak, wajib pajak diarahkan untuk memiliki NPWP.

Hubungan Program Ekstensifikasi pajak dengan Penerimaan Pajak

Kegiatan ekstensifikasi pajak jika dihubungkan dengan penerimaan pajak dan nomor pokok wajib pajak, dari penerapan kepemilikan nomor pokok wajib pajak dan adanya program ekstensifikasi pajak, di harapkan wajib pajak membayar pajak dan kemungkinan besar membayar pajak sesuai dengan penghasilan atau pembayaran yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perpajakan itu sendiri. Dari program penambahan wajib pajak atau ekstensifikasi pajak, bagian ekstensifikasi pajak mempunyai hubungan dengan bagian pengawasan dan konsultasi dengan membawahi *Account Representative* di mana bagian ini mengawasi akan pembayaran wajib pajak sehingga dalam realisasi penerimaan pajak pada setiap tahunnya, dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan.

Dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak dari data di atas dapat di ketahui bahwa dalam menambah wajib pajak atau objek pajak baru setiap tahun data Nomor Pokok Wajib Pajak meningkat dan dapat lihat dari segi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai tahun 2012 meningkat, tahun 2008 jumlah WP sebanyak 41.281 realisasi penerimaan pajak Rp.781.807.118.230, tahun 2009 jumlah WP sebanyak 73.751 realisasi penerimaan pajak Rp.802.598.862.803, tahun 2010 jumlah WP sebanyak 91.329 dan realisasi penerimaan pajak Rp.862.028.900.279,tahun 2011 jumlah WP sebanyak 105.078realisasi penerimaan pajak Rp.1.013.602.025.276, dan tahun 2012 jumlah WP sebanyak 116.501 dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.224.790.124.171. Jadi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar/NPWP setiap tahun maka realisasi penerimaan pajak juga akan meningkat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka di dapat kesimpulan yaitu Kegiatan penerapan kepemilikan nomor pokok wajib pajak memiliki hubungan yang erat dengan ekstensifikasi pajak karena dengan adanya kegiatan ekstensifikasi pajak,wajib pajak diarahkan agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Hubungan kepemilikan NPWP dengan ekstensifikasi pajak dikaitkan dengan penerimaan pajak, bahwa dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, calon wajib pajak diharapkan membayar dan kemungkinan besar membayar pajaknya dari penghasilan atau pembayaran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku selanjutnya maka realisasi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama manado akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 2, UPP STIM YPKN.

http://www.psychologymania.com/2012/12/definisi-efektivitas.html, tanggal akses: 18 Februarui 2014

Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2008

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi revisi 2009. Andi. Yogyakarta

Republik Indonesia, Surat Edaran Ditjen pajak No.SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6 agustus 2004 tentang, *Ekstensifikasi Pajak*, http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=9115,Tanggal akses: 18 Februari 2014.

Resmi. Siti, "Perpajakan", Buku 1, Edisi 6 SalembaEmpat, 2011.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2005. Manajemen Publik, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK CACAT PADA PT.SINAR PUREFOODS INTERNASIONAL BITUNG

Maria Lidya Lalamentik, Jantje Tinangon dan Victorina Tirayoh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado E-mail: marialalamentik@gmail.com

ABSTRAK

Selama berlangsungnya aktivitas produksi perusahaan tidak luput dari adanya kesalahan yang menyebabkan terjadinya produk cacat yang merupakan produk gagal yang masih dapat diperbaiki. Masalah akuntansi yang timbul akibat adanya produk cacat tersebut yaitu bagaimana memperlakukannya sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku. PT.Sinar Purefoods Internasional adalah perusahaan pengalengan ikan tuna yang selama proses produksi berlangsung tidak luput dari kesalahan kesalahan seperti terdapatnya produk yang cacat. Karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk cacat pada PT. Sinar Purefoods Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlakuan akuntansi terhadap produk cacat pada perusahaan telah sesuai dengan teori yang ada yaitu diberlakukan sebagai biaya overhead pabrik sehingga kerugian yang ada akibat terdapatnya produk cacat dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Produk Cacat

ABSTRACT

During the company's production activities are not spared from an error that causes a defective product which is a failed product that can still be improved. Accounting issues that arise as a result of the defective product, namely how to treat it in accordance with the applicable accounting treatment. PT. Sinar Purefoods International is a tuna canning company during the production process is not infallible presence of faults such as defective products. Therefore the aim of this study was to determine how the accounting treatment of the defective product at PT. Sinar Purefoods International. The method used in this study is a descriptive analysis method, by conducting interview and observation, evaluating up to draw conclusion. The research found that the accounting treatment of defects in the company's products are in compliance with existing theory that is treated as factory overhead costs.

Keywords: Accounting Treatment, Product Defects

A. PENDAHULUAN

Dalam setiap aktivitasnya perusahaan selalu berupaya menghasilkan produk yang bermutu, namun dalam pelaksanaanya walaupun perusahaan telah berusaha menghasilkan produk yang bermutu tetapi sulit untuk menghindar dari hal – hal seperti terjadinya barang rusak (spoiled good), barang cacat (defective goods), barang sisa (scrap) dan barang sampah (waste), dimana dalam penelitian ini khususnya akan membahas mengenai barang cacat (defective goods). Masalah akuntansi yang timbul akibat adanya produk cacat tersebut yaitu bagaimana memperlakukannya sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku.

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang bermanfaat untuk pengambil keputusan bagi pihak ekstern dan intern organisasi (perusahaan).

Akuntansi mengikuti beberapa pedoman yang digunakan oleh lembaga yang berhubungan dengan itu. Secara umum ada 5 prinsip akuntansi yang digunakan, yaitu:

- 1. The entity concept (konsep kesatuan entitas)
 - Konsep yang paling dasar dalam akuntansi adalah entitas. Suatu entitas akuntansi adalah suatu organisasi atau suatu bagian dari organisasi yang terpisahkan dari organisasi lain, dan individu individu lain yang merupakan suatu unit ekonomi yang terpisahkan.
- 2. The reability (objectivity) principle concept (konsep keandalan)

 Catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan atas data yang tersedia yang paling dapat diandalkan sehingga catatan dan laporan tersebut akan manjadi akurat dan berguna.
- 3. The cost principal (konsep biaya)
 Prinsip biaya menyatakan bahwa aktiva dan jasa yang diperoleh harus dicatat dengan harga yang benar benar dibayarkan pada saat pembeliannya atau pada saat terjadi transaksi.
- 4. The going concern concept (konsep kesinambungan)
 Sebab yang lain mengapa akiva harus dicatat menurut harga perolehannya adalah konsep kesinambungan, yang menyatakan bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya untuk masa yang tidak dapat ditetapkan/diramalkan dims depan. Sebagian aktiva seperti perlengkapan, tanah, bangunan, dan peraltan dibeli untuk digunakan dalam usaha bukan untuk dijual kembali berdasarkan konsep kesinambungan, diasumsikan bahwa pwrusahaan akan terus menggunakan aktiva aktiva yang dimilikinya dalam mwlakukan aktivitas operasionalnya untuk mencapai tujuan meraka
- 5. The stable-monetary-unit concept (konsep kestabilan moneter)
 Suatu peningkatan dalam harga disebut inflasi, dan selama inflasi itu mata uang dolar hanya dapat dibeli yang sedikit barang saja. Para akuntan mengasumsikan bahwa daya beli dari dolar adalah stabil. Konsep kesatuan moneter stabil ini adalah sebagai dasar untuk mengabaikan adanya efek dari inflasi didalam catatan akuntansi. Kita dapat juga mengurangkan atau menambah nilai-nilai mata uang dolar yang tercatat seolah-olah mata uang dolar tersebut memiliki daya beli yang sama.

Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya biaya yang berhubungan dengan akivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Akuntansi biaya menganalisis biaya perusahaan dalam membantu manajemen dalam pengawasan biaya.

Biasanya akuntansi biaya ditekankan pada biaya produksi, tapi akhir akhir ini penekanan atas biaya pesanan juga semakin meningkat. Selain untuk pengawasan, akuntansi biaya yang baik akan membantu manajemen dalam penetapan harga jual produknya sehingga diperoleh laba yang lebih besar. Selain itu, akuntansi biaya dapat memberi informasi kepada manajemen tentang produk mana yang tidak menguntungkan sehingga produksinya harus dihentikan, dan produk mana yang menguntungkan.

Adapun konsep akuntansi biaya adalah sebagai berikut

1. Sebagai basis data biaya

Akuntansi biaya sebagai basis data biaya lebih menitikberatkan pada proses penentuan biaya (harga pokok) dari setiap kegiatan, produk, departemen, segmen segmen tertentu didalam suatu perusahaan yang biasa disebut sebagai objek biaya, sebagai suatu aktivitas, akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya yang diperlukan untuk pembuatan laporan baik kepada pihak eksteren maupun pihak intern.

2. Akuntansi biaya sebagai suatu sistem informasi

Dalam bahasa yang sangat sederhana suatu system dapat dipandang sebagai sekelompok elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Akuntansi biaya mempunyai tujuan pokok yaitu menyediakan informasi biaya, dan mempunyai elemen yang terdiri dari tenaga (manusia) dan equipment. Lebih dari itu akuntansi biaya juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan khas suatu sistem yang terdiri dari : input (data), proses, dan output (informasi biaya).

Peranan akuntansi biaya yaitu akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan perangkat akuntansi dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian. Dalam hal ini, pencatatan, penyajian dan analisis data dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tugas tugas berikut:

- 1. Menyusun dan melaksanakan rencana anggaran operasi perusahaan dalam kondisi yang ekonomis dan bersaing.
- 2. Menetapkan metode kalkulasi biaya dan prosedur yang menjamin adanya pengendalian, dan jika memungkinkan, pengurangan atau pembenahan biaya.
- 3. Menentukan nilai persediaan dalam rangka kalkulasi biaya dan penetapan harga, dan sewaktu waktu memeriksa jumlah persediaan dalam bentuk fisik.
- 4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi tahunan, atau periode yang lebih singkat.
- 5. Memilih alternatif terbaik yang bisa menaikkan pendapatan atau menurunkan biaya.

Produk cacat merupakan produk gagal yang secara teknis atau ekonomis masih dapat diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tetapi membutuhkan biaya tambahan. Menurut Kholmi & Yuningsih (2009;136) mendefinisikan bahwa: "Produk cacat adalah barang yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan tetapi masih bisa diperbaiki."

Perlakuan Akuntansi untuk produk cacat menurut Mursyidi (2008;119) yaitu:

- 1. Biaya pengerjaan kembali ditambahkan pada harga pokok pesanan
- 2. Ditambahkan pada biaya overhead pabrik
- 3. Ditambahkan pada rugi produk cacat

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu yaitu Shinta Dewi Herawati dan Indri Cahya Lestari (2011) dengan judul Tinjauan Atas perlakuan Akuntansi untuk produk Cacat dan Produk Rusak pada PT. Indo Pacific, yang bertujuan untuk mengetahui dan meninjau perlakuan akuntansi untuk produk cacat dan rusak pada PT. Indo Pacific, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang di dapat yaitu diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan perlakuan akuntansi pada produk cacat dan rusak,hanya saja perusahaan tidak terlalu menggunakan perhitungan yang seharusnya dibuat dalam perhitungan perlakuan akuntansi. Letak kesamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu tentang perlakuan akuntansi pada produk cacat sedangkan perbedaanya terletak pada objek yang diteliti.

Penelitian selanjutnya yaitu Litah Indah Fratiwi (2010) dengan judul Perlakuan Akuntansi pada Produk Rusak dan Produk Cacat pada PT.Fuji Dharma Elektrik, yang bertujuan untuk mengetahui dan meninjau perlakuan akuntansi untuk produk cacat dan rusak pada PT.Fuji Dharma Elektrik, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perusahaan belum efektif menerapkan perlakuan akuntansi pada produk cacat dan produk rusak, seehingga perusahaan mengalami kerugian. Letak kesamaannya dengan penelitian yang dilakukan

penulis yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap fakor yang sama yaitu tentang perlakuan akuntansi pada produk cacat sedangkan perbedannya terletak pada objek yang diteliti.

Perlakuan akuntansi dimaksudkan untuk dapat mengatasi permasalahan apabila dalam proes produksi dan aktivitas perusahaan terdapat kesalahan-kesalahan yang menimbulkan produk cacat, untuk dapat menangani biaya-biaya tambahan produksi produk cacat tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan kerugian pada perusahaan. Dengan adanya produk cacat maka perusahaan mengalami kerugian dalam proses produksi, hal itu disebabkan karena produk ini tidak layak untuk dijual dengan harga yang telah ditentukan perusahaan, oleh karena itu diperlukan pemahaman atas perlakuan akuntansi yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

Oleh karena itu adanya produk cacat tidak boleh diabaikan atau dianggap masalah kecil, karenanya manajemen memerlukan informasi yang tepat mengenai banyaknya produk cacat, faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya, serta perlakuan akuntansi yang tepat atas produk cacat tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan yang lebih baik di masa datang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk cacat pada PT. Sinar Purefoods Internasional ?

Tujuan dari penelitian in adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk cacat pada PT. Sinar Purefoods Internasional.

B. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilaksanakan yaitu pada perusahaan PT. Sinar Purefoods Internasional yang terletak di Jl. Raya Madidir Bitung. Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan januari 2014, karena penulis mengambil data penelitian untuk bulan September 2013 maka waktu penelitian dilakukan setelah itu agar semua data-data yang diperlukan sudah lengkap.

Data yang ada dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara dan observasi pada perusahaan PT. Sinar Purefoods Internasional berupa data produksi, proses dan biaya produksi, sejarah dan strutur organisasi perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan (Mudrajad kuncoro, 2009;120). Dalam metode ini tidak menggunakan teknik analisis statistik untuk mengetahui dan menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, maka data diperoleh sebagian besar dari wawancara dan observasi.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkan informasi-informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada kepala bagian HRD dan staff bagian akuntansi PT. Sinar Purefoods Internasional untuk dijawab secara lisan pula. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku- buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu struktur organisasi perusahaan, dan flowchart proses produksi perusahaan. Observasi , melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap objek yang akan diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ikan merupakan sumber protein yang dibutuhkan manusia. Beberapa laporan dari berbagai sumber menyatakan kerusakan ikan selama penyimpanan dapat mencapai 30% sampai 50%. Yang disebabkam oleh gangguan mikro organisme. Saat ikan diawetkan dengan cara dikalengkan maka kerusakan yang terjadi selama penyimpanan relatif kecil dibandingkan dengan produk-produk perikanan lainnya.

PT. Sinar Purefoods Internasional sudah menjadi perusahaan pengalengan ikan yang sangat besar dan sangat berpengaruh di pasar dalam maupun luar negeri. Ini terbukti dengan luasnya sasaran pemasaran perusahaan yang tidak hanya didalam negeri saja, tetapi juga sudah melebar luas sampai ke mancanegara. Tempat-tempat pemasaran PT. Sinar Purefoods Internasional di luar negeri antara lain di USA, eropa (kanada, jerman, perancis), dan juga di beberapa negara asia sekitar seperti Jepang.

Dalam pemasarannya di luar negeri PT. Sinar Purefoods Internasional sudah memiliki para pelanggan atau pembeli tetap yang selalu rutin dan bahkan sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan dalam kegiatan ekspor perusahaan. sehingga membuat perusahaan bisa lebih luas dan lebih leluasa untuk mengekspor produknya ke negara-negara luar tersebut. Namun selain kesuksesan yang diraih di luar negeri, produk-produk yang dipasarkan didalam negeri juga tidak kalah suksesnya. Tercatat bahwa pemasaran yang dilakukan didalam negeri sudah hampir kesemua daerah, dan bahkan mendapat respon yang sangat positif dari konsumen dalam negeri. Hal inilah yang membuat PT. Sinar Purefoods Internasional ingin lebih meningkatkan serta memperbaiki kualitas produknya agar bisa semakin diterima di pasaran.

Dalam proses produksi sebuah perusahaan terutama perusahaan dengan skala besar sangat diperlukan ketelitian dan kematangan dalam menjalankan proses produksinya. Khususnya perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, tentunya proses produksi adalah salah satu tahap yang sangat penting. Karena dalam proses inilah penentuan baik tidaknya suatu produk yang akan dihasilkan nantinya. Dalam proses produksi sangatlah mungkin terjadinya kesalahan kesalahan baik itu disengaja maupun tidak yang bisa saja sangat berpengaruh pada kualitas produknya. Kesalahan-kesalahan ini nantinya yang akan menghasilkan produk-produk yang cacat.

Dalam proses menangani produk-produk yang cacat ini sangat diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang sesuai agar dapat menghindari terjadinya kerugian pada perusahaan. Perlakuan akuntansi ini dimaksudkan untuk dapat menangani biaya biaya yang keluar akibat adanya pengerjaan kembali produk yang cacat, dan juga untuk menangani kerugian pada produk yang rusak yang sudah tidak dapat diperbaiki kembali, apakah itu masih laku dijual dengan harga dibawah harga pokok, ataupun yang sudah tidak laku dijual.

Pada aktivitas produksi yang ada pada perusahaan PT.Sinar Purefoods Internasional, kesalahan-kesalahan yang menimbulkan terjadinya barang cacat juga masih seringkali ditemui dan tidak dapat dihindari. Dalam produksinya, perusahaan sering kali menjumpai produk cacat akibat adanya kelalaian dari pegawai, maupun ketidaksengajaan yang terjadi akibat adanya kerusakan pada mesin dan hal lainnya. Produk cacat yang sering kali dijumpai adalah terjadinya kecacatan pada kemasan kaleng-kaleng ikan seperti adanya bagian bagian kaleng yang penyok, dan sering juga dijumpai bagian atas kaleng yang tidak dalam keadaan baik atau penutupnya rusak.

Produk cacat yang dijumpai untuk bulan September 2013 berjumlah 245 kaleng (105 kaleng besar, 140 kaleng kecil). Hal ini dijumpai pada saat proses produksi berlangsung, sehingga menyebabkan perlu adanya pengerjaan kembali untuk membuka dan mengganti kaleng yang cacat tersebut. Dalam pengerjaan kembali inilah terdapat biaya-biaya tambahan atau sering disebut biaya pengerjaan kembali (rework).

PT. Sinar Purefoods Internasional memproduksi berbagai macam jenis ikan kaleng yang dibagi sesuai nama dan ukuran ukuran kaleng yang ada, dan juga berdasarkan tempat pemasarannya.

PT. Sinar Purefoods Internasional memasarkan produknya didalam dan juga di luar negeri. Dan untuk penelitian kali ini penulis hanya memfokuskan pada produk yang dipasarkan ke luar negeri.

Berikut adalah total unit produksi untuk produk ekspor PT. Sinar Purefoods Internasional:

Tabel 1. Total Unit Produksi Bulan September 2013 (dalam ribuan)

Nama Produk	Total Unit Penjualan
Tuna Chunks In Oil (kaleng besar uk. 2 kg)	120 kaleng
Tuna Chunks In Oil (kaleng kecil uk. 200 gram)	600 kaleng
Tuna Chunks In Brine (kaleng besar uk. 2 kg)	120 kaleng
Tuna Chunks In Brine (kaleng kecil uk. 200 gram)	600 kaleng
TOTAL	1.440 kaleng

Sumber: PT. Sinar Purefoods Internasional

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa produk cacat adalah merupakan produk gagal yang secara teknis atau ekonomis masih dapat diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tetapi membutuhkan biaya tambahan. Dalam penelitian kali ini, masalah yang ditemukan adalah produk cacat yang terjadi di perusahaan merupakan produk cacat yang normal atau yang disebabkan oleh faktor internal.

Tabel 2. Perlakuan Terhadap Produk Cacat

KET	KONSEP TEORI	RIIL (yang tejadi di perusahaan)	(+/-)
Produk cacat akibat dari sebab biasa (normal)	Biaya pengerjaan kembali diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik	Biaya pengerjaan kembali diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik	+
Perlakuan atas biaya kecacatan normal	Biaya kecacatan normal tersebar, melalui alokasi overhead diseluruh pekerjaan dan bukan pada pekerjaan tertentu.	Biaya kecacatan normal disebar, melalui alokasi overhead diseluruh pekerjaan dan bukan pada pekerjaan tertentu.	+

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya di bab II, bahwa produk cacat adalah merupakan produk gagal yang secara teknis atau ekonomis masih dapat diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tetapi membutuhkan biaya tambahan. Dalam penelitian kali ini, masalah yang ditemukan adalah produk cacat yang terjadi di perusahaan merupakan produk cacat yang normal atau yang disebabkan oleh faktor internal.

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilhat bahwa perlakuan terhadap produk cacat yang ada pada perusahaan telah sesuai dengan konsep teori yang ada.

Dalam penentuan biaya pengerjaan kembali produk cacat, unsur-unsur biaya yang akan dipakai adalah biaya bahan (kaleng), biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik variabel. Untuk bulan September 2013 jumlah produk cacat yang ditemukan adalah sebanyak 245 kaleng dalam 1 bulan atau sekitar 8 kaleng/hari. dan untuk mengerjakan kembali produk-produk cacat tersebut perusahaan memerlukan tenaga kerja (karyawan produksi) sebanyak 5 orang dihitung lembur dengan biaya lembur sebanyak 10% dari gaji yang sudah ditetapkan.

Perhitungan Biaya Pengerjaan Kembali Produk Cacat

1. Perhitungan biaya pengerjaan kembali kaleng

Dari 245 kaleng yang cacat, 105 buah merupakan kaleng besar, dan 140 buah kaleng kecil.

	unit	harga satuan (Rp)	jumlah (Rp)
Kaleng besar	105	8.000		840.000
Kaleng kecil	140	1.500		210.000
Total				1.050.000

Jadi jumlah biaya kaleng untuk mengganti produk yang cacat adalah sebesar Rp.1.050.000.

2. Perhitungan biaya pengerjaan kembali untuk tenaga kerja

Biaya tenaga kerja untuk karyawan produksi per bulan adalah sebesar Rp.1.900.000/org, dan untuk biaya lembur (10%) adalah sebesar Rp.190.000/org. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebanyak 5 orang.

$$5 \times Rp.190.000 = Rp. 950.000$$

Jadi jumlah biaya tenaga kerja untuk pengerjaan kembali produk cacat adalah sebesar Rp. 950.000.

3. Perhitungan biaya pengerjaan kembali untuk BOP

Persentase produk cacat dari keseluruhan total unit produksi yang ada adalah sebesar 0.017%. jadi untuk menghitung BOP produk cacat, jumlah total BOP variabel dikali persentase produk cacat.

Jadi jumlah BOP untuk pengerjaan kembali adalah sebesar Rp. 43.095

Setelah didapat jumlah biaya pengerjaan kembali untuk kaleng, tenaga kerja dan BOP, kita kemudian dapat mengetahui berapa total biaya untuk pengerjaan kembali.

Biaya kaleng	Rp. 1.050.000
Biaya tenaga kerja	Rp. 950.000
BOP	Rp. 43.095
Total biaya pengerjaan kembali produk cacat	Rp 2.043.095

Adapun jurnal yang dipakai untuk mencatat pengerjaan kembali produk cacat adalah sebagai berikut :

Barang dalam proses xx
Persediaan bahan xx
Upah dan gaji xx
Biaya overhead pabrik dibebankan xx

Untuk menghitung harga pokok produk cacat, diperlukan unsur-unsur biaya sebagai berikut :

1. Total biaya:

Biaya bahan baku, terdiri dari biaya kaleng ukuran besar sebanyak 105 kaleng dengan jumlah Rp. 2.013.040 dan biaya kaleng ukuran kecil sebanyak 145 dengan jumlah Rp. 3.328.780. Biaya tenaga kerja, didapat dari persentase produk cacat sebesar 0.017% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja langsung Rp. 2.850.000.000, sehingga didapat biaya sebesar Rp. 484.500.

Biaya overhead pabrik, didapat dari persentase produk cacat sebesar 0.017% dari jumlah BOP keseluruhan Rp. 253.500.000, sehingga didapat biaya sebesar Rp.49.142.

- 2. Biaya pengerjaan kembali (kaleng, tenaga kerja, BOP variabel)
- 3. Jumlah unit cacat sebanyak 245 unit.

Rumus untuk menghitung Harga Pokok Produk Cacat:

Total Biaya + Biaya Pengerjaa	n Kembali : Unit C	acat
Гotal biaya :		
Biaya bahan baku		
Kaleng besar	Rp.	2.013.040
Kaleng kecil	Rp.	3.328.780
Biaya tenaga kerja	Rp.	484.500
BOP	Rp	49.142
TOTAL	Rp.	5.875.462
iaya pengerjaan kembali :		
Biaya kaleng	Rp.	1.050.000
Biaya tenaga kerja	Rp.	950.000
BOP	Rp.	43.095
TOTAL	Rp.	2.043.095

Seperti uraian sebelumnya, bahwa jika pengerjaan ulang bersifat normal, maka biaya pengerjaan kembali dibebankan atau diperlakukan ke overhead produksi dan ditebar, melalui alokasi overhead, kesemua pekerjaan.

- Laporan biaya produksi sebelum ditambahkan biaya pengerjaan kembali produk cacat.

Tabel 3. Laporan Biaya Produksi Bulan September 2013 PT. Sinar Purefoods Internasional

Data Produksi	
Dimasukkan dalam proses	1.440.000 kaleng
Produk jadi yang ditransfer ke gudang	1.220.000 kaleng
Produk dalam proses akhir	220.000
Jumlah produk yang dihasilkan	1.440.000 kaleng
Biaya yang Dibebankan dalam Bulan Septem	ber 2013
Biaya bahan baku	Rp. 1.490.904.000
Biaya tenaga kerja langsung	Rp. 2.850.000.000
Biaya overhead pabrik	•
BOP Variabel	Rp. 253.500.000
BOP Tetap	Rp. 35.573.000
Biaya tenaga kerja tidak langsung	Rp. 189.900.000
Jumlah biaya overhead pabrik	Rp. 478.973.000
Jumlah	Rp. 4.819.877.000

Sumber : Data Hasil Olahan

- Laporan biaya produksi setelah ditambahkan biaya pengerjaan kembali produk cacat

Tabel 4. Laporan Biaya Produksi Bulan September 2013 PT. Sinar Purefoods Internasional

Data Produksi			
Dimasukkan dalam proses		1.440.000 k	aleng
Produk jadi yang ditransfer ke gudang		1.220.000 k	aleng
Produk dalam proses akhir		220.000	
Jumlah produk yang dihasilkan		1.440.000 k	aleng
Biaya yang Dibebankan dalam Bulan Septem	ber 2013		
Biaya bahan baku		Rp. 1.490.9	04.000
Biaya tenaga kerja langsung		Rp. 2.850.0	000.000
Biaya overhead pabrik			
BOP Variabel	Rp.	253.500.000	
BOP Tetap	Rp.	35.573.000	
Biaya tenaga kerja tidak langsung	Rp.	189.900.000	
Alokasi Overhead produksi	Rp.	2.043.095	
Jumlah biaya overhead pabrik	Rp.	481.016.095	
Jumlah		Rp. 4.821.9	20.095

Sumber: Data Hasil Olahan

D. KESIMPULAN

Perlakuan akuntansi terhadap produk cacat pada perusahaan sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu apabila produk cacat yang ditemukan bersifat normal, maka biaya pengerjaan kembali diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik, sehingga kerugian yang ada dapat di minimalisir.

Produk cacat yang terdapat di PT.Sinar Purefoods Internasional adalah sebesar 0.017% dari jumlah keseluruhan produksi setiap bulannya. Karena itu perusahaan memutuskan untuk mengerjakan kembali produk cacat tersebut karena biaya pengerjaan kembalinya masih lebih kecil dari harga pokok produk baik. Hal itu dilakukan perusahaan agar dapat membuat produk yang telah cacat tersebut menjadi produk yang kembali berkualitas untuk dapat dijual kembali dengan harga yang sama dengan harga produk baik.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba memberi saran apabila nantinya ditemukan penyebab kecacatan bersifat abnormal maka biaya yang muncul perlu dicatat di akun kerugian sebagai akun terpisah di laporan rugi laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Horngren Charles.T, Srikant M. Datar, dan George Foster, 2008. *Akuntansi Biaya:Penekanan Manajerial. Jilid 1. Edisi Kesebelas.* PT Indeks. Jakarta.
- Horngren Charles.T, Srikant M. Datar, dan George Foster, 2008. *Akuntansi Biaya:Penekanan Manajerial. Jilid 2. Edisi Kesebelas.* PT Indeks. Jakarta.
- Kholmi dan Yuningsih, 2009. Akuntansi Biaya Edisi Pertama. Erlanga, Jakarta.
- Mulyadi, 2012. *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN, Yogyakarta.
- Mursyidi, 2008. *Akuntansi Biaya-Conventional Costing, Just in time, and Activity Based Costing*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Mudrajad kuncoro, 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3. Erlangga, Yogyakarta.

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK CACAT DAN PRODUK KADALUARSA PADA DOLPHIN DONUTS BAKERY MANADO

Keisya Claudya Tampi, Sifrid S. Pangemanan dan Inggriani Elim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado Email: claudyakeisya@gmail.com

ABSTRAK

Dalam proses produksi, perusahaan sulit untuk menghindar dari hal-hal terjadinya produk cacat dan produk kadaluarsa. Masalah produk cacat dan produk kadaluarsa ini memerlukan adanya perlakuan akuntansi sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku. Dolphin Donuts Bakery Manado merupakan salah satu perusahaan industri yang memproduksi roti dan kue. Dalam proses produksi setiap hari, perusahaan tidak luput dari adanya produk cacat dan produk kadaluarsa. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk cacat dan produk kadaluarsa pada Dolphin Donuts Bakery Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa perusahaan tidak melakukan pengerjaan kembali terhadap produk cacat yang ada, hal ini tidak sesuai dengan konsep teori yang ada. Dan untuk kerugian produk kadaluarsa diperlakukan sebagai pengurang harga pokok produk selesai.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Produk Cacat, Produk Kadaluarsa

ABSTRACT

In the production process, the company is difficult to avoid the things the product defective and expired products. Product defects and product problems requires the presence of expired accounting treatment in accordance with the applicable accounting treatment. Dolphin Donuts Bakery Manado is one of the industries that produce breads and cakes. In the production process of each day, the company did not escape the presence of defective products and expired products. To that end, the purpose of this study was to determine how the accounting treatment of the product defects and product expired at Dolphin Donuts Bakery Manado. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The research proves that the company is not doing the work back to the defects of existing products, this is not in accordance with the existing theoretical concepts. And for expired product loss is treated as a reduction of cost of finished products.

Keywords: Accounting Treatment, Defective Products, Product Expiration

A. PENDAHULUAN

Dalam proses produksi, perusahaan sulit untuk menghindar dari hal – hal terjadinya barang rusak (*spoiled goods*), barang cacat (*defective goods*), barang sisa (*scrap*) dan barang sampah (*waste*). Dalam perusahaan dapat timbul produk cacat yaitu produk dihasilkan yang kondisinya rusak atau tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan, akan tetapi produk tersebut masih dapat diperbaiki secara ekonomis menjadi produk cacat lebih rendah dibanding kenaikan nilai yang diperoleh adanya perbaikan. Dalam perusahaan juga dapat timbul produk kadaluarsa yaitu produk jadi yang dihasilkan baik namun ada masa atau waktu dimana suatu produk yang dalam hal ini makanan akan mengalami perubahan fisik, bau, rasa, dan warna yang beresiko menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Dengan adanya produk cacat dan produk kadaluarsa ini, perusahaan mengalami kerugian dalam proses produksi dan mengakibatkan perusahaan tidak mendapatkan laba yang optimal.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011;5), akuntansi adalah menyangkut angka-angka yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan, angka itu menyangkut uang atau nilai moneter yang menggambarkan catatan dari transaksi perusahaan. Angka itu dapat dianalisis lebih lanjut untuk menggali lebih banyak informasi yang dikandungnya dan memprediksi masa yang akan datang, ia bersifat netral kepada semua pemakai laporan ada unsur seninya karena berbagai alternatif yang bisa dipilih melalui pertimbangan subjektif serta ia merupakan informasi yang sangat diperlukan para pemakai untuk pengambilan keputusan. Pemakai informasi adalah sebagai berikut:

- 1. Individu, anda menggunakan informasi akuntansi untuk mengelola rekening bank anda, mengevaluasi pekerjaan baru, dan mengambil keputusan.
- 2. Bisnis, para pemilik bisnis menggunakan informasi akuntansi untuk menetapkan tujuan, mereka mengevaluasi kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut dan mengambil tindakan korektif.
- 3. Investor, untuk memutuskan layak atau tidaknya investasi yang akan dilakukannya, seseorang harus meramalkan jumlah laba yang akan dihasilkan dari investasi tersebut.
- 4. Kreditor
- 5. Otoritas Pajak, informasi akuntansi juga digunakan oleh pemerintah lokal dan Negara bagian serta federal. Mereka memungut pajak. Pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan informasi akuntansi.

Akuntansi adalah sistem akuntansi yang mengukur aktivitas bisnis, memroses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Produk utama dari akuntansi adalah serangkaian dokumen yang disebut laporan keuangan. Laporan keuangan melaporkan tentang suatu bisnis dalam istilah moneter. Akuntansi sering disebut sebagai "bahasa bisnis", atau akan lebih tepat jika disebut "bahasa pengambilan keputusan". Semakin kita kuasai bahasa ini, akan semakin baik pula kita menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupan ini.

Menurut Armanto Witjaksono (2006;3), akuntansi biaya merupakan ILMU dan SENI. Akuntansi Biaya merupakan ILMU, dalam pengertian bahwa akuntansi biaya merupakan hal yang dapat dipelajari dan tentu saja telah memenuhi kaidah-kaidah tertentu untuk dapat diakui sebagai suatu disiplin ilmu; antara lain logis, dan telah diterima serta dipraktekkan oleh banyak orang. Akuntansi Biaya merupakan SENI, dalam pengertian bahwa akuntansi biaya merupakan bagian disiplin ilmu sosial yang karakteristiknya antara lain didasarkan atas suatu set asumsi tertentu. Asumsi tersebut dapat diungkapkan baik secara implisit maupun eksplisit.

Menurut Armanto Witjaksono (2006;4), barangkali manfaat terbesar mempelajari akuntansi biaya adalah timbulnya sikap "sadar akan biaya". Tidak banyak orang yang memahami bahwa harga pokok produk dan jasa merupakan refleksi kemampuan suatu organisasi dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi kemampuan mengelola cost, maka akan semakin baik produk dan jasa yang ditawarkan pada pelanggan baik dari sisi harga maupun kualitas.

Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisa terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Akuntansi biaya tidak hanya menyajikan perhitungan biaya persediaan dan harga pokok penjualan dalam penyajian laporan laba rugi, akan tetapi akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan perangkat akuntansi untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi.

Akuntansi biaya juga adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat bagi <u>manajemen</u> untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Manfaat biaya adalah menyediakan salah satu <u>informasi</u> yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya, yaitu untuk perencanaan dan pengendalian laba; penentuan harga pokok produk dan jasa; serta bagi pengambilan keputusan oleh manajemen.

Dalam akuntansi biaya juga terdapat beberapa kekurangan yang menyertainya, terutama dalam sistem akuntansi biaya yang telah ketinggalan zaman. Gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan zaman diantaranya ialah hasil dari penawaran sulit dijelaskan, harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk akal, produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi, manajer operasional berkeinginan menghentikan produk-produk yang kelihatan menguntungkan, marjin laba sulit dijelaskan, pelanggan tidak mengeluh atas biaya naiknya harga, departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu hanya untuk memberi data biaya bagi proyek khusus, dan biaya produk berubah karena adanya perubahan peratauran pelaporan.

Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang digunakan untuk berbagai tujuan, sehingga penggolongan biaya juga didasarkan atas disesuaikan dengan tujuan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggolongkan biaya diantaranya:

- 1. Berdasarkan Fungsi Pokok Perusahaan
 - a. Biaya Produksi (Factory Cost)
 - 1) Biaya Bahan Baku (Direct Material Cost)
 - 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung (*Direct Labor Cost*)
 - 3) Biaya Tidak Langsung (Factory Overhead)
 - b. Commercial Expense (Operating Expense)
 - 1) Marketing and Selling Expense
 - 2) General & Administration Expense
- 2. Berdasarkan Periode Akuntansi
 - a. Pengeluaran Modal (*Capital Expenditure*). Pengeluaran ini akan member manfaat pada beberapa periode akuntansi. Jenis pengeluaran ini dikapitalisirdan dicantumkan sebagai harga perolehan. Suatu pengeluaran dikelompokkan sebagai *capital expenditure* jika pengeluaran ini member manfaat lebih dari satu periode akuntansi, jumlahnya relatif besar, dan pengeluaran ini sifatnya tidak rutin.
 - b. Pengeluaran Penghasilan (*Revenue Expenditure*). Pengeluaran ini akan memberi manfaat pada periode akuntansi dimana pengeluaran ini terjadi. Pengeluaran ini menjadi beban pada periode tersebut, dan dicantumkan dalam *income statement*. Suatu pengeluaran dikelompokkan sebagai *revenue expenditure* jika pengeluaran tersebut memberi manfaat pada periode terjadinya pengeluaran tersebut, jumlahnya relatif kecil, dan umumnya pengeluaran ini sifatnya rutin.
- 3. Berdasarkan Pengaruh Manajemen Terhadap Biaya
 - a. Biaya Terkendali (*Controllable Cost*). Adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Biaya Tidak Terkendali (*Uncontrollable Cost*). Adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu.
- 4. Karakteristik Biaya Dihubungkan Dengan Keluarannya
 - a. Biaya *Engineered*. Adalah elemen biaya yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan output.

- b. Biaya *Discretionary*. Biaya ini disebut juga *managed cost* atau *programmedcost* adalah semua biaya yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan output.
- c. Biaya *Commited* atau biaya kapasitas. Adalah semua biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran dan administrasi.
- 5. Pengaruh Perubahan Volume Kegiatan Terhadap Biaya
 - a. Biaya Tetap. Yaitu biaya yang jumlah tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan sampai pada tingkatan tertentu. Biaya tetap perunit berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan.
 - b. Biaya Variabel. Biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktifitas tersebut. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar volume kegiatan maka semakin besar pula jumlah total biaya variabel.
 - c. Biaya Semi Variabel. Yaitu biaya dimana jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding/proporsional.
- 6. Berdasarkan Objek yang dibiayainya
 - a. Biaya Langsung. Biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu.
 - b. Biaya Tidak Langsung. Biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.

Biaya didefinisikan sebagai <u>waktu</u> dan <u>sumber daya</u> yang dibutuhkan dan menurut konvensi diukur dengan satuan <u>mata uang</u>.Biaya (*cost*) berbeda dengan beban (*expense*), *cost* adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa, sedangkan beban (*expense*) adalah *expired cost* yaitu pengorbanan yang diperlukan atau dikeluarkan untuk merealisasi hasil, beban ini dikaitkan dengan *revenue* pada periode yang berjalan. Pengorbanan yang tidak ada hubungannya dengan perolehan aktiva, barang atau jasa dan juga tidak ada hubungannya dengan realisasi hasil penjualan, maka tidak digolongkan sebagai *cost* ataupun *expense* tetapi digolongkan sebagai *loss*.

Menurut Charles T.Horngren (2008;246), cacat (*spoilage*) adalah unit produksi – apakah telah selesai secara penuh atau sebagian – yang tidak memenuhi standar yang diminta oleh pelanggan sebagai barang bagus yang dibuang atau dijual dengan harga yang dikurangi.

Menurut Mursyidi (2010;119), produk cacat merupakan produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, yang secara ekonomis dapat diperbaiki kembali. Produk cacat dapat diakibatkan oleh dua hal: yaitu disebabkan oleh spesifikasi pemesan (faktor eksternal) atau dikatakan sebab luar biasa; dan disebabkan oleh faktor internal, atau dikatakan sebab biasa. Jika produk cacat akibat dari sebab luar biasa, maka biaya pengerjaan kembali dibebankan pada biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Apabila produk cacat akibat dari sebab biasa, maka biaya pengerjaan kembali diperlakukan sebagai biaya *overhead* pabrik.

Kadaluarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk yang telah kadaluarsa. Menurut Mursyidi (2010;115), produk rusak merupakan produk gagal yang secara teknis atau secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Produk rusak dapat diakibatkan oleh dua sebab, yakni : *pertama*, produk rusak yang disebabkan oleh kondisi eksternal, misalnya karena spesifikasi pengerjaan yang sulit yang ditetapkan oleh pemesan, atau kondisi ini sering disebut dengan "sebab luar biasa". *Kedua*, produk rusak disebabkan oleh faktor internal perusahaan, misalnya keteledoran pekerja, keterbatasan peralatan, atau kerusakan fasilitas. Kondisi ini biasa disebut "sebab luar biasa". Menurut Mursyidi (2010;115), akuntansi produk rusak bergantung pada dua akibat adanya produk rusak diatas. Jika produk rusak

disebabkan hal luar biasa, maka kemudian adanya produk rusak diperlakukan sebagai penambah harga pokok produk yang baik; apabila produk rusak tersebut masih laku dijual. Maka taksiran nilai pasarnya diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi. Apabila adanya produk rusak diakibatkan hal biasa, maka kerugian yang terjadi diperlakukan sebagai biaya *overhead* pabrik.

Dolphin Donuts Bakery Manado merupakan salah satu perusahaan yang berproduksi secara massa yang memproduksi roti dan kue. Perusahaan ini sangat mengutamakan kualitas produk yang dihasilkan. Ini merupakan salah satu strategi perusahaan dalam menarik minat pelanggan demi untuk mendapatkan laba yang optimal. Masalah produk cacat dan produk kadaluarsa ini memerlukan adanya perlakuan akuntansi. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penulis mengambil judul Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Cacat dan Produk Kadaluarsa (studi kasus pada Dolphin Donuts Bakery Manado). Untuk itu pula timbul pertanyaan Bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap produk cacat dan produk kadaluarsa pada Dolphin Donuts Bakery Manado?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap produk cacat dan produk kadaluarsa pada Dolphin Donuts Bakery Manado.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode penganalisaan data dimana data dan informasi yang diperoleh dideskripsikan secara kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif sederhana. Jadi dalam penelitian ini data yang terkumpul secara keseluruhan terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif, kemudian seluruh data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Dolphin Donuts Bakery yang terletak di Jl.Sam Ratulangi kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni gambaran umum perusahaan dan informasi operasi perusahaan dan data kuantitatif yang berupa biaya produksi. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa data produksi, data biaya produksi, sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan yang diperoleh langsung dari Dolphin Donuts Bakery.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah yang pertama, wawancara yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada pimpinan Dolphin Donuts Bakery. Kedua, observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mencatat hal-hal yang diperlukan. Ketiga, dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu struktur organisasi.

Adapun penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Shinta Dewi Herawati (2009) dengan judul Tinjauan Atas Perlakuan Akuntansi untuk Produk Cacat dan Produk Rusak pada PT INDO PACIFIC. Berdasarkan hasil kajian dari data yang diperoleh untuk kerusakan produk pada PT. Indo Pacific, jenis kerusakan terbesar yaitu salah corak dan tarikan kain longgar yang disebabkan oleh kesalahan para karyawan atau sumber daya manusia.

Perlakuan akuntansi yang dilakukan perusahaan untuk membukukan hasil penjualan produk rusak adalah sebagai pendapatan lain-lain. Yang menjadi persamaannya adalah peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi terhadap produk rusak dan produk cacat. Yang menjadi perbedaannya terletak pada objek penelitian. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan industri yang memproduksi kain corak kotak-kotak, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan penghasil donat dan roti manis.

Yang kedua, penelitian terdahulu dilakukan oleh Lita Indah Fratiwi (2007) dengan judul Perlakuan Akuntansi terhadap produk cacat dan produk rusak pada PT Fuji Dharma Elektrik. Dari

penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perusahaan belum efektif dalam menerapkan perlakuan akuntansi terhadap produk cacat dan produk rusak sehingga perusahaan mengalami kerugian. Yang menjadi persamaannya adalah peneliti sebelumnya juga melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi. Yang menjadi perbedaannya terletak pada objek penelitian. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada PT.Fuji Dharma Elektrik, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Dolphin Donuts Bakery.

Yang ketiga, penelitian terdahulu dilakukan oleh Eka Sumiati (2009) dengan judul Evaluasi Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Rusak dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi pada PT Perkakas Rekadaya Nusantara Subang. Hasil penelitiannya yakni perlakuan akutansi terhadap produk rusak oleh perusahaan dengan perlakuan akutansi produk rusak sesuai dengan standar akutansi keuangan. Yang menjadi persamaannya yaitu peneliti terdahulu juga melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi. Perbedaannya yang pertama terletak pada objek penelitian. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu mengaitkan dengan perhitungan harga pokok produksi, sedangkan penelitian ini tidak mengaitkan perhitungan harga pokok produksi.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka perlu dibahas beberapa definisi operasional yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Cacat dan Produk Kadaluarsa (Studi Kasus pada Dolphin Donuts Bakery Manado).

- 1. Analisis adalah suatu proses untuk mencari tahu bagaimana perlakuan yang diterapkan dalam menangani produk cacat dan produk kadaluarsa apakah sudah sesuai dengan teori yang ada.
- 2. Perlakuan akuntansi adalah suatu proses bagaimana biaya-biaya diperlakukan dalam laporan akuntansi.
- 3. Produk cacat adalah produk yang mengalami kerusakan dalam proses produksi yang masih dapat diperbaiki namun membutuhkan biaya tambahan.
- 4. Produk kadaluarsa adalah produk yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk yang telah kadaluarsa.
- 5. Donat adalah merupakan salah satu jenis kue yang cara pembuatannya digoreng.
- 6. Roti Manis adalah salah satu jenis kue yang yang cara pembuatannya dipanggang.

Jadi yang dimaksudkan dengan judul skripsi ini adalah melakukan analisis untuk mencari tahu bagaimana perlakuan akuntansi yang telah diterapkan oleh perusahaan dalam menangani produk cacat dan produk kadaluarsa.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Donat, roti dan *pastry* merupakan produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Hamiko Irwan yang terlaksana pada tanggal 1 Maret 1997 dengan nama Dolphin Donuts Bakery. Pada saat berdiri, Dolphin Donuts Bakery memproduksi donat, roti manis, dan roti tawar. Pada awal tahun 2000, perusahaan mulai melakukan pengembangan usaha dengan memproduksi *pastry*.

Pembangunan berjalan lancar sehingga pada akhir tahun 2000 perusahaan berproduksi dengan kapasitas lebih banyak dan menambah cabang gerai *counter* di beberapa swalayan dan tempat lainnya, seperti Jumbo, Golden, Freshmart, Gramedia, dan Apotik Setia. Karena berhubungan dengan faktor kebutuhan, maka perusahaan menambahkan jajanan tradisional sebagai produk tambahan. Selain memproduksi donat, roti dan *pastry* untuk produk harian, perusahaan juga menerima pesanan khusus dengan berbagai macam cake dan roti, baik untuk acara ulang tahun, perkawinan, maupun acara lainnya. Sampai sekarang Dolphin Donuts Bakery tetap berproduksi dengan mempertahankan kualitas dan memperbanyak farian atau jenis produk.

Ruang lingkup kegiatan usaha Dolphin Donuts Bakery ini merupakan perusahaan yang memiliki beberapa cabang gerai *counter* di beberapa swalayan dan tempat lainnya, seperti Jumbo dengan 1 buah *counter*, Golden 1 buah *counter*, di beberapa cabang Freshmart dengan 1 buah *counter* di masing-masing cabang, toko buku Gramedia 1 buah *counter*, dan di Apotik Setia 1 buah *counter*. Dimana dalam hal usaha, Dolphin Donuts melakukan penjualan dan melakukan proses produksi sendiri.

Dolphin Donuts Bakery terletak ditengah kota Manado, yang bertempat di jalan Sam Ratulangi No. 45 Manado. Posisi ini merupakan posisi yang strategis dan mendukung kelancaran usaha perusahaan, karena disamping dekat dengan tempat- tempat cabang gerai *counter*, posisi ini juga menguntungkan karena berada tepat di pusat kota.

Pada dasarnya setiap perusahaan mengharapkan tujuan dari perusahaan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Struktur organisasi merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Di dalam suatu perusahaan adanya struktur organisasi mempunyai tujuan supaya efisien pekerjaan dalam suatu perusahaan dapat terjamin dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan juga memiliki banyak manfaatnya dimana bisa mengevaluasi atau mengukur keberhasilan dan kemampuan kerja dari masing-masing bidang dan bagiannya, selain itu juga bisa memudahkan bagi orang lain yang sangat membutuhkan informasi tentang perusahaan tersebut. Sehingga dapat dilihat bagaimana prosedur atau jalannya aktivitas dari suatu perusahaan.

Adapun struktur organisasi pada Dolphin Donuts Bakery sangat sederhana karena perusahaan masih merupakan perusahaan yang berbasis usaha dagang. Berikut struktur organisasi yang terdapat pada Dolphin Donuts Bakery :

1. Owner

Owner merupakan pemilik perusahaan yang mengatur keseluruhan perusahaan dan mengambil keputusan yang dinilai penting demi kelangsungan citra kesejahteraan perusahaan.

2. Manager

Manager merupakan orang yang bertanggungjawab membuat laporan hasil kerja pada *owner*. Selain itu, manager juga bertanggungjawab melakukan evaluasi rutin yang berhubungan dengan kinerja internal perusahaan. *Manager* juga sebagai orang yang mengawasi segala aktivitas produksi maupun penjualan yang terjadi pada perusahaan.

- 3. Bakery Chef
 - Bakery Chef bertanggungjawab atas seluruh proses produksi setiap harinya dan juga merupakan kepala chef yang membawahi beberapa koki.
- 4. Administrasi
 - Bagian administrasi bertanggungjawab dalam mengatur semua kepentingan perusahaan, membuat laporan ulang untuk laporan pencatatan penjualan sehari-hari dan keuangan perusahaan, kemudian memberikan laporan tersebut kepada *manager*, serta mengatur persediaan dan semua keuangan, pengeluaran sehari-hari termasuk kasir dan lain-lain.
- 5. Penjualan
 - Bagian penjualan membuat laporan ulang untuk laporan pencatatan penjualan sehari-hari dan keuangan perusahaan, kemudian memberikan laporan tersebut kepada *manager*.
- 6. Front Liner
 - Front Liner terdiri dari kasir dan waitress dimana kasir bertanggungjawab melayani proses pembayaran dan waitress bertanggungjawab melayani pembeli secara langsung.

a. Alat-alat Produksi

Fasilitas produksi berupa mesin dan peralatan yang digunakan perusahaan dalam membantu kegiatan usaha antara lain :

- Mixer
- Oven
- Meja Produksi

- Timbangan
- Cutter
- b. Bahan-bahan

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi antara lain:

- Tepung Terigu
- Mentega
- Gula
- Susu Bubuk
- Garam
- Ragi
- Pengembang
- Telur
- Air
- c. Tahap-tahap Produksi

Proses pengelolaan dari bahan mentah menjadi barang jadi dilakukan dengan melalui tahap yang pertama yaitu menimbang bahan sesuai dengan resep. Setelah bahan selesai ditimbang, bahan tersebut di*mixer* selama kurang lebih 20 menit sampai adonan jadi.

Adonan ditimbang sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian diisi dan dibentuk serta ditaruh dicetakan atau loyang. Tahap selanjutnya adonan difermentasikan selama kurang lebih 2 jam dengan suhu 60° lembab. Setelah selesai difermentasikan, adonan dipanggang didalam oven dengan suhu 170°C selama 18 menit. Produk jadi didinginkan kemudian dibungkus dan siap untuk dijual.

Perlakuan Akuntansi untuk Produk Cacat adalah sebagai berikut

Tabel 4.1 Teori Pembanding

Keterangan	Konsep Teori	Riil	(+/-)
Produk cacat akibat dari sebab luar	Biaya produksi	Tidak adanya	(-)
biasa, maka biaya pengerjaan	pesanan yang	pengerjaan kembali	
kembali dibebankan pada:	bersangkutan		
Produk cacat akibat dari sebab	Biaya <i>overhead</i> pabrik	Tidak adanya	(-)
biasa, maka biaya pengerjaan		pengerjaan kembali	
kembali diperlakukan sebagai :			

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan bukti penelitian, perusahaan tidak melakukan pengerjaan kembali (*rework*) untuk memperlakukan hasil produksi yang tidak memenuhi standar mutu perusahaan. Alasannya karena produk cacat yang ada kebanyakan disebabkan oleh kelebihan panas atau hangus. Disamping itu, produk cacat yang dihasilkan sangat sedikit yakni kurang lebih 20 unit setiap harinya untuk produk Donat dan Roti Manis.

Perlakuan Akuntansi untuk Produk Kadaluarsa adalah sebagai berikut

Tabel 4.2 Teori Pembanding

Keterangan	Konsep Teori	Riil	(+/-)
Kerugian produk rusak	Biaya <i>overhead</i> pabrik	Pengurang harga pokok	(-)
yang terjadi	sesungguhnya	produksi	
(sesungguhnya)			
diperlakukan sebagai :			
Jika produk rusak	Pengurang biaya	Pengurang harga pokok	(-)
abnormal, kerugian	produksi	produksi	
produk rusak yang			
terjadi diperlakukan			
sebagai :			

Oleh karena produk kadaluarsa merupakan produk yang tidak laku dijual maka menurut kebijakan perusahaan, kerugian atas produk rusak diperlakukan sebagai pengurang harga pokok produk selesai. Perusahaan mencatat ada sekitar 15% produk kadaluarsa yang dihasilkan per bulan.

Adapun transaksi yang terjadi khususnya untuk produk Donat dan Roti Manis, dicatat dengan jurnal berikut ini :

1. Jurnal untuk mencatat produk keluar :

Barang Titipan Rp 232.200.000

Piutang Rp 232.200.000

2. Jurnal untuk mencatat produk laku dijual:

Piutang Rp 197.415.315

Kas Rp 197.415.315

3. Jurnal untuk mencatat rugi produk rusak :

Retur Penjualan Rp 34.784.685

Biaya *Overhead* Pabrik-Sesungguhnya Rp 34.784.685

Berikut ini merupakan data produksi dan biaya Dolphin Donuts Bakery bulan Oktober 2013:

Biaya Bahan Baku Rp 61.882.670 Biaya Tenaga Kerja Rp 60.000.000 Biaya Overhead Pabrik Rp 40.200.000

Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah:

Produk Jadi 62.000 unit Produk dalam proses pada akhir bulan 950 unit

Data Produksi perusahaan Dolphin Donuts Bakery Bulan Oktober 2013

Bulan Oktober 2013		
Masuk ke dalam proses: 62.950 unit		
Produk Jadi:	62.000 unit	
Produk dalam proses akhir	950 unit	

Gambar 4.2 Data Produksi

Berikut ini akan disajikan laporan biaya produksi:

Dolphin Donuts Bakery		
Laporan Biaya Produksi Bulan Oktober 2013		
Data Produksi		
Dimasukkan dalam proses	<u>62.950 unit</u>	
Produk Jadi	62.000 unit	
Produk dalam proses akhir	<u>950 unit</u>	
Jumlah Produk yang dihasilkan	62.950 unit	
Biaya yang Dibebankan dalam Bulan Oktober 2013		
Biaya Bahan Baku	Rp 61.882.670	
Biaya Tenaga Kerja	Rp 60.000.000	
Biaya Overhead Pabrik	Rp 40.200.000	
Jumlah Biaya Produksi yang Dibebankan dalam bulan Oktober	Rp 162.082.670	

Gambar 4.3 Laporan Biaya Produksi

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan biaya produksi, biaya produksi yang terjadi dalam bulan Oktober 2013, dicatat dengan jurnal berikut ini.

1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku:

Barang Dalam Proses-Biaya Bahan Baku Rp 61.882.670

Persediaan Bahan Baku Rp 61.882.670

2. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja:

Barang Dalam Proses-Biaya Tenaga Kerja Rp 60.000.000

Gaji dan Upah Rp 60.000.000

3. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik:

Barang Dalam Proses-Biaya Ov. Pabrik Rp 40.200.000

Biaya Ov. Pabrik Dibebankan Rp 40.200.000

Kerugian Produk Kadaluarsa

Berikut ini akan dihitung kerugian produk kadaluarsa yang dialami perusahaan :

Kerugian Produk Kadaluarsa Keseluruhan

- = Total Penjualan X Presentase Kerugian
- = Rp 378.300.000 X 15 %
- = Rp 56.745.000

Kerugian Produk Kadaluarsa untuk Donat

- = Kerugian Produk Kadaluarsa X Presentase Produk Donat
- = Rp 56.745.000 X 29,7%
- = **Rp 16.853.265**

Jumlah Produk Kadaluarsa untuk Roti Manis

- = Kerugian Produk Kadaluarsa X Presentase Pr.Roti Manis
- = Rp 56.745.000 X 31,6%
- = **Rp 17.931.420**

Jadi, kerugian yang dialami perusahaan akibat produk kadaluarsa untuk Donat dan Roti Manis pada bulan Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

Produk Donat	Rp 16.853.265
Produk Roti Manis	Rp 17.931.420

Gambar 4.4 Kerugian Produk Kadaluarsa

Berikut ini merupakan laba perusahaan yang diterima dari hasil penjualan Donat dan Roti Manis setelah dikurangi dengan kerugian produk kadaluarsa.

	Donat	Roti Manis
Hasil Penjualan	Rp 112.500.000	Rp 119.700.000
Biaya Produksi	(Rp 55.214.100)	(Rp 58.363.170)
Kerugian produk Kadaluarsa	(Rp 16.853.265)	(Rp 17.931.420)
Laba	Rp 40.432.635	Rp 43.405.410

Gambar 4.5 Laba Perusahaan

D. KESIMPULAN

Tidak adanya produk cacat pada Dolphin Donuts Bakery dikarenakan perusahaan tidak melakukan pengerjaan kembali (*rework*) untuk memperlakukan hasil produksi yang tidak memenuhi standar mutu perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep teori yang ada.

Produk kadaluarsa merupakan produk yang tidak laku dijual melampaui tanggal yang telah ditetapkan untuk baik digunakan akibatnya produk ini menjadi produk rusak. Perusahaan memperlakukan kerugian produk kadaluarsa tersebut sebagai pengurang harga pokok produk selesai.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba memberi saran, melihat dari hasil penelitian yang telah penulis teliti, kerugian yang diakibatkan dari 15% produk kadaluarsa yang ada sangat berpengaruh bagi laba perusahaan. Jika produk kadaluarsa yang ada untuk bulan November juga kurang lebih sama, maka perusahaan harus melakukan evaluasi untuk menekan jumlah produk kadaluarsa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Armanto, Witjaksono. 2006. Akuntansi Biaya. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan.S, 2012. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Rajawali Pers. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Horngren Charles.T, Srikant M.Datar, dan George Foster, 2008. *Akuntansi Biaya:Penekanan Manajerial*. Jilid 2. Edisi Kesebelas. PT Indeks. Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3. Erlangga. Jogyakarta.
- Mulyadi, 2012. *Akuntansi Biaya Edisi 5Cetakan Sebelas*. Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mursyidi, 2008. *Akuntansi Biaya Conventional Costing, Just In Time, dan Activity-Based Costing*. Refika Aditama. Bandung.
- Akhmad, Benk's, 2009, "Makanan Kadaluarsa". Tanggal Akses: 10 Oktober 2013. http://gbenk.blogspot.com/2009/12/makanan-kadaluwarsa.html
- Zaenab, 2009, "Makanan Kadaluarsa". Tanggal Akses 21 Oktober 2013, keslingmks.files.wordpress.com/

ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2001-2012

Hesty Rahayu, Rosalina A. M Koleangan dan George M. Kawung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado Email : hestyrahayu.hr@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Indonesia. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga pola pembangunan ekonomi di Indonesia juga tidak seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Sulawasi Utara Tahun 2001-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah metode indeks wiliamson dan di regres menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan Metode Ordinary Least Square (OLS) dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif namun tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan wilayah sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci : Indeks Ketimpangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah.

ABSTRACT

As a country with thousands of islands, differences in the characteristics of the region is a logical consequence of unavoidable Indonesia. Characteristics of the region has a strong influence on the creation of economic development pattern, so the pattern of economic development in Indonesia is also not uniform. This inconsistency affects the ability to grow, which results in some regions were able to grow rapidly while other areas grow slowly. This study aims to analyze the influence of economic growth, the level of government spending in the field of education and development of the region inequality in the province of North Sulawasi 2001-2012. The analysis technique used is the method of Williamson and regress index using multiple linear regression analysis model with the method of Ordinary Least Square (OLS) with secondary data. The results showed that economic growth and a significant positive effect on inequality of the province of North Sulawesi. The level of education and the negative effect of government spending, but the level of education significantly affect inequality region whereas no significant effect of government spending on inequality region of North Sulawesi province.

Keywords: Regional Inequality Index, Economic Growth, Level of Education, Government Spending.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, desentralisasi fiskal merupakan merupakan ciri yang menonjol dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mengembangkan segenap potensi ekonomi daerah secara efisien dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memacu aktivitas perekonomian di daerah-daerah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan gerak perekonomian nasional. Peran Pemerintah cukup besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena pemerintah merupakan penggerak utama pembangunan. Anggaran pembiayaan pembangunan menjadi pedoman dalam membiayai tugas negara berasal dari berbagai sumber pendapatan baik dalam maupun luar negeri dan dapat dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan ekonomi. Oleh sebab itu, anggaran negara harus sesuai prinsip dengan kondisi dan keadaan ekonomi. Dan anggaran negara dapat dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan fiskal dalam mempengaruhi pendapatan nasional, karena dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah baik secara jumlah maupun proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan peningkatan aktivitas pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Peran Pemerintah cukup besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena pemerintah merupakan penggerak utama pembangunan. Anggaran pembiayaan pembangunan menjadi pedoman dalam membiayai tugas negara berasal dari berbagai sumber pendapatan baik dalam maupun luar negeri dan dapat dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan ekonomi. Oleh sebab itu, anggaran negara harus sesuai prinsip dengan kondisi dan keadaan ekonomi. Dan anggaran negara dapat dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan fiskal dalam mempengaruhi pendapatan nasional, karena dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah baik secara jumlah maupun proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan peningkatan aktivitas pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Pada Negara-negara sedang berkembang, ketimpangan wilayah dan kesejahteraan sangat lebar. Pengeluaran pemerintah cenderung untuk mempersempit jurang perbedaan tersebut, dimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan medis akan meningkatkan mutu sember daya manusia yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat lewat kenaikan pengeluaran pemerintah, lapangan kerja meluas dan menyebar yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kemampuan industrialisasi sehingga daerah yang tadinya tertinggal mampu berkembang dan memperkecil ketimpangan yang ada (Jhingan, 2007).

Kualitas sumber daya manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila kualitas sumber daya manusia di suatu daerah baik, maka diharapkan perekonomiannya juga akan lebih baik. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, atau indikator-indikator lainnya. Tingkat pendidikan yang baik akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta menentukan kemampuan dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Tarigan (2005), mengemukakan bahwa sebetulnya apa yang diuraikan hingga saat ini adalah yang berkaitan dengan rencana pengembangan fisik dan struktur perekonomian. Perlu diingat bahwa pengembangan perekonomian, baik nasional maupun regional banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengambil peran dalam gerak perekonomian. Sejalan dengan itu langkahlangkah untuk memperbaiki mutu SDM perlu terus digalakkan melalui pendidikan. Mutu SDM dibagi dalam dua aspek, yaitu aspek keahlian/keterampilan dan aspek moral/mental. Semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan juga akan semakin meningkat, yang selanjutnya pertumbuhan ini tidak memberikan efek stimulus bagi daerah lain yang lebih tertinggal khususnya di daerah pedesaan, sehingga akan meningkatkan ketimpangan wilayah.

Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Indonesia. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh

kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga pola pembangunan ekonomi di Indonesia juga tidak seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya, yakni pendapatan antar daerah. (Sianturi, 2011).

Ketidakmerataan pembangunan disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2006).

Desentralisasi fiskal yang diterapkan tidak serta merta menjadikan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB secara bersamaan. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota di Sulawesi Utara tahun 2001-2012, PDRB berdasarkan harga konstan secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun hanya sebagian wilayah saja yang mengalami peningkatan secara signifikan.

Dengan tingkat perbedaan yang demikian, dikhawatirkan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang semula ditujukan untuk memajukan dan mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah, justru akan terjadi sebaliknya yaitu akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pertumbuhan antar daerah. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat bervariasi antar daerah setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, disinyalir terjadi peningkatan ketimpangan antar kabupaten/kota pada Provinsi sulawesi utara. Tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini dilandasi teori-teori sebagai berikut, Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi. (Sianturi, 2011).

Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan muncul karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Sehingga kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan juga memberikan implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang akan mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah (Sjafrizal, dalam Basuki 2013).

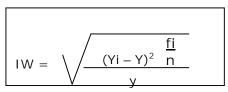
Adisasmita dalam Basuki 2013, Untuk menanggulangi masalah keterbelakangan, ketidakmerataan dan kemiskinan dalam pembangunan dihadapi proses lingkaran tidak berujung pangkal (vicious circle). Daerah yang terbelakang karena masyarakatnya miskin, mereka menjadi miskin karena mereka terbelakang (kapasitas sumber daya manusianya lemah serta kesediaan prasarana dan sarana pembangunan terbatas). Ketimpangan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan yang cenderung bertambah semakin besar, demikian pula dalam hal kesenjangan antar daerah akan menjadi besar.

Kebijakan dalam menanggulangi ketimpangan ekonomi sangat ditentukan oleh faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut. Kebijakan yang dimaksud disini adalah upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangkamengurangi tingkat

ketimpangan atar suatu daerah atau wilayah. Adapun penanggulangan ketimpangan ekonomi antar wilayah yaitu: 1). Penyebaran pembangunan prasarana perhubungan; 2). Mendorong transmigrasi dan migrasi spontan; 3). Pengembangan pendidikan antar wilayah 4). Pengembangan pusat pertumbuhan; 5). Pelaksanaan otonomi daerah

Ukuran ketimpangan wilayah untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, dan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan melalui perhitungan Indeks Williamson.

Rumus Indeks Williamson:



Dimana:

yi = PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota

y = PDRB per kapita Provinsi fi = Jumlah penduduk di wilayah i n = Jumlah penduduk Provinsi

Sumber: Sjafrizal, 2012.

Hakikat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah dan swasta dalam mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Menurut Djojohadikusumo, 1994 (dalam Badrudin 2012), Pertumbuhan ekonomi adalah Peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi .Masyarakat.

"Economic Development is Growth Plus Change" yang berarti pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak (Sukirno, 1994). Simon Kuznets dalam Sukirno, mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu peningkatan bagi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan (Sukirno, 1995). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh factor-faktor produksi yang selalu meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Boediono (1992) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, limapuluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kencenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian itu, artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dipertimbangkan PDRB riil satu tahun (PDRBt) dengan PDRB riil tahun sebelumnya (PDRBt-1), atau dapat di formulasikan sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi (PE) =
$$\frac{\text{PDRB}_{t-1} \times 100\%}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

Razak, 2009 (dalam Basuki, 2013), mengemukakan bahwa Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ekonominya, maka setiap daerah akan membutuhkan faktor-faktor produksi, dimana faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh setiap daerah tersebut tidak seluruhnya tersedia di dalam daerahnya. Demikian pula bahwa senantiasa terjadi perbedaan jenis, jumlah dan kualitas faktor produksi yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga tidak mampu untuk menghasilkan sendiri seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Disamping itu, untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan, maka pasar domestik setiap Negara tidak mampu menyerapnya, sehingga harus dipasarkan pula ke daerah-daerah atau Negara-negara lain. Akibatnya, pembangunan ekonomi di setiap daerah, selain ditentukan oleh faktor di dalam daerah (faktor internal) juga akan sangat tergantung kepada faktor-faktor eksternal, yakni faktor penentu yang berasal dari luar daerah atau luar negeri. Besarnya pengaruh faktor-faktor penentu eksternal tersebut bagi setiap daerah adalah sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya ekonomi di masing-masing daerah tersebut.

Pertumbuhan dan perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Utara dapat ditinjau dari beberapa indikator makro, yaitu antara lain dari nilai tambah yang dihasilkan struktur perekonomian daerah, laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta PDRB perkapita. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibanding dengan nilai tahun sebelumnya.

Penggunaan atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi dan pula merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya kegiatan ekonomi dalam salah satu daerah. Angka PDRB suatu daerah dapat memperlihatkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelolah sumber daya alam yang dimiliki melalui suatu proses produksi. Oleh karena itu besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Investasi dapat dilakukan bukan saja pada fisik, tetapi juga pada bidang non fisik. Investasi fisik meliputi bangunan pabrik dan perumahan karyawan, mesin-mesin dan peralatan, serta persediaan (bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi). Investasi non fisik meliputi pendidikati, pelatihan, migrasi, pemeliharaan kesehatan dan lapangan kerja. Investasi non fisik lebih atau lebih dikenal dengan investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Penghasilan selama proses investasi ini sebagai imbalannya dan diharapkan memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Investasi yang demikian disebut dengan *human capital* (Simanjuntak, 1985 dalam Atmanti)). Istilah modal manusia (*human capital*) ini dikenal sejak tiga puluh tahun lalu ketika Gary S. Becker, seorang penerima Nobel di bidang ekonomi membuat sebuah buku yang berjudul *Human Capital* (Becker, 1964 dalam Atmanti).

Robert M. Solow dalam Hastarini menekankan kepada ilmu pengetahuan dan investasi modal sumberdaya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai teori *The New Growth Theory*. Investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga semakin meningkat sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya.

Investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga semakin meningkat sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Kualitas sumber daya manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Penerapan otonomi daerah pada tahun 2001 mengakibatkan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah yang awalnya adalah manivestasi dari pemerintah pusat dan bertindak atas perintah dari pusat, dengan diberlakukannya otonomi daerah berubah menjadi sebuah pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab otonom untuk mengatur wilayahnya (berdasarkan kebutuhan wilayah), dalam koridor hukum yang telah ditentukan. Hal ini tercatum dalam *European Charter of Local Self Government*

Wagner dalam Guritno 1993, mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga di dasarkan pula pengamatan di Negaranegara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner menyadari dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, industri dan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini Wanger menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pedidikan, rekreasi, dan sebagainya.

Hubungan Teoritis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Wilayah. Pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan setiap Negara adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu memacu perkembangan ekonomi secara makro. Namun hal tersebut seringkali menyebabkan pendapatan antar daerah kurang merata akibat sumber daya alam dan keadaan geografis yang dimiliki oleh beberapa daerah kurang memadai dibanding dengan daerah-daerah yang maju.

Perbedaan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan ketimpangan ini disebabkan oleh berbedanya kandungan sumberdaya alam tiap-tiap daerah, dimana ada daerah yang memiliki sumber daya alam minyak dan gas sedangkan daerah lain tidak. Ada daerah yang memiliki deposit batu bara sedangkan daerah lain tidak. Perbedaan kandungan sumber daya ala mini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah yang memiliki kandungan sumberdaya alam yang banyak dapat memproduksi sumber daya alamnya dengan biaya yang relatif murah dengan daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Kondisi seperti ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang memiliki sumber daya alam yang lebih kecil akan memproduksi barang/jasa dengan harga yang lebih tinggi sehingga daya saing menjadi lemah dan menyebabkan pertumbuhan daerah tersebut melambat.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata inilah yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Penyebab lainnya pertumbuhan ekonomi yaitu alokasi dana pembangunan antar wilayah. Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang besar dari pemerintah, atau lebih banyak menarik investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Kedua, pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan wilayah. Sampai akhir ini, hampir semua Negara baik di Negara-negara maju maupun di Negara-negara berkembang berfokus pada hubungan-hubungan antara pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan output. Hal ini

tidaklah mengagetkan karena seperti yang telah kita ketahui tujuan pembangunan adalah memaksimalkan tingkat pertumbuhan output secara bersama-sama. Sebagai hasilnya, dampak atau pengaruh pendidikan terhadap pemerataan pendapatan dan usaha penghapusan kemiskinan absolut sebagian besar tersendat-sendat. Akan tetapi, studi-studi yang baru telah memperlihatkan bahwa disamping sebagai kekuatan yang umum untuk mengusahakan kebersamaan, sistem-sistem pendidikan di berbagai Negara yang sedang berkembang lebih banyak menciptakan peningkatan dari pada mengurangi ketimpangan-ketimpangan pendapatan ini, Todaro (2006).

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Prahara (2010) dalam Hariyanto (2010), sumber daya yang dicerminkan pada kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia berhubungan dengan proses produksi. Tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja merupakan modal utama bagi suatu daerah untuk berproduksi.

Kualitas sumber daya manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila kualitas sumber daya manusia di suatu daerah baik, maka diharapkan perekonomiannya juga akan lebih baik. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, atau indikator-indikator lainnya. Tingkat pendidikan yang baik akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta menentukan kemampuan dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Tarigan (2005), mengemukakan bahwa sebetulnya apa yang diuraikan hingga saat ini adalah yang berkaitan dengan rencana pengembangan fisik dan struktur perekonomian. Perlu diingat bahwa pengembangan perekonomian, baik nasional maupun regional banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengambil peran dalam gerak perekonomian. Sejalan dengan itu langkahlangkah untuk memperbaiki mutu SDM perlu terus digalakkan melalui pendidikan. Mutu SDM dibagi dalam dua aspek, yaitu aspek keahlian/keterampilan dan aspek moral/mental. Semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan juga akan semakin meningkat, yang selanjutnya pertumbuhan ini tidak memberikan efek stimulus bagi daerah lain yang lebih tertinggal khususnya di daerah pedesaan, sehingga akan meningkatkan ketimpangan wilayah.

Ketiga, pengaruh pengeluaran permerintah terhadap ketimpangan wilayah. Secara garis besar, pengeluaran pemerintah terbagi atas tiga bagian yaitu sebagai berikut: pengeluaran pemerintah untuk kebijakan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa (Exhausative), pengeluaran pemerintah untuk subsidi (Government Transfer Payment).

Pada Negara-negara sedang berkembang, ketimpangan wilayah dan kesejahteraan sangat lebar. Pengeluaran pemerintah cenderung untuk mempersempit jurang perbedaan tersebut, dimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan medis akan meningkatkan mutu sember daya manusia yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi yang meningkat lewat kenaikan pengeluaran pemerintah, lapangan kerja meluas dan menyebar yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kemampuan industrialisasi sehingga daerah yang tadinya tertinggal mampu berkembang dan memperkecil ketimpangan yang ada (Jhingan, 2007).

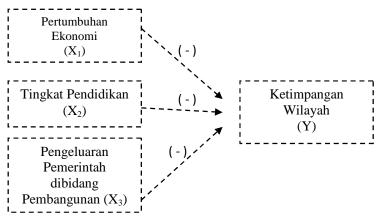
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini adalah: Andri Priyanto, 2009 yang meneliti tentang analisis ketimpangan dan faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi banten, mengemukakan hasil bahwa Ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2001-2008 cukup tinggi yaitu 0,63 sampai 0,67, dan hanya dua wilayah yang menunjukkan daerah maju yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dari tahun 2001 - 2008 sangat berfluktuasi, namun tetap menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2007, sektor yang mempunyai kontribusi tertinggi di Provinsi Banten yaitu industri pengolahan dan perdagangan pada tahun terakhir ini.

Puput Malahayati Sari, 2007 yang meneliti tentang analisis ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia,mengemukakan hasil bahwa Kawasan Timur Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota yang cukup besar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut cenderung menurun pada tahun 1996-2004. Nilai CVw yang diperoleh pada tahun 1993 sebesar 0,99113, sedangkan pada tahun 1996 nilainya meningkat menjadi 0,99136, dan pada tahun 1998 menurun menjadi 0,99077.

Rahmat Basuki 2013, yang meneliti tentang Analisis ketimpangan wilayah sebelum dan setelah desentralisasi fiskal di provinsi Sulawesi selatan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini memperoleh hadil dimana tidak terdapat perbedaan ketimpangan wilayah yang signifikan antara sebelum dan setelah desentralisasi fiskal, dimana dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa DUMMY Desentralisasi fiskal tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal, dikarenakan lulusan SMA belum mampu mendorong produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

Siagian R. Siagian, 2010 yang meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis regresi persamaan simultan (simultaneous equation regresion model) dengan model Berulang (Recursive Models) dan Kuadrat Terkecil. Model akan diregresi menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan data panel, atau disebut PLS (Panel Least Square) untuk mengetahui Analisis Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi signifikan dan positif dipengaruhi oleh derajat desentralisasi fiskal, dan tingkat aglomerasi suatu daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal dan tingkat aglomerasi suatu wilayah atau daerah maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya pajak daerah dan tenaga kerja memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal. Pertama, pertumbuhan ekonomi memilki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini disebabkan saling berbedanya kemapuan antar masing-masing daerah atau wilayah di Provinsi Jawa Barat dalam hal pertumbuhan ekonomi.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Sulawasi Utara Tahun 2001-2012.

B. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data Time Series dari tahun 2001 sampai tahun 2012. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara.

Model Indeks Wiliamson untuk mengukur tingkat ketimpangan di provinsi Sulawesi Utara:

$$IW = \sqrt{\frac{(Yi - Y)^2 \frac{fi}{n}}{V}}$$

Dimana:

yi

= PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota

y = PDRB per kapita Provinsi fi = Jumlah penduduk di wilayah i n = Jumlah penduduk Provinsi

Sumber: Sjafrizal, 2012

Selanjutnya untuk metode analisis, peneliti menggunakan analisis model Regresi Berganda (Multiple Regression) dengan metode kuadrat terkecil sederhana (Ordinary Least Square) da menggunakan program Eviews 5. Persamaan regresi berganda adalah persamaan regresi yang melibatkan dua atau lebih variabel dalam analisa. Tujuannya adalah untuk menghitung parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat dan memiliki pengaruh kepadanya. Variabel yang akan diestimasi adalah variabel terikat, sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel bebas.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Supaya hasil penelitian diatas diterima secara ekonometrik, maka diperlukan syarat BLUE (*Best, Linear, Unbiased, Estimatory*) dari metode kuadrat terkecil (OLS). Pengujian dilakukan dalam model antara lain: Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	R Hitung	R^2
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	0.588267	0.706800
Tingkat Pendidikan (PEN)	0.434449	0.706800
Pengeluaran Pemerintah (PP)	0.717656	0.706800

Sumber: Data Diolah

Dari tabel hasil analisis uji multikolinieritas di atas untuk variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terlihat bahwa R lebih kecil dari R . Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima. Dengan diterimanya H_0 berarti tidak terdapat Multikolinearitas. Namun untuk variabel pengeluaran pemerintah terlihat bahwa terlihat bahwa R lebih besar dari R . Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dengan ditolaknya H_0 berarti terdapat Multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokesdasitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah pengujian *White*.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

$R^2 = 0.546735$				
Obs^*R -squared = 6.560815				
Chi-squares (2) pada $1\% = 10.64464$				

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa koefisien determinasi (R²) sebesar 0.546735 Nilai Chi-squares hitung sebesar 6.560815 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R²). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares (²) pada = 1% dengan df sebesar 6 adalah 10.64464. Karena nilai Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares (²) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi masalah autokorelasi digunakan Uji *Lagrange Multiplier*. Jika hasil uji LM berada pada hipotesa nol (H_0) yaitu nilai chi squares hitung $(\ ^2)$ lebih kecil dari pada nilai kritis chi squares $(\ ^2)$, maka model estimasi tidak terdapat autokorelasi, begitu pula sebaliknya jika berada pada hipotesa alternative (H_a) yaitu nilai chi squares $(\ ^2)$ lebih besar dari pada nilai kritis chi squares $(\ ^2)$, maka terdapat autokorelasi.

Hasil Uji Autokorelasi

$R^{2} = 0.379024$	
chi squares $\binom{2}{2} = 4.5$	48285
nilai kritis (²) pada	10% = 4.60517
nilai kritis (²) pada	5% = 5.99147
nilai kritis (²) pada	1% = 9.21034

Sumber: Data Diolah

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.379024. Nilai chi squares hitung (R^2) sebesar 4.548285, sedangkan nilai kritis (R^2) pada = 10%, = 5%, = 1% dengan df sebesar 2. karena nilai chi squares hitung (R^2) lebih kecil dari pada nilai kritis chi squares (R^2), maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji statistik yang digunakan antara lain adalah Uji F yaitu suatu cara menguji hipotesis nol yang melibatkan lebih dari satu koefisien. Uji F digunakan dalam statistika untuk menguji signifikansi secara menyeluruh pada sebuah persamaan regresi. Statistik F mempunyai dua tipe derajat kebebasan: derajat kebebasan pembilang (numerator), diberi simbol k adalah variabel independent termasuk konstanta , dan derajat kebebasan penyebut (denumerator), diberi simbol n-k-1, dengan n adalah jumlah pengamatan sampel.

Nilai F_{tabel} dengan derajat kebebasan (3,7) dan = 5% adalah 4.35 Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 6.428376. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} , artinya secara bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah.

Nilai R² (koefisien determinasi) dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R² berkisar antara 0 - 1. Nilai R² makin mendekati 0 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin kecil Dan sebaliknya nilai R² makin mendekati 1 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin besar. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R² adalah 0.706800, yang berarti variasi dari Ketimpangan Wilayah (IK) mampu di jelaskan oleh variable-variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pendidikan (PEN), dan Pengeluaran Pemerintah dibidang Pembangunan (PP) di Sulawesi Utara sebesar 70.68%, sedangkan sisanya (29.32%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh para ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien-koefisien slope regresi secara individual. Uji t adalah uji yang tepat untuk digunakan apabila nilai-nilai residunya terdistribusi secara normal dan apabila varian dari distribusi itu harus diestimasi. Aturan dalam pengujian hipotesis nilai t hitung dan t tabel :

Dengan hipotesis =

H0: i = 0, dimana i = 1, 2, 3Ha: i = 0, dimana i = 1, 2, 3

H0 ditolak jika t hitung > t tabel = signifikan secara statistik

1. Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Dari hasil estimasi untuk Pertumbuhan Ekonomi (PE) di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar 3.930384dengan df sebesar 7 pada tingkat kepercayaan 1% = 2.998. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya H0 berarti Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1% terhadap Ketimpangan Wilayah (IK).

2. Tingkat Pendidikan (PEN)

Dari hasil estimasi untuk Tingkat Pendidikan (PEN) di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar 2.130824 dengan df sebesar 7 pada tingkat kepercayaan 5% = 1.895. Karena nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya H0, berarti Tingkat Pendidikan (PEN) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 5% terhadap Ketimpangan Wilayah (IK).

3. Pengeluaran Pemerintah (PP)

Dari hasil estimasi untuk Pengeluaran Pemerintah (PP) di dapatkan bahwa nilai t-statistik sebesar -2.300772 dengan df sebesar 7 pada tingkat kepercayaan 10% = 1.415. Karena nilai t-statistik lebih besar

dari nilai t-tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya H0 berarti Pengeluaran Pemerintah (PP) mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 10% terhadap Ketimpangan Wilayah (IK).

Pengujian Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat adalah pengujian yang dimaksud untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat untuk membenarkan hipotesis yang dibuat.

Hasil Regresi Berganda (OLS)

Variabel	Coefficient	t-statistik	Probabilitas	
PE	0.210046	3.930384	0.0044	
PEN	0.057843	2.130824	0.0657	
PP	-0.536152	-2.300772	0.0504	
С	10.08566	2.240720	0.0554	
R2 = 0.706800				
F-statistic = 6.428376				

Sumber : Data Diolah

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 5 di atas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

```
IK = 10.08566 + 0.210046PE + 0.057843PEN - 0.536152PP + \varepsilon_t
```

Pertumbuhan ekonomi memiliki tanda positif terhadap ketimpangan wilayah dengan koefisien regresi sebesar 0.210046. Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan pada ketimpangan wilayah sebesar 21.0046 satuan. Hal ini tidak sesuai

dengan teori yang di harapkan, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan mengakibatkan penurunan pada ketimpangan wilayah. *cateris paribus*.

Sedangkan hasil analisis dari tingkat pendidikan memiliki tanda positif terhadap ketimpangan wilayah dengan koefisien regresi sebesar 0.057843. Artinya, apabila tingkat pendidikan naik sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan pada ketimpangan wilayah sebesar 5.7843 satuan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang di harapkan, apabila tingkat pendidikan meningkat maka akan mengakibatkan penurunan pada ketimpangan wilayah. *cateris paribus*.

Hasil analisis dari pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan memiliki tanda negatif, dimana koefisien dari pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan sebesar -0.536152 yang artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan ketimpangan wilayah sebesar 53.6152 satuan. hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila tingkat pembangunan meningkat maka akan menyebabkan penurunan ketimpangan wilayah. *cateris paribus*.

Adapun pembahasan dari penelitian ini adalah dari hasil analisis regresi persamaan yang dilakukan, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hasil ini tidak sejalan dasar teoritik dan hipotesis bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah ketimpangan wilayah.

Namun hasil temuan studi ini sejalan dengan temuan dari Siagian 2010 bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini disebabkan saling berbedanya kemapuan antar masing-masing daerah atau wilayah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah juga akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah.

Dimana tiap daerah memiliki perbedaan kandungan sumberdaya alam, Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah yang memiliki kandungan sumberdaya alam yang banyak dapat memproduksi sumber daya alamnya dengan biaya yang relatif murah dengan daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Kondisi seperti ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang memiliki sumber daya alam yang lebih kecil akan memproduksi barang/jasa dengan harga yang lebih tinggi sehingga daya saing menjadi lemah dan menyebabkan pertumbuhan daerah tersebut melambat.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata inilah yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Penyebab lainnya pertumbuhan ekonomi yaitu alokasi dana pembangunan antar wilayah. Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang besar dari pemerintah, atau lebih banyak menarik investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Dari hasil analisis regresi persamaan yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hasil ini tidak sejalan dengan dasar teoritik yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah ketimpangan wilayah. Dengan kata lain tinggi rendahnya ketimpangan wilayah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan tiap-tiap daerah di Sulawesi utara.

Hal ini di karenakan lulusan yang dihasilkan daerah Sulawesi Utara sebagian besar menganggur, dan banyak yang hanya ingin bekerja di daerah ibukota akibatnya tidak terjadi pemerataan sumberdaya manusia di tiap-tiap daerah dan tidak dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja yang lebih tinggi yang mampu mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara.

Dari hasil analisis regresi persamaan yang dilakukan, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pembangunan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hasil ini sejalan dasar teoretik dan hipotesis bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan, maka semakin berkurang ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil temuan studi sejalan dengan temuan Basuki (2013), pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan disebabkan karena konsentrasi pembangunan yang tidak merata dan lebih terpusat di Ibu Kota Provinsi dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Hubungan negatif dan tidak signifikan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah, dimana pengeluaran pemerintah dalam hal ini merupakan pengeluaran pembangunan yang ditujukan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat menciptakan pendapatan regional yang lebih merata (equity). Semakin besar pengeluaran pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka akan menurunkan ketimpangan wilayah di Sulawesi Utara atau dapat juga dikatakan semakin tinggi pengeluaran pemerintah akan menyebabkan membaiknya pemerataan pendapatan antar daerah di Sulawesi Utara.

Dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi daerah akan mampu mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana perhubungan ke seluruh pelosok/daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Prasarana perhubungan yang dimaksud disini adalah fasailitas jalan, terminal, pelabuhan, dll. guna mendorong proses perdagangan antar daerah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula ketimpangan wilayah, adanya trade-off antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat tanpa memperhatikan aspek pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah yang semakin tinggi pula.
- 2. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Utara, dikarenakan lulusan yang ada belum mampu mendorong produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Utara.
- 3. Pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Utara, hal ini disebabkan karena konsentrasi pembangunan tidak merata dan lebih terpusat di Ibu Kota Provinsi dibanding dengan daerah-daerah lainnya yang diikuti dengan pola pendekatan yang sentralistik dan seragam.

DAFTAR PUSTAKA

Widarjono, Agus 2013. "Ekonometrika" Edisi ke-4Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Atmanti, Hastarini Dwi. "Investasi sumber daya manusia Melalui pendidikan" [Jurnal]

Badrudin, Rudi 2012. "Ekonomika Otonomi Daerah" Edisi 1 Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Basuki, Rahmat 2013. "Analisis Ketimpangan Wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal Tahun 1990-2011" [Skripsi], Makassar: Universitas Hasanuddin.

Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

- Hariyanto, 2010. "Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Penghasil Migas" [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Jhingan, M.L. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Pers, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad (2010). "Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan", Edisi ke-5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Riduwan dan H. Sunarto 2009. "Pengantar Statistika" Cetakan ke-3, Bandung: Alfabeta
- Sari, Malahayati Puput. 2007. "Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Kawasan Timur Indonesia" [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.
- Siagian R. Altito 2010. "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah (studi kasus kabupaten/kota Propinsi Jawa Barat" [Skripsi], Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sjafrizal (2012). "Ekonomi Wilayah dan Perkotaan", Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers
- Sukirno, Sadono. 2002. Ekonomi Pembangunan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Bina Grafika, Jakarta
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kesembilan, Jakarta: Erlangga.
- [Anonim]. Kajian Ekonomi Regional Sulawesi Utara Triwulan IV 2010, Bank Indonesia

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO

Maya Rangkang, Rosalina A.M Koleangan dan Debby Ch.Rotinsulu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado Email :maya rangkang@ymail.com

ABSTRAK

Dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat meningkatkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di kota manado. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi atau sumbangan antar variabel bebas panjang jalan (x1), jumlah sekolah (x2) dan jumlah rumah sakit (x3) terhadap variabel terikatpertumbuhan ekonomi (y) dan menggunakan data sekunder tahun 2002 – 2012 berdasarkan data badan pusat statistik sulawesi utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda dengan menggunakan program Eviews 5.1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel panjang jalan memberikan pengaruh signifikan terhadap PDRB pada tingkat kepercayaan 95% (=5%),jumlah sekolah memberikan pengaruh signifikan terhadap PDRB pada tingkat kepercayaan 90% (=10%) dan jumlah rumah sakit memberikan pengaruh signifikan terhadap PDRB pada tingkat kepercayaan 99% (= 1%) di kota manado.Ini berarti Semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur maka Pertumbuhan ekonomi di kota Manado akan meningkat pula. Dalam pengujuan asumsi klasik nilai chi-squre hitung < dari nilai chi-squre tabel maka tidak terdapat masalah heterokedastisitas dan masalah autokorelasi dan untuk pengujian multikolinearitas nilai r² korelasi < R² model utama maka tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel bebas.

Kata kunci: PDRB, panjang jalan, jumlah sekolah, jumlah rumah sakit

ABSRACT

With the development of infrastructure can meningkatkatkan public welfare . The government's role as a mobilizer of strategic development in favor of an increase in welfare and economic growth in the city of Manado . The purpose of this study was to determine the extent of contribution or donation between the independent variable path length (x1), the number of schools (x^2) and the number of hospitals (x^3) on the dependent variable of economic growth (y) and using secondary data in 2002-2012 based on data from the central statistics agency in North Sulawesi. The method of analysis used in this study is the method of multiple regression analysis using Eviews 5.1 program. The analysis showed that the variable path length has significant impact on GDP at 95% = 5 %), the number of schools has significant impact on GDP at 90 % confidence level (confidence level (= 10 %) and the number of hospitals has significant impact on GDP at 99 % confidence level (= 1 %) in the city of Manado. Increasingly this means the development of infrastructure in the city of Manado economic growth will increase as well. In pengujuan classical assumptions of chi -square value count < of the value of chi -square table then there is no problem and the problem heterokedastisitas for testing multicollinearity and autocorrelation values of correlation r2 < R2 main model then there is no problem of multicollinearity between independent variables.

Keywords: GDP, road length, number ofschools, number ofhospital

A. PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah di lakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan.

Simon Kuznets menyatakan bahwa "a country' economic growth as a long term rise in capity to supply increasingly diverse economic godds to its population, this growing capacity based on advancing technology and the institutional anf ideological adjustments that it demands" (Todaro, 2000: 155). Pertumbuhan ekonomi suatu negara di pengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana), sumber daya alam, sumber daya manusia baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja. (Todaro, 2000: 37)

Selama ini, pemerintah telah mengeluarkan banyak waktu,tenaga dan dana untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pembangunan dapat di lihat di seluruh wilayah Indonesia meskipun terdapat ketimpangan yang menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Terlihat ketimpangan yang cukup besar antar daerah,baik antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur,Pulau Jawa dengan wilayah lainnya dan juga antara daerah perkotaaan dengan daerah pedesaan. Ini terbukti dari ketimpangan nilai investasi dari produk di masing-masing wilayah. Lebih dari 50 persen invrstasi berada di pulau jawa hanya mencakup 7 persen total wilayah Indonesia. Sedangkan output atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau jawa menghasilkan lebih dari 60 persen total output Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa jauh lebih kuat pada wilayah lainnya.

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meringankan beban dunia usaha prioritas pertama, pemerintah meminta pemerintah daerah fasilitas dan kemudahan agar usaha bisa tetap berjalan dengan baik . Prioritas kedua adalah peningkatan pembangunan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia untuk mengatasi gelombang pengangguran , seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi, perhubungan dan perumahan. Selain akan menyerap tenaga kerja proyek infrastruktur juga membuat perekonomian akan bergerak. Untuk ini anggaran pembangunan infrastruktur akan di prioritaskan pengalokasiannya dalam APBN dan APBD.Di harapkan dengan cara tersebut pengangguran dapat teratasi dan di kurangi, serta infrastruktur perekonomian yang di perlukan untuk menggerakkan sektor riil bisa di tingkatkan lebih baik lagi.Prioritas ketiga adalah upaya pemerintah pusat dan daerah melindungi dan membantu meringankan beban golongan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan di bidang perekonomian.

Program reformasi infrastruktur yang di lakukan pemerintah dengan menyepakati paket pinjaman ADB sebesar US \$ 428 juta pada tahun 2006 merupakan salah satu program yang bertujuan memajuakan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Program yang di lakukan merupakan bukti keseriusan dan keyakinan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pembangunan infrastruktur.

Ketertingalan suatu daerah dalam membangun di pengaruhi oleh banyak hal.Salah satunya adalah rendahnya daya tarik suatu daerah yang menyebabkan tingkat aktivitas ekonomi yang rendah. Suatu daerah yang tidak memiliki sumber daya (baik manusia maupun alam) serta kurangnya insentif yang di tawarkan (prasarana infrastruktur, perangkat keras dan lunak, keamanan dan sebagainya) dapat menyebakan suatu daerah tertinggal dalam pembangunan (Azis,1994: 65).

Untuk mengejar ketinggalan dari daerah lainnya, terdapat daerah beberapa daerah alternatif pengembangan daerah.Alternatif tersebut dapat berupa investasi yang langsung di arahkan pada sektor

produktif atau investasi pada bidang social overhead seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana infrastruktur lainnya.Pilihan di tentukan oleh kondisi ciri daerah serta masalah institusionalnya (Azis, 2001 : 66).

Pada banyak negara berkembang, investasi pada prasarana infrastruktur menjadi sutu pilihan yang di sukai dan mempunyai porsi yang sangat besar dari total pengeluaran pemerintah. Ini menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam pengadaan prasarana infrastruktur, khususnya sektor transportasi, komunikasi maupun energi.Sedangkan pengeluaran publik lainnya pada sektor kesehatan dan pendidikan meskipun cenderung di abaikan namun mempunyai tingkat produktivias yang tinggi karena mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung berupa peningkatan kapasitas produtif dan sumber daya manusia.

Negara-negara berkembang melakukan investasi sebesar US\$ 200 milyar per tahun untuk infrastruktur baru, nilai ini di perkirakan 4 persen dari output nasional 1/5 dari total investasi (The World Bank,2004). Dampak investasi ini dalam meningkatkan jasa infrastruktur di harapkan sangat besar,namun performan infrastruktur sering mengecewakan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesalahan dalam pengalokasian dana. Misalnya dengan terus melakukan pembangunan infrastuktur baru tanpa melakukan perawatan terhadap infrastruktur yang sudah ada. Dengan tingkat perawatan yang kurang mencukupi, tingkat efektifitas tenaga listrik di negara berkembang hanya 60 persen dari kapasitas terpasangnya optimal 80 persen (The World Bank,2004) perawatan yang buruk ini tentunya akan mengurangi jasa pelayanan serta meningkatkan biaya bagi penggunanya.

Dampak dari kekurangan infrastruktur serta kualitasnya yang rendah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sehingga pada akhirnya banyak perusahaan akan keluar dari bisnis atau membatalkan ekspansinya. Karena itulah infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangat di perlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta.

Infrastruktur juga dapat di konsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya dengan adanya pengurangan waktu dan usaha yang di butuhkan untuk mendapatkan air bersih, berangkat kerja, menjual barang ke pasar dan sebagainya.Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.Pembangunan infrastruktur baik berupa transportasi (jalan rel KA, pelabuhan laut, pelabuhan udara), jaringan listrik dan komunikasi (telepon) serta instalasi dan jaringan air minum sangatlah penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah.Prasarana infrastruktur di butuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri.Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur di harapkan dapat membawa kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan prasarana yang mencukupi mempunyai keuntungan besar dalam usaha menarik investasi untuk masuk ke daerahnya serta akan lebih cepat berkembang di bandingkan dengan daerah yang memiliki prasara yang minim.

Pentingnya infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi menjadi perdebatan kalangan ekonom bahkan ketersediaan infrastrktur merupakan salah satu hal yang di butuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang di harapkan. Salah satu faktanya adalah sebelum krisis ekonomi 1997, Indonesia mengalokasikan sekitar 6 persen dari PBB untuk infrastrktur dan saat angka tersebut turun menjadi 2 persen saja dan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.(APB,2006)

Namun terlepas dari itu, kaitan antara infrastrktur dalam pertumbuhan ekonomi masih dalam perdebatan (Wang, 2002) paling tidak sampai saat ini ada 2 pendapat mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan sebaliknya adalah negatif. Perdebatan-perdebatan tersebut mempengaruhi penulis untuk melakukan penelitian ini juga yaitu "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota manado" dan memilih variabel infrastruktur Panjang jalan, jumlah sekolah dan jumlah rumah sakit.karena jalan merupakan roda penggerak perekonomian, sedangkan sekolah dapat meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) dan meningkatkan produktivitas dalam mengahasilkan barang dan jasa. Dan rumah sakit sebagai sarana untuk meningkatkan masyarakat yang sehat yang dapat mengola semua kegiatan perekonomian yang

ada di kota manado sebab itu sangat menarik bagi penulis untuk meneliti pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Manado.

Penelitian ini di landasi dengan teori – teori sebagai berikut :Teori pertumbuhan yang selanjutnya memasukkan unsur tekonologi ke dalam fungsi produksi yang di kenal dengan model pertumbuhan neoklasik Solow. Menurut solow, pertumbuhan ekonomi berasal dari satu atau lebih dari tiga faktor berikut: peningkatan dalam kuantitas dan kualitas pekerja (*labor*), kenaikan dalam capital (melalui tabungan dan investasi) dan peningkatan dalam teknologi. Namun peran teknologi dalam model ini masih eksogenous,yang artinya teknologi itu sendiri bukan merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi ,melainkan *given*. Investasi fisik seperti infrastuktur, dalam model Solow ini di masukkan dalam faktor kapital.

Teori ekonomi lain memasukkan peranan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan endogenous yang di perkenalkan oleh Romer. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat di katakan eksogen, melainkan endogen karena kemajuan teknologi sangat di tentukan oleh investasi dari sumber daya manusia dan industri berbasis ilmu pengetahuan. Konsekuensi lebih lanjut dari teori ini adalah pentingnya penyediaan infrastuktur yang dapat meningkatkan efesiensi alokasi sumber daya sehingga menghasilkan *increasing return to scale* dalam proses produksi.

Secara Umum sampai saat ini definisi infrastruktur masih belum di ketahui secara jelas, tetapi dalam kamus besar bahasa Indonesia infrastruktur dapat di artikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana-sarana tersebut di antaranya barang yang di sediakan pemerintah (Barang Publik) antara lain: Jalan, Rumah Sakit, jembatan, sekolah, sanitasi, telepon dsb. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (Modal Publik) yang di bentuk dari investasi yang di lakukan pemerintah. Mankiw (2003: 38). Familoni (2004:16) menyebut infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan. (familoni: 2004:20) menjelaskan bahwa infrastruktur di bedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi di antaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan dan gas juga termasuk pekerjaan umum seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi, serta proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial dapat di bedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang di kembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan lain untuk menfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.Sistem infrastruktur dapat di definisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003).

Salah satu teori pertumbuhan mengenai pembangunan adalah model Harrod-Domar. Model pertumbuhan ini, secara sederhana, di katakan bahwa tingkat pertumbuhan dari GNP (Y/Y) di tentukan oleh rasio tabungan nasional (s) dan rasio capital output nasional (k). Sementara,infrasruktur di sini dapat di kategorikan ke dalam capital stock (K). Sehingga secara langsung, dapat di katakan bahwa peningkatan dalam capital stock termasuk infrastruktur akan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan yang selanjutnya memasukkan unsur tekonologi ke dalam fungsi produksi yang di kenal dengan model pertumbuhan neoklasik Solow. Menurut solow, pertumbuhan ekonomi berasal dari satu atau lebih dari tiga faktor berikut: peningkatan dalam kuantitas dan kualitas pekerja

(labor), kenaikan dalam kapital (melalui tabungan dan investasi) dan peningkatan dalam teknologi. Namun peran teknologi dalam mode inimasih eksogenous,yang artinya teknologi itu sendiri bukan merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi, melainkan given. Investasi fisik seperti infrastuktur, dalam model solow ini di masukkan dalam faktor kapital.

Teori ekonomi lain memasukkan peranan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan endogenous yang di perkenalkan oleh Romer. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat di katakan eksogen, melainkan endogen karena kemajuan teknologi sangat di tentukan oleh investasi dari sumber daya manusia dan industri berbasis ilmu pengetahuan. Konsekuensi lebih lanjut dari teori ini adalah pentingnya penyediaan infrastuktur yang dapat meningkatkan efesiensi alokasi sumber daya sehingga menghasilkan increasing return to scale dalam proses produksi.

Ada tiga faktor atu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Todaro, 2000: 137). Akumulasi modal terjadi apabila bila sebagian dari pendapatan di tabung dan di investasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan. Akumulasi modal ini dapat di lakukan dengan investasi langsung terhadap stok modal secara fisik (pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku) dan dapat juga dengan melakukan investasi terhadap fasilitas-fasilitas penunjang seperti investasi infrastruktur, ekonomi dan sosial (pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, penyediaan listrik, air bersih dan fasilitas komunikasi).

Pada teori pembangunan modern, yang di pelopori oleh beberapa ekonom seperti: Cheney, Hirshman, Leibenstein, Lewis, Myrdal, Rostow, Scitovsky dan streeten menyadari pentingnya perdagangan internasional dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun perdagangan saja tidak cukup, walaupun perdagangan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, perdagangan itu tidak dapat melakukannya sendiri, karena beberapa hal, salah satunya karena adanya hal yang tidak dapat di perdagangkan (non-tradables) dalam bentuk infrastuktur fisik dan social yang sangat di butuhkan untuk memungkinkan timbulnya industri domestik yang kompetitif. Keduanya infrastuktur fisik dalam bentuk transportasi dan energy serta infrastuktur sosial dalam hak paten, institusi pasar, struktur social, politik dan budaya yang kurang akan baik akan menghambat *increasing return of scale* pada proses produksi.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Perwita Sari (2009) yang berjudul Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 25 Kabupaten Tertinggal. Variabel dependennya: Pertumbuhan Ekonomi, sedang variabel independennya: panjang jalan,jumlah keluarga pengguna listrik, jumlah keluarga pengguna telepon, jumlah puskesmas ,jumlah SD dan SMP. Penelitian menggunakan data sekunder berupa data panel 25 kabupaten tertinggal KT untuk periode 3 tahun (2003,2005 dan 2007). Teknik estimasi yang di lakukan adalah analisis regresi data panel dengan metode Generalized Least Squre (GLS). Hasil penelitian dengan menggunakan model fixed effect menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi panjang jalan jumlah keluarga pengguna telepon ,jumlah keluarga pengguna listrik dan infrstruktur sosial (jumlah sekolah) serta program P2IPDT yang di lakukan KNPDT berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membantu kabupaten tertinggal menjadi suatu kabupaten yang terbuka dan mampu berinteraksi dengan dunia luar sehingga akses ke berbagai faktor produksi menjadi semakin mudah untuk di jangkau.

Penelitian yang berkaitan juga Tunjung Haspari (2011) yang berjudul Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah apakah faktor – faktor produksi yang di wakili oleh infrastruktur (jalan, listrik, telepon, dan air mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output yang di wakili oleh variabel pendapatan perkapita agar dapat di tentukan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Data yang di gunakan adalah data panel dengan kurun waktu dari 2004 hingga 2009 untuk 26 propinsi di Indonesia.Unuk mencari hasil yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) Maka di lakukan uji untuk panel seperti *Chow Test dan Hausman Test* sehingga di

dapatkan model panel data fixed effect untuk menyelesaikan data dengan karakteristik seperti di atas.Kemudian di lakukan uji Asumsi Klasik Seperti Multikolinearitas,Heteroskedastisitas dan Autokorelasi.Hasil akhirnya adalah keempat variabel bebas di atas mempunyai dua variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu jalan, dan listrik.dan dua variabel lagi yang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan yaitu telepon dan air .

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat di tarik beberapa pertanyaan sebagai berikut: Apakah panjang jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado pada tahun 2002-2012? Apakah jumlah sekolah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado pada tahun 2002-2012? Apakah jumlah rumah sakit berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado pada tahun 2002-2012?

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh panjang jalanterhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado pada tahun 2002 -2012,untuk menganalis pengaruh jumlah sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado pada tahun 2002 - 2012, dan untuk menganalisis pengaruh jumlah rumah sakit terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado pada tahun 2002 - 2012

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi pemerintah kota manado dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan pembangunan infastruktur jalan, sekolah dan rumah sakit dan untuk memberikan hasil penelitian terhadap pengaruh pembangunan infrastruktur atas panjang jalan, jumlah sekolah, jumlah rumah sakit terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif pada rentang waktu antara tahun 2002 - 2012 dengan pertimbangan ketersediaan data.Data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder*time series*.

Data sekunder digunakan karena penelitian yang dilakukan meliputi objek yang bersifat makro dan mudah didapat.Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan.Sumber data berasal dari berbagai sumber, antara lain Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi utara, dan jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian.Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal ilmiah dan perpustakaan FE Universitas Sam Ratulangi Manado.

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran, maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang akan digunakan dan definisi operasionalnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y) sedangkan panjang jalan (X1), jumlah sekolah (X2) dan jumlah rumah sakit (X3) adalah variabel independennya.

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- PDRB (Y) merupakan PDRB atas harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang di hitung dengan memakai harga yang berlaku pada satuan tertentu sebagai tahun dasar (*base year*). Dalam penelitian ini di gunakan PDRB atas harga konstan dalam satuan milyar rupiah.
- Jalan (X1)Panjang jalan yang tersedia di kota manado (km). Panjang jalan yang di gunakan adalah jalan yang termasuk dalam golongan jalan negara, jalan propinsi dan jalan kota manado berdasarkan data dari badan pusat statistik.
- Sekolah (X2)adalah tempat yang di sediakan pemerintah kota manado untuk pendidikan di kota manado.Jumlah sekolah yang di gunakan adalah jumlah sekolah yang termasuk di kota manado berdasarkan data badan pusat statistik.

 Rumah Sakit (X3) adalah tempat yang di sediakan pemerintah untuk pengobatan untuk masyarakat yaitu rumah sakit dan rumah bersalin. Jumlah Rumah sakit yang di gunakan adalah jumlah rumah sakit yang berada di kota manado berdasarkan data dari badan pusat statistik.

Model Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yaitu model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana (*OrdinaryLeast Square*). Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen (Gujarati, 1999). Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *Eviews 5.1* dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Fungsi persamaan umum yang akan diamati dalam penelitian ini adalah:

$$PDRB = f(PJ(x1),JS(x2),JRS(x3),...(1)$$

Secara pengertian ekonomi, penjelasan fungsi matematis tersebut adalah perubahan Pendapatan Domestik Regional Bruto akan dipengaruhi oleh Panjang jalan , Jumlah Sekolah dan Jumlah rumah sakit.Model Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

PE =
$$_{0}$$
 1PJ . $_{2}$ JS . $_{3}$ JRS.e μ i......(2)

di mana:

PE = Produk Domestik Regional Bruto
PJ = Panjang Jalan
JS = jumlah Sekolah
JRS = jumlah rumah sakit
I = observasi ke i
μ = kesalahan yang disebabkan oleh faktor acak (error term)

μ = kesalahan yang disebabkan oleh faktor acak (error term) = konstanta

Uji Kesesuaian, Uji t-Parsial (*Partial test*), Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Dalam uji t digunakan hipotesis sebagai berikut:

H0: 1=0HA: 1=0

Dimana b1 adalah koefisien variabel independen ke-i adalah nilai parameter hipotesis biasanya nilai b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Bila nilai thitung >tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H0 ditolak.Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata terhadap variabel independen.

Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus:

t-hitung =
$$\frac{'_i}{Se('_i)}$$
(1)
t-tabel = n-k-1

Dimana:

1 = koefisien regresi variabel independen ke-i Se = standar eror dari vaiabel independen ke-i

N = jumlah dataK = jumlah variabel Uji-F (*Over all test*), Uji F-statistik ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama/serentak terhadap variabel dependen. Untuk pengujian F-statistik digunakan hipotesa sebagai berikut :

 $\begin{array}{l} H0: b1=b2=0 \mbox{ (tidak ada pengaruh)} \\ HA: b1 \quad 0 \mbox{ (ada pengaruh) untuk } i=1 \mbox{ k} \end{array}$

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, Jika Fhuting > Ftabel maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi veriabel independen. Nilai Fhitung dapat diperoleh dengan rumus :

Fhitung =
$$\frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$
....(2)

Dimana:

 R^2 = Koefisien determinasi

K = Banyaknya variabel total yang diperkirakan, satu diantaranya unsur intercept

n = Jumlah sampel

kriteria:

H0 diterima jika F-hitung < F-tabel HA diterima jika F-hitung > F-tabel

Nilai Koefisien Determinasi (R^2),Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel X1, dan X2 dan X3 terhadap variasi (naik turunnya) Y digunakan koefisien determinasi. Nilai R^2 digunakan antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$) semakin mendekati 1 berarti semakin tepat garis regresi untuk meramalkan nilai variabel terkait Y.

Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Heterokedastisitas merupakan salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan menggunakan White Test. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat probabilitas Obs*R-squared. Apabila nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari taraf nyata tertentu maka persamaan tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya.

Autokolerasi merupakan pelonggaran asumsi klasik yang menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat kolerasi antar error term.Autokolerasi sering disebut dengan kolerasi serial (serial correlation) terjadi kebanyakan pada serangkaian data runtut waktu (time series).Model linear klasik mengasumsikan bahwa autokolerasi demikian tidak terdapat kesalahan pengganggu, ut. Dengan symbol dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$E(ui, uj) = 0, i j$$

Akan tetapi, bila memang ada ketergantungan antara ui dan uj , maka ada autokolerasi yang dinyatakan sebagai berikut:

Dampak dari adanya autokolerasi yaitu:

- Autokolerasi murni tidak menyebabkan bias koefisien-koefisien estimasi
- Meningkatkan varian pada distribusi b
- Menyebabkan OLS menaksir terlalu rendah terhadap Standar Error Koefisien.
- Akibat yang ditimbulkan dari autokolerasi menyebabkan parameter yang diestimasi menjadi bias dan model menjadi tidak efisien.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model digunakan uji Breusch-Godfrey (Breusch-Godfrey Test)(Nachrowi, 2006). Untuk dapat menerapkan uji B-G, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu

1. Lakukan regresi atau estimasi dengan menggunakan model empiris yang sedang diestimasi, kemudian dapatkan nilai residual.

2. Gunakan nilai residual sebagai variabel dependent dan regresikan dengan variabel independent Xt.(jika variabel independent lebih dari satu, gunakan seluruhnya). Sehingga didapat model regresi:

$$t = 0 + 1 Xt + Ut-1 + Ut-2 + ... + p Ut-p + t...(3)$$

3. Lakukan uji hipotesis nol (Ho): 1 = 2 = ... = p = 0 Jika (n-p)*R2 = 2 -hitung melebihi nilai 2 -hitung, maka hipotesis nol ditolak, dan sebaliknya bila 2 -hitung lebih kecil dibandingkan nilai 2 -hitung, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak.

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen di antara satu dengan lainnya.Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regrasi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan kaidah "auxiliary regression". Penggunaan kaidah ini dilakukan dengan cara meregres masing-masing variabel independen dengan variabel independen yang lain. Apabila hasil dari proses meregres masing-masing variabel independen dengan variabel independen yang lain tersebut menunjukkan adanya nilai R^2 yang lebih rendah dari R^2 model utama, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas antar variabel independen.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik yang ada di Sulawesi Utara selama periode 2002-2012.Di pilihnya Badan Pusat Statistik karena dalam hal ini pelaporan sangat terbuka dan mengelurkan pelaporan tentang data variabel dependent dan variabel independent pada tahun 2002-2012.

Hasil Analisis Data yang didapat dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel Panjang Jalan (PJ),Jumlah Sekolah (JS), Jumlah Rumah Sakit (JRS) dan variabel dependen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Sulawesi Utara tahun 2002 sampai 2012. Data sekunder tersebut diestimasikan dengan analisis regresi berganda seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program Eviews 5.1 untuk uji t, uji F, uji R2 sampai dengan uji asumsi klasik. Dari hasil regresi dapat dibentuk model estimasi sebagai berikut:

Variabel Coefficient t-statistik **Probabilitas** ΡJ 0.022054 2.064471 0.0778 JS 0.004016 1.470341 0.0849 **JRS** 0.363423 3.822390 0.0065 \mathbf{C} -13.79119 -2.755425 0.0283 $R^2 = 0.965505$ F-statistic = 65.30965

Hasil Estimasi Persamaan Jangka Panjang (OLS)

Sumber : Data Olahan

Hasil estimasi persamaan OLS untuk periode 2002 - 2012 adalah sebagai berikut: $PE=-13.79119+0.022054(PJ)+0.00416(JS)+0.363.423(JRS)()\varepsilon_t$

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi dapat dipercaya maka dilakukan pengujian lebih lanjut yaitu berupa uji statistik.Uji tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah penafsiran-penafsiran terhadap parameter sudah bermakna secara teoritis dan nyata secara statistik.

Berdasarkan hasil regeresi di atas dapat dijelaskan pengaruh variabel panjang jalan, Jumlah Sekolah dan Jumlah Rumah Sakit terhadap PDRB sebagai berikut:

- Panjang jalan berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi panjang jalan, yaitu sebesar 0.022054. Artinya setiap bertambahnya panjang jalan sebesar 1 km maka PDRB akan naik sebesar Rp 22 Juta dengan asumsi faktor-faktor lain tetap ceteris paribus.
- Jumlah sekolah berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi Jumlah Sekolah, yaitu sebesar 0.004016 Artinya setiap kenaikan Jumlah Sekolah sebesar 1 unit maka PDRB naik sebesar Rp 4 Juta dengan asumsi faktor faktor lain tetap ceteris paribus.
- Jumlah rumah sakit berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi jumlah rumah sakit, yaitu sebesar 0.363423 artinya setiap kenaikan Jumlah Sekolah sebesar 1 unit maka PDRB naik sebesar Rp 363 Juta dengan asumsi faktor-faktor lain tetap ceteris paribus.

Uji t-statistik dilakukan untuk menguji apakah Panjang Jalan secara parsial berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB).

Hasil perhitungan variabel panjang jalan (X1):

Df	=11-4-1= 8
	= 5 %
T-tabel	= 1.894579
T-hitung	= 2.064471

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung >t-tabel (2.064471 >1.894579).Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Dengan diterimanya H0, maka perubahan km panjang jalan mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% (=5%) terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil perhitungan variabel jumlah sekolah (X2):

Df = n-k-1	ū	=11-4-1= 8
		= 10%
T-tabel		= 1.396815
T-hitung		=1.470341

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (1.470341 > 1.396815).Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Dengan diterimanya H0, maka perubahan Jumlah Sekolah mempunyai pengaruh yangsignifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 90% (=10%) terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil perhitungan variabel jumlah rumah sakit (X3)

```
\begin{array}{lll} Df = n\text{-}k\text{-}1 & = 11\text{-}4\text{-}1 = 8 \\ & = 1\% \\ T\text{-}tabel & = 2.89646 \\ T\text{-}hitung & = 3.822390 \end{array}
```

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (3.822390 > 2.89646).Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Dengan diterimanya H0, maka perubahan Jumlah Sekolah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% (=1%) terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel pada derajat kebebasan (k-1, n-k-1) dan tingkat signifikansi () 5%.Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.Artinya variabel bebas

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas dan jika F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas.

Nilai F-tabel dengan derajat kebebasan (3) dan =1% adalah 8.451 .Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 65.30965. Dengan demikian F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, artinya secara bersama-sama variabel Panjang Jalan, Jumlah Sekolah dan Jumlah Rumah Sakit berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota manado.

Nilai R² (koefisien determinasi) dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.Nilai R² berkisar antara 0-1. Nilai R² makin mendekati 0 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin kecil dan sebaliknya nilai R² makin mendekati 1 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin besar. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R² adalah0.965505, yang berarti variasi dari perubahan Panjang jalan, Jumlah Sekolah, Jumlah Rumah Sakit mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto sebesar 96.55%.Sedangkan sisanya 3.45% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau tidak di teliti.

Agar hasil empirik diatas dapat diterima secara ekonometrik, maka diperlukan syarat BLUE (Best, Linear, Unbias, Estimator) dari metode kuadrat terkecil (OLS). Pengujian yang dilakukan dalam model antara lain: Uji multikolinearitas, ujiheteroskedastisitas, uji autokorelasi. Pengujian ini dimaksudkan untukmendeteksi ada tidaknya Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi dalam model yang estimasi, karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut. Uji t dan uji F yang dilakukan menjadi tidak falid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.dari buku ekonometrika. Dengan kata lain, apakah hasil-hasil regresi telah memenuhi kaidah Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) sehingga tidak ada gangguan serius terhadap asumsi klasik dalam metode kuadrat terkecil tunggal (OLS) yaitu masalah Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokesdasitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah pengujian White. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan bantuan program komputer eviews dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Uji Heteroskedastisitas

$R^2 = 0.526457$
Obs*Rsquared=5.791032
Chi-squares (2) pada $0.05\% = 12.592$

Sumber : Data Olahan

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.526457 .Nilai Chi-squares hitung sebesar 5.791032 yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan R^2). Di lain pihak, nilai kritis nilai Chi-square (2) pada = 5% dengan df sebesar 6 adalah 12.592. Karena nilai Chi-squares hitung (2) lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares (2) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi masalah autokolerasi digunakan Uji Lagrange Multiplier.Jika nilai Chi-squared hitung 2 < dari nilai kritis Chi-squared 2, maka model estimasi tidak terdapat

autokolerasi.begitu pula sebaliknya jika nilai Chi-squared hitung 2 > dari nilai kritis Chi-squared 2, maka model estimasi tidak terdapat autokolerasi.

Hasil Uji Autokorelasi

$R^2 = 0.842554$	
chi squares $\binom{2}{2} = 9.26$	58099
nilai kritis (²) pada	10% =9.270

Sumber: Data Olahan

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.842554. Nilai chi squares hitung (X^2), sebesar 9.268099 sedangkan nilai kritis (X^2) pada = 1% dengan df sebesar 2 adalah 9.270 karena nilai chi squares hitung (X^2) < dari pada nilai kritis chi squares (X^2), maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan diantara variabel bebas. Deteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan melakukan regresi suatu variabel independen terhadap variabel-variabel independen yang lain dalam model. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas maka dibangun hipotesis sebagai berikut:

 $H_0: _1 = _2 = _3 = 0$ $H_a: _1 = _2 = _3 = 0$

Nilai R^2 yang lebih rendah dari R^2 model utama,maka dapat di simpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	r ² korelasi	R ² Model Utama
PJ	0.811503	
JS	0.791400	0.965505
JRS	0.691687	

Sumber : Data Olahan

Dari tabel hasil analisis uji multikolinieritas di atas terlihat bahwa r² korelasi lebih kecil dari R² model utama, maka dapat di simpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah

1. Pengaruh panjang jalan terhadap produk domestik regional bruto(PDRB)

Berdasarkan Hasil penelitian variabel panjang jalan terhadap PDRB di ketahui bahwa t-hitung > t-tabel (2.064471 > 1.894579) maka dapat di artikan bahwa panjang jalan mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% (=5%).Hal ini menunjukkan bahwa perubahan km panjang jalan mempengaruhi perubahan PDRB. Hal tersebut ditunjukkan dari meningkatnya pembangunan jalan di kota manado, Ini mendukung adanya peningkatan terhadap penerimaan produk domestik regional bruto. Jadi semakin meningkatnya Pembangunan jalan (dalam hal ini bertambahnya panjang jalan) dapat menigkatkan pertumbuhan ekonomi kota manado.

2. Pengaruh jumlah sekolah terhadap produk domestik regional bruto(PDRB)

Berdasarkan Hasil penelitian jumlah sekolah terhadap PDRB di ketahui t-hitung > t-tabel (1.470341 > 1.396815) maka dapat di artikan bahwa jumlah sekolah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB secara statistik pada tingkat kepercayaan 90% (=10%).Hal ini menunjukkan bahwa perubahan unit jumlah sekolah mempengaruhi perubahan PDRB. Hal tersebut di tunjukkan dengan meningkatnya pembangunan sekolah (bertambahnya jumlah sekolah) di kota manado. Pembangunan

sekolah yang di laksanakan di kota manado dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan sumber daya manusia serta produktifitas tenaga kerja demi kesejahteraan masyarakat kota manado.

3. Pengaruh jumlah rumah sakit terhadap produk domestik regional bruto (PDRB)

Berdasarkan Hasil penelitian jumlah rumah sakit terhadap PDRB di ketahui t-hitung > t-tabel (3.822390 > 2.89646) maka dapat di artikan bahwa jumlah rumah sakit mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap PDRB secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% (=1%).Hal ini menunjukkan bahwa perubahan unit jumlah rumah sakit mempengaruhi perubahan PDRB. Pembangunan rumah sakit yang di laksanakan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kota manado selain dapat mengobati tetapi dapat memberikan sumber daya manusia yang sehat dan memberantas pertumbuhan penduduk serta mengurangi kemiskinan di kota manado.

Melihat dari keseluruhan penelitan, hubungan antara panjang jalan, jumlah sekolah dan jumlah rumah sakit adalah kuat terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Manado.Dan yang berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) adalah semua variabel bebas (Panjang jalan, jumlah sekolah dan jumlah rumah sakit. Itu artinya semua pembangunan yang di laksanakan (jalan, sekolah, dan rumah sakit) dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kota manado,selain itu dapat meningkatkan masyarakat yang sehat,yang mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya dan mendukung dalam kelancaran kegiatan perekonomian.Pada teori-teori sebelumnya di jelaskan bahwa infrastruktur berfungsi untuk mendukung jalannya roda perkonomian baik dalam kota maupun kegiatan perekonomian negara.Oleh sebab itu Pengaruh antara pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan artinya semakin bertambahnya pembangunan maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah maupun negara itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data yang sudah diolah, menjawab dari tujuan penelitian pada babSebelumnya yaitu

- 1. Panjang jalan memberikan pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional bruto(PDRB) di lihat dari t-hitung > t- tabel (2.064471 > 1.894579) pada tingkat kepercayaan 95% (=5%) secara satistik. Artinya perubahan km panjang jalan memberikan pengaruh positif terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota manado tahun 2002-2012.
- 2. Jumlah sekolah memberikan pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di lihat dari t-hitung > t- tabel (1.470341 > 1.396815) pada tingkat kepercayaan 90% (=10%) secara satistik. Artinya perubahan unit jumlah sekolah memberikan pengaruh positif terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota manado tahun 2002-2012.
- 3. Jumlah rumah sakit memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) di lihat dari t-hitung > t- tabel (3.822390 > 2.89646) pada tingkat kepercayaan 99% (=1%) secara satistik. Artinya perubahan unit jumlah rumah sakit memberikan pengaruh positif terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota manado tahun 2002 -2012.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Manado, Statistik Daerah kota Manado (2011)
- BPS Sulut, Statistik kota manado 2002-2012
- Baltagi, B. H. 2005. Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & So LTD, The Atrium, SouthermGate, Chichester West Sussex PO198SQ.
- Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan "Tinjaun Ekonomi dan Keuangan Daerah provinsi SulawesiUtara (2012).
- Gujarati, D.N. 1999. Basic Econometrics.McGraw-Hill, Boston.Hsiao, C. 2003. Analysis Regres Berganda.Cambridge Univ. Press.
- Kodoatie, R.J. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. .
- Perwita Sari, Pengaruh Pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi 25 kabupatentertinggal.
- Prasetyo "Ketimpangan dan Dampak Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di WilayahKawasan Barat Indonesia (KBI)(2008)
- Suryono,, Pengaruh Infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia.. 2006
- Tunjung Haspari,, Pengaruh Infrastriktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2011
- Todaro, M.P. 2000. Economic Development. Addison-Wesley, Harlow. World Bank. 1994. World Development Report: Infrastructure for Development. Oxford University Press, New York.
- Wiwik Priyanto,, Analisis Pengaruh Pengeluaran Publik Infrastruktur dan otonomi daerah terhadap PDRB (2012).
- www.bps.go.id
- Yanuar, R. 2006. Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output serta Dampaknya terhadapKesenjangan di Indonesia

ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL PASCA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS KOTA MANADO 2008 – 2012)

Steivi Andrew Rayen Lombogia, Anderson G. Kumenaung dan Krest D. Tolosang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado Email: andrewlombogia@yahoo.com

ABSTRAK

PAD adalah salah satu bentuk penerimaan daerah yang paling besar dalam menunjang kemampuan keuangan daerah tersebut semakin besar PAD dan kontribusinya di dalam APBD daerah tersebut maka akan semakin menunjukan kemampuan daerah tersebut untuk dapat menjalankan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan secara otomatis berkurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kemampuan pengelolaan fiskal di kota Manado pasca era otonomi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berjenis time series sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Sedangkan untuk variable yang digunakan adalah total penerimaan daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah. Dan metode yang digunakan penulis adalah metode rasio kemandirian keuangan daerah, metode rasio derajat desentralisasi fiskal, metode rasio indeks kemampuan rutin dan rasio pertumbuhan. Dalam Penelitian ditunjukan bahwa derajat desentalisasi fiskal kota Manado masih berada di kisaran 12 % atau kurang selama periode pelaksanaan otonomi daerah, hal ini menunjukan bahwa ketergantungan akan pendanaan dari pemerintah pusat masih amat besar, untuk itu perlu ada tindakan segera dari pemerintah daerah Kota Manado memacu sumber-sumber ekonomi produktifnya serta mencari sumber-sumber perekonomian lain yang dapat meningkatkan PAD sehingga dapat memangkas ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kata Kunci : Total Penerimaan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah.

ABSTRACT

Local revenue is one of the greatest revenue to support the area of financial capability greater revenue contribution in the budget and the area the more it will show the ability of the area to be able to run a fiscal decentralization and dependence on the central government will be automatically reduced. The purpose of this study was to assess the ability of fiscal management in the city of Manado after decentralization. The data used in this study is secondary data type time series from 2008 through 2012. As for the variables used are total revenues, local revenues, fund balance, and local expense. And methods used are local financial independence ratio method, the degree of fiscal decentralization ratio method, the method routinely capability index ratio and the ratio of growth. In the study indicated that the degree of fiscal decentralization Manado still in the range of 12% or less during the period of implementation of regional autonomy, this shows that the dependence on funding from the central government is still very large, it is necessary for the immediate action of the city of Manado spur local government sources economic - productive sources and seek other economic resources that can increase revenue so that it can cut its dependence on the central government.

Keywords: Total revenue regions, Local revenue, Fund balance, Expenditure, Local expense.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian daerah dengan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang tersedia sejatinya dilakukan untuk dapat sampai ke tahapan perekonomian selanjutnya dimana salah satu ciri utamanya adalah pengelolaan yang serasi dan seimbang di antara satu sektor dan sektor lainnya guna memberi kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah tersebut guna meningkatkan kemandirian serta kemampuan daerah untuk dapat lebih memberi kontribusi dalam perekonomian nasional dan mencapai demokrasi ekonomi. Upaya peningkatan perekonomian suatu daerah tentu tak bisa lepas dari peran serta pemerintah pusat serta kontribusi dan peran aktif dari instansi terkait serta masyarakat luas yang secara bersama-sama mendorong peningkatan perekonomian.

Pasca otonomi daerah Manado sebagai Ibu kota Propinsi Sulawesi Utara dan juga sebagai pintu masuk perdagangan menyadari perkembangan perekonomian yang signifikan dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Utara, tidak lepas dari peranan pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat serta sektor swasta yang melakukan investasi di kota Manado. Berbagai investasi yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta diharapkan kedepannya akan mampu membuka sektor-sektor perekonomian yang baru serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan tentu saja meningkatkan PAD kota Manado. Dengan adanya sumber-sumber PAD yang baru maka diharapkan kedepannya akan mampu mengurangi ketergantungan fiskal dari Pemerintah Pusat guna membiayai APBD nya sendiri.

Didasari oleh kesadaran inilah, perhatian besar dan sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan faktor kemampuan daerah dalam membiayai APBDnya sendiri perlu untuk ditingkatkan guna mengurangi proporsi dana transfer pemerintah pusat dalam Total Penerimaan Daerah (TPD), yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat kemandirian suatu daerah.

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar kemampuan pemerintah kota Manado dalam mengelola desentralisasi fiskal pasca otonomi daerah.

Otonomi atau *autonomie* berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Jadi Otonomi berarti mengatur dengan undang-undang sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi adalah "pemberian hak dan kekuasaan perundang-undangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan ataupun daerah".

Pengertian Otonomi dalam lingkup suatu negara selalu dikaitkan dengan daerah atau pemerintah daerah (*local government*). Otonomi dalam pengertian ini, selain berarti mengalihkan kewenangan dari pusat (*central government*) ke daerah juga berarti menghargai atau mengefektifkan kewenangan asli yang sejak semula tumbuh dan hidup di daerah untuk melengkapi sistem prosedur pemerintahan negara di daerah.

Pemberlakukan UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999; direvisi menjadi UU No.32/2004 dan UU No.33/2004. tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Konsekwensi dari pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, dan lembaga sosial masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Keasatuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam mengelola administrasi keuangan pendapatan dan belanja daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya melaksanakan beberapa fungsi, antara lain: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Mangkoesoebroto, 1992).

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Bird dan Vaillancourt, 2000) Secara luas desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan serta pertahanan keamanan (Adisubrata, 2002). Jadi secara riil desentralisasi merupakan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah yang bersangkutan (seperti sumber daya manusia, pendapatan daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugastugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Faktor yang sangat penting dalm menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD). Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat .

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), ada dua persyaratan penting untuk kesuksesan desentralisasi fiskal, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro. *Pertama*, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihakpihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan - keputusan tersebut. *Kedua*, yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biayabiaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, seharusnya tidak perlu terjadi " ekspor pajak " dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang lain. Maksudnya, pemerintah daerah perlu memiliki kontrol atas tarif dari paling tidak beberapa jenis pajak.

Kemandirian Fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil – hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran penghambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap. Realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Indlikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah (Kuncoro, 1997, 408). Oleh karena itu otonomi daerah dapat terwujud apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif dan daerah mempunyai kemampuan menggali sumbersumber PAD.

Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave and Musgrave (1989); Anwar Shah (1994), besar kecilnya penerimaan di sektor pajak akan sangat ditentukan oleh : (1) pendapatan perkapita, (2) jumlah penduduk, baik pusat maupun daerah, Apabila pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi yang akan berakibat pada penerimaan pajak.. Jadi pendapatan perkapita berpengaruh (+) positif terhadap penerimaan pajak daerah. Begitu pula dengan jumlah penduduk, disini dibatasi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk berarti memiliki pendapatan sedangkan pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang di kelola oleh pemerinta propinsi sesuai UU No.28 tahun 2009, terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave and Musgrave (1989); Anwar Shah (1994), besar kecilnya penerimaan di sektor pajak akan sangat ditentukan oleh : (1) pendapatan perkapita, (2) jumlah penduduk, baik pusat maupun daerah, Apabila pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi yang akan berakibat pada penerimaan pajak.. Jadi pendapatan perkapita berpengaruh (+) positif terhadap penerimaan pajak daerah. Begitu pula dengan jumlah penduduk, disini dibatasi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk berarti memiliki pendapatan sedangkan pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang di kelola oleh pemerinta propinsi sesuai UU No.28 tahun 2009, terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU nomor 34 tahun 2000). Sedangkan pengertian retribusi adalah suatu pembayaran langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dari pemerintah. Pembayaran tersebut biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada Pengertian efisiensi ekonorni. Lebih lanjut dikatakan, bahwa dalarn teori ekonorni, harga barang atau layanan yang disediakan pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (marginal cost) yaitu biaya untuk melayani konsumen terakhir. Karena sebagian besar layanan pemerintah merupakan hak monopoli, maka manfaat ekonorni tertinggi untuk masyarakat adalah jika penetapan harga layanan tersebut diumpamakan adanya suatu persaingan pasar. Dengan demikian pemerintah akan memproduksi jasa tersebut pada titik tempat biaya tambahan sama dengan penerimaan tambahan (marginal revenue).

PAD adalah pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber PAD itu sendiri. PAD adalah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas dan lain-lain. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU nomor 33 Tahun 2004 dan PP nomor 55 tahun 2005). Dana Perimbanngan sendiri bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah. (pasal 3

ayat 2 UU nomor 33 tahun 2004) Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbngan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. (Ojo, Burhanudin : 2010).

Lain-lain PAD yang sah, adalah penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi/potongan ataupun bentuk lain dari pengadaan ataupun penjualan jasa oleh daerah (UU 32/2004, Penjelasan Pasal 157, Huruf a, Angka (4)).

Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada daerah dengan presentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001.

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan saerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiskal gap (fiscal gap), dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (fiscal needs) dengan potensi daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Kemampuan/potensi fiskal/ekonomi daerah dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah. (Republik Indonesia, 2004b).

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. (Republik Indonesia, 2004-b)

Perimbangan keuangan pusat dan pemerintahan daerah ini merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai konsekensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dapat ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dengan tujuan untuk melakukan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal dapat memberikan ruang bagi daerah untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi baru dalam meningkatkan juga efisiensi atas penyediaan pelayanan publik, menciptakan peluang investasi dan bisnis, dan secara selektif para investor dan pebisnis memilih selera yang paling mendekati preferensi masyarakat setempat.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut: 1). Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. 2) Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 3) Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah. 4) Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pinjaman Daerah bersumber dari : 1) Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri; 2) Pemerintah Daerah lain; 3) Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4) Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah:

- 1. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dala pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- 2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut diatas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembanguan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (World Bank 1994).

- A. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
- B. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antar pemerinta pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Olah karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalu kinerja keuangan daerah.

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperoleh kondisi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$TP PADt = \frac{PADt - PADt - 1}{PADt} \times 100$$

Dimana:

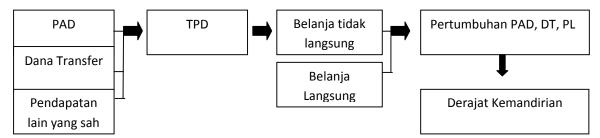
TP PADt = Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan

PADt = Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan

PADt-1 = Pendapatan asli Daerah Tahun Sebelumnya

Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Kerangka Pemikiran Teoritis



B. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur dan dari hasil materi perkuliahan ataupun sumber-sumber lain yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik dan laporan realisasi anggaran Kota Manado yaitu untuk tahun 2008-2012 serta data pendukung lainnya yang di butuhkan.

Model Analisis

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian =
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstren}} \times 100$$

Rasio kemandirian menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

 $Index \, Kemampuan \, Rutin = \frac{Pendapatan \, Asli \, Daerah}{Total \, Pengeluaran \, Rutin} \, x100 \\ Indeks \, kemampuan \, rutin \, dapat \\ dilihat \, melalui \, proporsi \, antara \, PAD \, dengan \, pengeluaran \, rutin \, tanpa \, transfer \, dari \, pemerintah \, pusat.$

4. Rasio Pertumbuhan

$$\mathbf{r} = \frac{\mathbf{Pn} - \mathbf{Pc}}{\mathbf{Po}}$$
Dimana:

r = Pertumbuhan

Pn = data yang di hitung pada tahun ke –n (PAD tahun berjalan di Kota Manado) Po = Data yang di hitung pada tahun ke – n (PAD tahun Sebelumnya di Kota Manado)

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan belanja pembangunan yang di ikuti oleh semakin rendahnya belanja rutin, maka pertumbuhanya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhanya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan belanja rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhanya dengan dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

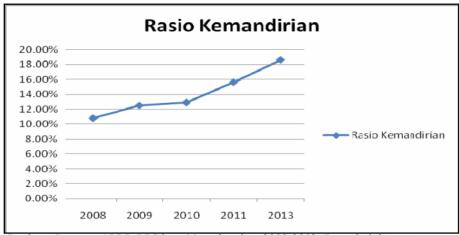
Adapun Definisi dan Pengukuran Variabel dalam penelitian ini adalah :

- 1. APBD adalah perkiraan penerimaan daerah kota Manado yang terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain PAD yang sah, yang di ukur dalam satuan Rupiah.
- 2. Belanja daerah adalah pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Manado yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung yang di ukur dalam satuan Rupiah/tahun.
- 3. DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat yang untuk pemerintah kota Manado sesuai kebutuhan, yang terdiri dari DAU untuk propinsi dan DAU untuk kabupaten/kota yang di ukur menggunakan satuan Rupiah.
- 4. DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada Kota Manado sesuai prioritas nasional yang di ukur dengan satuan Rupiah.
- 5. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah kota Manado untuk mendanai kebutuhan daerah yang ukur dengan satuan Rupiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Grafik 1. Tingkat Pertumbuhan Kemandirian Kota Manado



Sumber: Laporan APBD BPS kota Manado tahun 2008-2012 (Data diolah)

Dalam Grafik 1 dapat dilihat bahwa, ketergantungan kota Manado akan bantuan dari pihak luar masih amat tinggi, bahkan dari perhitungan rasio yang penulis lakukan didapati pada tahun awal penelitian yakni tahun 2008, tingkat kemandirian berada pada titik 10,8%, meskipun menunjukan peningkatan yang positif setiap tahunnya, namun masih relative kecil bahkan dalam 5 tahun penelitian yang dilakukan tingkat kemandirian kota Manado hanya mencapai titik 18,8% pada tahun 2012, atau hanya berada pada rataan 2% peningkatan setiap tahunnya.

Apabila mengacu pada standard kemandirian yang disusun oleh Departemen dalam Negeri dan Fisipol UGM, Manado masih beradapada tingkatan amat rendah, karena belum mencapai tingkat kemampuan 25,1% dan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat masih bersifat instruktif, yang intinya harus lebih banyak mendengarkan instruksi dan masukan dalam hal pengalokasian anggaran dan pembangunan sektor-sektor ekonomi potensial guna meningkatkan PAD yang merupakan salah satu komponen utama di dalam APBD. Rendahnya tingkat penerimaan PAD jika dibandingkan dengan total pendapatan kota Manado, merupakan gambaran pengalokasian anggaran yang kurang mengena serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi yang adalah komponrn utama PAD.

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

Tabel 1. Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal kota Manado 2008-2012 (Ribu Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan keuangan
2008	54.715.561.525	561.268.191.480	9,7 %	Sangat kurang
2009	73.898.733.040	662.074.202.665	11,1 %	Kurang
2010	72.404.996.767	647.169.850.697	11,1 %	Kurang
2011	90.828.438.199	672.960.863.401	13,4 %	Kurang
2012	134.721.720.942	899.152.955.866	14,9 %	Kurang
	Rata -Rat	a	12.22	Kurang

Sumber : Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

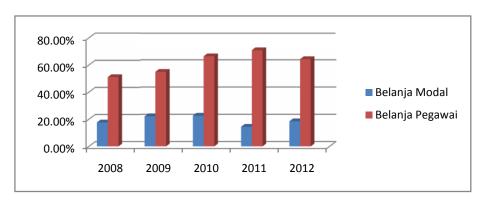
Melihat hasil yang ditunjukan dalam tabel diatas maka dapat dilihat seberapa besar rasio desentralisasi fiskal yang dimiliki kota Manado, pada tahun awal penelitian dapat dilihat bahwa jika mengacu pada pedoman kemampuan desentralisasi fiskal yang dikeluarkan oleh Depdagri dengan pedoman penelitian dari Fisipol UGM, kota Manado pada tahun 2008 masih berada pada tingkat derajat kemampuan desentralisasi fiskal sangat kurang karena berada pada interval 00,0% -10,0% yang mana mengambarkan kemampuan kota Manado untuk membiayai rumah tangganya masih amat terbatas, namun pada tahun 2009 terjadi penguatan kemampuan fiskal di kota Manado menjadi 11,1% sehingga mengeluarkan kota Manado dari tingkat kemampuan sangat kurang menjadi kurang, hal ini tentu mengindikasikan peningkatan PAD yang tidak lepas dari partisipasi masyarakat kota Manado dengan membayar pajak dan retribusi yang ditetapakan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu saja berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian yang terjadi di kota Manado yang tentunya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Garifk 2. Gambaran Pertumbuhan Derajat Desentralisasi Fiskal

Sumber: Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

Setelah penggambaran dalam grafik dapat dilihat tahun 2010 nampak tidak ada pergerakan yang terjadi di dalam skala derajat desentralisasi fiskal dan kembali menunjukan tingkat kemampuan seperti tahun sebelumnya, namun pada tahun 2011 dan tahun 2012 nampak pertumbuhan positif dari derajat desentralisasi fiskal kota Manado mulai terjadi kembali karena mulai bertumbuhnya PAD yang dipacu oleh berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang digiatkan oleh pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan ini diharapkan dapat terus dipacu dengan memberi perhatian pada sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat terus meningkatkan PAD, karena apabila melihat alokasi anggaran yang diberikan pemerintah Kota Manado untuk membangun potensi PAD nya masih amat kecil yang secara otomatis menurunkan efek dari sumber-sumber ekonomi produktif tersebut.



Grafik 3. Alokasi Belanja Modal dan Belanja Pegawai Sumber : Laporan APBD BPS kota Manado tahun 2008-2012 (Data diolah)

Hal ini dapat dilihat pada Grafik 3 yang menunjukan alokasi keuangan kota Manado yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai secara langsung bahkan tidak langsung, jika diamati maka akan terlihat bahwa sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa rata-rata alokasi dana untuk belanja pegawai mencapai angka 61.3 % pertahun, sedangkan untuk belanja modal hanya 19.04 persen dari total anggaran yang tersedia.

RASIO INDEKS KEMAMPUAN RUTIN

Tabel 2. Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Manado 2008-2012

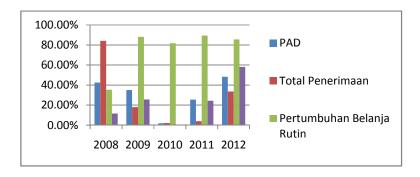
Tahun	PAD	Pengeluaran Rutin	IKR	Kemampuan Keuangan
2008	54.715.561.525	306.409.745.013	17,85 %	sangat kurang
2009	73.898.733.040	347.693.423.895	21,25 %	Kurang
2010	72.404.996.767	424.994.024.741	17,03 %	sangat kurang
2011	90.828.438.199	475.460.069.159	19,10 %	sangat kurang
2012	134.721.720.942	554.781.774.977	24,28 %	Kurang
Rata-Rata			22,4 %	Kurang

Sumber: Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

Melihat hasil yang ditunjukan oleh perhitungan rasio kemandirian menunjukkan kemampuan rutin yang ditunjukan dalam tabel 2, maka dapat diketahui bahwa kemampuan PAD kota Manado dalam menunjang pengeluaran rutinnya masih digolongkan dalam kategori kurang didasarkan pada acuan indeks kemampuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan Fisipol UGM. Dapat dilihat pada tahun awal penelitian yakni tahun 2008 serta tahun 2010 dan 2011 menunjukan angka prosentase di bawah 20 % indeks kemampuan rutin, hal ini tentu mengindikasikan pertumbuhan PAD yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pengeluaran rutin yang ada di kota Manado.

RASIO PERTUMBUHAN

Melihat rasio pertumbuhan yang ditunjukan dalam penelitian maka akan terlihat pertumbuhan yang paling besar terjadi adalah di bagian belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah kota Manado, bahkan rata-rata mencapai angka 70 % lebih setiap tahunnya, berbanding terbalik dengan pertumbuhan belanja modal yang hanya berada di kisaran 17 % pertumbuhan tiap tahunnya, sama halnya dengan pertumbuhan PAD kota Manado yang hanya berada di kisaran 20 % per tahunnya seperti dapat dilihat lebih jelas dalam grafik 4.



Grafik 4. Tingkat Pertumbuhan di kota Manado

Sumber: Laporan APBD BPS Kota Manado Tahun 2008 – 2012 (Data diolah)

Dalam grafik 4 juga terlihat pertumbuhan total penerimaan daerah tidak banyak mengalami pertumbuhan yang signifikan dapat dilihat tingkat pertumbuhan diatas 80 % terjadi pada tahun awal penelitian, namun kemudian malah menunjukan tren negatif pada tahun selanjutnya, bahkan pada tahun 2010 mencapai titik pertumbuhan terendah dan berada di bawah 10 % seperti halnya pertumbuhan PAD yang juga amat kecil pada tahun yang sama, dan pertumbuhan belanja pembangunan bahkan tidak mencapai angka 1 %. Dengan melihat kembali pengalokasian fiskal untuk belanja pegawai dengan pengalokasian fiskal untuk belanja modal tidak heran mengapa pertumbuhan PAD di kota Manado berjalan amat lambat sehingga menyebabkan tingkat kemampuan fiskalnya amat lemah.

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian berdasarkan rasio pertumbuhan, rasio derajat desentralisasi fiskal,rasio indeks kemampuan rutin, dan rasio kemandirian, dapat dilihat secara jelas bagaimana kemampuan desentralisasi fiskal yang dimiliki kota Manado pasca otonomi daerah sejak 2008-2012 masih amat kurang dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Hal ini tentu tidak lepas dari tingkat pertumbuhan PAD yang masih amat kecil diakibatkan kurangnya pendapatan pemerintah dari sumbersumber PAD utama seperti retribusi dan pajak, yang tentunya merupakan kontribusi masyarakat luas.

Dalam hal ini kurangnya kontribusi masyarakat terhadap peningkatan PAD kota Manado juga dipengaruhi oleh kurangnya alokasi fiskal dalam APBD yang ditetapkan, untuk membuka sumbersumber ekonomi baru atau memacu potensi sumber-sumber perekonomian potensial, yang tentunya akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian, hal ini terlihat kurang wajar jika menilik pertumbuhan belanja pegawai baik langsung maupun tidak, setiap tahunnya bisa mencapai angka 89% sedangkan pertumbuhan PAD hanya mampu mencapai rataan 30% pertahun, hal yang lebih mengejutkan adalah pertumbuhan belanja modal yang hanya mencapai rataan 20% pertahunnya. Hal semacam ini semestinya tidak dibiarkan berkesinambungan, karena jika terus dibiarkan maka meskipun PAD mengalami peningkatan yang positif setiap tahunnya namun hal ini tidak bisa menutupi besarnya pertumbuhan belanja pegawai setiap tahunnya. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat lebih membatasi pengeluaranya demi hal yang kurang produktif, dan mengalokasikannya ke sektor-sektor ekonomi produktif guna meningkatkan PAD seksligus mengurangi pertumbuhan belanja rutin.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, kota Manado masih belum berada pada tingkatan mampu membiayai rumah tangganya sendiri, tercatat bahwa sampai tahun akhir penelitian yakni tahun 2012 tingkat kemandiriannya bahkan tidak mencapai angka 25 % dimana adalah batasan minimal untuk tingkat kemampuan rendah, dengan demikian selama 2008-2012 kota Manado masih berada pada tingkat kemandirian sangat kurang, meskipun demikian dari penelitian yang dilakukan juga menunjukan tingkat kemandirian Kota Manado terus mengalami tren positif setiap tahunnya bahkan tingakt pertumbuhannya dalam kurun waktu lima tahun mencapai peningkatan sebesar 8 %, yang pada tahun awal tingkat kemandiriannya hanya 10,8 % menjadi 18,8% pada tahun akhir penelitian.

Sedangkan untuk rasio derajat desenteralisasi fiskal, tingkat kemampuan PAD kota Manado jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah masih amat kecil, jika dilihat dari tingkat kemampuannya yang masih ada berada pada angka 9.7 % pada awal tahun penelitian dan mencapai hanya 14.9 % pada tahun akhir penelitian dan jika diambil rata-rata kemapuan keuangan kota Manado hanya berada pada angka 12.22 % menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan PAD masih amat kecil dan belum mampu memberikan efek yang signifikan pada total pendapatan daerah, sehingga sebagian besar sumber pendapatan kota Manado masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah Pusat.

Selanjutnya untuk rasio indeks kemampuan rutin kota Manado sejak tahun penganggaran 2008 hingga 2012 didapatkan hasil rata-rata kemampuan 22.4 % per tahunnya, yang mampu dibiayai

oleh PAD kota Manado dengan tingkat kemampuan terendah17.3 % pada tahun 2010 dan tertinggi 24.2% pada tahun 2012, dengan demikian pada saat dilakukan penelitian dapat terlihat bahwa kemampuan PAD membiayai pengeluaran rutin masih masuk di golongan kurang, karena masih berada dalam rasio 20.1 % - 40.0 %.

Kemudian untuk rasio tingkat pertumbuhan, Manado saat ini masih belum menunjukan pertumbuhan yang berarti dalam bidang pembangunan ekonomi, meskipun ada pertumbuhan yang terjadi namun hal tersebut tertutupi dengan tingkat pengeluaran pemerintah kota Manado untuk membiayai pertumbuhan belanja rutinnya yang mencapai 70 % lebih per tahunnya, sehingga pertumbuhan PAD yang terjadi hampir tidak menimbulkan dampak secara keseluruhan karena tingkat pertumbuhannya yang relatif kecil.

Berdasarkan hasil analisis data kinerja keuangan di kota Manado, penulis mencoba memberikan saran untuk bisa meningkatkan kemampuan fiskal, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di kota Manado. Dengan meninjau kembali pengalokasian dana pada sektor-sektor penunjang pemerintahan agar dapat dioptimalkan sehingga memberikan alokasi lebih besar kepada sektor-sektor ekonomi potensial dalam bentuk belanja modal sehingga dapat memacu perekonomian di Manado, sehingga dapat menarik lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, yang adalah komponen utama PAD. Dengan demikian maka pertumbuhan PAD yang baik tentu akan membuat kemampuan Pemerintah Kota Manado dalam membiayai APBD akan semakin tinggi, dan akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Langkah konkrit yang bisa diterapkan adalah dengan membuka sektor-sektor ekonomi baru yang dapat menarik investor baik secara lokal maupun global untuk dapat menanamkan investasi mereka di Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Adisubrata, Winama Surya, 2002. Otonomi Daerah di Era Reformasi. Penerbit (UPP) AMP YKPN : Yogyakarta

Bird, M. Richard and Francois Vaillancourt, 200. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kuncoro, Munajad. 1997. "Otonomi Daerah dalam transisi". Temu alumniu dan seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam era Global, KKD-FE UGM. Yogyakarta.

Mangkoesobroto, Guritno (1993). Ekonomi Publik Edisi ketiga, BPFE: Yogyakarta.

Mardiasmo, 1999. The Impact of Central and Provincial Government Intervention on Local Government Budgetary Management : The Case of Indonesia. Thesis.

Shah, Anwar, 1994a. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations inDeveloping and Emerging Market Economics.

World Bank PolicyResearch Series 23. Washington, DC: The World Bank June.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

daerah (UU 32/2004, Penjelasan Pasal 157, Huruf a, Angka (4)).

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V

Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta

http://burhanuddinojo.blogspot.com/2010/12/apa-itu-dana-perimbangan.html

www.deptan.go.id/eplanning/admin/satlak/UU-33-tahun-2004

<u>www.kpu.go.id/.../UU 32 2004 Pemerintahan%20Daerah</u> (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, 2001:192)

ANALISIS PENDAPATAN PRODUSEN SALAK DI KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Fredrik Pelealu dan J. Tampenawas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado email <u>:fredrik.pelealu@gmail.com</u>

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian negara berkembang dan para petani sebagai pelaku ekonomi, berhasil tidaknya usaha pertanian dapat dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan yang diterima dikurangi biaya produksi dan Kecamatan Ratahan adalah daerah penghasil produk-produk pertanian salah satunya adalah Salak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh luas lahan dan biaya produksi terhadap pendapatan petani salak. Metode penelitian adalah asosiatif dengan teknik analisis menggunakan Ekonometrika khususnya regresi linier berganda. hasil penelitian menunjukan bahwa luas lahan dan biaya produksi mempunyai hubungan yang sangat erat dan signifikan dengan pendapatan petani sehingga untuk meningkatkan pendapatan petani maka perlu diperluas areal tanaman salak di desa pangu.

Kata kunci: luas lahan, biaya produksi, pendapatan

ABSTRACT

The agricultural sector is a very important sector role in the economy of developing countries and farmers as economic actors, the success of agricultural enterprises can be seen from the level of income received minus the cost of production and the District Ratahan is producing regions agricultural products one of which is the study Salak conducted in order to determine the effect of area and production cost of the farmers' income barking. The research method is associative analysis technique using multiple linear regression particular Econometrics. results showed that the area of land and the cost of production has a very close relationship with farmers income and significantly so as to increase the income of farmers need to be expanded in the rural areas of plant bark Pangu.

Keywords: land area, production costs, revenue

A. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha yang terus menerus yang dilakukan yang adil makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan alokasi sumber-sumber ekonomi tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kegiatan masyarakat dan mempertinggi tingkat pendapatan juga merupakan usaha pembangunan sosial, politik dan budaya.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup besar dlm pembangunan ekonomi indonesia disebabkan indonesia adalah negara agraris yang hampir sebagian masyarakat hidup dari hasil-hasil pertanian. Perananya dalam pembangunan ekonomi indonesia diantaranya ialah memberikan lapangan pekerjaan pada penduduk menciptakan pendapatan nasional dan menymbang export yang cukup besar.

Tujuan dari pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dengan produksi yang meningkat maka diharapkan pendapatan petani sebagai salah satu pelaku ekonomi di bidang pertanian ikut pula meningkat yang akan membuat para petani mempunyai kemampuan atau daya beli yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Kesejahteraan pendapatan petani bergantung dari beberapa hal yaitu luas lahan biaya produksi ,factor produksi,dan harga yang terjadi di pasar, berhasil tidaknya usaha pertanian bergantung dari tinggi rendahnya pendapatan petani yaitu keuntungan yang di dapat berupa uang dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani dari hasil pertanian tersebut.

Kecamatan Ratahan merupakan salah satu kecamatan yang memproduksi hasil-hasil pertanian sebab sebagian besar dari masyarakat di sana bermata pencaharian sebagai petani khususnya untuk desa pangu petani di sana memproduksi buah salak yang kemudian dijual ke daerah-daerah sekitarnya.

Maka dari itu penulis tertarik melihat dan meneliti para petani di desa Pangu Kecamatan Ratahan dimana hanya di desa tersebut terdapat tanaman salak disebabkan adanya kecocokan suhu dan tanah oleh karena itu hampir semua petani di desa tersebut mengusahakan tanaman Salak.berdasarkan wawancara dengan para petani salak besarnya pendapatan yang di peroleh petani bergantung dari ;luas lahan,biaya produksi dan iklim.

Dalam pertanian tanah merupakan yang sangat penting dan menentukan dalam proses pertumbuhan suatu tanaman, sumber daya tanah merupakan sistim penggunaan dan pengolahan tanah yang didasarkan atas pembawaan atau keadaan tanah itu sendiri meliputi penetapan ukuran-ukuran atau proyek-proyek terbaik yang diketahui dengan tujuan untuk memperoleh produksi tertinggi, tanpa merusak tanah tersebut Soejono (2004:10).

Tanah sebagai salah satu factor produksi merupakan sumber dari hasil-hasil pertanian factor produksi tanah dalam pertanian merupakan factor yang mempunyai kedudukan paling penting dalam proses hasil-hasil pertanian hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan dengan factor-faktor lainnya Mubyarto (2000:76).

Dalam subtansi tanah terdapat empat komponen utama yang mendukung kemungkinan hidupnya tumbuhan yaitu bahan mineral, bahan organic, air dan udara, posisi dan keadaan komponen-komponen tersebut sangat menentukan kesuburan tanah atau penggunaan tanah untuk macam-macam usaha tani, tanah sebagai salah satu factor produksi merupakan tempat produksi tanaman berlangsung Hanafi (2010:52)

Ruhardi (2004:3) menyatakan produksi merupakan kombinasi dan koordinasi kekuatan (Input factor, sumber daya atau jasa-jasa produksi) dalam pembuatan barang atau jasa (Output atau produksi tertentu, suatu output dari suatu produksi merupakan input bagi suatu produksi yang lainnya atau dapat merupakan konsumsi akhir.Dalam beberapa buku teks teori ekonomi yang konvensional produksi sering di definisikan sebagai penetapan guna, dimana guna berarti kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Meskipun produksi dalam pengertian umum meliputi semua aktivitas untuk menciptakan barang dan jasa, tetapi dalam konsep produksi hanya akan membicarakan pada masalah barang/produk karena dalam kasus barang/produk masalah akan lebih sederhana. Faktor-faktor produksi yang digunakan dapat ditunjuk secara jelas dan produk yang dihasilkan juga didentifikasikan dengan mudah baik kualitas maupun kuantitasnya. Sudarman (2002:119)

Biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variable. Biaya tetap adalah semua jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecinya produksi yang termasuk dalam kelompok ini misalnya sewa tanah yang berupa uang atau pajak. Luas tanah jumlah biaya tetap adalah konstan yang termasuk lahan dan sebagainya Hanafi (2010:199).

Produksi dan biaya produksi bagaikan keping mata uang logam bersisi dua, jika produksi berbicara tentang nilai fisik penggunaan factor produksi, biaya mengukurnya dengan nilai uang Soekardono (2009:66).

Samuelson dan Nordhaus (2000:258) mendefinisikan pendapatan adalah jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang selama jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa bunga dan devisa serta pembayaran transfer dan penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan social dan asuransi pengangguran penghasilan atau pendapatan diperoleh tergantung dari hasil penjualan produksi barang-barang dan jasa-jasa dikurangi biaya pokok yang ditambah dengan biaya lain.

Raharja dan Manurung (2001:375) pendapatan adalah total penerimaan uang dan bukan uang seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu.

Sukirno (2012:47) pendapatan adalah penerimaan produsen dan hasil penjualan output dimana pendapatan adalah jumlah penerimaan yang diberikan dalam berbagai aktivitas ekonominya.

Hermanto (2001:145) membagi ukuran-ukuran pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan kerja petani
 - Pendapatan ini diperhitungkan penerimaan dari penjualan hasil dengan penerimaan yang diperhitungkan dari yang dipergunakan untuk keluarga ditambah dengan kenaikan nilai investasi dikurangi dengan pengeluaran tunai, termasuk bunga modal.
- Penghasilan Kerja Petani
 - Diperoleh dari pendapatan kerja petani, penerimaan tidak tunai yang digunakan keluarga misalnya, tanaman dan hasilnya dikonsumsi keluarga merupakan penerimaan tidak tunai.
- Pendapatan Kerja Keluarga
 - Diperoleh dari penghasilan kerja petani ditambah nilai TK keluarga, ukuran terbaik usaha tani dikerjakan oleh petani dan keluarga.
- Pendapatan keluarga
 - Pendapatan keluarga diperoleh dari total (Pendapatan Keluarga)

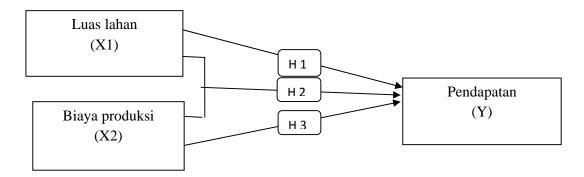
Hubungan antara pendapatan dengan luas lahan dan biaya produksi adalah tanah (lahan) sebagai salah satu faktor poduksi merupakan sumber dari hasil – hasil pertanian, faktor produksi tanah dalam pertanian merupakan faktor yang mempunyai kedudukan paling penting dalam proses hasil – hasil pertanian, hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor – faktor lainnya (Mubyarto, 2004:76). Dengan demikian dengan bertambahnya luas lahan pendapatan

petani diharapkan akan meningkat. Luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha. Skala usaha ini pada akhirnya akan mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian (Soekartawi,2001:93).

Rahardja (2000:195) laba (pendapatan) adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung perusahaan. Makin besar resiko, laba yang diperoleh harus semakin besar. Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Jika laba di konotasikan , pendapatan total sebagai TR dan biaya total TC Dari hal tersebut dapat kita tahu bahwa biaya produksi mempunyai pengaruh sangat erat dengan pendapatan atau keuntungan.

Penelitian terdahulu Viktor Alfa Mongkaren (2008) dalam penelitiannya berjudul analisis pendapatan petani Vanili di Kecamatan Kumelembual dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh produksi dan harga Vanili terhadap pendapatan petani Vanili di Kecamatan Kumelembual dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan parameter tingkat produksi Vanili mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan petani Deivie Lidya Makadao (2008), dalam penelitiannya berjudul analisis pendapatan produsen gula merah di Kecamatan Ratahan dengan tujuan penelitian untuk mengetahuik pengaruh faktor sumber ekonomi (faktor jumlah produksi dan harga gula merah) terhadap pendapatan produsen gula merah di Kecamatan Ratahan dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka penulis ingin mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- 1 Luas lahan dan dan biaya produksi diduga berpengaruh terhadap pendapatan petani salak di desa Pangu
- 2 Luas lahan diduga berpengaruh terhadap pendapatan petani salak didesa Pangu
- 3 Biaya produksi diduga berpengaruh terhadap pendapatan petani salak di desa Pangu

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah yang ada sebagai berikut bagaimanakah pengaruh luas lahan dan biaya produksi terhadap pendapatan petani salak di desa pangu kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh luas lahan dan biaya produksi terhadap pendapatan petani Salak di desa pangu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

B. METODE PENELITIAN

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

- 1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan dari responden petani salak di Desa Pangu Kecamatan Ratahan.
- 2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi yang ada hubungan dengan penelitian ini : kantor kecamatan Ratahan dan Kantor Desa Pangu.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden

Dan dalam bentuk pengisian kuesioner.

Populasi yang digunakan penulis yaitu petani salak yang ada di desa Pangu yang diambil secara purposive dengan pertimbangan di desa tersebut merupakan daerah produksi salak. Untuk mengambil responden petani salak, diambil secara stratified random sampling sebanyak 60 responden petani salak berdasarkan luas lahan yang dimiliki.

Adapun variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Pendapatan adalah jumlah penerimaan produsen salak dikurangi dengan biaya produksi yang di ukur dengan satuan rupiah (Rp).
- Biaya produksi adalah biaya yang digunakan petani untuk memproduksi salak diukur dengan satuan rupiah (Rp).
- Luas lahan adalah tanah yang digunakan petani untuk menanam salak diukur dengan satuan hektar (Ha).

Metode analisis tabel untuk mengetahui luas lahan dan biaya produksi dan juga luas lahan dan biaya produksi terhadap tingkat pendapatan produsen salak di Desa pangu Kecamatan Ratahan.

Tempat penelitian dilakukan di kantor kepala desa dan juga melalui wawancara langsung kepada para petani salak di desa pangu kecamatan ratahan kabupaten minahasa tenggara waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Januari sampai Februari 2013

Analisis Ekonometrika Dengan Fungsi Regresi Berganda: (Djalal 2002:121)

 $Y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e_1$

Dimana

Y = Pendapatan Petani Salak

 X_1 = Biaya produksi

 X_2 = Luas lahan

 B_0 = Intercept yang menggambarkan pengaruh rata-rata semua variable.

 B_{1-2} = Koefisien regresi parsial masing-masing variable X_{1-2}

 e_1 = Faktor pengganggu atau galat

Koefisien Korelasi personal digunakan untuk melihat keeratan hubungan antara variable bebas dengan variable terikat secara silmultan jika mendekati 1 maka keeratan hubungannya sangat kuat sedangkan jika koefisiennya mendekati 0 (nol) maka keeratan hubungan sangat lemah.

Perumusan hipotesis secara parsial sebagai berikut :

 $H_o: b_1 = 0$: Total biaya produksi salak tidak berpengaruh terhadap pendapatan produsen Salak di Desa pangu Kecamatan Ratahan.

 $H_o:b_1\neq 0$: Total biaya produksi Salak berpengaruh terhadap pendapatan produsen Salak di Desa Pangu Kecamatan Rahatan.

 $H_a:b_2=0$: Luas lahan tidak berpengaruh terhadap pendapatan produsen Salak di Kecamatan Ratahan.

 $H_a:b_2\neq 0$: Luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan produsen Salak di Kecamatan Ratahan.

Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta}{S\beta}$$

 $t = \frac{\beta}{S\beta}$ Dimana apabila

- T hitung < t tabel maka Ho diterima sehingga H₁ ditolak
- T hitung > t tabel maka H₀ ditolak sehingga H₁ diterima

Perumusan hipotesis secara simultan yaitu:

 $H_0: b_1, b_2 = 0$ Luas lahan dan biaya produksi tidak berpengaruh terhadap pendapatan produsen

 $H_0: b_1, b_2 \neq 0$ Luas lahan dan biaya produksi berpengaruh terhadap pendapatan produsen Salak. Untuk menguji hipotesis secara simultan dipergunakan rumus sebagai berikut :

Koefisien determinasi (R²) adalah memperkirakan kontribusi Variabel bebas yaitu total biaya produksi (X_1) dan luas lahan (X_2) terhadap naik turunnya variable terikat dengan menggunakan rumus koefisien determinasi.(Djalal,2002:21).

Bila $R^2 = 1$ berarti presentasi sumbangan total biaya produksi dan luas lahan terhadap naik turunnya Y sebesar 100% dan tidak ada factor lain yang mempengaruhi variable Y.

Bila $R^2 = 0$ berarti regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan terhadap Y.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Pangu raya merupakan desa yang berada di bagian Utara Kabupaten Mitra dan juga adalah desa pertama yang ditemui dari Kabupaten Minahasa Tenggara dari arah jalur Utara, dengan luas wilayah 944 Ha dan luas permukaan desa 32 Ha Pangu raya berada pada batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hutan Negara Sebelah Selatan: Kepolisian Lowu Sebelah Timur : Kepolisian Wongkay Sebelah Barat : Kepolisian Kalatin

Wilayah Desa Pangu merupakan daerah batasan tinggi dengan topografi berbukit-bukit presentase bentang wilayahnya adalah wilayah datar 30% dan wilayah berbukit 70% dengan wilayah tanah hitam. Banyaknya curah hujan adalah 145 mm pertahun dengan suhu udara minimal 200 dan maksimal 34° C, sedangkan ketinggian tanah diatas permukaan laut adalah 500m-700m. Pada tahun 2011 Desa Pangu raya dimekarkan sehingga menjadi 3 Desa yaitu Desa Pangu I, Desa Pangu II dan Desa Pangu Induk.

Dari lokasi penelitian yang dilakukan di desa Pangu petani melakukan panen sebanyak 25 kali dalam setahun banyak atau sedikitnya jumlah produksi salak tergantung dari faktor alam di desa tersebut juga pengalaman dan pengetahuan petani bersangkutan, tabel berikut ini akan menjelaskan jumlah produksi salak berdasarkan luas lahan

Tabel 1 Luas lahan dan Tingkat Produksi salak didesa Pangu raya

No	Luas lahan	Tingkat Produksi (Q) (Kg/Thn)	Luas lahan	Tingkat Produksi (Q) (Kg/Thn)	Luas lahan	Tingkat Produksi ((Q)
						(Kg/Thn)	
1	<1	7.000	1	12.000	>1	16.000	
2	<1	9.000	1	10.000	>1	20.000	
3	<1	8.000	1	11.000	>1	15.000	
4	<1	8.000	1	10.000	>1	20.000	
5	<1	5.000	1	10.000	>1	15.000	
6	<1	4.000	1	11.000	>1	20.000	
7	<1	4.000	1	8.000	>1	16.000	
8	<1	4.000	1	9.000	>1	15.000	
9	<1	3.000	1	10.000	>1	13.000	
10	<1	4.000	1	9.000	>1	20.000	
11	<1	4.000	1	8.000	>1	25.000	
12	<1	4.000	1	10.000	>1	20.000	
13	<1	3.000	1	10.000	>1	15.000	
14	<1	4.000	1	8.000	>1	20.000	
15	<1	6.000	1	10.000	>1	20.000	
16	<1	6.000	1	7.000	>1	25.000	
17	<1	5.000	1	8.000	>1	18.000	
18	<1	3.000	1	8.000	>1	20.000	
19	<1	4.000	1	8.000	>1	17.000	
20	<1	4.000	1	10.000	>1	20.000	
Juml	ah	99.000	Jumlah	187.000		370.000	

Sumber: Hasil Data Olahan penelitian

Tabel diatas, menunjukan Tingkat produksi salak didesa Pangu diwakili 60 responden itu berbeda untuk setiap luas lahan misalnya untuk luas lahan <1 Ha hasil produksi salak paling kurang 3000kg pertahunnya dan paling banyak 9000kg pertahun sedangkan untuk luas 1 Ha hasil produksi salak paling kurang 8000kg pertahun dan paling banyak 12.000kg pertahun dan yang terakhir untuk luas lahan >1 Ha hasil produksi salak paling kurang 13.000kg pertahun dan paling banyak 25.000kg pertahun

Biaya produksi salak berbeda untuk setiap petani tergantung dari luas tanah dan jumlah tenaga kerja yang dipakai para pemilik tanaman salak.Ada beberapa petani yang mengerjakan sendiri tanamannya sehingga tidak ada biaya tenaga kerja membuat biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin.

Tabel.2 Jumlah Biaya Produksi Salak Setiap Responden

Luas Lahan <1Ha		Luas Lahan 1Ha		Luas Lahan >1Ha		
Responden	Jumlah Biaya Produksi (TC) (RP)	Responden	Jumlah Biaya Produksi (TC) (RP) Responden		Jumlah Biaya Produksi (TC) (RP)	
1	5.600.000	1	12.000.000	1	18.400.000	
2	6.300.000	2	9.000.000	2	5.000.000	
3	5.200.000	3	10.500.000	3	9.300.000	
4	5.000.000	4	9.000.000	4	13.000.000	
5	1.100.000	5	8.500.000	5	18.000.000	
6	4.000.000	6	10.000.000	6	13.000.000	
7	4.000.000	7	9.500.000	7	17.000.000	
8	6.100.000	8	11.000.000	8	15.000.000	
9	4.000.000	9	9.500.000	9	12.500.000	
10	4.700.000	10	10.400.000	10	20.000.000	
11	5.000.000	11	3.000.000	11	28.000.000	
12	4.700.000	12	12.000.000	12	3.400.000	
13	4.000.000	13	6.500.000	13	15.500.000	
14	4.600.000	14	9.000.000	14	23.000.000	
15	2.000.000	15	4.000.000	15	23.000.000	
16	4.000.000	16	4.000.000	16	30.000.000	
17	4.000.000	17	9.000.000	17	21.000.000	
18	5.000.000	18	9.000.000	18	23.000.000	
19	4.000.000	19	9.000.000	19	20.000.000	
20	4.000.000	20	10.000.000	20	12.500.000	
Jumlah	87.300.000		174.900.000		370.600.000	

Sumber: Hasil Data Olahan Penelitian

Tabel diatas, memperlihatkan bahwa jumlah biaya produksi para petani salak dalam setahun di 3 wilayah sampel desa Pangu raya dengan 60 responden yang berdasarkan pada luas lahan menjelaskan bahwa pada luas lahan <1Ha Jumlah biaya produksi paling rendah sebesar Rp. 1.100.000 dan yang paling tinggi yaitu Rp. 6.100.000 untuk luas lahan 1 Ha Jumlah biaya produksi paling rendah Rp. 3.000.000 jumlah biaya produksi tertinggi yaitu Rp. 12.000.000 dan yang terakhir untuk luas lahan >1Ha jumlah biaya produksi paling rendah adalah Rp. 3.400.000 yang paling tinggi sebesar Rp. 18.400.000

Untuk menganalisa pengaruh dan besarnya pengaruh faktor luas lahan dan biaya produksi terhadap pendapatan petani salak maka akan digunakan analisis regresi – korelasi linier berganda. Dimana hasil analisis fungsi pendapatan petani salak di kecamatan Ratahan dalam bentuk persamaan dapat dilihat sebagai berikut

	=		3264282,387 -	+ 2308033,821X1**	+	0,281X2*
S	=			194777747,38 0,817		
t-hit	=			8,439	2,910	
\mathbb{R}^2	=		0,835	R = 0.914	F = 14	4,395*
Ketera	ıngan :	**	Signifikan pad	a tingkat 0,01		
		*	Signifikan pad	a tingkat 0.05		

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendugaan parameter tingkat luas lahan mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan petani salak hal ini berarti apabila tingkat luas lahan meningkat maka pendapatan petani salak akan seamakin meningkat yang signifikan pada tingkat 0,01 citeris paribus.

Besarnya pengaruh luas lahan sebesar 2308033,821 pada pendapatan petani salak , berarti apabila luas lahan naik 1ha maka diharapkan pendapatan petani salak akan naik sebesar 2308033, 821 rupiah citeris paribus..

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendugaan parameter tingkat biaya produksi mempunyai pengaruh terhadap pendapatan petani salak yang signifikan pada tingkat 0,05 citeris paribus. Besarnya pengaruh biaya produksi adalah 0,281 yang berarti bahwa apabila biaya produksi naik Rp 1000.0000 maka diharapkan pendapatan petani salak akan naik sebesar 0,281 juta citeris paribus.

Hasil penelitian secara bersama sama tingkat luas lahan dan biaya produksi berpengaruh terhadap pendapatan petani salak yang signifikan pada tingkat 0,01

Hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,914. Hal ini berarti bahwa tingkat luas lahan dan biaya produksi mempunyai hubungan yang sangat erat dan signifikan dengan pendapatan petani salak sebesar 91,4 %.

Hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,835. Hal ini berarti besarnya sumbangan atau proporsi tingkat luas lahan dan biaya produksi terhadap variasi atau naik turunnya pendapatan petani salak adalah sebesar 83 % dan sisanya 17 % dijelaskan oleh faktor – faktor lain.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terdapat hubungan yang positif antara biaya produksi salak terhadap pendapatan petani salak di desa pangu.
- 2. Hasil penelitian juga menunjukan luas areal tanaman salak berpengaruh positif terhadap pendapatan petani salak.

DAFTAR PUSTAKA

Djalal. Nacrowi. 2002. Penggunaan Teknik Ekonometrika. Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Hanafi. Rita. 2010. PengantarEkonomi Pertanian. Penerbit PT andi, Jogjakarta

Hermanto. Fadholi. 2001. Ilmu UsahaTani. Seri Pertanian. Penerbit PT penebar swadaya, Jakarta

Mubyarto. 2000. Pengantar Ekonomi Pertanian. Penerbit LP3S, Jakarta

Rahardja. Prathama. 2001. Teori Ekonomi Mikro. Penerbit FEUI, Jakarta

Ruhardi. 2004. Manajemen \Dalam Pertanian .edisi 7. Penerbit CV mandar maju, Jakarta

Samuelson. Paul. 2000. Ekonomi. Penerbit Erlangga, Jakarta

Soejono. 2004. Menggerakan dan Membangun Pertanian. penerbit LP3ES, Jakarta.

Soediyono. 2002. Pengantar Analisa Ilmu Pertanian. Penerbit LP3ES, Jakarta

Soekartawi. 2001. *Pembangunan Pertanian Untuk Mengentaskan Kemiskinan*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Soekardono. 2009. Ekonomi Agribisnis Peternakan Teori & Aplikasinya. akademika pressindo, Jakarta

Sudarman. Ari. 2002. Teori Ekonomi Mikro. Penerbit BPFE, Yokyakarta

Sukirno sadono. 2012. Makro Ekonomi Teori Pengantar. penerbit Rajawali pers, Jakarta